

kk
kk-2
DIS.E.20/10
wid
P

DISERTASI

PENGARUH PERTUMBUHAN SUB-SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI



WAYAN WIDIA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2010**

**PENGARUH PERTUMBUHAN SUB-SEKTOR
PARIWISATA DAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP
ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA SEKTORAL DAN
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN SERTA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI BALI**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu**

**Tanggal : 11 November 2009
Pukul 10.⁰⁰ -12.⁰⁰**

Oleh :

**WAYAN WIDIA
NIM. 090515658 D**

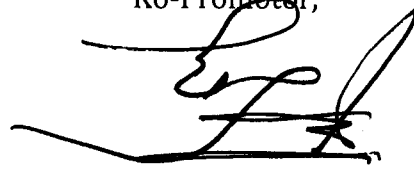
DISERTASI INI
TELAH MENDAPAT PERSETUJUAN PADA :
Tanggal : 11 Januari 2010

Oleh :
Promotor,



Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE
NIP : 130 355 369

Ko-Promotor,



Prof. Dr. H. Effendie, SE
NIP : 130 531 816

**Telah Diuji Pada Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)
Tanggal : 11 Agustus 2009**

Panitia Penguji Ujian Akhir Disertasi Tahap I (Tertutup)

Ketua : Prof. Dr. Soedjono Abipraja, SE
Anggota : 1. Prof. Dr.H. Suroso Imam Zadjuli, SE
2. Prof. Dr.H. Effendie, SE
3. Prof. Dr. Murdidjanto Purbangkoro, SE, SU
4. Prof. Dr. Ketut Rahyuda, MSIE
5. Dr.Hj. Sri Kusreni
6. Prof.Kuntoro,dr,MPH,Dr.PH

**Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
Universitas Airlangga
Nomor : 1173/H3/KR/2009
Tanggal : 19 Agustus 2009**

UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH

Om Suastyastu,

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga disertasi yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali" dapat diselesaikan. Dalam penulisan hingga terselesaikannya, tidak berlebihan kiranya bila saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, S.E., Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ketika beliau selaku Penasehat Akademik (PA) maupun Promotor yang dengan segala kesabaran, kearifan dan tulus ikhlas membimbing, mengarahkan serta mengizinkan saya mengikuti program Sandwich ke Amerika Serikat sejak bulan Oktober 2008 hingga Februari 2009. Beliau telah memberikan motivasi dan inspirasi yang sangat berarti sejak awal saya mengikuti program pendidikan Doktor, dalam proses sampai terselesaikan penulisan disertasi ini.

Prof. Dr. H. Effendie, S.E., Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga selaku Ko-Promotor, ditengah kesibukannya yang luar biasa namun tetap penuh perhatian. Beliau dengan penuh kesabaran dan kecermatan membimbing serta memberikan pandangan-pandangan positif dalam penyempurnaan disertasi ini.

Pemerintah Indonesia (cq. DIKTI, Depdiknas) yang telah memberikan Bantuan Pendidikan Pascasarjana (BBPS) untuk mendanai program pendidikan doktor di Universitas Airlangga dan keperluan biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program Sandwich sejak bulan Oktober 2008 hingga Februari 2009 di Cornell University, USA.

Rektor Universitas Airlangga **Prof.Dr. H. Fasich, Apt.**, dan mantan Rektor **Prof. Dr.Med Puruhito, dr.**, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga **Prof.Dr.Hj. Sri Harjati, S.H,MS.**, Wakil Direktur I, **Prof.Dr.H. Eddy Raharjo, dr.Sp.Ank.Ic.**, dan Wakil Direktur II **Prof. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs.Ak., Mec., PhD.**, mantan Direktur **Prof. Dr.H. Muhammad Amin,dr.**, mantan Asisten

Direktur I **Prof.Dr.Laba Mahaputra, drh., MSc.**, dan **Dr. Soenarjo,dr. MS., MSc.**, mantan Asisten Direktur II, beserta seluruh staf dan karyawan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan fasilitas dan bantuan kepada saya selama menjalani masa studi S-3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi.

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi **Prof.Dr.H. Effendie, S.E.** yang dengan semangat dan kedisiplinan tinggi memberi arah sejak dimulai hingga selesainya pendidikan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Prof.Dr.Budiman Christiananta, MA, PhD., **Prof.Dr. IBM Santika, SE.**, **Prof.Dr.H. Imam Syakir, SE., (alm)**, **Prof.Dr.H.Effendie, SE.**, **Prof.Dr.H. Soedjono Abipraja, SE.**, **Prof.Dr. Lasiyo, MA, MM.**, **Prof Dr.Hj. Jumila Zain, Prof.Dr.H. Suroso Imam Zadjuli, SE.**, **Prof. Haryono Suyono, MA, PhD.**, **Prof.Dr. Munawar Ismail, DEA.**, **Prof.Dr. Harry Susanto**, staff pengajar pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dijadikan bekal bagi saya dalam menyelesaikan studi.

Prof.Dr.Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan **Prof.Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE.**, SU Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Jember, selaku dosen penanggungjawab Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) yang telah meletakkan dasar-dasar teoritik yang dapat dipergunakan untuk penyelesaian studi ini.

Prof. Iwan Jaya Azis, Msc., PhD., Guru Besar dan Ketua Program Studi Ilmu Regional Cornell University yang telah mengabulkan permohonan saya untuk dapat mengikuti Program Sandwich di Cornell University, New York, USA. Selama pelaksanaan program sejak Oktober 2008-Februari 2009, beliau dengan segala kesungguhannya telah memberikan pendalaman pemahaman ilmu Makro Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Ekonomi Moneter, Analisis Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan. Beliau juga membimbing, mengarahkan serta menyediakan fasilitas untuk pengolahan data sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Nasehat dan bimbingan moral serta tanggungjawab intelektual beliau patut untuk diteladani.

Prof. Gustav Ranis, M.A., PhD., Guru Besar Emeritus Yale University, New Haven Connecticut, USA dan **Prof. Kaja McGowan, M.A., PhD.**, Guru Besar dan Ketua Program Studi Ilmu Sosial, Cornell University, New York, USA atas bantuannya yang sangat berharga menyediakan beberapa artikel terpilih yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini.

Kepada Rektor Universitas Udayana **Prof.Dr. I Made Bakta, Sp.PD,dr., Prof.Dr. Wayan Wita, Sp.J., dr.**, selaku mantan Rektor yang telah memberikan izin melanjutkan pendidikan doktor. **Prof.Dr. I Ketut Rahyuda, MSIE** selaku mantan Pembantu Rektor II yang telah bersedia memberikan rekomendasi untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta program doktor, mendampingi dan memberikan masukan-masukan berharga guna menajamkan substansi disertasi ini.

Kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, **Ir. I Gusti Ngurah Agung, SU.**, Pembantu Dekan I, **Ir. Nyoman Semadi Antara, MS, PhD.**, Pembantu Dekan II, **Dr.Ir.Ketut Satriawan, MT** dan **Ir. Agus Selamat Duniaji, MS** selaku Pembantu Dekan III, yang telah memberikan motivasi dan bantuan moril dalam menempuh pendidikan doktor pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Kepada **ibunda** dan **ayahnda** tercinta (alm) yang telah dengan ikhlas dan tanpa pamrih telah mendidik dan membesarkan, serta senantiasa memberikan doa yang tiada hentinya kepada ananda sekeluarga. Istriku **Luh Eka Armoni, S.E.** tersayang, dan ananda tercinta; **Putu Duhita Ayuningtyas** dan **Made Yudha Ganesa Wikantyas** yang dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati telah menerima kekurangan waktu untuk keluarga dan perhatian serta kurangnya kasih sayang dari suami dan ayahnya, serta doa yang tiada hentinya untuk memberikan motivasi. Untuk itu tidak berlebihan bila keberhasilan memperoleh gelar doktor ini kupersembahkan kepada kalian tercinta.

Kepada rekan-rekan peserta program doktor Ilmu Ekonomi, angkatan 2005/2006; **Dr. Thomas Kaihatu, Dr. Dyah Poespita, Dr. Hadi Sasana, Dr. Agus Arman, Dr. Victor Lengkong, Dr. Mudjilah Rahayu, Dr. Rovila El Magfiroh, Dr. Khusaini, Dr. Nur Laily, Dr. Fachrudy Asy'ari, Dr.Diana Tobing, Dr. Yusak Anshori, Grace Pontoh SE,Ak,MSi, Verina H. Secapramana S.Psi,MM, Hartono Subayo, SE,MM, Hariyanto Tanuwijaya, Ir.MT, Diah Ekaningtyas, Dra.Ak, MM** yang telah membantu keberhasilan studi ini, saya haturkan penghargaan dan terimakasih yang tulus dan ikhlas, semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa memberikan balasan yang setimpal.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

RINGKASAN

RINGKASAN

Pengaruh Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali.

Keberadaan pariwisata Bali hingga dewasa ini lebih merupakan fakta sejarah yang khas dan terus berkembang baik secara nasional maupun internasional, sehingga sudah sewajarnya bila sub-sektor pariwisata ini merupakan salah satu unggulan untuk lebih ditingkatkan peranannya oleh pemerintah daerah Provinsi Bali. Keberadaan modal asing telah memperkuat struktur investasi sub-sektor pariwisata di era 1980-an dan diperkuat oleh tersedianya tenaga kerja yang terampil di bidangnya serta didukung pula oleh intensifikasi dan modernisasi di sektor pertanian sejak Pelita I. Banyaknya penawaran tenaga kerja ternyata tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi di Provinsi Bali, namun lebih merupakan potensi penyediaan tenaga kerja yang berbasis pada sub-sektor kepariwisataan, kebudayaan dan relegi yang terus meningkat. *Dual economy* antara sub-sektor pariwisata dengan sektor pertanian dalam proses pembangunan telah berhasil menumbuhkan dan mengubah struktur perekonomian di Provinsi Bali.

Kegiatan sub-sektor pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan sektor tersier dan sekunder. Kedatangan wisatawan asing merangsang tumbuhnya industri kecil seperti halnya kerajinan patung, anyaman, perhiasan emas dan perak, industri konveksi, jasa transportasi & komunikasi serta peningkatan kegiatan budaya masyarakat. Kegiatan tersebut telah menumbuhkan kreasi dalam teknologi yang berbasis pada keterampilan masyarakat setempat. Pengaruh positif dari perkembangan kegiatan tersebut adalah telah mengurangi laju urbanisasi, menambah pendapatan rumah tangga petani, kesempatan kerja bagi kaum wanita bertambah sehingga mampu menyerap tenaga kerja pedesaan yang tersedia.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Hal ini berarti perubahan struktur produksi yang terjadi dalam *dual economy* sub-sektor pariwisata dengan sektor pertanian telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bermakna bahwa perubahan struktur produksi yang terjadi dalam *dual economy* sub-sektor pariwisata dengan sektor pertanian telah memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh

positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa memang benar sub-sektor pariwisata bisa menjadi sarana penggerak pembangunan (*engine of development*).

Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan di sisi lain berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pertumbuhan produksi/*output* dalam kegiatan sub-sektor pariwisata telah mengakibatkan terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sub-sektor pariwisata yang diiringi oleh mobilitas pekerja dari desa ke kota namun dengan laju yang makin lamban. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi telah mengikuti pola pertumbuhan ekonomi bebas, yakni distribusi pendapatan yang timpang lebih merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan hasil studi yang telah dibuktikan secara kuantitatif dan kualitatif tersebut, dapat disimpulkan secara terintegrasi bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian di Provinsi Bali dalam periode 2000-2006 secara bersama telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi perluasan kesempatan kerja dan pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan makin lambannya laju urbanisasi.

Hasil studi ini membuktikan bahwa model pembangunan *dual economy* Lewis-Ranis-Fei telah terjadi di Provinsi Bali, terutama di Kabupaten Gianyar. Namun *trade-off* pertumbuhan dan pemerataan tidak dijumpai sebagaimana yang diramalkan dalam model tersebut. Hipotesis "U" terbalik Kuznets berlaku, namun teori pertumbuhan modern Kuznets tidak sepenuhnya berlaku dikarenakan kegiatan perekonomian yang berkembang di Provinsi Bali bukan terletak pada industri berbasis teknologi yang intensif modal melainkan industri kreatif dengan teknologi berbasis budaya dan keterampilan masyarakat setempat. Teori keterkaitan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian Greenwood-Williams-Shaw kurang berlaku dikarenakan ciri khas pariwisata di Provinsi Bali adalah pariwisata budaya serta relegi dan bukan merupakan kegiatan agrowisata seperti ciri khas yang dimiliki pariwisata di pulau Hawaii, Amerika Serikat. Lebih lanjut, studi ini menolak pemikiran ekonomi neoklasik yang memandang berlakunya kegiatan ekonomi yang bersifat dualistis menghambat proses pembangunan masyarakat dan daerah.

Berdasarkan hasil studi lebih lanjut, terbukti perkembangan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian di Provinsi Bali mempunyai pola pertumbuhan yang mempengaruhi beberapa aspek penting pembangunan dan mampu mewujudkan terjadinya pembangunan ekonomi. Untuk itu,

pemerintah Provinsi Bali seharusnya mendorong berkembangnya dunia usaha di sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian secara proporsional, agar hasil produksi sektor pertanian lokal dapat memenuhi standar mutu kebutuhan kegiatan sub-sektor pariwisata dan sebaliknya sub-sektor pariwisata secara tidak langsung ikut membina masyarakat petani setempat dalam teknik dan manajemen berproduksi untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas hasil. Untuk kesempurnaan studi lebih lanjut, masih diperlukan studi lain terutama yang mengarah pada analisis dampak keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan kebelakang (*backward linkage*) dari makin meningkatnya keterkaitan sub-sektor pariwisata di Provinsi Bali terhadap kegiatan sektoral dan kedaerahan.

SUMMARY

The Effects of Tourism Sub-sector and Agriculture Sector Growth on Sectoral Employment Elasticity, Income Distribution Inequality and Community Welfare in Bali Province

The existence of tourism in Bali until now is actually an outcome of unique history and continuously growing both national and international, so that the tourism sub-sector become a leading sector and that some reason much of its development was promoted by government in Bali province. The presence of foreign capital had strengthened the structure of investment of the tourism sub-sector in 1980s and coupled with an available of skilled labour as well as supported by modernization and intensification in agriculture sector since "Pelita I". The abundant supplies of labour did not generate problems on economic development in Bali Province, but it was an increasing potential supplies of labour base on tourism sub-sector, cultural and religious. The dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector has success for promoting growth and changed the economic structure in Bali Province.

Tourism sub-sector activities have a strong economic link with the secondary and tertiary sectors. The arrival of foreign tourists stimulated the growth of small industries i.e. wood carving, handcrafts, silver and gold jewelries, clothing industries, communication & transportation services as well as increasing the local cultural events. This activities has promoted the creation on technologies base on local community skills. The positive effects of this progress are reducing urbanization rate, increasing the farmers' income and employment for the women so that it absorbed the supplies labour in rural areas.

The results of this study shows that the growth of tourism sub-sector and agriculture sector had a significant positive effects on sectoral employment elasticity. Its mean that the outcome of production structural change on dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector create economic growth with additional new employment. The growth of tourism sub-sector and agriculture sector had a significant negative effects on income distribution inequality. It means that the outcome of production structural change on dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector improving society income distribution. The growth of tourism sub-sector and agriculture sector had a significant positive effects on community welfare. It means that is recognized that tourism sub-sector as a tool of development (engine of development).

Sectoral employment elasticity had a significant negative effect on income distribution inequality and significant positive effects on the welfare of the community. It means that the output growth in tourism sub-sector caused labor migration from agriculture sub-sector to tourism sub-sector with the decreasing workers urbanization workers from rural to urban. Income distribution inequality had a significant positive effect on the community welfare. Its means that the patterns of economic growth in Bali Province refer to free economic growth, in other word the income distribution inequality is a consequence of faster economic growth.

Based on the empirical evidences of this study, which was investigated by quantitative and qualitative analysis, it could be concluded that the outcome of growth of dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector in the Province of Bali since 2000-2006 had create economic growth with benefit for creating new additional employment and reducing income distribution inequality as well as increasing the community welfare and reducing the rate of urbanization.

The results of this study have a contribution for science implications that recognize the dual economy development Lewis-Ranis-Fei models, especially in Gianyar Regency, but the trade-off between growth and equality it was not found according this models. Kuznets curve hypothesis was relevant, but the Kuznets modern growth theories it was not much relevant due to the economic activities that growth in Bali Province not base on modern technologies with capital intensive but that was a creative industries with using technology base on cultural and local community skills. Greenwood-Williams-Shaw theories are less relevant because of typical tourism in Bali is based on local culture that is different from the agro-based tourism in Hawaii, United State of America. In addition, this study is not in line with the neoclassic economic perspective that postulate economic dualism as a constraint on process for community and regional development.

Base on the result of further study, the growth of tourism sub-sector and agriculture sector had created a positive benefit for creating new employment and reducing income distribution inequality as well as increasing the community welfare. So that, the government of Bali province should be promote the strengthened linkage of tourism sub-sector and agriculture sector in other the local agricultural products could be fulfill the quality requirement of tourism sub-sector and in other hand tourism sub-sector indirectly will be supervise the local farmers to increasing both quantity and quality. Regarding of this, it should be conducted further study which address to a bought impact on forward and backward linkages of increasing tourism-sub sector in Bali province on sectoral and regional activities.

ABSTRACT

ABSTRACT

The Effects of Tourism Sub-sector and Agriculture Sector Growth on Sectoral Employment Elasticity, Income Distribution Inequality and Community Welfare in Bali Province

Tourism has become a component of regional development strategy in developing countries. However, tourism alone does not guarantee some targets of economic development. This study deals with the elaboration of Lewis-Ranis-Fei models of dual economies to explain the role of tourism and agriculture on generating economic growth. Kuznets theory of growth suggest that changing economic structure is the most important way of self-sustained economic growth. Base on this theoretical point of view, the objectives of this study was to investigate the effects of tourism and agriculture sector on employment elasticity, the income distribution inequality and the community welfare. The Partial-Least-Square (PLS) modeling was used for assessing the causal relationship among variables, primarily on the problem of estimation and statistical inference.

The results of this study showed that the growth of dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector has positive effects on sectoral employment elasticity, negative effects on income distribution inequality and positive effects on the community welfare. In addition, sectoral employment elasticity has a negative effect on income distribution inequality and a positive effect on the community welfare. Income distribution inequality has a positive effect on the community welfare.

Base on empirical evidence, the growth of dual economy between tourism sub-sector and agriculture sector in Bali Province significantly increasing the welfare community both directly and indirectly through creating additional new employment and improving income distribution in society. The results of this study could be used as a reference for development planning, especially for the regions that have a potential tourism resources in Indonesia.

Keywords : dual economy, tourism and agriculture, sectoral employment elasticity, income distribution inequality and the community welfare.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	
Sampul Dalam	i
Prasyarat Gelar	ii
Persetujuan	iii
Penetapan Panitia Penguji	iv
Ucapan Terima Kasih	v
Ringkasan	viii
Summary	xi
Abstract	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Studi.....	20
1.4 Manfaat Studi	21
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teoritis	23
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	23
2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith	23
2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	26
2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Romer	28
2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Kuznets	30
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi	33
2.1.2.1 Teori Pembangunan Chenery	33
2.1.2.2 Teori Pembangunan <i>Dual Economy</i> Lewis	36
2.1.2.3 Teori Pembangunan <i>Dual Economy</i> Ranis-Fei	46
2.1.2.4 Teori Keterkaitan Pembangunan Pariwisata dan Pertanian.....	51
2.1.2.5. Teori Pembangunan Berimbang Rosenstein-Rodan	55
2.1.3 Teori Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja	57
2.1.3.1 Konsep Ketenagakerjaan	57
2.1.3.2 Faktor Penentu Perluasan Kesempatan Kerja	62
2.1.3.3 Elastisitas Kesempatan Kerja	71
2.1.4 Teori Distribusi Pendapatan	74
2.1.4.1 Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan	74
2.1.4.2 Perubahan Pola Distribusi Pendapatan	80
2.1.4.3 Distribusi Pendapatan Pedesaan dan Perkotaan	81
2.1.4.4 Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan <i>Gini-ratio</i> ...	82



2.1.5	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia	84
2.1.5.1	Teori Kesejahteraan	84
2.1.5.2	Kesejahteraan dengan Memperhatikan Pembangunan Manusia	88
2.2	Penelitian Terdahulu	94
BAB	3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	100
3.1	Kerangka Konseptual	100
3.2	Hipotesis	111
BAB	4 METODE PENELITIAN	113
4.1	Rancangan Penelitian	113
4.2	Populasi	114
4.3	Variabel Penelitian	115
4.3.1	Klasifikasi Variabel	115
4.3.2	Definisi Operasional Variabel	116
4.3.2.1	Pertumbuhan sub-sektor pariwisata	116
4.3.2.2	Pertumbuhan sektor pertanian	118
4.3.2.3	Elastisitas kesempatan kerja sektoral	119
4.3.2.4	Ketimpangan distribusi pendapatan	120
4.3.2.5	Kesejahteraan masyarakat	124
4.4	Instrumen Penelitian	128
4.5	Lokasi dan Waktu Penelitian	128
4.6	Prosedur Pengumpulan Data	129
4.7	Teknik Analisis	130
4.7.1	Konsep dasar Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM)	130
4.7.2	Spesifikasi model PLS-PM	131
4.7.3	Estimasi model	134
4.7.4	Evaluasi model	135
4.7.4.1	Evaluasi outer model	135
4.7.4.2	Evaluasi inner model	138
4.7.4.3	Uji signifikansi koefisien jalur	139
BAB	5 ANALISIS HASIL STUDI	140
5.1	Kontribusi Pariwisata dan Pertanian dalam Ekonomi Provinsi Bali	140
5.1.1	Kontribusi dalam Pembentukan <i>Output</i>	140
5.1.2	Kontribusi dalam Penyerapan Tenaga Kerja	141
5.1.3	Kontribusi dalam Pembentukan PDRB	141
5.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	142
5.2.1	Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata	143
5.2.2	Pertumbuhan Sektor Pertanian	144
5.2.3	Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral	145
5.2.4	Ketimpangan Distribusi Pendapatan	146
5.2.5	Kesejahteraan Masyarakat	147
5.3	Evaluasi SEM Pendekatan Partial Least Square-Path Modeling.....	148

5.3.1	Evaluasi Outer Model	148
5.3.2	Estimasi Bobot Outer Model	151
5.3.3	Evaluasi Inner Model	147
5.3.4	Hasil Pengujian Hipotesis	155
5.3.5	Intepretasi Koefisien Jalur dan Uji Signifikansi	157
5.3.6	Intepretasi Persamaan Struktural	159
BAB 6	PEMBAHASAN	161
6.1	Hasil Pengujian Hipotesis	161
6.1.1	Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan Terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral	161
6.1.2	Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	168
6.1.3	Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	176
6.1.4	Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral Berpengaruh Signifikan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	186
6.1.5	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	191
6.2	Peran Sub-sektor Pariwisata terhadap Perkembangan Sektor Pertanian	197
6.2.1	Dukungan Pertanian Tahap Awal Pengembangan Pariwisata Bali.....	197
6.2.2	Marjinalisasi Pertanian	200
6.2.3	Kebijakan Penguatan Keterkaitan Sektor Pertanian dan Sub-sektor Pariwisata di Provinsi Bali.....	204
6.3	Peran Sub-sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi	207
6.3.1	Sektor Industri Tersier dan Sekunder Terkait Sub-sektor Pariwisata	207
6.3.2	Dampak Ekonomi Pariwisata	212
6.4	Dampak Budaya Wisatawan Terhadap Budaya Masyarakat Setempat	218
6.4.1	Pariwisata Internasional Sebagai Doktrin Pembangunan Ekonomi	218
6.4.2	Komersialisasi Budaya atau Involusi Budaya : <i>Tesis Hanna vs Tesis McKean</i>	222
6.4.3	Gejala-gejala Memburuknya Pariwisata Bali dan Merosotnya Budaya Masyarakat Setempat	227
6.4.4	Kebijakan Pembinaan Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisataaan	231
BAB 7	PENUTUP	234
7.1	Kesimpulan	234
7.2	Saran	240

DAFTAR PUSTAKA	241
LAMPIRAN	254

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Kontribusi pariwisata terhadap total Gross Domestic Product (GDP), kesempatan kerja dan total ekspor di beberapa negara tahun 2005	2
Tabel 1.2 : Perkembangan pertumbuhan pariwisata dan pertanian di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006	10
Tabel 1.3 : Perkembangan elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.....	12
Tabel 1.4 : Perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.....	14
Tabel 1.5 : Perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006	16
Tabel 4.1 : Banyaknya desa perkotaan dan desa pedesaan kabupaten/kota di Provinsi Bali	123
Tabel 4.2 : Nilai maksimum dan minimum komponen IPM	124
Tabel 5.1 : Kontribusi sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian dalam pembentukan <i>output</i> ekonomi periode 2000 s.d 2006	140
Tabel 5.2 : Kontribusi sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja periode 2000 s.d 2006	141
Tabel 5.3 : Kontribusi sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB ekonomi periode 2000 s.d 2006	142
Tabel 5.4 : Statistik deskriptif indikator pengukur variabel pertumbuhan sub-sektor pariwisata	143
Tabel 5.5 : Statistik deskriptif indikator pengukur variabel pertumbuhan sektor pertanian	144
Tabel 5.6 : Statistik deskriptif indikator pengukur variabel elastisitas kesempatan kerja sektoral	146
Tabel 5.7: Statistik deskriptif indikator pengukur variabel ketimpangan distribusi pendapatan	147
Tabel 5.8 : Statistik deskriptif indikator pengukur variabel kesejahteraan masyarakat	143
Tabel 5.9 : Composite reliability	149
Tabel 5.10 : Discriminat validity	151
Tabel 5.11 : Estimasi bobot outer model	152

Tabel 5.12 :	Evaluasi inner model variabel dependen Y_1	153
Tabel 5.13 :	Evaluasi inner model variabel dependen Y_2	153
Tabel 5.14 :	Evaluasi inner model variabel dependen Y_3	154
Tabel 5.15 :	Hasil pengujian hipotesis dan persamaan struktural ...	156
Tabel 6.1 :	Persentase pengeluaran wisatawan menurut kelompok pengeluaran (persen)	183
Tabel 6.2 :	Angka rata-rata gini-ratio (kota+Desa) dan IPM periode 2000 s.d 2006 di Kabupaten/kota Provinsi Bali	195
Tabel 6.3 :	Perkembangan ketersediaan luas lahan pertanian di Provinsi Bali tahun 1997s.d 2007	202
Tabel 6.4 :	Peran Sektor Pariwisata terhadap PDRB Bali Tahun 2007	216
Tabel 6.5 :	Dampak Ekonomi Sektor Pariwisata Bali Tahun 2007 (dalam jutaan rupiah).....	217

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Mekanisme dasar akumulasi kapital dalam masyarakat	31
Gambar 2.2	Konsep surplus tenaga kerja Lewis	37
Gambar 2.3	Proses pertumbuhan ekonomi Model Lewis	42
Gambar 2.4	Model transfer tenaga kerja pertanian Ranis-Fei	48
Gambar 2.5	Kebocoran dan keterkaitan industri pariwisata terhadap ekonomi domestik	52
Gambar 2.6	Diagram ketenagakerjaan.....	61
Gambar 2.7	Pengaruh perubahan teknologi produksi terhadap perluasan kesempatan kerja.....	66
Gambar 2.8	Pertumbuhan vs ketimpangan distribusi pendapatan	79
Gambar 2.9	Kurva lorenz	83
Gambar 2.10	Skema hubungan akumulasi asset, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan	91
Gambar 3.1	Kerangka proses berpikir	100
Gambar 3.2	Kerangka konseptual penelitian	106
Gambar 4.1	Kurva Lorenz	116
Gambar 5.1	Koefisien jalur dan uji signifikansi hipotesis	156

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Peta teori 254
Lampiran 2	Kontribusi pariwisata dan pertanian dalam perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Bali 260
Lampiran 3	Data variabel penelitian 262
Lampiran 4	Hasil analisis data 265
Lampiran 5	Jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia dan yang langsung ke Bali periode 1969-2007..... 271

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian khusus terhadap industri pariwisata. Pariwisata disebut sebagai industri jasa, padat karya dan industri yang mempunyai potensi sebagai penghasil devisa. Devisa pariwisata lebih cepat diperoleh bila dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional. Kegiatan industri pariwisata berbeda dengan industri lainnya dikarenakan konsumen membeli komoditas yang ditawarkan untuk dinikmati langsung di tempat di mana komoditas tersebut dihasilkan. Di samping itu, bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri-industri lain terbatas, Bryden (dalam Yoeti, 2008:75).

Dalam perkembangannya, industri pariwisata telah menjadi *outward economic development strategies* dalam upaya melengkapi usaha-usaha membangun ekonomi di negara-negara berkembang. Perkembangan ini pula yang menyebabkan industri pariwisata telah tumbuh menjadi salah satu industri penting dunia. Menurut *World Travel and Tourism Council*, WTTC (2006), tahun 2005, industri pariwisata mempekerjakan 74,2 juta orang atau 2,8 persen dari total kesempatan kerja dan menyumbang hampir 3,8 persen *output* dunia. Jika digabungkan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi yang terkait dengan kepariwisataan, industri ini diperkirakan mempekerjakan 221 juta orang atau 8,3 persen total kesempatan kerja dan

menyumbangkan 10,6 persen total *output* dunia. Kontribusi industri pariwisata dalam perekonomian di beberapa negara seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP TOTAL GROSS DOMESTIC
PRODUCT (GDP), KESEMPATAN KERJA DAN TOTAL EKSPOR
DI BEBERAPA NEGARA TAHUN 2005

Kelompok Negara	GDP (%)	Kesempatan Kerja (%)	Ekspor (%)
A. Dunia	10.6	8.3	6.4
B. Negara Industri Maju			
Amerika Serikat	10.5	10.9	9.5
Jepang	9.4	10.9	2.4
Inggris	9.4	8.6	7.1
Kanada	11.1	11.9	4.0
Jerman	9.3	10.1	3.4
C. Negara Industri Baru			
Hongkong	17.1	15.9	3.8
Korea, Republik	6.8	7.4	2.4
Taiwan	6.5	6.9	3.2
Singapore	10.3	8.3	2.2
D. Negara-negara ASEAN			
Malaysia	14.6	12.6	6.5
Thailand	14.3	10.7	10.6
Philipina	9.1	10.8	6.5
Indonesia	8.7	7.2	8.4
Vietnam	10.9	8.7	3.5
E. Negara-negara lainnya			
China	13.7	10.2	3.6
Mexico	14.7	19.1	6.1
Fiji	33.1	31.0	42.2
Dominika, Republik	21.3	18.4	36.0

Sumber : *World Travel and Tourism Council, WTTC (2006)*

Tabel 1.1, menunjukkan bahwa kontribusi industri pariwisata dalam perekonomian di setiap negara bervariasi satu sama lainnya. Pengembangan pariwisata modern di Hawaii, Amerika Serikat telah menjadi bagian integral dalam pembangunan ekonominya sehingga sektor pertanian dan pariwisata tumbuh secara serasi dan berimbang. Kehadiran pariwisata

internasional meningkatkan daya saing ekspor hasil-hasil pertanian lokal, Bowen and Cox (2001). Menurut Latzko (2004), jumlah wisatawan yang berkunjung ke Hawaii telah mencapai 7,8 juta orang pada tahun 2004. Setiap satu persen kenaikan jumlah kunjungan wisatawan meningkatkan 0,47 persen GDRP, 0,30 persen kesempatan kerja dan 0,40 persen pendapatan per kapita penduduk Hawaii.

Sedangkan di China, perkembangan pariwisata internasional tumbuh pesat sejak 1990-an dan memberikan dampak ekonomi yang positif. Setiap satu persen peningkatan kunjungan wisatawan asing ke China meningkatkan 1,6 persen GDP, 1,4 persen pendapatan rumah tangga dan 1,0 persen kesempatan kerja. Selama periode 1978-2001, jumlah pengeluaran wisatawan asing di China meningkat rata-rata 19,7 persen per tahun, Oosterhaven and Tianhau (2006).

Perkembangan pariwisata yang paling maju terjadi di negara-negara industri baru (*New Industrial Countries*, NICs). Menurut Wong *et al.* (2008), tipe kepariwisataan dan kebijakan promosi yang ditempuh telah menyebabkan Hongkong dan Singapore sukses dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. Tahun 1979, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Hongkong sebanyak 2,1 juta orang dan telah mencapai 25,5 juta orang pada tahun 2007. Sedangkan di Singapore pada periode yang sama meningkat dari semula 2,5 juta menjadi 9,7 juta orang wisatawan asing.

Di negara-negara berkembang lainnya, industri pariwisata telah pula berkembang pesat. Mereka meyakini kegiatan ekonomi pariwisata berpengaruh positif terhadap perbaikan neraca pembayaran, penyebaran

pembangunan ke daerah-daerah non industri, penciptaan lapangan kerja, efek pengganda dan keuntungan sosial atas terjadinya pertukaran budaya antara masyarakat lokal dan masyarakat dunia, (Bryden, 2003; Coxhead and Anan, 2006).

Di samping kekuatan, keunikan industri pariwisata juga memiliki kelemahan yang fundamental. Pariwisata merupakan bisnis jasa yang rentan terhadap perubahan kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan yang sifatnya tidak lagi lokal atau regional, melainkan sudah mengglobal. Pariwisata sebagai pemakai sumber daya dapat menjadi perusak sumber daya yang menjadi daya tariknya, Travis (dalam Picard, 2006:157). Pertumbuhan pariwisata yang pesat cenderung mengakibatkan pengaturan tata ruang tak terkendali, memudarnya nilai-nilai kearifan tradisional dan komersialisasi budaya, Pitana (2002:131). Torres (2003), menyebutkan bahwa kehadiran investasi swasta asing di Mexico telah menumbuhkan model pariwisata *enclave*, memunculkan banyaknya spekulasi tanah yang memaksa para petani untuk melepaskan kepemilikan tanahnya. Industri pariwisata yang berkembang pesat berakibat menimbulkan konflik perebutan sumber daya tanah, air, tenaga kerja dan kebocoran ekonomi sehingga melemahkan keterkaitan ekonomi antara pariwisata dengan pertanian.

Dalam menyikapi kecenderungan negara-negara di dunia, Pemerintah Indonesia mengarahkan pengembangan pariwisata berdasarkan konsep pariwisata budaya sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1990. Potensi seni dan budaya yang beraneka ragam yang tersebar

pada tiap Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Indonesia diharapkan dapat memberi peluang bagi setiap daerah dalam upaya merencanakan pembangunannya menuju keadaan yang lebih baik. Sepuluh DTW provinsi yang telah memberikan andil bagi perkembangan pariwisata nasional di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Selama periode 2000-2006, perkembangan pariwisata nasional diindikasikan oleh rata-rata kunjungan wisatawan asing mencapai 4,85 juta orang, rata-rata lama tinggal 3,31 hari dan sumbangan devisa sebesar US \$ 4521,73 juta, BPS (2007).

Sugiyarto *et al.* (2002:123-156), mengestimasi setiap 10 persen peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia meningkatkan 0,1 persen GDP dan 0,2 persen kesempatan kerja. Pengeluaran konsumsi riil wisatawan asing memperbaiki kesejahteraan ekonomi domestik melalui peningkatan investasi 0,1 persen dan konsumsi riil rumah tangga sebesar 0,2 persen. Selain itu, setiap 10 persen peningkatan kunjungan wisatawan asing meningkatkan pendapatan ekspor nasional sebesar 0,7 persen dan pengurangan 2,2 persen defisit dalam neraca pembayaran. Hal ini berarti, perkembangan pariwisata di Indonesia memberikan dampak ekonomi positif.

Pada dasarnya pembangunan pariwisata dan pertanian memiliki potensi besar bekerja secara bersamaan dalam hubungan simbiosis mutualisme. Menurut Greenwood (1970); Williams and Shaw (1998:34-75), perbaikan sistem transportasi pariwisata bermanfaat bagi pertanian melalui

peningkatan akses pasar potensial. Perbaikan infrastruktur ini tidak saja membantu pertanian melainkan juga memungkinkan wisatawan dapat mengunjungi areal, sistem pertanian dan kegiatan masyarakat petani. Promosi pariwisata bisa membangkitkan permintaan ekspor bagi produk pertanian lokal dan di lain pihak promosi pertanian bisa membangkitkan kunjungan wisatawan.

Dorman (2004), menyatakan bahwa pariwisata menawarkan kesempatan untuk mengaitkan baik langsung maupun tidak langsung masyarakat lokal dalam pembangunan. Melalui *backward linkages*, pariwisata memiliki potensi menstimulasi pembangunan pertanian tradisional yang memungkinkan para petani lokal dapat memasok hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Hubungan fundamental pariwisata dan pertanian terkait melalui sisi permintaan, penawaran dan pemasaran. Jika industri perhotelan menggunakan produk-produk hasil pertanian setempat dalam memenuhi kebutuhannya akan memberikan dampak positif bagi tumbuhnya ekonomi pedesaan.

Di negara berkembang yang berpenduduk padat seperti Indonesia, perekonomian pada dasarnya mempunyai ciri *dual economy*, yakni sektor modern dan sektor tradisional. *Dual economy* juga dapat diartikan sebagai kegiatan di sektor pertanian dan non-pertanian, formal dan non-formal, desa dan kota atau istilah lain sesuai dengan tujuan analisis dan kebijakan. Salah satu faktor pendorong wisatawan berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata adalah untuk mengetahui tradisi spesifik masyarakat setempat. Karena itu,

pariwisata dapat dipandang sebagai sektor modern dan di lain pihak pertanian sebagai sektor tradisional, Mangiri (2003:54-57).

Dalam situasi di mana kondisi ekonomi belum berkembang dan dihadapkan pada masalah kelebihan tenaga kerja, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal, pengembangan pariwisata dapat dijadikan alternatif pilihan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Di wilayah di mana jumlah penduduk tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alam yang tersedia, tambahan tenaga kerja sebagian besar akan menumpuk di sektor pertanian. Kondisi ini menyebabkan tingginya pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yang berakibat menurunkan produktivitas tenaga kerja pertanian.

Menurut (Lewis,1954; Ranis *and* Fei, 1964: 86-90), adanya fenomena *disguised unemployment* yang menjadi sumber kelebihan penawaran tenaga kerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelebihan pekerja justru merupakan modal untuk mengakumulasi pendapatan. Realokasi pekerja dari sektor tradisional ke sektor modern akan menjadikan perekonomian semakin berkembang. Dengan memandang kegiatan pariwisata sebagai bentuk dari sektor ekonomi modern dan andaikan kegiatan ekonomi pariwisata yang tumbuh mampu mendayagunakan *disguised unemployment*, maka akan menghasilkan dua manfaat sekaligus. Di satu pihak, para pelaku usaha pariwisata akan menikmati surplus keuntungan yang diperoleh dari selisih produktivitas marjinal tenaga kerja dengan upah riil yang dibayarkan. Di lain pihak, pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian tidak akan berakibat

menurunkan total *output* atau terjadi peningkatan dalam produktivitas. Realokasi *disguised enemployment* yang mengakibatkan terjadinya surplus keuntungan di sektor pariwisata dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian adalah suatu proses pembangunan ekonomi.

Proses pembangunan ekonomi bermula dan selanjutnya terus menerus berlangsung sebagai akibat dari penanaman kembali keuntungan yang diperoleh dalam sektor pariwisata. Kegiatan ini akan menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan *output* dan dengan begitu pembangunan ekonomi tercipta. Proses perubahan seperti ini akan terus-menerus berulang sehingga makin lama tingkat keuntungan makin besar, tingkat penanaman modal menjadi lebih tinggi dan laju perkembangan ekonomi juga bertambah cepat.

Bagi Provinsi Bali, peranan pariwisata telah memberikan sumbangan penting bagi kelangsungan pembangunan. Pertanian dalam arti luas, industri kecil dan industri pariwisata telah menjadi prioritas dalam pembangunan. Pembangunan kepariwisataan ditujukan dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan mendinamisasi pembangunan bidang-bidang lainnya. Di lain pihak, pengembangan sektor pertanian di daerah pariwisata penting untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, memelihara lingkungan hidup, mendukung kelangsungan pengembangan pariwisata budaya dan menumbuhkan pertanian itu sendiri.

Menurut Bustanul (2004a:80), pengembangan agribisnis secara nasional di era globalisasi dihadapkan pada tiga masalah utama. *Pertama*, karakter komoditas agribisnis yang bersifat musiman, mudah rusak, amba,

beragam dan transmisi harga rendah menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku agribisnis dan pembuat kebijakan. *Kedua*, pengalaman empiris Indonesia di masa lalu dalam mendesain dan melaksanakan kebijakan agribisnis yang distortif dimana rantai tata niaga terlampau panjang. *Ketiga*, peta perdagangan dunia untuk komoditas pertanian menjadi makin tidak simetris karena subsidi yang diberikan oleh negara-negara maju kepada petani sangat besar dikarenakan posisi politik mereka lebih strategis. Karena itu, pergeseran komoditas agribisnis dari bahan pangan berbasis padi ke komoditas non-padi hanya dapat berjalan lancar jika didukung oleh bantuan permodalan, teknologi dan akses pasar serta serangkaian kebijakan yang mendukung kelayakan usaha.

Strategi pembangunan ekonomi yang ditempuh dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah telah mendorong masuknya penanaman modal swasta asing dalam memperkuat struktur investasi sehingga industri pariwisata berkembang pesat di Provinsi Bali. Sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang berlaku dan meskipun berbagai tantangan serta konsekuensi yang timbul atas pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan pariwisata dan pertanian masih memberikan kontribusi yang dominan dalam perekonomian di Provinsi Bali selama periode 2000-2006. Hal ini terlihat seperti pada Tabel 1.2 halaman 10.

Tabel 1.2, memperlihatkan peran pariwisata dari sudut kelembagaan unit usaha dan perusahaan yang usahanya mendukung kegiatan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik. Seluruh nilai tambah yang dihasilkan dalam usaha ini adalah kontribusi pendapatan dari institusi

pariwisata dalam PDRB. Dalam hal ini diwakili oleh subsektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Demikian juga peran pertanian mencakup kegiatan ekonomi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan termasuk kegiatan pengolahan hasil-hasilnya yang masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Seluruh nilai tambah yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah kontribusi pendapatan dari institusi pertanian dalam PDRB. Angka-angka pada Tabel 1.2, menunjukkan bahwa baik sektor pariwisata maupun pertanian secara potensial memiliki kemampuan besar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dalam perekonomian Provinsi Bali.

Tabel 1.2
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PARIWISATA DAN PERTANIAN
DI PROVINSI BALI PERIODE 2000 s.d 2006

Tahun	Pertumbuhan Pariwisata*		Pertumbuhan Pertanian**	
	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Kontribusi terhadap Total PDRB (%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Kontribusi terhadap Total PDRB (%)
2000	4.37	31.73	5.30	21.68
2001	3.84	31.12	3.80	22.13
2002	3.07	30.18	3.46	22.26
2003	3.36	30.62	3.68	22.28
2004	4.65	30.63	4.55	22.07
2005	5.18	30.84	6.20	21.79
2006	4.57	30.79	5.12	21.54

Sumber : BPS Provinsi Bali, berbagai terbitan

*) Diproksi dari Subsektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

***) Diproksi dari Subsektor Pertanian dalam arti luas

Dalam proses pembangunan ekonomi tidak selamanya kenaikan *output* suatu sektor ekonomi selalu diikuti dengan kenaikan kesempatan kerja pada sektor yang bersangkutan. Hal ini mungkin disebabkan oleh perkembangan teknologi yang ditandai dengan terciptanya alat-alat industri

yang efisien dan mampu menghasilkan *output* lebih banyak dibandingkan dengan tenaga manusia, atau dengan kata lain sektor tersebut lebih terfokus pada usaha yang padat modal dan bukan padat karya. Besarnya pengaruh dari pergeseran peran sektor ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja terlihat pada tingkat elastisitas kesempatan kerja yang ada.

Perkembangan elastisitas kesempatan kerja secara nasional menunjukkan kecenderungan yang makin memburuk. Dalam periode 1977-1998, rata-rata elastisitas kesempatan kerja nasional sebesar 0,54, Nazamuddin (2004). Pasca krisis ekonomi elastisitas kesempatan kerja nasional menurun drastis menjadi 0,27. Dengan kata lain, setiap satu persen pertambahan *output* nasional hanya menyerap 270 ribu orang tenaga kerja, Pasaribu (2005). Kondisi ini jauh dari target ideal sebesar 0,70, yaitu menyerap 700 ribu orang sebagaimana yang direkomendasikan oleh badan *International Labour Organization* (ILO) untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, Rizwanul (2007).

Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan elastisitas kesempatan kerja merupakan salah satu target jangka panjang pembangunan nasional. Elastisitas kesempatan kerja yang lebih tinggi menandakan tersedianya lapangan kerja produktif yang lebih banyak sehingga memberi peluang kepada penduduk untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai faktor produksi fundamental. Selain itu, dengan adanya tambahan lapangan kerja akan mengurangi tingkat pengangguran. Adapun perkembangan elastisitas kesempatan kerja sektoral di provinsi Bali periode 2000-2006 seperti pada Tabel 1.3 halaman 12.

Tabel 1.3
PERKEMBANGAN ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA
SEKTORAL DI PROVINSI BALI PERIODE 2000 s.d 2006

Tahun	Elastisitas kesempatan kerja sektoral	
	Pariwisata*	Pertanian**
2000	0.21	0.23
2001	-0.61	0.26
2002	2.38	0.22
2003	0.17	0.17
2004	1.14	-0.02
2005	0.24	1.40
2006	0.23	0.03

Sumber : BPS Provinsi Bali, berbagai terbitan diolah

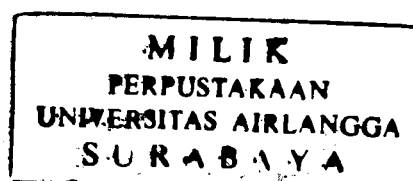
*) Diproksi dari Subsektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR)

***) Diproksi dari Subsektor Pertanian dalam arti luas

Tabel 1.3, menunjukkan bahwa peningkatan *output* baik pariwisata maupun pertanian keduanya diiringi oleh peningkatan atau pengurangan dalam penyerapan kerja sesuai dengan tingkat elastisitas yang ada. Pada tingkat laju pertumbuhan *output* yang sama, penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata lebih tinggi dibandingkan dengan di sektor pertanian. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di sektor pariwisata yang besar dibandingkan produktivitas tenaga kerja pertanian akan menarik perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju pariwisata. Menurut Booth and Sundrum (1984:124), proses ini akan berjalan langgeng bila perubahan struktur produksi terlaksana dalam hubungan yang serasi antara sektor pertanian dengan non-pertanian. Pertumbuhan produktivitas rata-rata di sektor pertanian tidak boleh terlalu rendah oleh karena bilamana demikian pertumbuhan produksi pertanian tidak cukup menjamin ketahanan pangan.

Dalam proses pembangunan, pertumbuhan nilai tambah sektor-sektor ekonomi terjadi karena perubahan dalam kualitas, kuantitas, dan komposisi faktor produksi serta perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi pola pembagian pendapatan dalam masyarakat. Pola pembagian antargolongan pendapatan akan menjadi semakin timpang, jika akses kesempatan berusaha dan atau kepemilikan faktor produksi dinikmati oleh segelintir orang. Sebaliknya, pembagian pendapatan lebih merata, jika akses kesempatan berusaha dan atau kepemilikan faktor produksi dinikmati oleh masyarakat luas. Perubahan pola pembagian pendapatan dalam masyarakat tercermin pada angka *gini-ratio* yang ada.

Berbagai program pemerataan pendapatan sebagaimana yang dilaksanakan melalui delapan jalur pemerataan belum efektif mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Bahkan sebaliknya, perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan justru menaik. Angka *gini-ratio* nasional yang diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi riil menunjukkan perubahan yang berfluktuasi. Selama periode 1996-2002 terjadi penurunan *gini-ratio* baik untuk perkotaan maupun pedesaan, dari 0,362 menjadi 0,317 untuk perkotaan, dan dari 0,274 menjadi 0,247 untuk pedesaan. Sebaliknya, pada periode 2002-2005, justru distribusi pendapatan lebih tidak merata dibandingkan periode sebelumnya di mana terjadi peningkatan *gini-ratio* dari 0,317 menjadi 0,338 untuk daerah perkotaan, dan dari 0,247 menjadi 0,264 untuk daerah pedesaan, BPS (2005:101). Adapun perkembangan *gini-ratio* di Provinsi Bali seperti pada Tabel 1.4 halaman 14.



Tabel 1.4
PERKEMBANGAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI PROVINSI BALI PERIODE 2000 s.d 2006

Tahun	Ketimpangan distribusi pendapatan	
	<i>gini-ratio</i> perkotaan	<i>gini-ratio</i> pedesaan
2000	0.2513	0.1726
2001	0.2899	0.1877
2002	0.2941	0.1930
2003	0.2713	0.1832
2004	0.2703	0.1827
2005	0.3314	0.2060
2006	0.3148	0.1970

Sumber : BPS Provinsi Bali, berbagai terbitan diolah

Tabel 1.4, menunjukkan bahwa angka *gini-ratio* di Provinsi Bali lebih rendah dibandingkan *gini-ratio* nasional baik untuk perkotaan maupun pedesaan. Namun demikian, menurut Hartono (2006:101), angka *gini-ratio* yang rendah tidak selalu bermakna baik. Jika perubahan angka *gini-ratio* lebih disebabkan oleh makin memburuknya perolehan pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan terendah berakibat menambah terjadinya insiden kemiskinan dan penanganannya lebih sulit. Sebaliknya, meskipun *gini-ratio* lebih tinggi dan lebih disebabkan oleh makin membaiknya perolehan pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tertinggi, kondisi kepingcangan semacam ini lebih mudah diatasi melalui penerapan pembayaran transfer untuk mengurangi jurang perbedaan antara golongan berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan terendah.

Masalah pertumbuhan dan ketimpangan distribusi pendapatan sampai saat ini tetap menjadi perhatian utama di negara-negara

berkembang. Sebagian para pemikir berasumsi bahwa ketimpangan pendapatan akan muncul pada awal dan menghilang setelah dicapai hasil pembangunan. Peningkatan sementara dalam ketimpangan pendapatan hanya merupakan biaya untuk memperoleh manfaat dari suatu proses pembangunan. Sebaliknya, pemikiran yang lain beranggapan pembangunan ekonomi akan menimbulkan perubahan struktural yang makin meneguhkan ketimpangan distribusi pendapatan, karena itu pemerintah harus aktif menjalankan kebijakan untuk menanggulangi ketimpangan yang melekat dalam perkembangan ekonomi.

Tujuan akhir pembangunan ekonomi Provinsi Bali pada intinya adalah membangun manusia dan masyarakat seutuhnya. Melalui perkembangan sektor pariwisata dan pertanian diharapkan pertumbuhan ekonomi tercipta. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat meningkat kecuali ada kebijaksanaan yang mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga pertumbuhan yang terjadi disertai pula dengan penambahan lapangan kerja baru dan pemerataan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan tersedianya lapangan kerja baru yang lebih banyak dan terjadinya perbaikan distribusi pendapatan akan mendukung keberhasilan pembangunan manusia dalam wujud perbaikan kualitas hidup dan kehidupan seluruh masyarakat.

Menurut Ranis *and* Stewart (2000a), pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia terkait dalam hubungan timbal balik. Pembangunan manusia yang berhasil bermanfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan pengusaha yang

produktif. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan mendukung pencapaian pembangunan manusia melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah. Meningkatnya pendapatan masyarakat mempertinggi daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi, perumahan yang baik, jasa pendidikan maupun kesehatan. Meningkatnya pendapatan pemerintah mempertinggi alokasi pengeluaran di sektor publik yang semuanya berguna bagi peningkatan kapasitas masyarakat. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang manusia-manusianya dapat hidup layak, terdidik, sehat serta hidup dalam suasana kemasyarakatan yang aman dan tentram. Adapun perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali seperti pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
PERKEMBANGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI BALI PERIODE 2000 s.d 2006

Tahun	Kesejahteraan Masyarakat	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Kriminalitas Daerah (IKD)
2000	68.52	1.33
2001	65.20	1.36
2002	67.39	1.17
2003	68.29	1.12
2004	69.03	0.78
2005	69.90	1.36
2006	70.41	1.46

Sumber : BPS Provinsi Bali, berbagai terbitan

Tabel 1.5, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Di daerah kabupaten yang lebih maju cenderung mempunyai angka IPM yang lebih

tinggi. Namun demikian, suatu wilayah yang mempunyai IPM tinggi, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah itu mungkin saja rendah yang disebabkan oleh meningkatnya kasus-kasus kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Studi-studi yang membahas peran pariwisata dalam pembangunan cukup banyak tersedia. Studi Erawan (dalam Pitana, 2002:128) menemukan bahwa kegiatan pariwisata menyumbang 51,6 persen terhadap pendapatan masyarakat di Provinsi Bali. Total sumbangan ini 45,3 persen berasal dari dampak pengeluaran wisatawan dan 6,3 persen berasal dari dampak investasi dalam pariwisata.

Suyana Utama (2006) dan Mahendra Yasa (2007) menemukan bahwa perkembangan pariwisata sejak 1975-2004 telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Dalam kurun waktu yang sama struktur ekonomi Provinsi Bali berubah yang diindikasikan oleh rasio produksi pertanian terhadap non-pertanian pada tahun 1975 sebesar 91,49 persen menurun menjadi 23,82 persen. Demikian pula diiringi oleh perubahan intensitas penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dari semula 60 persen turun menjadi 37 persen. Transformasi ekonomi yang telah terjadi membuktikan proses pertumbuhan modern Kuznets berlaku. Akan tetapi, temuan-temuan ini belum menjawab persoalan masyarakat manakah yang lebih diuntungkan atas proses modernisasi tersebut.

Pertumbuhan pariwisata telah menumbuhkan dan mengubah struktur ekonomi Provinsi Bali. Keberhasilan ini tidak terlepas atas meningkatnya penanaman modal asing. Kehadiran pemodal asing mempertinggi tingkat

penanaman modal di sektor pariwisata dan mempercepat tingkat pembangunan ekonomi. Namun demikian, menurut Nehen (dalam Sukardika, 2004:21), pembangunan kepariwisataan yang telah terjadi dalam banyak kasus menyebabkan banyak petani kehilangan tanahnya. Selain itu, ada indikasi yang meyakinkan bahwa sebagian besar keuntungan ekonomi pariwisata di Provinsi Bali mengalir keluar. Telfer (1996), menemukan indikasi konflik perebutan sumber daya tanah, air dan tenaga kerja antara kepentingan pariwisata dan pertanian di Bali, Lombok dan Yogyakarta.

Pesatnya pertumbuhan pariwisata telah terbukti menumbuhkan dan mengubah struktur ekonomi Provinsi Bali. Akan tetapi, pariwisata yang tumbuh pesat belum mampu memberi peluang pasar bagi hasil-hasil produksi pertanian setempat. Seharusnya, pembangunan *dual economy* antara pariwisata dengan pertanian dilaksanakan secara serasi dan berimbang. Sebab, pembangunan yang berimbang merupakan strategi untuk saling menciptakan pasar dan memperoleh eksternalitas ekonomi sehingga disparitas pertumbuhan sektoral yang makin mengecil, yang berarti pula struktur sektoral makin berimbang, akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi, (Rosenstein *and* Rodan, 1957; Zadjuli, 1986:12; Azis, 1994:73).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dalam studi ini disusun disertasi yang berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul studi tersebut disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral?
2. Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral?
3. Apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
4. Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan penduduk?
5. Apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
6. Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
7. Apakah elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan?
8. Apakah elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
9. Apakah ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?
10. Bagaimanakah peran sub-sektor pariwisata dalam perkembangan sektor pertanian?

11. Bagaimanakah peran sub-sektor pariwisata sebagai penggerak industri tersier dan sekunder?
12. Bagaimanakah dampak budaya wisatawan asing terhadap budaya masyarakat setempat?

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan studi ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sub-sektor pariwisata terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali.
2. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali.
3. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sub-sektor pariwisata terhadap ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali.
4. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali.
5. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sub-sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
6. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali

7. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh elastisitas kesempatan kerja sektoral terhadap ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali.
8. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh elastisitas kesempatan kerja sektoral terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
9. Menganalisis dan membuktikan adanya pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
10. Menjelaskan peran sub-sektor pariwisata dalam perkembangan pertanian di Provinsi Bali.
11. Menjelaskan peran sub-sektor pariwisata sebagai penggerak industri tersier dan sekunder di Provinsi Bali.
12. Menjelaskan dampak budaya wisatawan asing terhadap budaya masyarakat setempat.

1.4 Manfaat Studi

Manfaat yang diperoleh dalam studi ini antara lain :

1. Dapat memberikan penjelasan dengan benar tentang hubungan pertumbuhan sub-sektor pariwisata, pertumbuhan sektor pertanian, elastisitas kesempatan kerja sektoral, ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengintegrasikan konsep-konsep dalam teori pertumbuhan ekonomi, pembangunan *dual economy* dan teori keterkaitan pembangunan antara

pariwisata dengan pertanian sehingga dihasilkan konsep perencanaan pembangunan dimana pertumbuhan *dual economy* antara pariwisata dengan pertanian mampu memperluas kesempatan kerja baru, memperbaiki distribusi antargolongan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Diharapkan konsep berpikir dan hasil-hasil didapat studi ini dapat menambah referensi dan membuka wacana penelitian lebih lanjut.
4. Dapat memberikan apresiasi kritis terhadap kepariwisataan dan memberikan saran untuk membenahi perumusan perencanaan dan kebijakan pembangunan *dual economy* antara pariwisata dengan pertanian di masa datang.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Kerangka konseptual dibangun berdasarkan proses berpikir. Proses berpikir merupakan penalaran yang bersumber pada peninjauan teori dan hasil studi empirik. Dalam studi ini teori-teori utama yang ditinjau meliputi :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi
2. Teori Pembangunan Ekonomi
3. Teori Keterkaitan Pembangunan Pariwisata dan Pertanian
4. Teori Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja
5. Teori Distribusi Pendapatan
6. Teori Kesejahteraan

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Smith (dalam Boediono, 1998:7), dua aspek yang mencirikan pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu, semakin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkannya dan penduduknya juga semakin bertambah. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan berinteraksi sepanjang proses pertumbuhan ekonomi berlangsung. Kegiatan produksi barang dan jasa dapat terlaksana bila tersedia faktor produksi yang meliputi sumber daya alam (atau faktor produksi "tanah), sumber-sumber manusiawi (atau jumlah penduduk) dan stok barang kapital.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Sumber daya manusia dalam arti angkatan kerja yang merupakan *input* dalam proses produksi mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*. Stok modal merupakan faktor produksi yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Peranannya sangat sentral karena stok modal bisa berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap tingkat *output*.

Selanjutnya, Smith (dalam Suparmoko dan Irawan, 2002:75), menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi itu terjadi karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat menodorong ditemukan alat atau mesin baru dan akhirnya mempercepat peningkatan produksi. Sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Selain itu, pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi. Potensi pasar akan bisa dicapai maksimal, jika dan hanya jika setiap warga masyarakat diberi kebebasan seluas-seluasnya untuk melakukan kegiatan pertukaran dan kegiatan ekonominya (doktrin *laissez-faire* dan *free trade*).

Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan pendapatan nasional dan selanjutnya memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar tenaga kerja karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan. Jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan pasar yang semakin meluas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan ekonomi mengalami kemacetan atau berhenti.

Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka jumlah penduduknya juga akan semakin bertambah. Hal ini terjadi jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berasal dari pertambahan penduduk, sedangkan permintaan tenaga kerja berasal dari perusahaan terjadi seiring dengan meningkatkan kapasitas produksi. Semakin meningkat kapasitas produksi masyarakat, akumulasi kapital akan tercipta lebih cepat, permintaan tenaga kerja lebih banyak dan pada gilirannya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian juga semakin meningkat.

2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Akan tetapi, kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi oleh kemajuan faktor atau unsur perkembangan ekonomi lainnya sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan maupun permintaan. Artinya, perkembangan ekonomi atau peningkatan jumlah dan kualitas ketersediaan faktor-faktor produksi hanya dapat diharapkan bila ada tabungan yang dipergunakan untuk keperluan investasi secara terus menerus.

Investasi yang produktif berperan penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Menurut Domar (dalam Hakim, 2002:84), investasi berpengaruh pada dua sisi, yaitu di satu sisi akan meningkatkan permintaan efektif akibat adanya efek-efek multiplier dari pengeluaran investasi. Sisi lainnya, meningkatkan kapasitas produksi akibat semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas stok kapital yang tersedia.

Pengeluaran investasi harus dilaksanakan pada tingkat yang tepat. Jika pengeluaran investasi dilaksanakan secara berlebihan tanpa didukung oleh meningkatnya permintaan efektif yang memadai, maka akan terjadi pengangguran kapasitas produksi dan membuat perekonomian mengalami depresi. Sebaliknya, jika pengeluaran investasi kurang mampu meningkatkan kapasitas produksi sesuai dengan tingkat permintaan yang ada, maka akan terjadi kelebihan permintaan dan membuat perekonomian mengalami inflasi. Karena itu, pengeluaran investasi harus dilaksanakan

dalam tingkat yang tepat agar senantiasa tercipta suatu keseimbangan keadaan dimana laju peningkatan permintaan sama persis dengan laju peningkatan kapasitas produksi.

Perekonomian akan dapat tumbuh secara stabil bila syarat-syarat untuk menciptakan stabilitas keseimbangan jangka panjang itu dapat terpenuhi. Menurut, Harrod (dalam Hakim, 2002:85), kriteria stabilitas keseimbangan jangka panjang adalah tingkat pendapatan yang stabil, kesempatan kerja yang penuh, termasuk penggunaan kapasitas terpasang. Berdasarkan kriteria ini, Harrod memperkenalkan dua konsep laju pertumbuhan, yaitu tingkat pertumbuhan yang dijamin (*warranted growth*) dan tingkat pertumbuhan alamiah (*natural growth*).

Pertumbuhan ekonomi akan bisa berkembang dalam jangka panjang jika tingkat pertumbuhan yang benar-benar terjadi (*actual growth*) adalah sama dengan tingkat pertumbuhan yang dijamin (*warranted growth*) dan juga sama dengan tingkat pertumbuhan natural (*natural growth*). Jika investasi yang dilakukan tidak tepat, maka tingkat pertumbuhan yang terjadi akan mengakibatkan dua hal, yakni depresi yang berkepanjangan atau inflasi berkepanjangan.

Inti dari model pertumbuhan Harrod-Domar adalah suatu relasi jangka panjang antara peningkatan investasi (pembentukan kapital) dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengasumsikan perubahan stok kapital sama dengan tingkat investasi ($\Delta K=I$), maka kebutuhan investasi tergantung pada ICOR (*incremental capital output ratio*) yang diterjemahkan ($\Delta K= \Delta Y$). Makin tinggi ICOR makin besar investasi yang dibutuhkan dan menandakan

perekonomian kurang efisien. Domar menyarankan, investasi harus tumbuh atas suatu persentase yang konstan, sejak *marginal propensity to save*, yakni rasio dari pertumbuhan tabungan (S) terhadap peningkatan pendapatan (Y) dan ICOR keduanya konstan. Sedangkan Harrod menyarankan, investasi harus dibiayai oleh tabungan nasional dan negara menetapkan rencana tabungan nasional selalu sama dengan besarnya investasi yang direncanakan agar perekonomian negara mampu tumbuh secara mantap dalam jangka panjang, (Tambunan, 2001:46).

2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Romer

Teori pertumbuhan Romer membahas peranan kemajuan teknologi dalam menentukan perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi yang dimaksud Romer adalah hasil inovasi oleh para wirausaha melalui kegiatan produksi sehari-harinya (*learning by doing*) dan bukan hasil-hasil penelitian dasar (*basic researchs*). Menurut Romer (1986), perkembangan ekonomi suatu negara sangat ditentukan berkembangnya berbagai inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Dengan motif mengejar keuntungan yang maksimal para pengusaha yang bersemangat ingin terus maju berusaha melakukan perbaikan teknologi dalam memproduksi. Perbaikan teknologi yang tumbuh dari hasil karya inovasi para wiraswasta masyarakat setempat memperluas lapangan usaha untuk menyerap angkatan kerja yang tumbuh setiap tahunnya.

Romer (1986;1990) mengartikan kemajuan teknologi sebagai kemajuan dalam inovasi bisnis oleh masyarakat setempat (*the economic of idea*) melalui *learning by doing*. Romer menyebut perubahan teknologi

produksi yang penting dalam perekonomian adalah yang berasal dari dalam perekonomian itu sendiri atau dengan istilah lain *endogeneous technological change* dan bukan dari luar perekonomian sebagaimana yang diartikan oleh Solow. Romer meyakini ada karakteristik intrinsik dari perekonomian yang dapat menyebabkannya tumbuh dalam jangka panjang dan bukan semata-mata oleh adanya kekuatan yang berasal dari luar sistem ekonomi. Teori pertumbuhan Romer sering disebut sebagai teori pertumbuhan *endogenous* dengan motivasi utama menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antarnegara.

Lebih jelasnya lagi, teori pertumbuhan Romer berusaha untuk menentukan faktor-faktor yang menentukan besarnya λ , yaitu tingkat pertumbuhan GDP yang tidak dijelaskan oleh dan dianggap sebagai variabel eksogen dalam perhitungan teori pertumbuhan neoklasik Solow (residu Solow). Dengan asumsi bahwa investasi sektor publik dan swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktivitas yang membalikkan kecenderungan hasil yang semakin menurun yang alamiah, teori pertumbuhan Romer berupaya menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antarnegara.

Teori pertumbuhan Romer menekankan pentingnya investasi modal manusia untuk mempercepat pertumbuhan. Investasi komplementer menghasilkan manfaat sosial maupun pribadi sehingga pemerintah dapat memperbaiki efisiensi alokasi sumber dayanya. Mereka dapat melakukannya dengan menyediakan barang-barang publik (infrastruktur) atau mendorong

investasi swasta dalam industri-industri yang padat pengetahuan (*knowledge-intensive*) di mana sumber daya manusia dapat diakumulasikan dan akhirnya diperoleh hasil yang semakin meningkat.

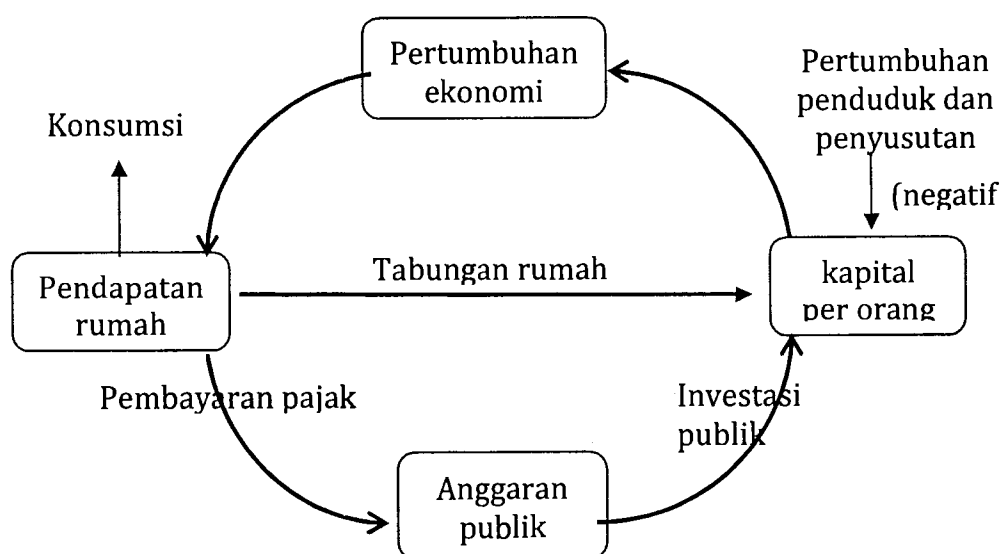
Romer mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri memproduksi dengan skala hasil yang konstan (*constant return to scale*). Cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian, \bar{K} , secara positif mempengaruhi *output* pada tingkat industri, sehingga terdapat kemungkinan skala hasil yang semakin meningkat (*increasing return to scale, IRS*) pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Cadangan modal setiap perusahaan meliputi pengetahuan yang dimilikinya juga. Bagian pengetahuan yang terdapat dalam cadangan modal tetap setiap perusahaan secara esensial adalah sebuah barang publik (*public good*) yang merembes ke perusahaan lain di dalam perekonomian secara instan.

2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Kuznets

Menurut Kuznets (1966:1-81), pertumbuhan ekonomi modern adalah perubahan ekonomi yang melibatkan serangkaian proses transformasi ekonomi, sosial, kelembagaan, politik dan ideologi sehingga menghasilkan peningkatan kemampuan ekonomi tumbuh dengan sendirinya secara berkelanjutan (*self-sustained growth*). Pertumbuhan ekonomi modern dicirikan oleh tiga hal pokok, yaitu [i] kenaikan pendapatan per kapita, [ii] perubahan struktur, dan [iii] akumulasi kapital pada tingkat kecepatan yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

Kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat untuk menyerap barang dan jasa. Kenaikan akumulasi kapital mencerminkan peningkatan kapasitas produktif ekonomi di masa datang. Dan perubahan struktur mencerminkan kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat.

Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas, tabungan dan konsumsi. Tingkat tabungan dan konsumsi mempengaruhi produktivitas. Ketiga hal ini akan mempengaruhi kecendrungan ekonomi dan tingkat kehidupan yang berbeda. Pendapatan per kapita menentukan stok kapital yang tersedia dalam masyarakat. Mekanisme dasar pembentukan akumulasi kapital dalam masyarakat seperti pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1
MEKANISME DASAR AKUMULASI KAPITAL DALAM MASYARAKAT
 (Sumber : Kuznets dalam Jeffery, 2005:247)

Gambar 2.1 halaman 31, menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga dapat dipergunakan untuk tiga hal yaitu konsumsi, tabungan dan sumber pendapatan pajak. Pembayaran pajak merupakan komponen pendapatan pemerintah untuk membiayai investasi publik. Tabungan rumah tangga dan investasi publik menentukan besaran kapital per orang. Akumulasi kapital yang tersedia dalam masyarakat merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menumbuhkan ekonomi. Akan tetapi, stok kapital masyarakat menjadi berkurang oleh adanya pertumbuhan penduduk dan penyusutan. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya meningkatkan pendapatan rumah tangga. Sejalan dengan model pertumbuhan Harrod-Domar, Kuznets (1968:75) menyatakan bahwa setiap penambahan stok kapital masyarakat meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output* potensial.

Kuznets (1966:217), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi modern memiliki empat kecendrungan utama. *Pertama*, bagian pendapatan nasional yang didistribusikan kepada rumah tangga atas partisipasinya dalam penyediaan tenaga kerja dan kapital untuk proses produksi menurun dari semula 85 persen menjadi 75 persen. Penurunan ini diimbangi oleh kenaikan distribusi pendapatan yang diterima oleh organisasi non-personil seperti pemerintah, organisasi swasta dan publik. *Kedua*, bagian pendapatan properti dalam pendapatan nasional dari semula 20-40 persen menurun menjadi di bawah 20 persen. *Ketiga*, kenaikan kontribusi pendapatan tenaga kerja sebagai dampak investasi-investasi yang besar baik di bidang pendidikan maupun pelatihan bagi pekerja. Sebaliknya, kontribusi

pendapatan kapital menurun. *Keempat*, Ketimpangan distribusi pendapatan menaik pada tahap awal transisi dan menurun pada tahap transisi berikutnya menyerupai kurva U-terbalik (*Kuznets U-curve Hypothesis*).

Pertumbuhan ekonomi modern memiliki kecenderungan untuk terus menerus merambah dan merentangkan sayapnya ke negara lain di dunia untuk memperoleh bahan mentah, tenaga kerja yang murah dan pemasaran yang menguntungkan. Transisi pertumbuhan ekonomi modern melibatkan urbanisasi, berubahnya peran gender, mobilitas sosial, tata nilai, struktur keluarga, dan meningkatnya spesialisasi.

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi

2.1.2.1 Teori Pembangunan Chenery

Teori *Pattern of Development* yang dirumuskan Chenery menitikberatkan perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami proses transformasi ekonomi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan. Teori ini disusun berdasarkan pengalaman bahwa perubahan ekonomi negara terjadi sejalan peningkatan pendapatan per kapita.

Chenery *et al.* (1994:57), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari serangkaian proses yang melibatkan perubahan-perubahan struktural sepanjang periode transisi pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai serangkaian perubahan yang melibatkan proses akumulasi, proses alokasi sumber daya dan proses pendistribusian serta transformasi kependudukan yang mengakibatkan dua kemungkinan,

yaitu gagal atau sukses dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi modern. Konsep pembangunan dipandang sebagai sebuah transisi dari suatu keadaan menuju suatu keadaan lainnya.

Chenery and Sirquin (1986) mengartikan pola pembangunan adalah pola perubahan struktural. Pola perubahan struktural adalah variasi-variasi yang bersifat sistematis dalam beberapa aspek struktur sosial ekonomi yang berkaitan dengan meningkatnya level pendapatan. Proses pertumbuhan ekonomi dideskripsikan sebagai hasil dari perluasan dalam sumber daya produktif dan peningkatan efisiensi penggunaannya. Selama episode pembangunan, pertumbuhan *total factor productivity* (TFP) mengalami peningkatan yang cepat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan teknologi yang melekat dalam akumulasi kapital sehingga realokasi sumber daya antar sektor dapat dilakukan. Demikian pula, pengaruh-pengaruh *embided* perubahan teknologi dalam kapital memungkinkan tingkat laju investasi yang lebih tinggi untuk menjamin kelangsungan pemenuhan permintaan agregat dan mencegah terjadinya pengangguran kapasitas produksi.

Chenery membagi tahapan pembangunan ekonomi atas tiga tahap yaitu tahap awal, tahap pergeseran pusat kegiatan ekonomi dan tahap perekonomian maju. Pada tahap awal proses transformasi dicirikan oleh dominannya aktivitas-aktivitas primer yang mana pertanian merupakan sumber utama peningkatan *output* dan barang-barang yang diperdagangkan. Pada tahap ini terjadi perlambatan pertumbuhan secara keseluruhan. Perlambatan pertumbuhan secara agregat adalah lebih dikarenakan oleh rendahnya pertumbuhan produktivitas dibandingkan dengan tingkat

investasi. Tahap kedua proses transformasi dicirikan oleh pergeseran pusat kegiatan ekonomi dari produksi primer menuju manufaktur.

Pergeseran menuju manufaktur bisa pula terjadi pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah atau lebih tinggi tergantung pada sumberdaya *endowment* dan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan dengan negara lain. Tahap ketiga adalah mencapai perekonomian maju yang dicirikan oleh elastisitas pendapatan untuk barang-barang manufaktur menurun, dan pada saat bersamaan kontribusi dalam permintaan domestik mulai jatuh. Kondisi secara mendasar tercermin dalam penurunan kontribusi manufaktur baik dalam pembentukan GDP dan penyerapan angkatan kerja.

Menurut Chenery (dalam Sukirno, 2006:123), transformasi struktur produksi adalah bagian dari proses pembangunan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian secara signifikan lebih rendah dibandingkan seluruh sektor ekonomi lainnya. Pada tahap awal pembangunan produktivitas sektor pertanian tertinggal dibandingkan seluruh sektor ekonomi lainnya. Kesenjangan produktivitas sektoral ini mencerminkan bukan saja perbedaan sifat fungsi produksi dan tingkat perubahan teknologi melainkan juga oleh rendahnya mobilitas sumberdaya. Realokasi sumber daya berpengaruh signifikan dalam mempercepat pertumbuhan. Ketika migrasi dan akumulasi kapital mengurangi kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian maka upah-upah relatif di sektor pertanian meningkat dan sebagai hasilnya gap produktivitas sektoral semakin berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut teori pembangunan chenery menegaskan bahwa perubahan struktural dibutuhkan bagi kelangsungan pertumbuhan namun demikian selama proses berlangsung tidak selamanya berjalan mulus atau tanpa ada suatu kekacauan-kekacauan. Di samping itu, perubahan struktural juga mensyaratkan pemerintah dapat bertindak bijaksana dan penduduk bersedia untuk dapat beradaptasi dalam hal perbedaan kondisi kerja dan gaya hidup dengan sendirinya.

Hipotesis utama dari teori di atas adalah bahwa model perubahan struktural yang terjadi pada tiap-tiap negara sebenarnya dapat diidentifikasi dan proses perubahan secara umum dari masing-masing negara pada dasarnya memiliki kesamaan pola. Meski demikian teori ini toleran terhadap variasi-variasi kecil yang terjadi dalam proses perubahan struktural yang mungkin berbeda antarnegara. Perbedaan faktor *endowment*, kebijakan pemerintah, dan aksesibilitas terhadap modal dan teknologi, merupakan faktor penjelas penting terhadap perubahan perbedaan variatif transformasi struktural yang terjadi.

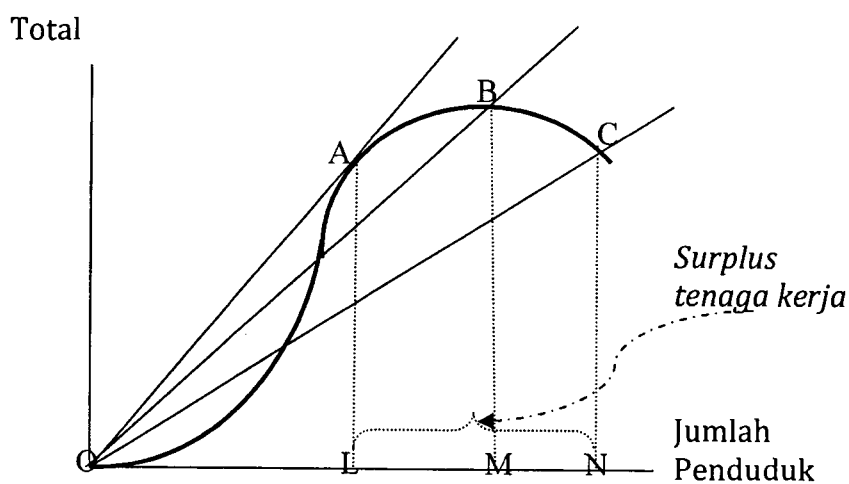
2.1.2.2 Teori Pembangunan *Dual Economy* Lewis

Menurut Lewis (1954), dalam situasi di mana ekonomi menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja yang tinggi, peranan modal menjadi penting untuk mencegah *Malthusian Population-Trap* dan *Low-level Equilibrium Trap*, Ranis (2004). Lewis menyadari sulitnya pembentukan kapital dan terbatasnya kemampuan pemerintah di negara-negara berkembang menggalang investasi untuk aktivitas produktif bahkan termasuk dalam mengorganisasikan sumber daya produktif yang tersedia.

Karena itu, Lewis menyarankan agar sektor swasta dilibatkan sejak tahap awal pembangunan.

Seperti halnya Smith, Lewis meyakini kecil kemungkinan sektor komersial non-pertanian mempunyai kemampuan menggerakkan pembangunan. Lewis lebih optimis tabungan-tabungan pedesaan yang tidak tampak dapat dimobilisasi sehingga produktivitas pertanian meningkat. Di lain pihak, Lewis meyakini bahwa para pemilik tanah mempunyai potensi sebagai penabung demikian juga sebagai pengusaha industri ataupun komersial. Karena itu, Lewis yakin transformasi ekonomi *indigenous* menuju ekonomi modern dapat terlaksana.

Ciri-ciri umum keadaan ekonomi di negara berkembang adalah sebagian besar penduduknya masih melakukan kegiatan di sektor pertanian dan sektor tersebut mempunyai kelebihan pekerja (surplus tenaga kerja). Lewis menggambarkan konsep surplus tenaga kerja seperti Gambar 2.2.



Gambar 2.2
KONSEP SURPLUS TENAGA KERJA LEWIS
 (Sumber : Lewis dalam Meier, 2000:119)

Gambar 2.2 halaman 37, menunjukkan hubungan total produk dan total penduduk. Produk rata-rata per pekerja maksimum di titik A dan menurun seiring dengan penambahan penduduk. Produk marginal menjadi nol di titik B, dan jika penduduk meningkat melebihi M, produk marginal tenaga kerja menjadi negatif dan rata-rata produk per pekerja berlanjut jatuh. OL mencerminkan ukuran penduduk yang optimum dan LM mencerminkan ukuran surplus tenaga kerja.

Dalam modelnya, Lewis mengabstraksikan ekonomi kedalam dua sektor yaitu sektor kapitalis dan non-kapitalis. Sektor kapitalis didefinisikannya sebagai bagian ekonomi yang menggunakan kapital yang dapat digandakan (*reproducible capital*), membayar jasa kapitalis atas kemampuannya dalam mengorganisikan penggunaan sumber daya dan mempekerjakan tenaga kerja yang dibayar untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Produksi sektor kapitalis tidak terbatas pada sektor manufaktur saja, termasuk perkebunan dan pertambangan yang menggunakan tenaga kerja dan menjual *output*-nya untuk mendapatkan keuntungan. Sektor kapitalis bisa merupakan lembaga swasta atau publik.

Pada sisi lain, sektor non-kapitalis atau pertanian subsisten adalah bagian ekonomi yang tidak menggunakan kapital yang dapat digandakan, menyerap tenaga kerja untuk memproduksi terbatas untuk kebutuhan sendiri atau disebut sebagai sektor tradisional *indigenious*. Di sektor ini *ouput* per tenaga kerja lebih rendah dibandingkan sektor kapitalis, pada tingkat teknologi yang tersedia. Produktivitas marginal pertanian bisa jadi nol atau

sangat terbatas sebagai hasil dari pengaturan kelembagaan produksi yang didasarkan atas hubungan kekerabatan atau usaha rumah tangga.

Hubungan fundamental di antara ke dua sektor adalah ketika sektor kapitalis berkembang, sektor ini mendapatkan tenaga kerja dari lumbung (reservoir) di sektor non-kapitalis. Untuk negara-negara yang padat penduduk, diasumsikan penawaran tenaga kerja bersifat tidak terbatas. Artinya, ketika sektor kapitalis menawarkan sejumlah kesempatan bekerja pada tingkat upah yang berlaku, jumlah orang-orang yang bersedia menerima tawaran melebihi dari yang diperlukan. Dalam teori ekonomi, kurva penawaran tenaga kerja bersifat *infinite-elastic* atau secara grafis kurva penawaran berbentuk horizontal lurus.

Menurut Lewis, suatu kondisi yang merangsang tenaga kerja beralih dari sektor subsisten menuju sektor kapitalis adalah tingkat upah riil yang diberlakukan di sektor kapitalis melebihi pendapatan total yang diterima petani, bahkan melebihi tingkat upah riil di manapun dalam sektor non-kapitalis. Kondisi lain yang mendorong mereka beralih ke perkotaan adalah motivasi ingin meningkatkan pendapatan keluarga.

Komponen terbesar dari "*unlimited-supply*" adalah pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) di sektor pertanian dan sektor tradisional lainnya. Sumber lain adalah mereka yang pindah dari semula menjadi pekerja rumah tangga menuju pada kesempatan kerja komersial dan sumber lainnya berasal dari pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ketersediaan tenaga kerja tak terlatih dalam jumlah besar memungkinkan industri-industri baru dapat diciptakan dan atau industri-industri yang tua

masih dapat berkembang tanpa ada kekawatiran akan kekurangan tenaga kerja tak terlatih.

Lewis menyadari bahwa jumlah pembiayaan yang besar harus datang dari peningkatan tabungan swasta domestik atau bahkan dari bantuan asing. Pengalaman menunjukkan saat ini negara-negara maju, tabungannya meningkat sejalan dengan meningkatnya kontribusi dari keuntungan-keuntungan sektor swasta dalam pendapatan nasionalnya. Karena itu perlu tersedia insentif ekonomi yang menarik bagi pemilik modal agar terangsang untuk berinvestasi. Insentif yang paling esensial adalah pertumbuhan tingkat upah di sektor kapitalis harus dibayar dan ditentukan besarnya berdasarkan tingkat penghasilan tenaga kerja di sektor pertanian subsisten. Tingkat upah riil sekurang-kurangnya pada tingkat setara dengan rata-rata produk terhadap tanah sebagai kompensasi atas biaya perpindahan dan merangsang tenaga kerja untuk meninggalkan kehidupan di sektor subsisten. Menurut observasi Lewis, gap upah riil di sektor kapitalis dan pendapatan di sektor subsisten sekitar 30 persen.

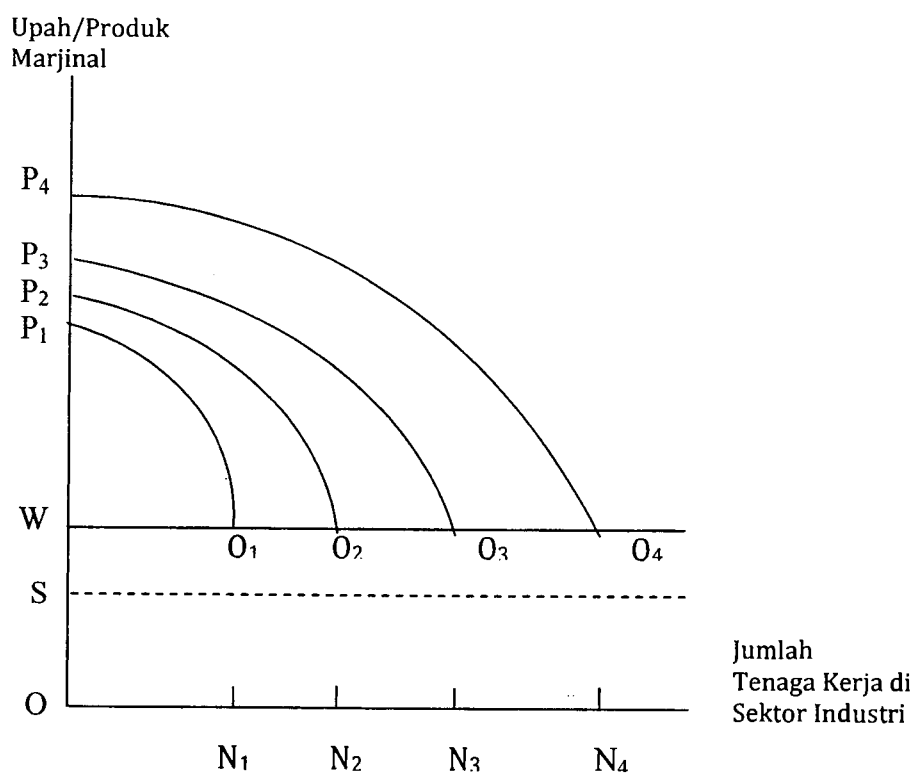
Dalam modelnya Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan perekonomian mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tenaga kerja erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marjinal (*marginal product*) tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya, fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*.

Dengan pengandaian seperti di atas, secara teoritis penambahan *input* tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada. Dengan kata lain, pengurangan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tidak mengurangi tingkat produksi yang ada. Dalam perekonomian semacam ini pangsa semua pekerja terhadap *output* yang dihasilkan adalah sama. Nilai upah riil ditentukan oleh rata-rata produk per tenaga kerja dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

Sebaliknya, di daerah perkotaan perekonomian digerakkan oleh sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi atas *input* yang digunakannya, termasuk tenaga kerja. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal tenaga kerja positif menunjukkan bahwa belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai.

Penambahan tenaga kerja pada sistem produksi di sektor modern meningkatkan *output* yang diproduksi. Ini artinya, industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan akan berusaha dipenuhi oleh penduduk pedesaan. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada di pedesaan dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga bentuk kurva penawaran tenaga kerja berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas melengkapi daya tarik untuk melaksanakan urbanisasi.

Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi *output* yang dihasilkan di sektor modern. Percepatan ekspansi *output* dimungkinkan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Akumulasi modal hanya akan terjadi jika terdapat eksese keuntungan (*profit*) pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut. Lewis menggambarkan teori proses pertumbuhan di atas dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.3.



Gambar 2.3
PROSES PERTUMBUHAN EKONOMI MODEL LEWIS
 (Sumber : Lewis dalam Thirwall, 1999:134)

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa sumbu tegak merupakan tingkat upah di sektor pertanian dan industri, dan tingkat produk marjinal tenaga

kerja di sektor industri. Apabila faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan, dan apabila masih terdapat kelebihan dalam jumlah tenaga kerja, tingkat upah di kedua sektor tersebut tidak akan mengalami perubahan. Besarnya tingkat upah di sektor pertanian adalah S dan tingkat upah ini dinamakan upah subsisten, yaitu upah yang memungkinkan pekerja dan keluarganya mempertahankan hidup mereka. Di sektor industri tingkat upah mencapai W .

Kurva-kurva P_1Q_1 , P_2Q_2 , P_3Q_3 , dan P_4Q_4 menunjukkan tingkat produk marjinal dari satu pekerja tambahan di sektor industri. Pada permulaannya tingkat produk marjinal satu pekerja tambahan adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva P_1Q_1 . Selama jumlah, atau nilai produk marjinal seorang tenaga kerja di sektor industri masih lebih besar daripada tingkat upah di sektor itu, jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan akan terus ditambah oleh para pengusaha. Langkah seperti ini dilakukan oleh para pengusaha dengan tujuan mencapai keuntungan yang maksimal, dan keadaan ini tercapai apabila nilai tingkat produk marjinal telah sama dengan tingkat upah W , dan dicapai pada titik Q_1 . Dengan demikian jumlah pekerja di sektor industri pada waktu itu adalah ON_1 , dan surplus keuntungan sebesar P_1WQ_1 .

Surplus keuntungan tersebut seluruhnya akan ditanamkan kembali. Kegiatan ini bukan saja mengakibatkan perkembangan dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga kenaikan dalam tingkat produktivitas. Maka pada masa berikutnya produk marjinal para pekerja akan bertambah tinggi, misalnya seperti yang digambarkan pada kurva P_2Q_2 . Perubahan ini akan mendorong

para pengusaha menggunakan lebih banyak pekerja, yaitu sebanyak ON_2 . Langkah ini akan menghasilkan surplus keuntungan sebesar P_2WQ_2 . Makin lama sektor industri akan makin bertambah besar dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan juga terus-menerus bertambah. Ini artinya, perkembangan kesempatan kerja berubah dari ON_1 menjadi ON_2 , dan selanjutnya menjadi ON_3 , ON_4 , ... dan seterusnya hingga akhirnya tidak terdapat lagi kelebihan pekerja dalam perekonomian tersebut.

Lewis mengatakan bahwa ciri utama dalam proses pembangunan ekonomi adalah berlakunya kenaikan tabungan dan investasi dalam sektor industri. Pada awal proses pembangunan perekonomian akan menabung dan menanam modal sebesar 4 sampai 5 persen dari pendapatan nasionalnya. Proses pembangunan merombak kegiatan ekonomi masyarakat menjadi suatu perekonomian di mana tabungan sukarela mencapai kira-kira 12 sampai 15 persen dari pendapatan nasionalnya atau lebih. Sumber dari berlakunya kenaikan tabungan dan penanaman modal adalah keuntungan atau surplus yang bertambah besar.

Analisis Lewis yang terakhir menyebutkan bahwa faktor terpenting yang menimbulkan proses pembangunan tidak berlaku lagi adalah terjadinya perkembangan ekonomi yang pesat sehingga tidak terdapat lagi kelebihan pekerja. Akan tetapi, walaupun kelebihan tenaga kerja masih ada, proses pembangunan seperti yang digambarkannya juga dapat berubah sebagai akibat dari terdapatnya beberapa faktor yang menaikkan tingkat upah di sektor industri. Kenaikan upah akan menghapuskan keuntungan yang

diperoleh para pengusaha, dan sebagai akibatnya tabungan tidak lagi dapat diciptakan dan penanaman modal tidak dapat dilakukan.

Lewis mengemukakan terdapat tiga kemungkinan yang dapat menimbulkan proses pembangunan tidak dapat berjalan. *Pertama*, pembentukan modal lebih cepat dari pertumbuhan penduduk. Ini akan menyebabkan kenaikan produksi rata-rata di sektor pertanian dan subsisten pada keseluruhannya. Kenaikan seperti mempertinggi upah di sektor pertanian dan selanjutnya mendorong kenaikan upah di sektor industri. *Kedua*, dengan bertambah besarnya sektor industri, harga-harga hasil pertanian menjadi relatif mahal dari sebelumnya. Keadaan ini juga akan mendorong kenaikan upah di sektor industri. *Ketiga*, kemajuan teknik yang mungkin terjadi di sektor pertanian dan menyebabkan kenaikan produktivitas dan kemajuan ini selanjutnya mendorong kenaikan upah di sektor tersebut.

Perkembangan sektor industri yang cepat tidak menjamin akan menampung semua kelebihan tenaga kerja tanpa didukung oleh kebijaksanaan mengenai penyediaan lapangan kerja. Unsur-unsur kebijaksanaan lapangan kerja yang dimaksud Lewis antara lain kebijaksanaan upah, tindakan-tindakan untuk mencegah intensitas modal sangat tinggi, pengeluaran yang cukup untuk daerah pedesaan dan terutama kota-kota kecil, dan kebijaksanaan kependudukan. Mengabaikan daerah pedesaan ketika mengalokasikan pengeluaran pembangunan memperbesar kesenjangan di antara penghidupan di daerah kota dan pedesaan, dan menyebabkan urbanisasi yang berlebihan.

Inti dari teori Lewis adalah menerangkan proses pembangunan dalam perkonomian dengan kelebihan tenaga kerja. Dua hal yang paling menarik dalam teorinya dan sampai saat ini masih masih relevan bagi negara-negara berkembang adalah peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi dan pola berimbang antara pembangunan industri dengan pertanian.

2.1.2.3 Teori Pembangunan *Dual Economy* Ranis-Fei

Teori Ranis-Fei mengenai proses pembangunan ekonomi sama sifatnya dengan dengan teori Lewis yang telah diuraikan terlebih dahulu. Kedua teori ini merupakan teori pembangunan untuk negara yang menghadapi kelebihan penduduk sehingga menghadapi masalah pengangguran serius. Demikian pula, keadaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat terbatas. Walaupun coraknya sama, tetapi kedua teori tersebut menekankan analisisnya masing-masing kepada aspek yang berbeda. Dalam teori Lewis analisis ditekankan kepada corak pertumbuhan di sektor industri. Sebaliknya, analisis Ranis-Fei lebih menekankan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pertanian.

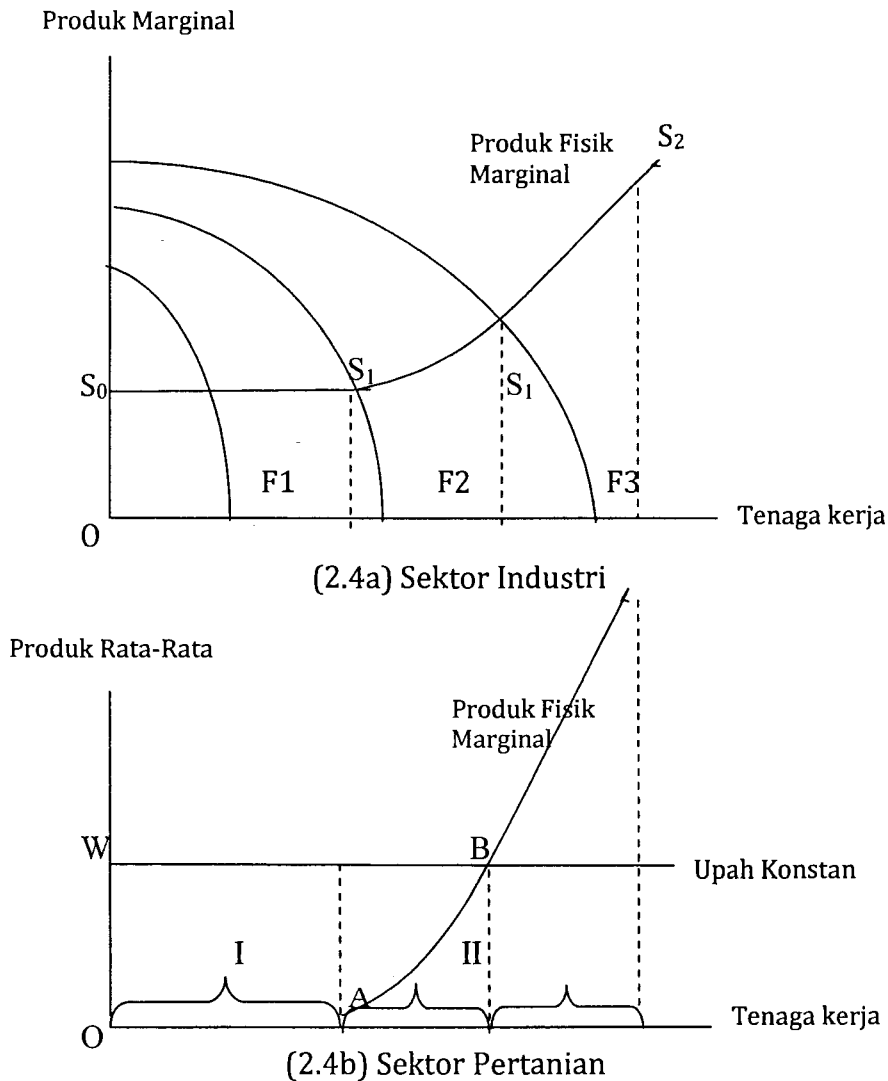
Model pembangunan Ranis-Fei menekankan pentingnya surplus hasil pertanian dalam proses pembangunan. Apabila pembangunan ekonomi terjadi, akan terdapat kelebihan produksi pertanian jika dibandingkan dengan konsumsi hasil pertanian yang dilakukan oleh penduduk di sektor pertanian. Kelebihan ini oleh Ranis-Fei dinamakannya *total agricultural surplus* (TAS). Jika jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor industri bertambah banyak, maka jumlah TAS akan bertambah banyak. Kalau TAS

dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sektor industri akan diperoleh surplus rata-rata pertanian atau *average agricultural surplus* (AAS).

Seperti halnya dalam teori Lewis, teori Ranis-Fei menekankan pembangunan ekonomi melalui realokasi surplus tenaga kerja di sektor tertentu menuju sektor lain yang membutuhkan. Fase-fase penyerapan tenaga kerja yang diinginkan oleh Ranis-Fei lebih bertahap sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Tahap pertama merupakan tahap pemindahan (*labor release*) tenaga kerja pertanian yang tidak menambah total *output* pertanian. Tahap kedua, memindahkan tenaga kerja pertanian yang menambah *output* produksi pertanian akan tetapi nilainya lebih kecil dari upah kelembagaan yang diterima. Tahap ketiga, adalah perpindahan tenaga kerja pertanian menuju industri seiring pertumbuhan akumulasi kapital dan perluasan usaha industri. Menurut Ranis and Fei (1966:124), pemindahan gravitasi ekonomi dari pedesaan menuju perkotaan baru akan dapat terlaksana jika sebelumnya telah dicapai peningkatan *total agricultural surplus* (TAS) secara memadai dalam jangka panjang.

Seperti halnya Lewis, Ranis-Fei mengasumsikan bahwa tenaga kerja (L) merupakan input utama pada kedua sektor. Kapital (K) hanya digunakan di sektor non-pertanian dan *input* tanah (T) hanya digunakan di sektor pertanian. Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tanah dinyatakan dengan rasio penduduk pertanian terhadap lahan (L/T). Pada tahap modernisasi sumber pertumbuhan berasal dari bangkitnya teknologi baru yang dibawa oleh kapital (K) untuk menyerap kelebihan tenaga kerja pertanian menuju sektor industri. Analisis Lewis tentang

transfer tenaga kerja pertanian diperdalam Ranis-Fei (1964) seperti pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4.
MODEL TRANSFER TENAGA KERJA PERTANIAN RANIS-FEI
 (Sumber : Ranis-Fei, 1997:125)

Gambar 2.4, adalah sebuah ilustrasi grafis model mekanisme transfer tenaga kerja pertanian sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi. Kurva MPP nol digambarkan pada ruas OA, tingkat upah konstan sepanjang garis W (Gambar 2.4b) dan kurva penawaran tenaga kerja yang elastis

sempurna sepanjang garis SS_0 (Gambar 2.4a). Ranis-Fei menggambarkan mekanisme transfer tenaga kerja pertanian ke dalam tiga tahap perkembangan ekonomi.

Pada tahap I, karena tenaga kerja melimpah maka MPP tenaga kerja sama dengan atau mendekati nol, sehingga surplus tenaga kerja yang ditransfer dari sektor pertanian menuju sektor industri mempunyai kurva penawaran tenaga kerja yang elastis sempurna. Pada tahap ini, walaupun terjadi transfer tenaga kerja, produksi di sektor pertanian tidak menurun. Produktivitas tenaga kerja pertanian meningkat dan sektor industri dapat berkembang karena didukung oleh suplai tenaga kerja yang disediakan sektor pertanian. Dengan demikian, transfer tenaga kerja menguntungkan kedua sektor ekonomi.

Pada tahap II, pengurangan satu satuan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan produksi, karena MPP tenaga kerja sudah bernilai positif (ruas AB). Namun besarnya MPP masih lebih kecil dari tingkat upah W . Transfer tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri pada tahap ini mempunyai biaya imbalan yang positif, sehingga kurva penawaran tenaga kerja di sektor industri mempunyai elastisitas positif sejak S_1 . Transfer akan tetap terjadi dan produsen pertanian dengan senang hati melepaskan tenaga kerjanya walaupun produksi menurun karena penurunan produksi tersebut lebih kecil dari besarnya upah yang tidak jadi dibayarkan. Di pihak lain, karena surplus produksi yang ditawarkan ke sektor industri menurun sementara permintaannya

meningkat (karena masuknya tambahan tenaga kerja), harga relatif komoditi pertanian akan meningkat.

Tahap III adalah tahap komersialisasi di kedua sektor ekonomi, dimana MPP tenaga kerja sudah lebih tinggi dari tingkat upah. Produsen pertanian akan mempertahankan tenaga kerjanya sehingga sehingga masing-masing sektor berusaha efisien. Transfer tenaga kerja akan terus terjadi jika inovasi teknologi di sektor pertanian dapat meningkatkan MPP tenaga kerja. Sementara permintaan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat dengan asumsi keuntungan di sektor ini diinvestasikan kembali untuk memperluas usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Ranis-Fei menyimpulkan bahwa kecepatan transfer tenaga kerja pertanian tergantung pada : (1) tingkat pertumbuhan penduduk, (2) perkembangan teknologi di sektor pertanian, (3) tingkat pertumbuhan stok modal di sektor industri dan surplus yang dicapai di sektor pertanian. Dengan demikian, keseimbangan pertumbuhan di kedua sektor menjadi prasyarat untuk menghindari stagnasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini berarti kedua sektor harus tumbuh secara seimbang dan transfer serta penyerapan tenaga kerja di sektor industri harus lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja.

Menurut Ranis-Fei (dalam Sukirno, 2006:286), untuk menjamin kelancaran proses pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri maka setidaknya-tidaknya rasio jumlah tenaga kerja di sektor industri terhadap jumlah tenaga kerja keseluruhan perekonomian menjadi bertambah dari masa ke masa.

2.1.2.4 Teori Keterkaitan Pembangunan Pariwisata dan Pertanian

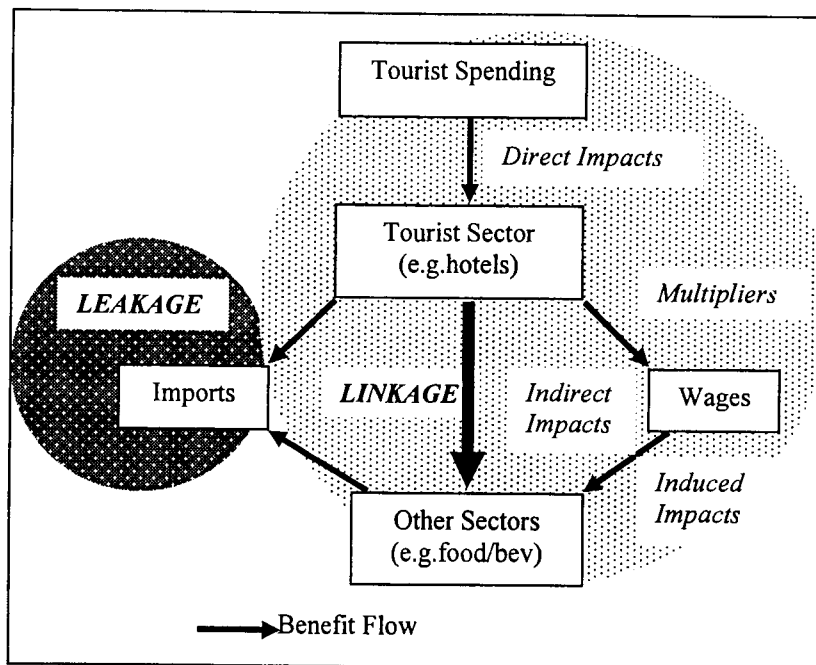
Kontribusi pariwisata dalam pembangunan ekonomi berawal dari arus masuk orang dan uang ke dalam daerah tujuan wisata (DTW). Arus masuk orang dan uang mengakibatkan pergeseran struktur produksi dan konsumsi. Pergeseran struktur produksi dan konsumsi pada tahap awal pembangunan pariwisata diiringi oleh migrasi tenaga kerja antar kawasan dan atau urbanisasi tenaga kerja dari desa menuju DTW, Williams *and* Shaw (1998:34-75).

Bersamaan dengan penyediaan kapital oleh para pengusaha, industri pariwisata yang berkembang membangkitkan beranekaragam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kesempatan dan pendapatan (*income*) bagi tenaga kerja, pemilik modal dan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak. Dalam perspektif makro, peran ekonomi pariwisata tercermin pada kontribusinya dalam pembentukan GDP atau pendapatan nasional, yakni pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Selain manfaat kesempatan kerja dan pendapatan, pertumbuhan pariwisata menghasilkan akumulasi kapital bagi kelangsungan pembangunan, (Williams *and* Shaw, 1998:33; Derek, 2004:53). Seiring dengan pertumbuhan permintaan pariwisata internasional, kehadiran *Foreign Direct Investment* (FDI) menguatkan pariwisata dan struktur investasi industri yang terkait, Balaz (2004:45-50).

Pariwisata telah menjadi komponen integral dalam strategi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sejak tahun 1960-an. Pariwisata memiliki potensi yang besar dalam upaya memperoleh manfaat

ekonomi dalam bentuk penerimaan devisa, daya tarik investasi internasional, penerimaan pajak dan kesempatan untuk menciptakan berbagai pertumbuhan. Menurut Mowforth dan Munt (1998:56), pariwisata bisa dipandang sebagai industri ekspor dan sebagai *outward-oriented economic development strategies*.

Keterkaitan pariwisata dan pertanian tercermin dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Industri pariwisata mempengaruhi kinerja ekonomi domestik melalui mekanisme kebocoran (*leakeges*) dan keterkaitan (*linkage*) seperti ditunjukkan pada pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5
KEBOCORAN DAN KETERKAITAN INDUSTRI PARIWISATA
TERHADAP EKONOMI DOMESTIK
 (Sumber : Jonathan and Fall, 2006:8)

Gambar 2.5, menunjukkan bahwa kebocoran ekonomi dapat terjadi jika transaksi sektor-sektor yang terkait dengan industri kepariwisataan

dilakukan di luar daerah tujuan wisata. Misalnya, pembayaran impor atas penggunaan peralatan dan sarana produksi hotel maupun restoran. Demikian juga komisi atau penjualan jasa-jasa biro perjalanan dan penerbangan asing merupakan kebocoran sehingga hanya sebagian surplus ekonomi yang tertahan dalam sirkulasi ekonomi domestik.

Kebocoran ekonomi pariwisata dapat dikurangi jika *trickle down effect* bekerja dengan baik. *Trickle down* bekerja melalui pembelanjaan wisatawan untuk barang-barang kerajinan masyarakat lokal dan pembelanjaan pihak hotel untuk hasil sektor pertanian lokal. Di samping itu, diversifikasi jasa-jasa industri pariwisata memberi kesempatan penawaran bagi pasar tenaga kerja lokal dikarenakan industri layanan kepariwisataan bersifat *labor-intensive*. Ekspansi industri memperbaiki distribusi pendapatan penduduk oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja berketerampilan rendah, Annan and Coxhead (2006).

Di samping itu, pariwisata menawarkan kesempatan untuk mengaitkan baik langsung maupun tidak langsung masyarakat lokal dalam pembangunan. Melalui *backward linkages*, pariwisata memiliki potensi menstimulasi pembangunan pertanian tradisional yang memungkinkan para petani lokal dapat memasok hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Hubungan fundamental pariwisata dan pertanian terkait melalui sisi permintaan, penawaran dan pemasaran. Penguatan keterkaitan industri pariwisata dan pertanian dari ketiga sisi memungkinkan terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan. Jika hotel-hotel menggunakan produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat

setempat, hal ini bisa jadi berimplikasi pada jalur keberlanjutan pemeliharaan lingkungan yang bersih dan hijau dan pemberdayaan masyarakat tani-nelayan, Dorman (2004).

Pembangunan pariwisata dan pertanian memiliki potensi besar bekerja bersamaan dalam hubungan simbiosis. Perbaikan sistem transportasi pariwisata bermanfaat bagi pertanian melalui peningkatan akses pasar potensial. Perbaikan infrastruktur ini tidak saja membantu pertanian melainkan juga memungkinkan wisatawan dapat mengunjungi dan melihat areal, sistem pertanian dan kegiatan masyarakat petani. Promosi pariwisata bisa membangkitkan permintaan ekspor bagi produk pertanian lokal dan di lain pihak promosi pertanian bisa membangkitkan kunjungan wisatawan, Greenwood (1970).

Secara aktual keterkaitan pariwisata dan pertanian tidak senantiasa berjalan mulus. Menurut Dwyer *and* Forsyth (2007;2008), hubungan simbiosis pariwisata dan pertanian umumnya terjadi pada tahap awal pengembangan pariwisata. Ketika memasuki tahap eksploitasi situasi berubah menjadi konflik. Sumber utama konflik pariwisata dan pertanian berkaitan dengan perebutan sumber daya tanah, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lain yang berkaitan dengan produksi. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha memaksimalkan manfaat ekonomi pariwisata dengan mengundang sebanyak mungkin keterlibatan modal dan investasi asing internasional dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, jumlah kunjungan, lama tinggal dan total pengeluaran wisatawan.

Pada tingkat regional, konflik pariwisata dan pertanian berawal dari persaingan dalam penggunaan sumber daya alam, khususnya tanah dan air. Konflik ini mengarah pada pengurangan keterkaitan (*linkages*). Polarisasi pembangunan pada gilirannya melahirkan ketimpangan dalam pencapaian kemakmuran di antara kawasan industri pariwisata dan pertanian pedesaan.

2.1.2.5 Teori Pembangunan Berimbang Rosenstein-Rodan

Menurut Rosenstein *and* Rodan (dalam Sukirno, 2006:234), teori pertumbuhan ekonomi tidak menjelaskan secara rinci berapa lama investasi diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan pada setiap sektor. Padahal masalah waktu ini sangat penting untuk mengarahkan ke mana investasi harus ditujukan. Teori pembangunan berimbang menjelaskan strategi makro mengenai kebijakan investasi yang perlu dijalankan suatu negara yang ingin memulai dan mempercepat pembangunan ekonominya atau pola investasi yang bagaimana yang perlu dijalankan.

Pembangunan berimbang didefinisikan sebagai usaha pembangunan industri secara besar-besaran agar perkembangan ekonomi lebih cepat. Rosenstein-Rodan (dalam Sukirno, 2006:274) mengemukakan pandangan sebagai berikut :

” Misalkan, di Eropa Timur dan Tenggara ada 20.000 penganggur yang dimobilisasikan dari sektor pertanian dan ditempatkan pada industri sepatu. Mereka akan menerima upah yang secara substansial lebih tinggi dari pendapatan mereka di sektor pertanian, karena mereka tidak lagi hanya membutuhkan bahan pangan, tetapi juga harus membayar transportasi, akomodasi perumahan, dll. Jadi akibat dari mobilisasi demikian berdampak pada permintaan sektor-sektor lain, sehingga sektor-sektor lain itu membutuhkan investasi juga”.

Namun permasalahannya adalah bahwa untuk mendukung investasi secara besar-besaran seperti itu memerlukan dana yang besar. Sementara di daerah-daerah miskin, investasi yang rendah terjadi justru karena kemiskinan mereka. Menurut Nurkse, kemiskinan di suatu daerah mengakibatkan rendahnya tabungan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya investasi. Investasi yang rendah akan mengakibatkan rendahnya produktivitas yang pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka. Nurkse (dalam Sukirno, 2006:276) mengemukakan pandangan sebagai berikut :

"agar negara berkembang dapat melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan yang dihadapi, perlulah dilaksanakan program pembangunan seimbang, yaitu dalam waktu bersamaan dilaksanakan penanaman modal di berbagai industri yang mempunyai keterkaitan. Dengan cara ini luas pasar akan dapat diperbesar, karena kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang diperoleh dari dari berbagai industri akan menciptakan permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri yang dibangun. Pembangunan industri akan menciptakan pasar bagi industri yang dibangun. Pembangunan industri menciptakan pasar bagi industri lain, dan makin banyak industri yang dibangun, makin luas pasar, dan memungkinkan untuk menggunakan modal dengan lebih efisien dan efektif. Dengan demikian pembangunan seimbang akan menjadi perangsang untuk memperluas permintaan terhadap modal dan menciptakan perangsang untuk mengadakan lebih banyak penanaman modal".

Dua pakar lain yang dapat dikaitkan dengan teori pembangunan berimbang adalah Scitovsky dan Lewis. Menurut Scitovsky (dalam Sukirno, 2006: 277), jika pembangunan dilakukan secara berimbang, maka industri yang satu akan memperoleh manfaat secara cuma-cuma karena perbaikan efisiensi yang terjadi pada industri lain. Disamping itu, kenaikan keuntungan

juga diperoleh suatu perusahaan yang bersumber dari tindakan-tindakan perusahaan lain. Sedangkan Lewis menunjukkan penekanan pada keuntungan yang diperoleh dari terciptanya interdependensi yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri, dan antara sektor dalam negeri dan luar negeri.

Menurut Lewis (dalam Arsyad, 2004:95), akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

2.1.3 Teori Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja

2.1.3.1 Konsep Ketenagakerjaan

Proses pembangunan ekonomi biasanya tidak hanya ditandai dengan terjadinya perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, namun juga ditandai dengan terjadinya perubahan struktur ketenagakerjaan. *Chenery and Sirquin* (1986:145) menyebut perubahan tersebut adalah proses demografi. Proses demografi ini terutama terjadi sebagai akibat dari perubahan pada struktur produksi yang timbul seiring dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Perubahan struktur produksi berimplikasi pada dua hal, yaitu aspek ketenagakerjaan dan kesempatan kerja.

Tenaga kerja pada hakikatnya adalah setiap penduduk yang mampu dan siap untuk bekerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan konsep *manpower*, penduduk yang mampu bekerja adalah golongan penduduk yang berusia layak kerja (*age-eligible population*). Kemampuan bekerja dinilai berdasarkan batasan usia. Batasan usia kerja pada tiap-tiap negara berbeda beda. Sedangkan, berdasarkan konsep *labor force*, penduduk usia kerja dibedakan atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa. Bagian dari tenaga kerja yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, mereka yang mengurus rumah tangga dan mereka yang memilih tidak bekerja dengan berbagai alasan, (Bowen and Finegan, 1993:105; Djojohadikusumo,1994:205).

Tenaga kerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengertian tenaga kerja adalah meliputi tenaga kerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produktif maupun utamanya dalam proses produksi adalah tenaga kerjanya sendirinya baik fisik maupun pikiran.

Sejalan dengan pengertian di atas, Susanti *et al.* (2000:81-109) membedakan beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

1. Tenaga kerja (*manpower*)

Adalah penduduk dalam usia kerja atau jumlah seluruh penduduk yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

2. Angkatan kerja (*labor force*)

Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation*)

Adalah menggambarkan angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut

4. Tingkat pengangguran (*unemployment rate*)

Adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

5. Pengangguran terbuka (*open unemployment*)

Adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan

6. Setengah menganggur (*underemployment*)

Adalah perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya

7. Setengah menganggur kentara (*visible underemployment*)

Adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (*part time*) diluar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya

8. Setengah menganggur tidak kentara (*invisible underemployment*)

Adalah jika seseorang bekerja secara penuh (*full time*) tetapi

pekerjaannya itu tidak dianggap tidak mencukupi, karena pendapatannya yang terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia mengembangkan seluruh keahliannya

9. Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*)

Adalah mereka yang dalam angkatan kerja dimasukkan dalam kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya mereka adalah penganggur jika dilihat dari segi produktivitasnya. Misalnya, pekerjaan yang dapat dikerjakan 2 orang, tetapi dikerjakan 3 orang sehingga 1 orang merupakan *disguised unemployment*.

10. Pengangguran friksional (*frictional unemployment*)

Adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Kesenjangan ini dapat berupa kesenjangan waktu, informasi maupun jarak. Jenis pengangguran ini tampaknya merupakan jenis pengangguran yang pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan.

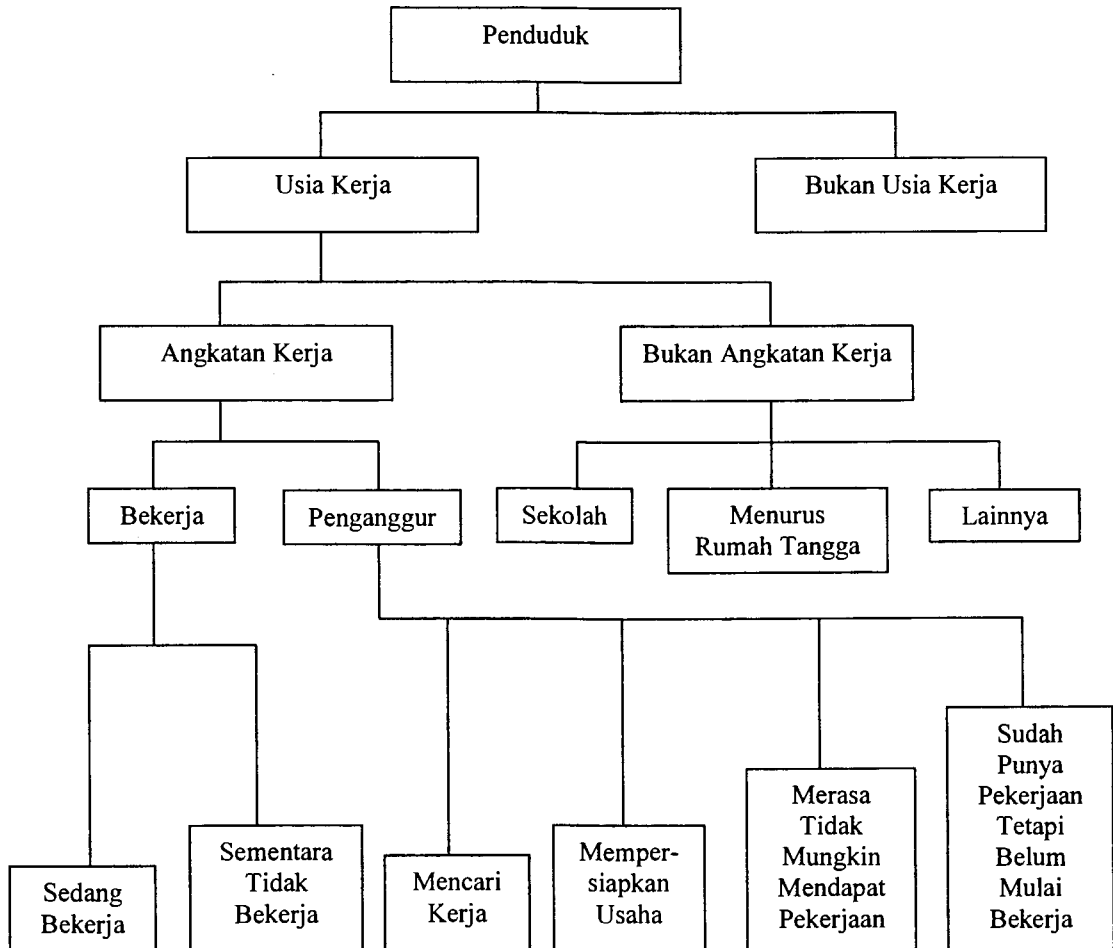
11. Pengangguran struktural (*structural unemployment*)

Adalah pengangguran yang timbul terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian. Perubahan struktur ekonomi menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan jenis atau tingkat ketrampilan yang berbeda. Untuk mengatasi masalah pengangguran jenis ini umumnya lebih sulit.

12. Pengangguran musiman (*seasonal unemployment*)

Adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan musim. Sebagai contoh adalah petani. Biasanya jenis ini tidak banyak soroti.

Berdasarkan konsep-konsep ketenagakerjaan yang telah diuraikan di atas disusunlah suatu diagram ketenagakerjaan seperti pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6
DIAGRAM KETENAGAKERJAAN
(Sumber : Statistik Ketenagakerjaan BPS,2006)

Diagram ketenagakerjaan seperti pada Gambar 2.6 oleh pemerintah dipergunakan sebagai dasar penghitungan untuk mengetahui perkembangan profil angkatan kerja, profil penduduk yang bekerja, keadaan pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan produktivitas tenaga kerja suatu negara dalam suatu periode waktu.

Tenaga kerja yang tersedia akan dapat didayagunakan bila perekonomian sepanjang waktu mampu menyediakan lapangan kerja baru. Setiap sektor ekonomi memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian, karena adanya keterampilan akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja. Tanpa adanya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja kegiatan produksi tidak akan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas ketenagakerjaan dalam arti pembangunan ditujukan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemererataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, meberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja termasuk keluarganya.

2.1.3.2 Faktor Penentu Perluasan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang masih lowong atau tersedia kesempatan bagi yang setiap orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja. Kesempatan kerja dapat dibedakan dalam tiga aspek yaitu aspek pendapatan, produksi dan harga diri. Dari sisi aspek pendapatan, kesempatan kerja memberikan pendapatan para pekerja. Karena itu, kesempatan kerja sering dianggap sebagai alat efektif sebagai upaya mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Dari sisi produksi, kesempatan kerja menghasilkan luaran, berarti tambahan kesempatan kerja dapat membesar laju pertumbuhan luaran. Sedangkan,

dari sisi harga diri, kesempatan kerja memberikan harga diri bagi yang bersangkutan, mengangur sering diartikan bahwa dirinya tidak berguna dan menyebabkan perasaan rendah diri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Kesempatan kerja berubah dari waktu ke waktu, namun sebenarnya penyebab dari perubahan kesempatan kerja tersebut bukan karena waktu saja, tetapi karena perubahan bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada situasi ekonomi membawa dampak pada kesempatan kerja. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi mikro bahwa permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Apabila perekonomian berkembang maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah. Sedangkan apabila perekonomian mengalami kemunduran maka kesempatan kerja juga akan berkurang dan berakibat menambah pengangguran.

Penggunaan tenaga kerja hanya bisa diwujudkan bila tersedia dua unsur pokok. Unsur pertama adalah kesempatan kerja yang cukup banyak, produktif dan memberikan imbalan yang layak. Sedangkan unsur kedua adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan semangat kerja yang cukup tinggi, Anastasia (2004:21). Apabila kesempatan kerja diukur dari banyaknya orang bekerja dianggap sebagai *proxy* bagi permintaan tenaga kerja, maka untuk melihat faktor yang menentukan kesempatan kerja harus dikaitkan dengan permintaan akan barang dan jasa. Dengan kata lain,

masalah kesempatan kerja sangat terkait dengan perkembangan daya beli masyarakat.

Perluasan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja yang produktif serta pemberian upah yang layak berperan menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kesempatan kerja yang tercipta jika terjadi permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Bersarnya tenaga kerja yang diminta dalam jangka pendek tergantung pada besarnya elastisitas permintaan untuk tenaga kerja yang dipengaruhi oleh substitusi tenaga kerja oleh faktor produksi yang lain dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap lainnya.

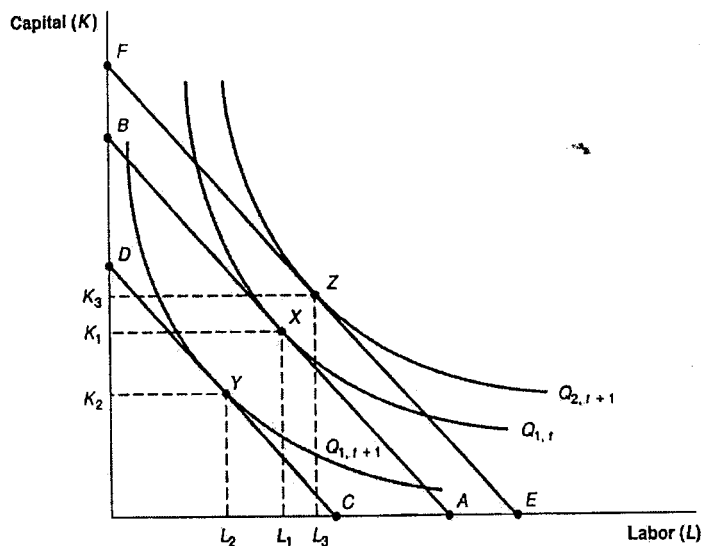
Salah satu model ekonomi yang menjelaskan proses dan faktor yang menentukan dalam masalah ketenagakerjaan yaitu model makro *output-kesempatan kerja (output employment macro model)*. Menurut Todaro (2000:100), model ini berfokus pada hubungan antara akumulasi modal, pertumbuhan *output* industri dan penciptaan lapangan kerja. Model ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai suatu hasil kombinasi pemupukan tingkat tabungan dan akumulasi modal fisik dengan rasio modal *output* agregat tertentu, tingkat pertumbuhan *output* nasional serta kesempatan kerja yang dapat menyeimbangkan antara tingkat tabungan dan investasi. Model ini menyarankan bahwa dorongan besar (*high push*) kearah industrialisasi yang cepat merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan keberhasilan pembangunan nasional.

Tenaga kerja adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi. Karena itu dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja akan meningkat bila *output* meningkat. Hubungan antara *output* dan kesempatan kerja dapat dilihat berdasarkan rasio kesempatan kerja-*output* dan angka elastisitas kesempatan kerja. Rasio *ouput*-kesempatan kerja mendefinsikan bahwa hubungan antara tingkat *output* (Q) dan kesempatan kerja (L) bersifat proporsional. Menurut Okun (dalam Dornbusch, 1991:12), setiap laju pertumbuhan ekonomi naik sebesar 2,2 persen di atas tingkat trend yang telah dicapai pada tahun tertentu, penyerapan tenaga kerja naik sebesar 1,0 persen. Tingkat pengangguran minimal (4,0 persen per tahun) akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai (*full employment*). Berdasarkan temuan empirik ini, Okun mengembangkan formula hubungan kesempatan kerja-*output* sebagai berikut :

$$L = cQ ; \delta L / \delta Q = c \dots\dots\dots (2.1)$$

Dari persamaan (2.1), dengan mudah dapat diketahui bahwa untuk menambah kesempatan kerja, *output* harus bertumbuh, sebab setiap satu unit pertambahan *output* akan menambah kesempatan kerja sebanyak c unit. Makin besar nilai c , maka jumlah kesempatan kerja yang tersedia semakin bertambah akibat bertambahnya satu unit *output*. Besar kecilnya nilai c sangat tergantung pada teknik produksi (tingkat teknologi) yang dipergunakan dan tingkat efisiensi yang dicapai. Teknik produksi yang padat karya cenderung memperbesar nilai c . sebaliknya, teknik produksi yang padat modal akan memperkecil nilai c .

Perubahan teknologi merupakan salah satu faktor penentu terjadinya perluasan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang perusahaan tidak saja hanya mensubstitusikan tenaga kerja dengan kapital tetapi juga pergantian kapital yang kadaluarsa dengan kapital yang *up to date* yang umumnya bercirikan padat kapital (*capital intensive*). Pengaruh perubahan teknologi produksi terhadap perluasan kesempatan kerja terlihat pada Gambar 2.7.



Gambar 27
PENGARUH PERUBAHAN TEKNOLOGI PRODUKSI TERHADAP
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
 (Sumber : Kraufman *and* Hotchkiss, 2000:240)

Gambar 2.7, menunjukkan perubahan teknologi produksi berpengaruh terhadap perluasan kerja. Jika diasumsikan tiap-tiap perusahaan dalam suatu industri memiliki fungsi produksi yang serupa dalam bentuk, $Q = f(K,L)$, tingkat maksimum jumlah *output* yang bisa dicapai dapat diketahui atas dasar tingkat teknologi yang tersedia saat ini. Fungsi ini dapat dipergunakan untuk merumuskan suatu serial *isoquant*, $Q_{1,t}$, seperti yang terlihat pada Gambar 2.7, yang merepresentasikan tingkat *output*

industri sebesar Q_1 yang diproduksi pada periode waktu t . Dengan mengetahui rasio harga faktor W_1, R_1 dalam industri dan mempertemukan dengan garis *isocost* AB , perusahaan-perusahaan meminimumkan biaya dengan cara memproduksi sebanyak $Q_{1,t}$, melalui kombinasi penggunaan K_1 unit kapital dan L_1 unit tenaga kerja (titik X).

Menurut Kraufman and Hotchkiss (2000:239), perubahan teknologi produksi memiliki dua bentuk transmisi pengaruh (*two-pronged effect*) terhadap kesempatan kerja. Pengaruhnya pada tahap awal adalah mengurangi permintaan tenaga kerja sebagai implikasi dari perusahaan-perusahaan menggunakan teknologi yang lebih baik dalam memproduksi pada tingkat *output* tertentu dengan penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pengaruh yang kedua adalah perbaikan teknologi menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah dan kemudian harga-harga produk menjadi lebih murah, meningkatkan penjualan dan pada gilirannya akan memperbesar permintaan terhadap *input* tenaga kerja.

Esensi dari perubahan teknologi adalah adanya suatu pembaharuan yang lebih terbuka dalam perluasan. Pengaruh ini direpresentasikan oleh pergeseran dari titik asal pada *isoquant* Q_1 menuju $Q_{1,t+1}$. *Isoquant* Q_1 dan $Q_{1,t+1}$ tingkat *output* yang sama, perbedaannya adalah dalam hal kecanggihan status teknologi, di mana Q_1 dapat diproduksi pada periode $t+1$ dengan tenaga kerja dan kapital yang lebih sedikit. Bila harga-harga bertahan pada W_1 dan R_1 , perusahaan-perusahaan dalam industri akan meminimumkan biaya produksi Q_1 dengan penggunaan hanya sebanyak K_2 unit kapital dan L_2 unit tenaga kerja (titik Y). Biaya produksi yang lebih rendah bisa jadi mungkin

menghasilkan harga produk lebih murah dan meningkatkan penjualan menjadi $Q_{2,t+1}$. Efek bersihnya adalah meningkatnya permintaan akan kapital dan tenaga kerja (dari titik X ke Z).

Bila pengaruh-pengaruh perubahan teknologi secara kontinyu hanya menggeser *isoquant* ke arah titik origin, sepanjang waktu perekonomian membutuhkan pekerja lebih sedikit untuk memproduksi *output* tertentu. Artinya, perubahan teknologi berpengaruh terhadap kesempatan kerja sebagai implikasi dari adanya relokasi tenaga kerja (*the displacement of labor*). Akan tetapi, faktanya sekalipun terjadi revolusi teknologi pada periode abad ke-20, jumlah pekerjaan dalam perekonomian tidak berkurang tetapi bahkan meningkat dalam kesempatan yang lebih banyak. Hal ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara perubahan teknologi dan permintaan akan produk (*technological change and product demand*).

Meskipun perubahan teknologi produksi mengurangi pengurangan sejumlah *input* tenaga kerja per unit *output*, hal ini justru cenderung memungkinkan terjadinya perluasan tingkat *ouput* total yang diminta dan peningkatan tenaga kerja yang dimintakan dalam perekonomian. Artinya bahwa perubahan teknologi yang mulanya menyebabkan terjadinya kehilangan kesempatan kerja akibat penggunaan teknologi yang efisien, juga menimbulkan efek balik di mana pada gilirannya akan menimbulkan efek bersih yang meningkatkan kesempatan kerja dalam industri, yaitu sebanyak L_3-L_1 sebagai akibat meningkatnya baik penjualan dalam industri maupun permintaan produk secara total dalam perekonomian. Perubahan teknologi produksi dapat menimbulkan perubahan yang bersifat *quantum-leaf*.

Keadaan ini dimungkinkan bilamana permintaan dari produk yang dihasilkan industri-industri lebih elastis atau bila industri-industri dalam perekonomian bersaing secara ketat yang menyebabkan harga-harga lebih kompetitif yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan riil dari setiap pekerja. Secara singkat perekonomian berada dalam situasi yang kondusif. Efek bersih dari pengaruh perubahan teknologi produksi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian tergantung pada kombinasi kekuatan tarik-menarik antara kecenderungan *displacement of labor* dan *increasing product demand*.

Belous (1986) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, perubahan teknologi produksi merupakan kekuatan positif yang mengantarkan pada peningkatan pendapatan riil dan menumbuhkan peluang penyerapan tenaga kerja. Sedangkan, Meisenheimer (1998), menyatakan bahwa masyarakat akan mendapat manfaat dari kemajuan teknologi. Namun demikian, aspek lain dari perubahan teknologi produksi adalah adanya pengaruh kembar (*skill twist*) terhadap permintaan pekerja yaitu di satu pihak terjadi pengurangan penggunaan tenaga kerja tidak terampil atau tenaga kurang terampil dan di pihak lain terjadi peningkatan tenaga terampil atau yang pendidikannya lebih tinggi. Pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pergantian teknologi baru harus berusaha mencari lowongan baru pada industri yang bisa jadi berbeda dengan industri sebelumnya. Untuk pekerja yang usianya sudah tua atau yang telah bekeluarga proses transisi ini menyulitkan.

Selain variabel substitusi kapital/tenaga kerja dan perubahan teknologi produksi, perubahan dalam permintaan tenaga kerja dapat dianalisis melalui variabel pertumbuhan produktivitas. Istilah “produktivitas” biasanya mengacu pada produktivitas pekerja (*labor productivity*) yang didefinisikan sebagai jumlah *output* yang diproduksi pada perusahaan, industri atau perekonomian per jam bekerja. Akan tetapi, pengukuran produktivitas juga terkadang dilakukan dalam bentuk lain seperti produktivitas kapital (*capital productivity*) yaitu *output* per unit kapital dan *multi-factor productivity* yaitu *output* per unit komposit faktor *input*.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja mengandung arti bahwa perusahaan-perusahaan dapat memproduksi tiap-tiap unit *output* secara fisik dengan *input* tenaga kerja yang lebih sedikit. Perubahan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang dapat ditinjau dari dua penyebab penting yaitu, *pertama* proses substitusi kapital-tenaga kerja yang mana menempatkan tingkat upah menaik secara relatif terhadap biaya-biaya kapital. *Kedua*, faktor penting yang mengarahkan peningkatan produktivitas adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi memungkinkan perusahaan untuk memproduksi pada tingkat *output* yang sama dengan tenaga kerja lebih sedikit, yang mengarah pada peningkatan *ouput* per pekerja dan kemudian peningkatan dalam produktivitas tenaga kerja.

Perubahan struktur penyerapan tenaga kerja merupakan salah implikasi dari pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Hill (dalam Sitanggang *et al.*,2004) berpendapat bahwa perubahan distribusi penyerapan

tenaga kerja sektoral biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perubahan peranan *output* secara sektoral mengingat proses perpindahan tenaga kerja sangat lambat terutama bagi tenaga kerja yang berasal dari sektor yang produktivitasnya rendah menuju sektor-sektor yang produktivitasnya lebih tinggi. Artinya, terdapat banyak rintangan mobilisasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan sektor jasa tatkala proses transformasi ekonomi berlangsung. Adanya rintangan-rintangan (*obstacle*) ini menyebabkan struktur penyerapan tenaga kerja mengalami perubahan sepanjang waktu dalam perekonomian.

2.1.3.3 Elastisitas Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan permintaan tenaga kerja. Permintaan akan tenaga kerja mengandung makna adanya kesempatan bagi angkatan kerja baru yang sedang mencari pekerjaan. Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan kerja dan kesempatan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi atau kegiatan produksi, sehingga kesempatan kerja termasuk lapangan kerja yang belum diduduki dan masih lowong. Dengan kata lain, kesempatan kerja dapat juga diartikan banyaknya orang yang dapat ditampung bekerja pada suatu instansi atau perusahaan. Kesempatan kerja akan menampung semua tenaga kerja apabila lapangan kerja yang tersedia mencukupi atau memadai sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia.

Persentase permintaan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada setiap sektor jika terjadi peningkatan *output* sektoral disebut elastisitas kesempatan kerja sektoral (*sectoral employment elasticity*). Alokasi kesempatan kerja menurut lapangan usaha seringkali digunakan sebagai

indikator tingkat pembangunan suatu negara, di mana pergeseran struktur kesempatan kerja berlangsung dari kegiatan tradisional ke sektor modern yang ditandai dengan terjadinya proses pembangunan pada suatu negara.

Tiap kegiatan ekonomi mempunyai daya serap yang berbeda akan tenaga kerja baik dalam kuantitas, maupun dalam kualitas. Daya serap tersebut berbeda secara sektoral dan menurut penggunaan teknologi. Sektor kegiatan yang dibangun dengan cara padat karya pada dasarnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang relatif besar karena tidak terlalu terikat kepada persyaratan keterampilan yang tinggi. Sebaliknya sektor yang dibangun dengan cara padat modal menciptakan kesempatan kerja yang relatif lebih menggunakan tenaga kerja berketerampilan tinggi.

Elastisitas kesempatan kerja sektoral merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan tenaga kerja terhadap salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas ini dapat dihitung berdasarkan rasio perubahan kesempatan kerja dengan perubahan produksi sektoral. Besaran angka elastisitas ini menggambarkan dua hal. *Pertama*, memproyeksikan sampai seberapa besar laju pertumbuhan produksi yang diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang ada. *Kedua*, untuk menganalisis kecenderungan pola produksi yaitu padat modal atau padat karya. Penurunan elastisitas kesempatan kerja disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu teknik produksi mengarah pada padat-modal dan penurunan tingkat efisiensi produksi.

Koefisien elastisitas kesempatan kerja dapat dihitung secara sederhana berdasarkan rasio antara laju pertumbuhan kesempatan kerja

dengan laju pertumbuhan *output* yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{\% \text{ laju pertumbuhan kesempatan kerja}}{\% \text{ laju pertumbuhan } output}$$

$$\epsilon = \frac{\% \Delta L}{\% \Delta Q}$$

Di mana :

ϵ = elastisitas kesempatan kerja

ΔL = laju pertumbuhan kesempatan kerja

ΔQ = laju pertumbuhan *output*

Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan definisi tersebut dapat dibuat formulasi elastisitas kesempatan kerja sektoral sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{\% \text{ laju pertumbuhan kesempatan kerja sektoral}}{\% \text{ laju pertumbuhan } output \text{ sektoral}}$$

$$\epsilon = \frac{\% \Delta L_i}{\% \Delta Q_i}$$

Di mana :

ϵ = elastisitas kesempatan kerja sektoral

ΔL_i = perubahan pertumbuhan kesempatan kerja sektoral

ΔQ_i = perubahan pertumbuhan *output* sektoral

Menurut Simanjuntak (dalam Kusreni, 2006:56), angka elastisitas dapat diartikan sebagai berikut :

1. $\epsilon = 1$; diinterpretasikan perubahan kesempatan kerja dan *output* sama-sama mengalami peningkatan. Besaran ini merupakan kondisi yang

paling ideal karena menggambarkan produktivitas tenaga kerja yang sangat baik.

2. $0 < \epsilon < 1$; masih tergolong ideal karena perubahan *output* masih dimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja walau tidak sebanding dengan peningkatan *output*. Hal ini umumnya terjadi pada perekonomian yang kondisinya sedang berkembang.
3. $\epsilon > 1$; menunjukkan rendahnya produktivitas karena peningkatan kesempatan kerja lebih besar dari peningkatan *output*.
4. $\epsilon < 0$ (negatif); menjelaskan dua keadaan. *Pertama*, penurunan kesempatan kerja justru terjadi pada saat *output* meningkat sehingga pada kondisi ini tidak terdapat penyerapan tenaga kerja. *Kedua*, peningkatan kesempatan kerja terjadi pada saat *output* menurun sehingga tambahan tenaga kerja tidak dapat menghasilkan *output* yang lebih tinggi dan mereka dinilai tidak produktif.

2.1.3 Teori Distribusi Pendapatan

2.1.4.1 Pertumbuhan dan Distribusi Pendapatan

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh semakin meningkatnya nilai tambah atau pendapatan yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada. Seluruh pendapatan ekonomi akan terbagi habis ke sektor rumah tangga dalam bentuk upah, sewa modal, bunga uang dan keuntungan pengusaha. Jika sistem harga berfungsi dengan sempurna, harga tiap sumber daya merupakan nilainya dalam penggunaan marginal yang paling produktif dimana ia bisa diterapkan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor

produksi, terutama kepemilikan barang modal. Karena itu, menurut pendekatan klasik perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, (Herrick *and* Kindleberger (1998:56; Gillis *et al.*, 1987:124, Djojohadikusumo, 1994:98 dan Kasliwal, 1995:154).

Menurut pendekatan klasik, ketidakmertaan pendapatan akan muncul pada awalnya dan akan menghilang setelah dicapai hasil pembangunan. Menurut Lewis (1954) ada dua alasan meningkatnya ketidakmerataan pendapatan awal pertumbuhan. Pertama, kontribusi pemilik kapital meningkat pada saat peran sektor modern meningkat sehingga meningkatkan kesenjangan pendapatan antara pemilik modal dan buruh. Kedua, kesenjangan distribusi buruh sendiri juga meningkat dengan bertambahnya tenaga kerja yang pindah dari tingkat upah sektor subsisten ke tingkat upah sektor modern yang lebih tinggi. Namun, ketidakmertaan tersebut berubah manakala seluruh surplus tenaga kerja diserap oleh sektor modern yang menyebabkan tenaga kerja berubah menjadi faktor produksi yang langka. Tingkat upah kemudian meningkat yang pada akhirnya menurunkan tingkat ketidakmertaan.

Lewis (1966:101), menyatakan bahwa setiap orang akan memperoleh manfaat ekonomi apabila mereka menunggu proses pembangunan tersebut sampai selesai. Peningkatan sementara dalam ketidakmertaan pendapatan hanya merupakan biaya untuk memperoleh manfaat proses pembangunan tersebut. Tanpa adanya campur tangan pemerintah pemerataan akan terjadi dengan sendirinya pada saat negara telah mencapai tingkat pembangunan dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Pendapat yang senada dengan Lewis juga dilontarkan oleh Kaldor. Kaldor (dalam Boediono, 1998:75), menyatakan bahwa jika distribusi pendapatan lebih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat pemilik modal maka akan meningkatkan jumlah tabungan nasional. Tingkat tabungan nasional mempengaruhi jumlah investasi fisik maupun *human capital*. Jika semua tabungan yang ada diinvestasikan pada kegiatan-kegiatan ekonomi produktif maka pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Sebaliknya, pendekatan strukturalis memandang pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi yang mengandung perubahan mendasar pada ekonomi yang disebut sebagai perubahan struktural. Perubahan struktural tersebut merupakan masa ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan kesenjangan penyesuaian yang panjang. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi negara-negara kurang maju tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi pemerintah harus aktif menjalankan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pendekatan strukturalis menganggap bahwa masalah distribusi pendapatan harus dilakukan melalui intervensi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat dua pendekatan ekstrem dalam mencapai pertumbuhan dan pemerataan, yaitu aliran ekstrem kanan yang menganut paham kapitalis yang memfokuskan pada pertumbuhan, yaitu "*grow first, then redistribute*" dan aliran ekstrem kiri

yang menganut paham sosialis yang memfokuskan pada pemerataan, yaitu "*redistribute first, then grow*".

Sebagai alternatif dari dua aliran ekstrem tersebut, terdapat satu strategi yang beraliran moderat untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan secara bersama, yaitu "*redistribution with growth, RWG*" yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Menurut Chenery *et al.* (1994:65), konsep "*redistribution with growth, RWG*" berpegang pada bagaimana manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan sehingga distribusi pendapatan meningkat sepanjang waktu dengan meningkatnya pertumbuhan. Hanya melalui peningkatan GNP akan ada sesuatu yang berarti untuk bisa didistribusikan.

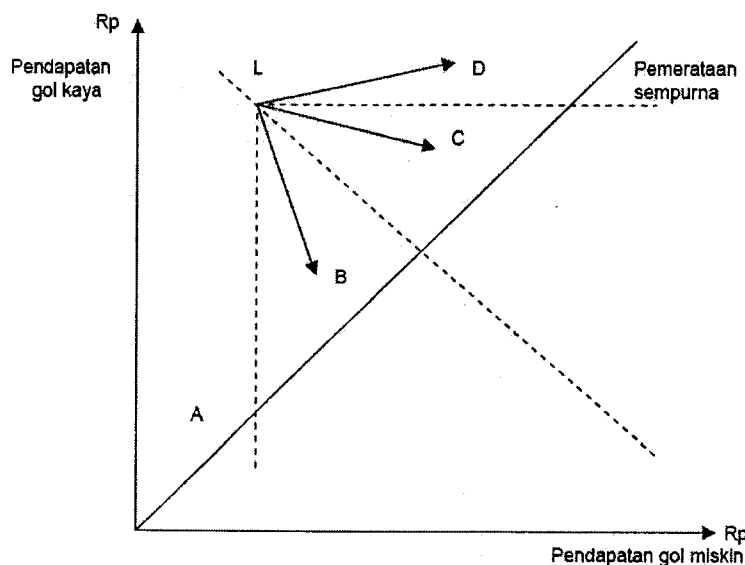
Distribusi tidak dapat diharapkan sebagai produk sampingan dari pertumbuhan, melainkan harus diciptakan dari unsur kebijakan. Karena itu, menurut konsep RWG, kebijakan pemerintah harus mempengaruhi pola pembangunan sedemikian rupa sehingga produsen berpendapatan rendah yang umumnya berlokasi terutama di sektor pertanian dan industri pedesaan berskala kecil akan melihat peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Bukti-bukti empiris menunjukkan hasil yang beragam, di antaranya ada yang mendukung pendekatan Klasik, dan sebagian juga mendukung pendekatan Strukturalis. Misalnya, temuan empirik Alesnia *et al.* (1994a;1994b), Perotti (1996) dan Solimano (1999) mendukung pendekatan Klasik. Dengan merujuk pada model-model pertumbuhan *endogenous* mereka menyatakan bahwa negara-negara dengan tingkat kesenjangan yang tinggi memaksa pemerintah untuk menaikkan pajak progresif dan

menerapkan kebijakan-kebijakan redistribusi pendapatan yang semua ini akan mengurangi keuntungan bagi pemilik modal. Tingkat keuntungan yang tidak menarik mengurangi niat para investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya. Hal ini pada gilirannya mengurangi pertumbuhan jangka panjang.

Sebaliknya beberapa temuan lainnya tidak sejalan dengan aliran klasik. Misalnya, Hausmann *et al.* (1996) dan Aghion *et al.* (1999) malahan mendukung pendekatan strukturalis. Mereka menyatakan bahwa di dalam suatu ekonomi di mana pasar modal tidak bekerja sempurna dan tingkat kekayaan serta kondisi sumber daya manusia (SDM) berbeda menurut individu, maka distribusi pendapatan yang tidak merata akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan pembangunan, yakni mengurangi kesempatan investasi, mengurangi insentif bagi peminjam modal dan menciptakan ekonomi makro yang tidak stabil.

Menurut Kasliwal (dalam Susilowati *et al.*, 2007) secara umum hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dapat dinyatakan dengan Gambar 2.8 halaman 79. Gambar 2.8, menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan kelompok kaya (50% populasi dengan pendapatan tinggi) dan pendapatan kelompok miskin (50% populasi dengan pendapatan rendah).



Gambar 2.8.
PERTUMBUHAN VS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
 (Sumber : Susilowati *et al.*, 2007)

Distribusi awal berada di titik L, yang mana terkonsentrasi kepada kelompok kaya. Kebijakan dilakukan agar distribusi mengarah garis pemerataan pendapatan. Namun, kebijakan redistribusi pada umumnya juga akan mengubah total pendapatan. Kebijakan yang mengakibatkan distribusi pendapatan berada di wilayah A adalah kebijakan yang tidak diinginkan karena kelompok kaya akan menjadi miskin dan kelompok miskin menjadi semakin miskin. Pada wilayah B, kelompok miskin akan memperoleh manfaat yang lebih rendah dibanding kerugian yang dialami kelompok kaya sehingga total pendapatan menurun. Jika redistribusi bergerak ke wilayah C, yaitu di atas garis pendapatan konstan, terdapat peluang mengalami pertumbuhan diikuti dengan pemerataan karena total pendapatan meningkat. Pada wilayah D, redistribusi akan mengalami *pareto superior* karena masing-masing kelompok memperoleh peningkatan pendapatan.

2.1.4.2 Perubahan Pola Distribusi Pendapatan

Hipotesis Kuznets menggambarkan hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dan tingkat pembangunan. Kuznets (dalam Arief, 1998:136) menyatakan bahwa pada waktu ekonomi mulai tumbuh terjadi ekspansi di sektor modern. Kesenjangan dalam distribusi pendapatan melebar sebagai akibat berpindah sumber-sumber ekonomi dari sektor pertanian/sektor tradisional ke sektor industri/modern di daerah perkotaan. Pengusaha-pengusaha di sektor modern menikmati *propensity to save* yang lebih tinggi. Ini disebabkan tingginya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan modern dalam keseluruhan pendapatan masyarakat menjadi lebih tinggi. Tingkat tabungan perorangan yang lebih tinggi akhirnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan selanjutnya.

Selanjutnya pada tahap pertumbuhan yang sudah matang, kesenjangan distribusi pendapatan akan menurun pada waktu surplus tenaga kerja telah berpindah ke sektor-sektor modern diiringi dengan peningkatan upah. Pada tahap ini pula tingkat keuntungan pengusaha di sektor modern akan disesuaikan dengan porsi upah dalam nilai *output* dan ini akan sama tingkatnya dalam produksi barang-barang kebutuhan pokok. Dengan meluasnya pasaran barang-barang kebutuhan pokok akan meningkatkan pertumbuhan nilai tambah di sektor pertanian yang mengakibatkan pertumbuhan *output* keseluruhannya dalam ekonomi.

Hipotesis Kuznets menarik banyak kalangan peneliti untuk membuktikan secara empirik. Menurut Tambunan (2005:74) beberapa

catatan penting yang di dapat dari hasil studi tersebut, yaitu *pertama*, sebagian besar studi-studi tersebut mendukung hipotesis Kuznet dan sebagian lainnya menolak. *Kedua*, walaupun secara umum hipotesis tersebut dapat diterima, namun hanya terbukti nyata pada kelompok negara-negara industri maju. *Ketiga*, bagian kiri dari kurva U terbalik kesenjangannya cenderung lebih tidak stabil dibandingkan pada posisi bagian kanan.

2.1.4.3 Distribusi Pendapatan Antar Daerah Pedesaan dan Perkotaan

Secara umum ciri daerah pedesaan ditandai oleh struktur kegiatan penduduk berbasis pertanian, kepadatan penduduk lebih rendah, cara hidup maupun pola budaya yang dekat dengan pemanfaatan sumber daya alam, tempat tinggal penduduk berkelompok tersebar, potensi SDM dengan pendidikan yang baik langka dan mempunyai sistem organisasi sederhana. Sebaliknya ciri daerah perkotaan ditandai oleh struktur kegiatan penduduk berbasis perdagangan dan jasa, kepadatan penduduk lebih tinggi, tempat tinggal penduduk berkelompok, tenaga kerja berpendidikan tinggi relatif tinggi dan mempunyai sistem organisasi yang kompleks dan berbasis kegiatan formal (Abipraja, 2002:45).

Dualisme antara daerah pedesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap proses pembangunan. Misalnya, Lewis (1954:65) menyatakan bahwa, urbanisasi orang dari pedesaan menuju keperkotaan memberi dampak positif terhadap perekonomian di pedesaan. Dampak positif ini berupa meningkatnya kesempatan kerja produktif, tingkat produktivitas dan pendapatan rata-rata masyarakat di pedesaan. Sedangkan ekonomi

perkotaan pada suatu saat akhirnya tidak mampu menampung masuknya tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, yang sebagian besar adalah pendatang dari pedesaan. Kondisi ini berakibat meningkatnya pengangguran di satu pihak dan menurunnya laju pertumbuhan tingkat upah/gaji di pihak lain.

Perubahan pola distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh struktur pasar dan perbedaan besarnya distorsi di pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan jumlah sektor dan jumlah unit usaha di dalam masing-masing sektor relatif kecil dibandingkan di perkotaan. Struktur pasar yang sederhana ini membuat distorsi pasar juga relatif lebih kecil yang berarti kesempatan berusaha bagi setiap individu di pedesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan.

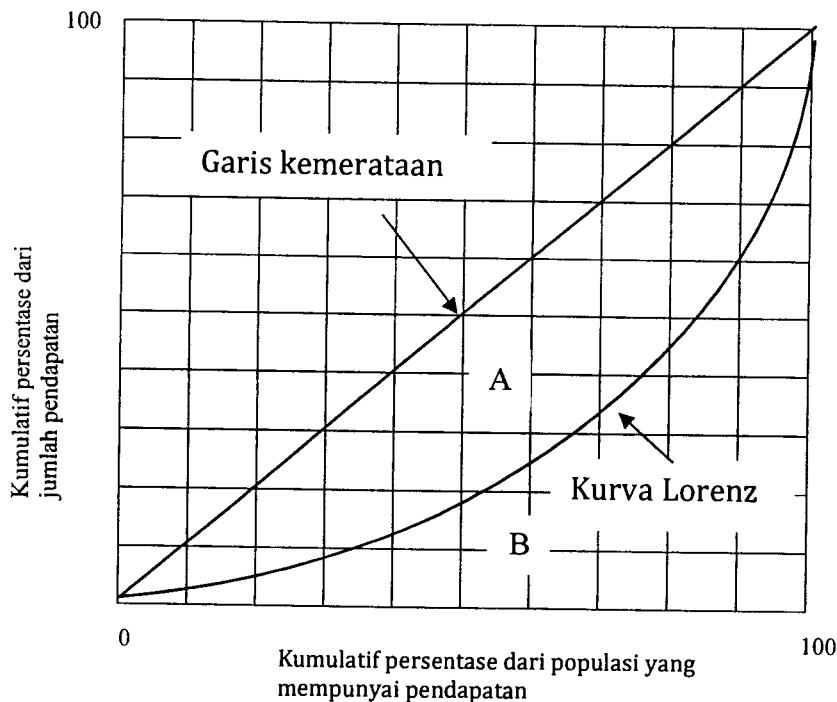
Sejalan dengan pandangan Lewis, Tambunan (2005:83) menyatakan bahwa proses pembangunan pedesaan dapat memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Diversifikasi ekonomi pedesaan akan menambah jumlah kesempatan kerja di pedesaan dan pada saat berbarengan menambah pendapatan petani. Di samping itu, melalui pembangunan pedesaan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di daerah pedesaan semakin baik dimanfaatkan oleh penduduk desa (pemakaian semakin optimal).

2.1.4.4 Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan Gini-ratio

Menurut Arsyad (2004:227), distribusi pendapatan perorangan merupakan dimensi yang paling umum digunakan oleh para ekonom untuk menilai perubahan pola distribusi pendapatan penduduk dalam pembangunan di suatu wilayah atau negara. *Gini-ratio* adalah salah satu alat

untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang didasarkan atas *axiomatic approach* dan sering digunakan di setiap studi-studi empirik. Gini-ratio dapat dihitung berdasarkan basis kurva Lorenz.

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Kurva Lorenz dapat digambar dengan menggunakan data desil, atau dengan kata lain sumbu vertikal dan horizontal dibagi kedalam sepuluh bagian yang sama. Contoh kurva Lorenz adalah seperti pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9
KURVA LORENZ
(Sumber : Arsyad, 2004: 228)

Dengan menggunakan grafik seperti pada Gambar 2.9, Gini-ratio adalah rasio (a) daerah di dalam grafik tersebut yang terletak di antara Kurva Lorenz dan garis pemerataan sempurna yang membentuk sudut 45° dari titik

0 dari sumbu y dan x terhadap (b) daerah segitiga antara garis pemerataan dan sumbu y dan x .

Formula Gini-ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Gini-ratio} = 1 - \sum_1^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1}) \dots\dots\dots (2.2)$$

Di mana :

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Nilai Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila Gini-ratio = 0, berarti pemerataan yang sempurna (setiap orang mendapat porsi dari pendapatan yang sama dan bila Gini-ratio = 1, berarti ketidakmerataan yang sempurna (hanya satu orang atau satu kelompok masyarakat menikmati seluruh pendapatan yang ada).

2.1.5 Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Manusia

2.1.5.1 Teori Kesejahteraan

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach* (Albert and Hahnel, 2005). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi di mana tidak memungkinkan suatu realokasi *input* atau *output* untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang lebih buruk. Dengan kata lain, distribusi barang dan jasa antar konsumen bila setelah alokasi barang-barang

antar konsumen menghasilkan pengurangan kepuasan setidaknya-tidaknya untuk satu orang. Sedangkan *new contraction approach* menekankan pada konsep di mana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.

Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang dapat diraih dalam kehidupannya. Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai bila suatu perilaku (*behavioral*) mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan dengan sumber daya yang dimiliki.

Berbeda dengan negara-negara lainnya di dunia, di Indonesia kondisi kehidupan masyarakat yang dianggap lebih sejahtera tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spritual. Misalnya, berdasarkan pengertian kesejahteraan sebagai suatu keadaan, Isbandi (2003:41) mendefinisikan konsep kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

"Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun sepirtuil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila"

Rumusan di atas menggambarkan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya. Pengertian ini lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan

antara aspek jasmaniah dan rohaniah, ataupun keseimbangan antara aspek material dan spriritual. Secara singkat, dapat diartikan bahwa masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang lebih berdaya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, sopan, bermartabat serta senantiasa menjauhi tindakan kekerasan maupun kejahatan yang tidak dibenarkan menurut ajaran agama maupun nilai-nilai kearifan lokal.

Menurut Graaff (dalam Agarwal, 1998:128), kesejahteraan tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi. Kesejahteraan sekompok manusia atau perorangan tergantung beberapa faktor, sebagian merupakan faktor ekonomi sedangkan lainnya merupakan faktor non-ekonomi seperti faktor sosial, budaya dan politik. Dalam berbagai kasus, sebagian besar ahli ekonomi hanya memperhitungkan variabel-variabel ekonomi dan variabel-variabel non ekonomi dianggap konstan.

Konsep kesejahteraan dapat dibedakan atas kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan oleh individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda. Misalnya, seseorang yang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih barang A daripada B, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi di A daripada di B.

Kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif. Mengukur kesejahteraan sosial merupakan hal yang tidak mungkin. Demikian pula, membandingkan

kesejahteraan sosial dalam situasi yang berbeda melalui media yang pilihan sosial tidak mudah. Karena itu, dengan pengertian yang sederhana, Varian (1993:539) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai penjumlahan dari kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Hubungan antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial digambarkan dalam bentuk fungsi kesejahteraan sebagai berikut :

$$W = W(U_1(X_1), \dots, U_n(X_n)) ; \dots \dots \dots (2.3)$$

Di mana :

W = kesejahteraan sosial

X_i = konsumsi individu

$U_i(X_i)$ = tingkat utilitas dari konsumen

Fungsi kesejahteraan yang diformulasikan oleh Varian secara langsung adalah fungsi dari tingkat utilitas-utilitas individu dan secara tidak langsung adalah fungsi dari konsumsi individu-individu.

Menurut Graff (dalam Agarwal, 1998:728) terdapat tiga konsep kesejahteraan yang berbeda yaitu Konsep kesejahteraan sosial *Paretian*, *Bergson* dan *Paternalist*. Konsep *Paretian* menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan kolektif yang terdiri dari individu-individu dalam masyarakat. Konsep ini menyatakan bahwa bila sekurang-kurangnya satu orang menjadi lebih baik dan tidak seorangpun menjadi lebih buruk keadaannya maka kesejahteraan diartikan mengalami kenaikan. Konsep *Bergson* mencakup lebih banyak kasus di mana perubahan organisasi ekonomi membuat beberapa orang menjadi lebih baik dan orang lain menjadi lebih buruk. Dalam konsep ini dibuat pertimbangan nilai secara ekslisit dalam sebuah fungsi sederhana di mana kesejahteraan seseorang ditambahkan pada kesejahteraan orang lain. Sedangkan, konsep

kesejahteraan *Paternalist* menekankan bahwa negara mempunyai ide tentang kesejahteraan sosial maksimum yang akan dicapai. Kesejahteraan sosial ditentukan oleh pandangan-pandangan penguasa paternalist atau negara dan bukan oleh individu-individu atau masyarakat. Ketiga konsep kesejahteraan sosial ini menekankan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan yang dapat diraih oleh individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat. Taraf kesejahteraan masyarakat tergantung pada kondisi alokasi sumber daya yang tersedia dan kebebasan bagi setiap individu dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya.

Dimensi kesejahteraan masyarakat sangat luas dan kompleks, sehingga suatu taraf kesejahteraan masyarakat hanya dapat terlihat dan diperbandingkan melalui aspek-aspek tertentu. Untuk membandingkan tingkat perkembangan kesejahteraan pada setiap daerah, setiap tahapan pembangunan atau setiap negara, dewasa ini telah disepakati secara global untuk menggunakan indikator komposit yang dikenal dengan *Human Development Index* (HDI) atau di Indonesia diterjemahkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.1.5.2 Kesejahteraan dengan Memperhatikan Pembangunan Manusia

Banyak faktor yang dapat menjadi penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akumulasi kapital dan kemajuan teknologi menaikkan *output*, produktivitas dan kesempatan kerja nasional sepanjang waktu. Kapital dan tenaga kerja bergabung menjadi bagian *input* sektor produksi untuk

menghasilkan *output* nasional untuk tujuan konsumsi dan investasi. Jika investasi (I), *ouput* potensial (Q^p), permintaan agregat (Z), stok kapital (K), produktivitas tenaga kerja (N) dan *output* alamiah tumbuh dengan laju yang sama, yaitu dengan *warranted rate of growth* (gw)= *natural rate of growth* (gn), maka ekonomi tumbuh dalam keadaan yang mantap, Harrod-Domar dalam Boediono (1998:75).

Ekonomi akan tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang melalui pergeseran keseimbangan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi jika dan hanya jika, kapital dan tenaga kerja dapat bersubstitusi dan bergerak bebas memenuhi kondisi pareto optimal, Solow (2000:126). Pertumbuhan jangka panjang tercermin dalam peningkatan *total factor productivity* (TFP), Griliches (1988:125); Jogerson, (1988); Grossman *and* Helpman, (1991a;1991b:54).

Di samping itu, ekonomi juga bisa tumbuh dari kekuatan-kekuatan dari dalam sistem tanpa mensyaratkan kondisi pareto optimal. Ide-ide baru yang dihasilkan para pengusaha menciptakan eksternalitas positif yang menaikkan produktivitas stok kapital agregat dan produktivitas ekonomi secara keseluruhan sehingga menghasilkan pola pertumbuhan *increasing return to scale* (IRTS), (Romer, 1990; Lucas, 1988). Pertumbuhan *endogenous* bisa digerakkan oleh efek-efek *spillover* dan eksternalitas positif, jika dan hanya jika dalam ekonomi terlaksana investasi-investasi di bidang penelitian dan pengembangan, Grossman *and* Helpman (1991b:135).

Sejarah membuktikan bahwa ekonomi dunia berubah menjadi modern melibatkan proses transisi dari suatu keadaan menuju keadaan yang

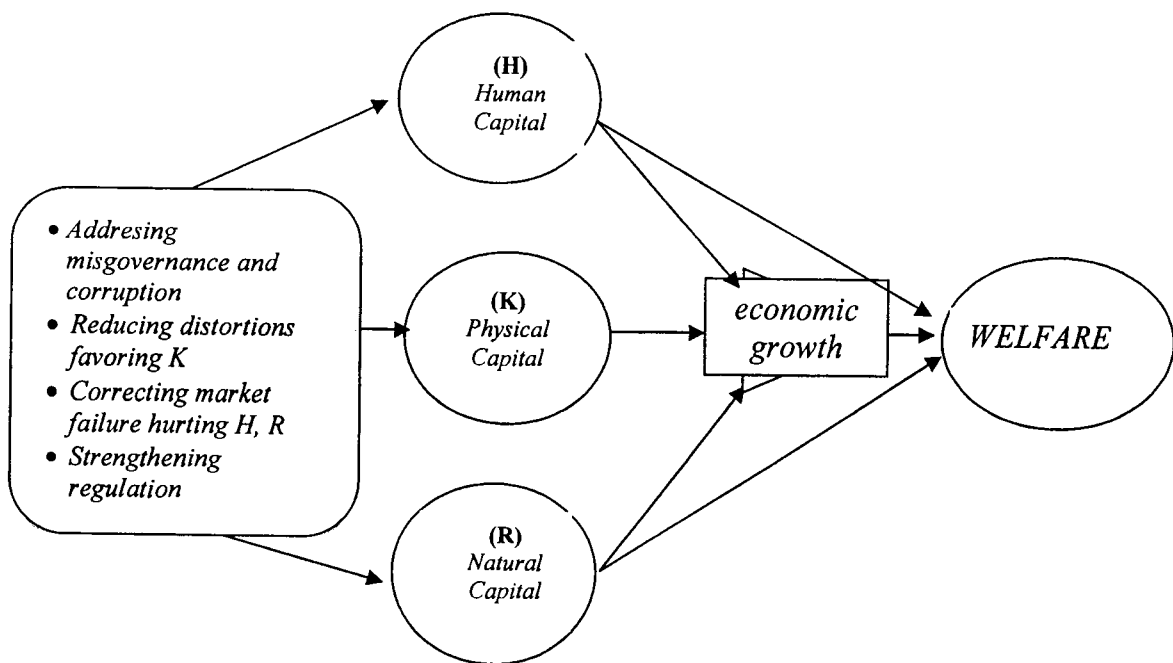
baru. Pertumbuhan ekonomi modern merupakan produk industrialisasi yang ditandai oleh kenaikan peningkatan pendapatan per kapita, perubahan struktur dan akumulasi kapital lebih cepat sepanjang waktu. Pembentukan modal dan investasi merupakan syarat penting namun belum cukup. Untuk itu diperlukan perubahan dan transformasi struktural produksi, komposisi permintaan konsumen, perdagangan internasional, serta faktor sosial ekonomi seperti proses urbanisasi dan distribusi penduduk, Kuznets (1966:224) dan Chenery *et al.* (1994:105).

Tingkat pertumbuhan setiap sektor produksi pada setiap industri berbeda satu sama lainnya. Pola umum pertumbuhan industrialisasi di kebanyakan negara dicirikan oleh pertumbuhan sektor-sektor produksi di sektor manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor utama lainnya, (Chenery *and* Taylor, 1960). Negara yang kaya akan sumber daya alam mengawali dengan pembangunan industrialisasi substitusi impor. Sebaliknya, yang miskin akan sumber daya alam mengawali dengan pembangunan industrialisasi promosi ekspor, Chenery *and* Sirquin (1986).

Ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dalam kondisi kelebihan tenaga kerja. Proses pembangunan ekonomi berjalan dengan mempertemukan kapital di sektor industri perkotaan dengan kelebihan tenaga kerja yang tersimpan di sektor pertanian pedesaan. Proses pembangunan bermula dan selanjutnya terus-menerus berlangsung sebagai akibat penanaman kembali keuntungan yang diperoleh di sektor kapitalis. Kegiatan ini akan melahirkan kesempatan kerja baru, meningkatkan produksi nasional dan dengan begitu pembangunan ekonomi tercipta.

Proses perubahan ini akan terus-menerus berulang sehingga makin lama tingkat keuntungan makin besar, dan akhirnya tingkat penanaman modal jadi lebih tinggi dan laju perkembangan ekonomi juga bertambah cepat (Lewis,1954; Ranis *and* Fei, 1964:145; Kelly *et al.*,1972:124; Agarwala, 1983:91).

Berdasarkan uraian tersebut di atas pengelolaan kualitas pertumbuhan ekonomi penting untuk peningkatan kesejahteraan (Dasgupta,1999; Birdsall,1998; Sen, 1998, Christian *et al.*, 2003). Skema hubungan akumulasi asset, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan seperti Gambar 2.10.



Gambar 2.10
SKEMA HUBUNGAN AKUMULASI ASSET,
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
(Sumber : World Bank, 2000:23, dimodifikasi).

Gambar 2.10, menjelaskan cara modal manusia (H), alam (R) dan fisik (K) berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan

kesejahteraan (*welfare*). Modal fisik berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi. Modal manusia (-sosial) dan alam (-lingkungan) juga berpengaruh untuk hal yang sama dan keduanya merupakan komponen langsung dari kesejahteraan. Modal manusia dan alam juga berkontribusi langsung terhadap modal fisik melalui peningkatan pemanfaatannya. Modal fisik meningkatkan modal manusia dan alam, jika pasar melihat hal ini untuk akumulasi mereka sendiri. Penambahan investasi dalam modal fisik, manusia dan alam, bersamaan dengan reformasi kebijakan tertentu berkontribusi terhadap kemajuan teknologi dan pertumbuhan *total factor productivity* (TFP) yang pada gilirannya meneguhkan pertumbuhan.

Menurut Ravallion *and* Datt (dalam Ocampo, 2007:23), stabilitas *outcome* pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pendapatan kelompok rumah tangga miskin sangat sensitif terhadap siklus dan krisis dalam pertumbuhan. Khususnya, bagi mereka yang miskin akan kepemilikan asset-asset tanah, keterampilan dan tabungan secara finansial untuk dapat mempertahankan stabilitas konsumsi mereka dalam saat-saat yang buruk. Mereka yang hidup di sekitar batas garis kemiskinan dan jutaan rumah tangga yang hampir miskin cenderung jatuh ke jurang kemiskinan oleh adanya guncangan-guncangan eksternal. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang dipromosikan untuk mengurangi kemiskinan memerlukan kondisi-kondisi yang relatif stabil sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.

Hubungan tingkat pertumbuhan terhadap pengurangan kemiskinan tergantung pada sifat dan besaran investasi-investasi dalam masyarakat.

Investasi-investasi yang lebih merata memperbesar dampak pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan insiden kemiskinan. Jika kemampuan masyarakat terdistribusi secara normal antar penduduk satu sama lainnya, perbaikan dalam pendidikan dan kesehatan memperbesar kesejahteraan masyarakat dalam wujud kesempatan-kesempatan menggunakan teknologi baru untuk mengangkat mereka lebih jauh di atas kondisi miskin. Karena itu, pemerintah seyogyanya mengalokasikan pembelanjaan publik untuk pendidikan dalam jumlah yang meyakinkan tercapainya peningkatan kualitas dan pendistribusian yang lebih setara, Knack *and* Stephen (1997). Lebih lanjut, Stephen menyarankan kemitraan swasta-publik dibutuhkan untuk menciptakan kebijakan yang berbasis-pasar untuk meningkatkan pendidikan di seluruh jenjang termasuk pendidikan tinggi. Dukungan yang lain seperti kebijakan pasar tenaga kerja dan perlindungan sosial juga diperlukan.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama. Menurut World Bank (2000:234), tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*) dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequality*). Sedangkan, menurut *United Nations Development Programme*, UNDP (1990) kinerja pembangunan manusia dapat diukur dengan *Human Development Index* (HDI).

Menurut Ranis *and* Stewart (2000a;2000b), pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terkait dalam hubungan timbal balik. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya berkontribusi bagi kelangsungan pembangunan manusia. Sebaliknya, pembangunan manusia itu sendiri merupakan kontributor penting terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan proses memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Di dalamnya, tercakup dimensi non-material seperti dimensi politik, budaya dan kebebasan sosial. Aspek non-material yang mendasar adalah menyangkut pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh asset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah studi membuktikan bahwa koeksistensi industri pariwisata dan pertanian bisa menjadi potensi dinamis dalam pembangunan ekonomi kepulauan (*island economies*). Jonathan *and* Faal (2006) menemukan bahwa seiring dengan pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja, pertumbuhan industri pariwisata menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap surplus

tenaga kerja di sektor pertanian tradisional Gambian Afrika-Barat. Hasil studi ini sejalan dengan penelitian Latief (2001) dan Latimer (2001) dengan mengambil kasus koeksistensi pariwisata dan pertanian Caribbean.

Pubben *and* Verstappan (2005) menemukan bahwa pengeluaran wisatawan di daerah tujuan wisata Gambian terdistribusi secara langsung menuju sektor kepariwisataan (perdagangan, hotel & restoran) dan secara tidak langsung terdistribusi menuju sektor pertanian dan sektor lainnya. Demikian pula terdistribusi dalam bentuk upah dan pembiayaan impor. Lebih lanjut, Pubben dan Verstappan mengungkapkan bahwa pertumbuhan pariwisata dan peningkatan produktivitas pertanian tradisional menaikkan pendapatan per kapita dan akumulasi kapital bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata Gambian-Afrika Barat. Temuan ini sejalan dengan studi Blake (2008) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran wisatawan di Afrika-Timur tidak saja meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin pedesaan melainkan juga meningkatkan ekspor hasil-hasil industri masyarakat setempat.

Bowen *et al.* (2001) menganalisis pengaruh pertumbuhan pariwisata dan pertanian di Hawaii-Amerika Serikat. Di satu sisi, pertumbuhan pariwisata memacu diversifikasi aktivitas pertanian yang disertai dengan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi bagi hasil-hasil pertanian hortikultura (buah, sayur, dan kacang-kacangan). Pada sisi lainnya, pariwisata menstimulasi jasa-jasa pertamanan dan terbentuknya kluster industri berbasis pertanian. Studi ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan pariwisata di daerah tujuan wisata Hawaii menghasilkan perubahan yang

ekstensif dan positif bagi transformasi pertanian. Dengan kata lain, pertumbuhan pariwisata tidak menghancurkan pertanian.

Pertumbuhan pariwisata dan pertanian memiliki potensi hubungan simbiosis saling menguntungkan. Studi Latzko (2004) mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang awalnya ditujukan bagi industri pariwisata berdampak positif bagi penghematan biaya ekspor komoditi-komoditi olahan hasil-hasil pertanian Hawaii, termasuk ekspor komoditi hasil pertanian dalam bentuk segar. Para eksportir pertanian hanya membayar dalam bentuk biaya variabel. Sedangkan biaya tetap ekspor pertanian tercover oleh biaya yang dibebankan pada wisatawan yang berkunjung ke Hawaii.

Industri pariwisata membangkitkan berbagai aktivitas perekonomian domestik. Studi Clarie *and* Jones (2008) mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata mempengaruhi pasar tenaga kerja lokal melalui peningkatan permintaan segmen pasar tenaga kerja terlatih dan merangsang pertumbuhan sektor pendidikan kepariwisataan di daerah tujuan wisata Welsh-United Kingdom.

Dorman (2004) menemukan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di Caribia melebarkan pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru di sekitarnya sebagai dampak pertumbuhan investasi perhotelan dan restoran yang diiringi oleh urbanisasi penduduk dari pedesaan menuju kawasan industri pariwisata. Sedangkan studi Goodwin *et al.* (2006) mengutarakan bahwa arus pendapatan ekspor pariwisata menaikkan tingkat konsumsi domestik yang pada gilirannya merangsang pertumbuhan investasi sejalan

dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Caribia. Hal senada dikemukakan Isabel (2007), bahwa baik pariwisata domestik maupun internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Spanyol dan Italia.

Berlawanan dengan hasil-hasil studi yang telah dikemukakan sebelumnya, studi-studi lainnya mengungkapkan bahwa eksploitasi pertumbuhan pariwisata merusak kelangsungan pembangunan pertanian. Studi Dwyer *and* Forsyth (2007;2008) menyimpulkan bahwa simbiosis pariwisata dan pertanian hanya terjadi pada tahap awal pembangunan dan ketika memasuki tahap eksploitasi situasi berubah menjadi konflik. Konflik pariwisata dan pertanian berkaitan dengan perebutan sumber daya tanah, tenaga kerja dan sumber-sumber daya produktif lainnya.

Torres (2000; 2002a;2002b; 2003) dan Brohman (1996), mengutarakan bahwa keterlibatan modal dan investasi swasta asing dalam pembangunan industri pariwisata merupakan awal pemicu dilematis keterkaitan industri pariwisata dan pertanian tradisional di daerah tujuan wisata. Pada tingkat regional, konflik pariwisata dan pertanian berawal dari persaingan dalam penggunaan sumber daya alam, khususnya tanah dan demikian halnya dengan tenaga kerja. Lebih lanjut, konflik ini mengarah pada pengurangan keterkaitan, ketidaksetaraan dan pembangunan secara spasial terpolarisasi yang pada gilirannya melahirkan ketimpangan dalam pencapaian kemakmuran di antara kawasan industri pariwisata perkotaan dan pertanian tradisional pedesaan.

Studi Torres *and* Momsen (2004), mengungkapkan bahwa dominasi investasi swasta asing dalam pembangunan industri pariwisata Cancun-Mexico menurunkan pendapatan masyarakat pertanian. Tingginya tingkat upah pekerja pariwisata Cancun merangsang kenaikan tingkat upah riil pertanian yang berakibat tidak saja mengurangi surplus pendapatan para petani pedesaan melainkan juga meningkatkan intensitas pelepasan hak kepemilikan tanah pertanian pedesaan.

Telfer *and* Wall (1996; 2000), mengutarakan bahwa keterkaitan pertumbuhan pariwisata dan pertanian di Pulau Bali dan Lombok –Indonesia tidak menghasilkan manfaat bersih yang signifikan. *Backwards linkages* pariwisata dan pasokan produksi hasil pertanian lokal terhalang oleh standar aturan dan kriteria yang diberlakukan resort internasional mengakibatkan manfaat ekonomi pariwisata tidak signifikan terdistribusi ke dalam sektor ekonomi domestik. Hal senada diungkapkan dalam studi Ashely (2000; 2001) yang menyatakan bahwa terbatasnya dampak positif pengeluaran wisatawan di daerah tujuan wisata Namibia-Afrika Selatan terhadap perbaikan tingkat hidup penduduk miskin pedesaan.

Wang *et al.* (2006) menyelidiki dampak ekonomi pariwisata menurut tipologi perilaku sosial ekonomi dan kependudukan negara asal wisatawan. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa kontribusi tipologi pariwisata *home based* atau *high-income country* lebih kecil dibandingkan tipologi *non-home based* atau *low-income country*. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan kunjungan wisatawan tipe *home based* menaikkan 0,01 persen kesempatan kerja dan 0,004 persen distribusi pendapatan rumah tangga di daerah tujuan

wisatawan Northern Indiana. Sebaliknya, setiap satu persen kenaikan pertumbuhan kunjungan wisatawan tipe *non-home based country* menaikkan 0,03 persen kesempatan kerja dan 0,026 persen distribusi pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan hasil studi-studi yang telah dikemukakan di atas terlihat sebagian studi mengungkapkan ko-eksistensi industri pariwisata dan pertanian berdampak positif bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya, studi lainnya mengungkapkan bahwa ko-eksistensi industri pariwisata dan pertanian berdampak negatif bagi pembangunan ekonomi.

BAB 3

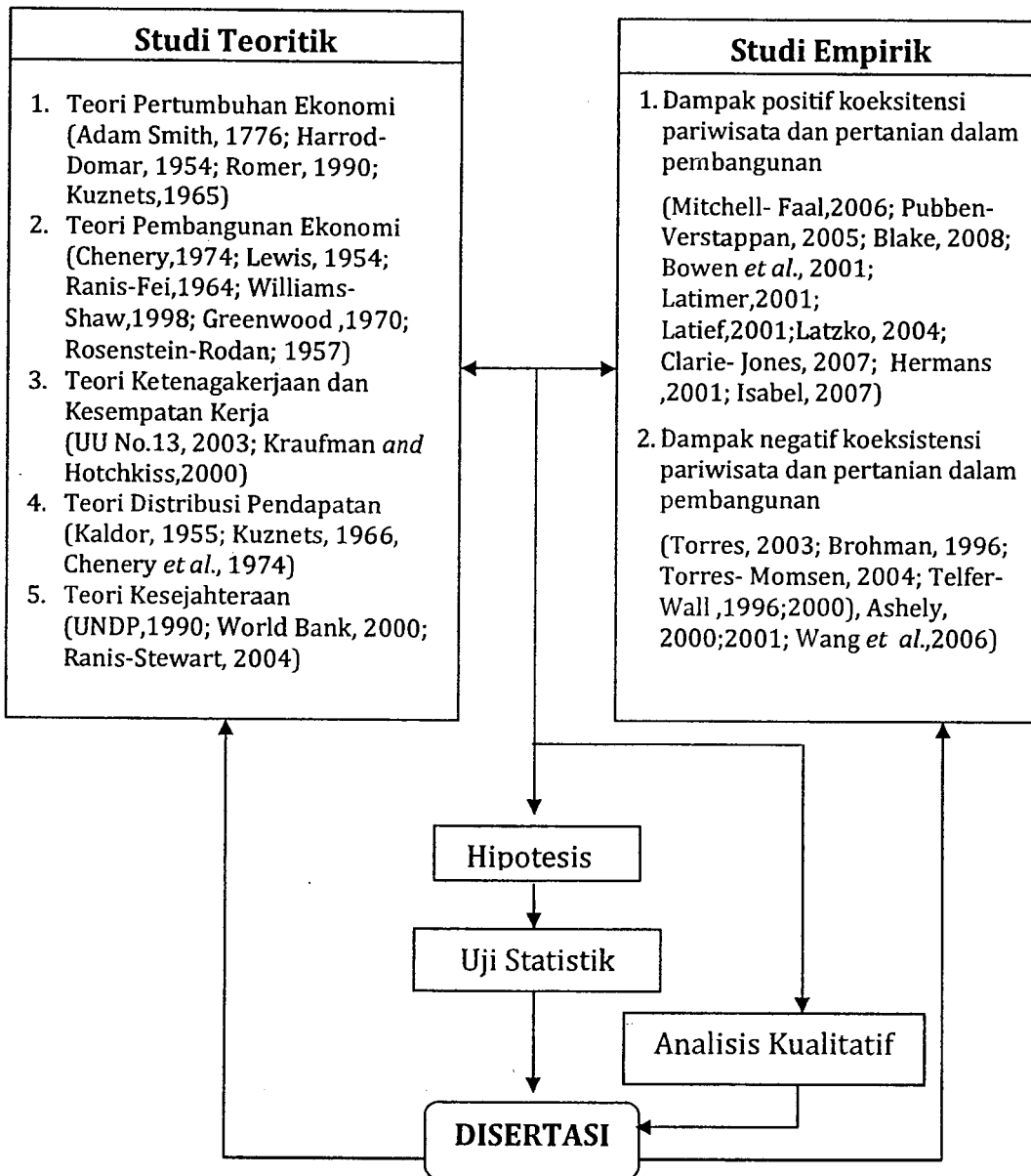
KERANGKA KONSEPTUAL

DAN HIPOTESIS

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan studi terlebih dahulu disusun kerangka proses berpikir seperti Gambar 3.1.



Gambar 3.1.
KERANGKA PROSES BERPIKIR

Kerangka proses berpikir pada Gambar 3.1 halaman 100, adalah cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Alur berpikir yang tercakup dalam kerangka ini menjadi landasan dalam menyusun kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah cara meletakkan variabel dalam hubungannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai arah perkembangan tertentu. Proses berpikir ini diawali dengan tahapan studi teoritik. Studi teoritik adalah kegiatan menelaah teori-teori dari suatu disiplin ilmu tertentu dengan maksud menemukan penjelasan mengenai suatu faktor tertentu, hukum-hukum yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu kaitan sebab akibat. Di samping itu juga sebagai cara mengembangkan kemampuan menganalisis dan memprediksi apa yang mungkin terjadi.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor penentu, sifat dan ciri-ciri empirik perkembangan ekonomi suatu negara. Adam Smith menyatakan kunci pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi kapital yang dibarengi dengan meningkatnya penggunaan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan. Jika akumulasi kapital dan penggunaan tenaga lebih banyak terjadi maka tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi asalkan pasar tersedia cukup luas. Semakin berkembang ekonomi suatu negara jumlah penduduknya akan semakin bertambah.

Pertambahan penduduk tanpa dibarengi oleh kemajuan faktor lainnya tidak akan membawa perkembangan yang berarti. Harrod-Domar menyatakan bahwa perkembangan ekonomi hanya dapat diharapkan jika negara mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai kegiatan

investasi secara terus-terus. Investasi yang produktif akan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produksi dan permintaan efektif masyarakat. Jika negara mampu menciptakan tabungan nasional sama persis dengan kebutuhan investasi maka negara itu akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang. Dalam praktek, negara-negara yang tabungan nasional tidak cukup mencari bantuan luar negeri dalam bentuk pinjaman atau menarik masuknya investasi asing langsung.

Investasi memang perlu, namun yang lebih menentukan perkembangan ekonomi adalah budaya berinovasi dikalangan para wirausaha. Romer menyatakan perkembangan ekonomi suatu negara lebih ditentukan oleh perkembangan inovasi yang terjadi dalam perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi ini akan berpengaruh pada permintaan tenaga kerja. Semakin tinggi kapasitas produksi perusahaan maka jumlah tenaga kerja yang terserap akan semakin banyak.

Ekonomi tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama di semua sektor-sektor-sektornya. Perbedaan ini terjadi karena kesempatan-kesempatan untuk berkembang tidak sama. Kesempatan berkembang tergantung pada ketersediaan sumber daya ekonomi, infrastruktur pendukung, perubahan kelembagaan yang menghambat pertumbuhan, dan kesempatan seperti itu yang lainnya, dan oleh sebab itu menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berlainan pula. Karena itu kondisi pertumbuhan yang terjadi pada suatu sektor ekonomi akan berpengaruh pada kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan menimbulkan perubahan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dikatakan timpang jika bagian terbesar dari total pendapatan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir orang dalam masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah pemicu terjadinya kemiskinan dan keresahaan sosial dalam masyarakat. Lewis menjelaskan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan hanyalah bersifat sementara, tanpa adanya campur tangan pemerintah pengurangan dalam ketimpangan pendapatan akan terjadi dengan sendirinya pada saat negara telah mencapai tingkat pembangunan dan pendapatan per kapita yang tinggi.

Di negara-negara berkembang hingga kini tingginya tingkat pengangguran dan banyaknya rumah tangga miskin masih merupakan masalah pokok pembangunan. Pengangguran terjadi karena kurangnya kesempatan kerja. Kemiskinan terjadi karena adanya distribusi pendapatan yang timpang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa cara mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang bisa mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan yang berkualitas merupakan pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak didorong oleh investasi riil dan ekspor. Perekonomian yang bertumpu pada investasi riil akan menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan dan merata.

Teori-teori tersebut pada intinya mengarahkan pada penjelasan secara deduktif dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Penjelasan deduktif adalah penjelasan dengan cara berpikir untuk memahami suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah ditetapkan sebelumnya.

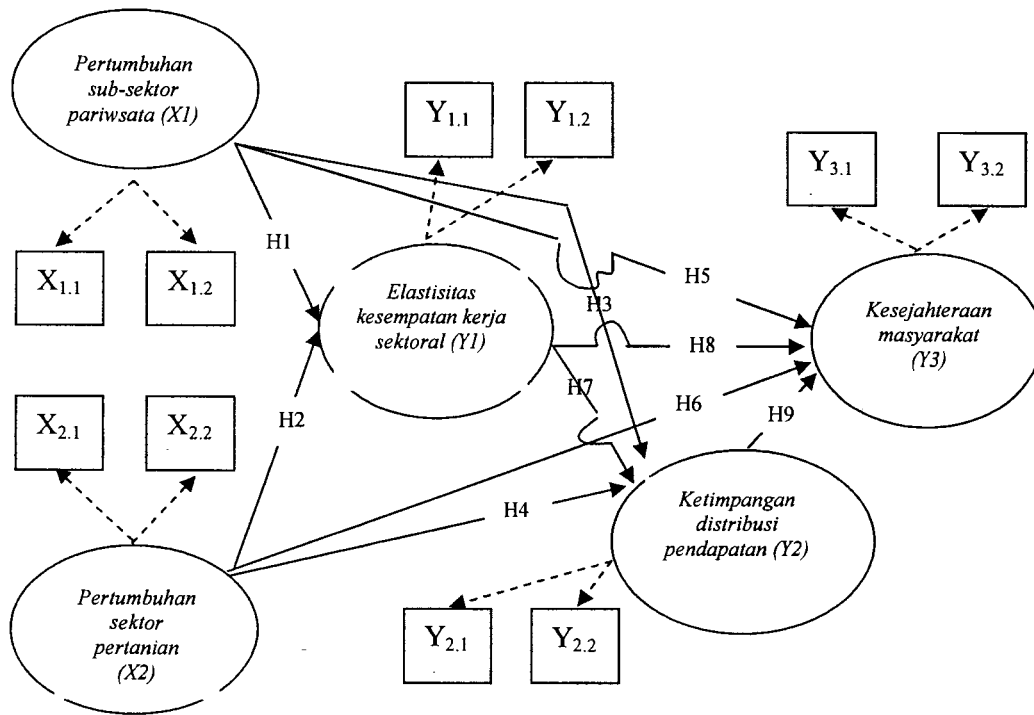
Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan kerangka berpikir yg masuk akal dan mencerminkan kenyataan diperlukan adanya perpaduan proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir induktif dilakukan melalui studi empirik. Studi empirik adalah menelaah pengetahuan yang bersumber pada kebenaran nyata. Kebenaran nyata dalam kontekstual tertentu ini didapat berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Proses berpikir dalam studi empirik adalah menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang sifatnya khusus.

Esensi dari penemuan ilmiah adalah mengetahui sesuatu yang belum pernah diketahui terhadap objek tertentu. Hal ini bisa dicapai melalui proses berpikir interaktif yang dimulai dari studi teoritik menuju studi empirik dan atau sebaliknya dari studi empirik menuju studi teoritik secara berulang-ulang. Proses berpikir interaktif ini dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan diarahkan untuk mencapai kemajuan. Hasil dari proses berpikir interaktif ini adalah menemukan objek tertentu yang menarik perhatian dan akhirnya menemukan sesuatu hal yang dipertanyakan. Dalam studi ini terdapat dua belas hal yang dipertanyakan. Sembilan diantaranya menjadi hipotesis penelitian dan tiga lainnya tidak menjadi hipotesis penelitian.

Berdasarkan kajian teoritik (deduktif) dan kajian empirik (induktif) serta sintesis dari kedua kajian tersebut, dapatlah disusun suatu rumusan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dalam hipotesis terkandung logika ilmiah yang merupakan gabungan logika deduktif dan induktif yang menjelaskan sifat hubungan sebab akibat variabel-variabel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi desain rancangan penelitian, penentuan populasi, variabel penelitian dan cara pengukurannya. Data yang dikumpulkan diolah dan diuji secara statistik. Intisari pembahasan terhadap analisis hasil studi menjelma menjadi konsep disertasi. Konsep disertasi memuat temuan-temuan penting yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan perumusan kebijakan.

Mengenai variabel apa saja dan bagaimana sifat hubungan antar variabel yang diuji dapatlah dilihat pada kerangka konseptual pada Gambar 3.2 halaman 106. Kerangka konseptual Gambar 3.2 menggambarkan model penelitian dengan pendekatan sistem yang mengintegrasikan analisis regresi, komponen utama, analisis jalur dan model struktural sebagaimana di dalam teknik analisis *Partial Least Square-Path Modeling* (PLS-PM).

Dalam sistem model pada Gambar 3.2 halaman 33, terdapat lima variabel laten (struktural) yang terdiri dari dua variabel eksogen (independen), dua variabel endogen (*intervening*) dan satu variabel endogen (dependen). Variabel eksogen yang dimaksud adalah variabel pertumbuhan sub-sektor pariwisata (X_1) dan variabel pertumbuhan sektor pertanian (X_2).



Keterangan :

: Variabel Laten **→** : Pengaruh
 : Indikator **- - - - ->** : Dimensi Pengukur

- $X_{1.1}$ = Laju Pertumbuhan PDRB Sub-sektor Pariwisata
- $X_{1.2}$ = Kontribusi PDRB Sub-sektor Pariwisata
- $X_{2.1}$ = Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
- $X_{2.2}$ = Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
- $Y_{1.1}$ = Elastisitas Kesempatan Kerja Pariwisata
- $Y_{1.2}$ = Elastisitas Kesempatan Kerja Pertanian
- $Y_{2.1}$ = Gini-ratio Perkotaan
- $Y_{2.2}$ = Gini-ratio Pedesaan
- $Y_{3.1}$ = Indeks Pembangunan Manusia
- $Y_{3.2}$ = Indeks Kriminalitas Daerah

Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam studi ini, variabel pertumbuhan sub-sektor pariwisata dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu laju pertumbuhan nilai tambah ($X_{1.1}$) dan kontribusi nilai tambah sub-sektor pariwisata terhadap total PDRB ($X_{1.2}$). Variabel pertumbuhan sektor pertanian (X_2) dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu laju pertumbuhan nilai tambah ($X_{2.1}$) dan kontribusi nilai

tambah sektor pertanian terhadap total PDRB ($X_{2.2}$). Kedua indikator ini mencerminkan kesempatan-kesempatan untuk berkembang, tingkat penggunaan sumber daya tersedia dan kemampuan suatu sektor ekonomi menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Variabel endogen (dependen) dalam model penelitian ini adalah variabel kesejahteraan masyarakat (Y_3). Kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung karena substansinya luas dan kompleks. Dalam studi ini, variabel kesejahteraan dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia ($Y_{3.1}$) dan Indeks Kriminalitas Daerah ($Y_{3.2}$). Kedua indikator ini mencerminkan substansi kesejahteraan masyarakat selain bersumber pada aspek sosial ekonomi juga bersumber pada aspek spiritual. Dengan kata lain, masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memunyai taraf hidup yang baik, taat hukum, melaksanakan apa yang diharuskan dan tidak melaksanakan apa yang menjadi larangan ajaran agamanya.

Dalam model penelitian ini juga terdapat variabel *intervening* yang menghubungkan variabel eksogen dan endogen. Variabel *intervening* yang dimaksud adalah variabel elastisitas kesempatan kerja sektoral (Y_1) dan variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2). Kesempatan kerja sektoral tidak dapat diukur secara langsung karena lowongan kerja yang tersedia tidak selalu dipublikasikan. Kesempatan kerja dapat diproksi melalui penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tertentu. Variabel elastisitas kesempatan kerja sektoral (Y_1) dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu elastisitas penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata ($Y_{1.1}$) dan elastisitas

penyerapan tenaga kerja sektor pertanian ($Y_{1.2}$). Kedua indikator ini mencerminkan kemampuan dari pertumbuhan ekonomi yang tercipta untuk memberikan tambahan lapangan kerja baru.

Demikian pula, ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak dapat diukur secara langsung karena sumber dan macamnya sangat beragam. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diproksi melalui variasi-variasi dalam pola pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam studi ini, variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) dibentuk berdasarkan dua indikator, yaitu *gini-ratio* perkotaan ($Y_{2.1}$) dan *gini-ratio* pedesaan ($Y_{2.2}$). Kedua indikator ini mencerminkan indeks ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan dalam masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan.

Dengan dimasukkannya *variabel intervening* dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengaruh tidak langsung melalui perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral dan ketimpangan distribusi pendapatan. Di samping itu, terdapat pengaruh langsung elastisitas kesempatan kerja sektoral terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta pengaruh langsung ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Kenaikan tingkat penyerapan tenaga kerja terjadi seiring dengan meningkatnya *output* yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi. Di negara-negara berkembang

sebagian besar masyarakatnya masih melakukan kegiatan di sektor pertanian. Akibat jumlah penduduk yang terus bertambah, sektor tersebut mempunyai kelebihan tenaga kerja dan terdapat pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*) yang serius. Keadaan ini memberi peluang berkembangnya sektor pariwisata. Kegiatan pariwisata membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi berneka ragam jasa yang dibutuhkan untuk melayani wisatawan. Karena tingginya upah yang ditawarkan terjadinya mobilisasi tenaga kerja di sektor pertanian menuju sektor pariwisata.

Mobilisasi tenaga kerja ini menguntungkan kedua sektor dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tercipta. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin banyak *output* barang dan jasa yang dihasilkan dan berpengaruh pada tingkat penyerapan tenaga kerja. Karena elastisitas kesempatan kerja sektoral adalah rasio pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan *output* sektor tertentu. Berdasarkan hal ini terdapat pengaruh pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan pertanian terhadap elastisitas kesempatan kerja.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dengan semakin berkembangnya kegiatan pariwisata yang didukung oleh pula oleh perkembangan di sektor pertanian pendapatan total ekonomi juga meningkat. Pendapatan ini akan terdistribusi ke dalam masyarakat sebagai balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi. Perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan produktivitas berpengaruh pada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Distribusi pendapatan dikatakan timpang

bila sebagian kecil golongan masyarakat menikmati bagian yang besar dari total pendapatan ekonomi.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin berkembangnya kegiatan pariwisata yang didukung oleh perkembangan di sektor pertanian yang maju laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan melampaui tingkat pertambahan penduduk. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh pada meningkatnya pendapatan per kapita secara terus menerus. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membiayai konsumsi, pendidikan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memperoleh jaminan kesehatan yang semakin baik. Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik mempunyai andil dalam perbaikan taraf dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja yang tinggi mencerminkan terbukanya kesempatan yang luas bagi para pekerja untuk berpindah dari sektor tertentu menuju sektor lain yang produktivitasnya lebih tinggi dengan harapan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Perpindahan ini menarik masuknya pekerja baru sehingga semakin banyak anggota keluarga yang mempunyai pendapatan. Hal ini berpengaruh pada di satu sisi pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan dan sisi lainnya terhadap taraf kesejahteraan keluarga.

Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan. Pengurangan tingkat kemiskinan dapat terjadi jika surplus pendapatan yang diterima oleh golongan berpendapatan tinggi dipergunakan untuk kegiatan investasi. Investasi berpengaruh pada penciptaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi produsen-produsen kecil. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberdayakan potensi masyarakat secara lebih merata.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka proses berpikir serta kerangka konseptual maka disusun rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali
2. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali
3. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali
4. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali
5. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali

6. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali
7. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali
8. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali
9. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Untuk rumusan masalah nomor sepuluh (10) sampai dengan nomor dua belas (12) tidak dihipotesiskan karena menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

BAB 4

METODE PENELITIAN

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dapat diartikan rencana tentang bagaimana cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk memberi arti terhadap data secara efisien dan efektif. Rancangan penelitian meliputi tahapan penentuan alat (*instrument*), pengambilan data yang digunakan, cara pengumpulan data dan teknik analisis yang akan digunakan serta pemberian kesempatan atas kemungkinan hasil-hasil analisis yang dilakukan.

Penelitian ini berbasis pada penelitian *eksplanatory*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian terhadap elastisitas kesempatan kerja, ketimpangan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari tujuan penelitian maupun obyek yang menjadi fokus penelitian maka penelitian ini dilaksanakan terhadap obyek, dokumen-dokumen, maupun nara sumber yang diamati dengan melakukan sensus untuk mendapatkan data wilayah maupun data semua variabel penelitian di semua kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data sekunder yang dikumpulkan adalah data yang telah diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, data disusun dalam bentuk data panel.

Adapun pertimbangan yang mendasari pemilihan rancangan semacam ini adalah agar informasi yang terkandung pada data yang telah disediakan dan dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah dapat dimanfaatkan ataupun dieksplorasi secara lebih maksimal baik bagi pengembangan ilmu

maupun kebijakan. Vinzi *et al.* (2007:24) menyebut rancangan penelitian semacam ini dengan istilah *causal-predictive analysis*

Penelitian ini dilengkapi dengan metode penelitian kualitatif, yaitu penjelasan secara deskriptif yang memandang interaksi sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian dalam proses pembangunan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. Menurut Sugiyono (2009:13), analisis kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada proses dan makna.

Ditinjau dari tujuan penelitian dan maupun objek yang menjadi fokus, maka analisis kualitatif dalam studi ini dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen antara lain *Bali Tourism Study* yang disusun oleh SCETO (1971), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bali (2005) yang disusun oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan *Bali Tourism Satelite Account* (2007) yang disusun oleh Departemen Budaya dan Pariwisata. Hasil analisis ini berupa penjelasan deskriptif tentang peran sub-sektor pariwisata dalam perkembangan sektor pertanian, peran sub-sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi dan dampak budaya wisatawan asing terhadap budaya masyarakat setempat di Provinsi Bali.

4.2 Populasi

Sugiyono (2003:55) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan Hasan (2002:58) mendefinisikan bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Berdasarkan ke dua definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang diambil secara lengkap.

Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daerah kabupaten/kota (8 kabupaten dan 1 kota) di Provinsi Bali. Karena tidak menggunakan sampel, penelitian ini merupakan penelitian sensus.

Penggunaan populasi dalam studi ini berdasarkan pertimbangan :

1. adanya variabilitas kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerah.
2. sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu membuktikan pengaruh pertumbuhan pariwisata dan pertanian terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral dan ketimpangan distribusi pendapatan serta kesejahteraan masrakat di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.
3. Jenis dan sumber datanya adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, kabupaten maupun kota yang dipublikasikan.
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4.3 Variabel Penelitian

4.3.1 Klasifikasi variabel

Harch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2003:20) mendefinsikan variabel sebagai atribut dari seseorang atau obyek yang mempunyai variasi

antara satu orang dengan orang lain atau antara satu obyek dengan obyek lain. Variabel tersebut adalah gejala yang merupakan fokus yang ingin diamati, konstruk atau sifat yang dapat memiliki bermacam-macam nilai.

Sesuai dengan kerangka konseptual dalam studi ini konstruk variabel-variabel penelitian diklasifikasikan atas tiga jenis, yaitu variabel eksogen, variabel endogen baik endogen *intervening* maupun endogen dependen. Variabel eksogen adalah variabel pertumbuhan pariwisata dan variabel pertumbuhan pertanian. Variabel endogen *intervening* adalah variabel elastisitas kesempatan kerja sektoral dan variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan variabel endogen dependen adalah variabel kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Definisi Operasional Variabel

4.3.2.1 Pertumbuhan sub-sektor pariwisata

Sub-sektor pariwisata dilihat dari sisi kelembagaan adalah kontribusi unit usaha dan perusahaan yang usahanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Konsumsi wisatawan itu adalah barang dan jasa yang dibeli wisatawan selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Barang dan jasa yang dibutuhkan wisatawan di daerah tujuan wisata antara lain akomodasi hotel, makanan dan minuman, transportasi lokal, atraksi hiburan, museum, cendramata, pemandu wisata dan yang lainnya. Seluruh nilai tambah yang dihasilkan dari usaha ini adalah kontribusi pendapatan dari institusi pariwisata dalam pendapatan ekonomi

regional (PDRB), (Erawan, 2004; Greenwood,1970; William *and* Shaw, 1998; BPS,2000).

Sub-sektor pariwisata dari perspektif *dual economy* dapat dikategorikan sebagai sektor modern. Sektor modern yang ditunjukkan dalam bisnis pariwisata dicirikan oleh usahanya yang umumnya berbadan hukum, mempunyai pembukuan yang teratur dan mengikuti prinsip-prinsip umum akuntansi, manajemen yang mapan, memanfaatkan teknologi dan mengadaptasi teknologi yang tersedia dalam pasar, usahanya ditunjang oleh sarana dan sistem informasi serta jaringan kerja baik nasional maupun global, kegiatan usahanya mengikuti standarisasi pelayanan secara nasional maupun internasional, (Mangiri,2003; Bryden,2003).

Berdasarkan kedua pengertian di atas pertumbuhan sub-sektor pariwisata didefinisikan sebagai meningkatnya peran aktivitas pariwisata dalam perekonomian yang muncul dalam setiap kinerja institusi atau usaha ekonomi yang terlibat langsung memenuhi konsumsi wisatawan di daerah tujuan wisata. Peran sektor pariwisata dapat diketahui melalui laju peningkatan nilai tambah dan persentase kontribusi nilai tambah sektor pariwisata terhadap total pendapatan ekonomi regional (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB). Dalam studi ini, peran sektor pariwisata diproksi melalui sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR).

Adapun rumusan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Laju pertumbuhan nilai tambah sub-sektor pariwisata}_t = \frac{\text{PDRB PHR}_t - \text{PDRB PHR}_{t-1}}{\text{PDRB PHR}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi sub-sektor pariwisata}_t = \frac{\text{PDRB PHR}_t}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

4.3.2.2 Pertumbuhan sektor pertanian

Sektor pertanian dilihat dari sisi kelembagaan adalah kontribusi unit usaha dan perusahaan yang usahanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan yang berkunjung di daerah tujuan wisata. Komoditi-komoditi pangan ini antara lain padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan. Seluruh nilai tambah yang dihasilkan dari usaha ini adalah kontribusi pendapatan dari institusi pertanian dalam pendapatan ekonomi regional (PDRB), (Dorman,2004; Telfer,1996; BPS,2000)

Sub-sektor pertanian dari perspektif *dual economy* dapat dikategorikan sebagai sektor tradisional. Sektor tradisional yang ditunjukkan dalam bisnis pertanian dicirikan oleh usahanya yang umumnya dikelola secara kekeluargaan atau koperasi lokal, berbasis tanah (*land base agricultural*), pasarnya bersifat lokal dan musiman, pengaturan irigasi berbasis budaya lokal ("subak"), pemanfaatan teknologi berdasarkan ketrampilan individu dan kekeluargaan, sangat minim menggunakan teknologi modern dan sistem informasi pasar, (Mangiri,2003;Mubyarto dalam Yoeti,2008).

Berdasarkan kedua pengertian di atas pertumbuhan sektor pertanian didefinisikan sebagai meningkatnya peran aktivitas pertanian dalam perekonomian yang muncul dalam setiap kinerja institusi atau usaha

ekonomi yang terlibat langsung memenuhi konsumsi pangan di daerah tujuan wisata. Peran sektor pertanian dapat diketahui melalui laju peningkatan nilai tambah dan persentase kontribusi nilai tambah sektor pertanian terhadap total pendapatan ekonomi regional (Produk Domestik Regional Bruto, PDRB). Dalam studi ini, peran sektor pertanian diproksi melalui sektor pertanian dalam arti luas. Sebab secara aktual basis-basis pertanian yang ada mencakup sub sektor pertanian berbasis tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Adapun rumusan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Laju pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian}_t = \frac{\text{PDRB Pertanian}_t - \text{PDRB Pertanian}_{t-1}}{\text{PDRB Pertanian}_{t-1}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi sektor pertanian}_t = \frac{\text{PDRB Pertanian}_t}{\text{Total PDRB}_t} \times 100\%$$

4.3.2.3 Elastisitas kesempatan kerja sektoral

Kesempatan kerja secara agregat adalah total jumlah dari orang-orang yang sedang bekerja dikalikan dengan jumlah jam kerja masing-masing pekerja dalam ekonomi selama periode tahun tertentu. Sedangkan, kesempatan kerja sektoral adalah jumlah tenaga kerja yang terserap di setiap perekonomian sektoral dalam periode tahun tertentu. Dalam studi ini, kesempatan kerja sektoral adalah jumlah angkatan kerja yang terserap di sektor pariwisata (PHR) dan di sektor pertanian.

Elastisitas kesempatan kerja menunjukkan gambaran seberapa jauh kepekaan perubahan akan permintaan tenaga kerja terhadap perubahan

akan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya. Koefisien elastisitas dapat dihitung berdasarkan rasio persentase pertumbuhan penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan *output*. Pendekatan sederhana untuk menghitung besaran elastisitas kesempatan kerja adalah sebagai berikut :

$$\epsilon = \frac{\Delta L / L}{\Delta Y / Y} ,$$

Di mana :

$\Delta L / L$ = persentase perubahan penyerapan tenaga kerja

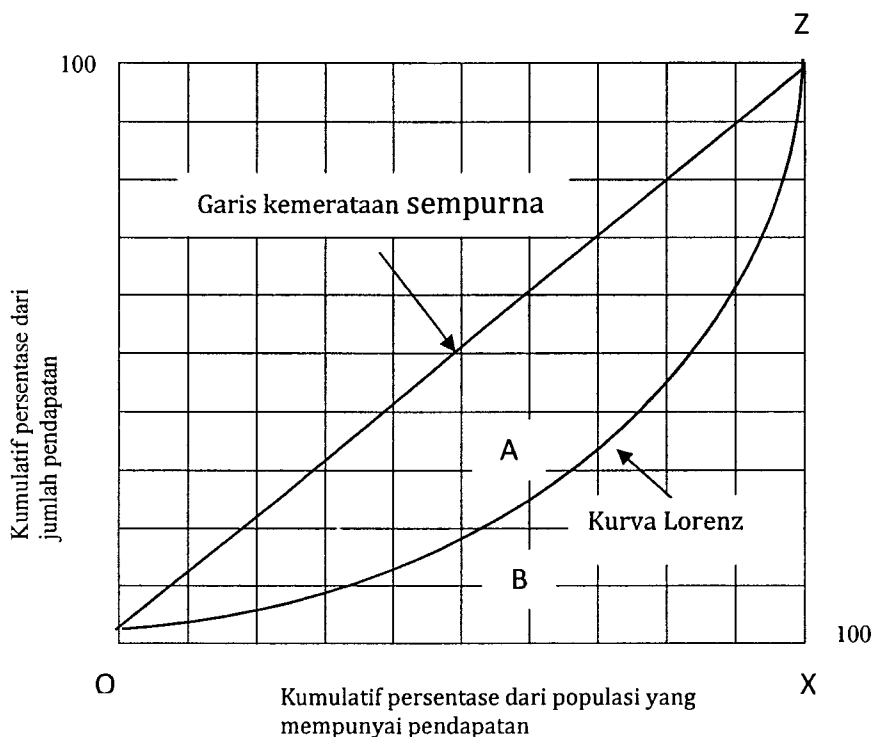
$\Delta Y / Y$ = persentase perubahan *output*.

4.3.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah tingkat ketidakmerataan distribusi antar kelompok pendapatan penduduk. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi, tipologi kependudukan dibedakan atas penduduk di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Dalam studi ini, ketimpangan distribusi pendapatan diukur berdasarkan dua indikator, yaitu *gini-ratio* perkotaan dan *gini-ratio* pedesaan.

Ukuran ketimpangan distribusi pendapatan umumnya dinyatakan dengan *gini-ratio*. Perhitungan *gini-ratio* berbasis pada kurva distribusi Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik. Semakin jauh jarak kurva Lorenz terhadap garis diagonal (kemerataan sempurna), distribusi pendapatan semakin tinggi tidak merata. Contoh kurva Lorenz adalah seperti pada

Gambar 4.1. Dengan menggunakan grafik seperti pada Gambar 4.1, luas daerah segitiga *oxz* adalah penjumlahan luas daerah A dan luas daerah B. Garis *oz* adalah diagonal gini yang menggambarkan pemerataan sempurna.



Gambar 4.1
KURVA LORENZ
(Sumber : Arsyad, 2004: 228)

Secara matematis formula Gini-ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Gini-ratio} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000} \dots\dots\dots (1)$$

yang mana :

P_i = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-*i*

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-*i*

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-*(i-1)*

K = Banyaknya kelompok pendapatan

Nilai Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila *gini-ratio* = 0, berarti pemerataan yang sempurna (setiap orang mendapat porsi pendapatan yang sama dan bila *gini-ratio* = 1, berarti ketidakmerataan yang sempurna (hanya satu orang atau satu kelompok masyarakat menikmati seluruh pendapatan yang ada).

Pola distribusi pendapatan penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu dapat diamati menurut tipe tipologi kependudukan yaitu daerah penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan. Kriteria yang digunakan untuk membedakan kedua tipologi tersebut yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian dan akses pada fasilitas umum. Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit yang nilainya didasarkan pada skor-skor tiga buah variabel tersebut.

Cara perhitungan indikator komposit merujuk pada metode BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk tahunan. Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, skor satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², skor dua bagi desa dengan kepadatan antara 500-1249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan skor 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8500 orang per km². Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1-8, skor satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan skor 8, bila desa mempunyai 5 persen atau

kurang. Skor untuk akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan. Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan pertimbangan mudahnya akses kepada fasilitas perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.

Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau pedesaan. Desa dengan skor gabungan ≤ 9 digolongkan sebagai desa pedesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai ≥ 10 digolongkan sebagai desa perkotaan.

Berdasarkan statistik potensi desa (PODES) tahun 2000, banyaknya desa perkotaan dan pedesaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
BANYAKNYA DESA PERKOTAAN DAN DESA PEDESAAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

No	Kabupaten/Kota	Banyaknya Desa	
		Perkotaan	Pedesaan
1	Jembrana	6	45
2	Tabanan	8	105
3	Badung	6	50
4	Gianyar	5	61
5	Kelungkung	18	41
6	Bangli	3	66
7	Karangasem	2	61
8	Buleleng	24	122
9	Denpasar	35	8
	Provinsi Bali	107	559

Sumber : BPS Provinsi Bali (2000)

4.3.2.5 Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi taraf dan kualitas kehidupan individu-individu dalam suatu masyarakat. Dalam studi ini batasan substansi kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kemanan sosial. Berdasarkan batasan tersebut kinerja kesejahteraan masyarakat diukur berdasarkan dua indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kriminalitas Daerah (IKD).

IPM secara matematis adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks hidup layak. Indeks harapan hidup dan pendidikan memungkinkan diperbandingkan baik tingkat nasional (provinsi dan kabupaten/kota) maupun internasional. Hal ini karena nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen tersebut mengikuti batasan yang ditetapkan UNDP. Sedangkan untuk konsumsi riil per kapita hanya mungkin diperbandingkan antar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Adapun batasan nilai komponen IPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
NILAI MAKSIMUM DAN MINIMUM KOMPONEN IPM

Komponen	Satuan	Sasaran ideal	Nilai minimum	Target pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
Angka harapan hidup	Tahun	85	25	60
Angka melek huruf	(%)	100	0	100
Rata-rata lama sekolah	Tahun	15	0	15
Konsumsi riil per kapita				
1996	Rp	732.720	300.000	432.720
2002	Rp	1.332.720	900.000	432.720

Sumber : BPS Provinsi Bali (2007)

Penyusunan indeks untuk setiap komponen IPM dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan umum :

Indeks X_i = Pencapaian selama satu periode/Target pencapaian, atau

Indeks X_i = (X_i hasil pengukuran - Nilai X_i minimum)/Target pencapaian

Berdasarkan persamaan diatas, maka persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut :

$$IPM = (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) / 3$$

Di mana :

X_1 = indeks harapan hidup

X_2 = indeks pengetahuan (2/3 indeks melek huruf + 1/3 indeks lama sekolah)

X_3 = indeks hidup layak

Secara koseptual angka harapan hidup (AHH) diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hidupnya. Hal ini bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berkaitan dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis secara langsung bisa memperpanjang usia hidup seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk.

Karena AHH dipakai sebagai dasar untuk menghitung indeks kesehatan yang dianggap dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan masyarakat telah menggunakan sumber daya masyarakat untuk memajukan kesehatan maka ditetapkan angka minimal dan maksimal. Angka minimal berdasarkan standar UNDP sebesar 25 tahun. Dengan angka ini seseorang diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 25 tahun meskipun dengan

fasilitas kesehatan yang minimal. Sedangkan angka maksimal harapan hidup 85 tahun diartikan jumlah umur tertinggi yang masih mempunyai makna bagi seseorang dalam menikmati sisa hidupnya.

Indeks Pengetahuan diwakili oleh sektor pendidikan dan merupakan salah satu komponen yang mengindikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup suatu masyarakat pada suatu daerah sehingga tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Indeks pengetahuan diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Angka minimal untuk angka melek huruf adalah 0 (nol), artinya penduduk tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Sebaliknya bila masyarakat dengan mudah mengakses pendidikan, maka angka maksimal untuk angka melek huruf adalah 100. Dari kedua nilai tersebut maka target pencapaian adalah $100-0 = 100$. Sedangkan, rata-rata lama sekolah yaitu jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang dalam menempuh pendidikan formal. Angka minimal untuk indikator ini adalah 0 (nol) yang berarti masyarakat tidak atau belum mampu sama sekali menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan. Sebaliknya angka maksimal adalah 15, yang berarti seluruh penduduk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai perguruan tinggi setara Diploma III dan sesuai standar UNDP adalah 15 tahun bersekolah.

Standar hidup layak diartikan sebagai jumlah pengeluaran (uang) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per kapita per tahun.

Konsumsi riil per kapita, yaitu jumlah pengeluaran per kapita yang benar-benar dipakai untuk mengkonsumsi satu paket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan non-makanan. Sesuai dengan standar BPS angka indikator ini adalah minimal Rp. 900.000 dan maksimal Rp 1.332.720 per kapita per tahun.

Perhitungan indikator konsumsi per kapita riil dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Kor (=A)
2. Menyesuaikan nilai A dengan data Susenas Modul (=B)
3. Mendeflasikan nilai B dengan IHK propinsi yang sesuai (=C)
4. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit) dengan merujuk metode *International Comparison Project (ICP)* dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.
5. Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D) agar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi mempunyai harga yang sama antar wilayah.
6. Menyesuaikan nilai D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari D.

Indeks Kriminalitas daerah adalah angka yang mengindikasikan tingkat ketidakamanan daerah yang dihitung berdasarkan banyaknya kasus kriminalitas yang telah terjadi per 1000 penduduk di suatu daerah. Makin besar angka indeks kriminalitas daerah menggambarkan makin tinggi derajat ketidakamanan suatu daerah. Demikian sebaliknya, makin kecil angka

indeks kriminalitas daerah menggambarkan derajat keamanannya makin tinggi. Batasan kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah Polda mencakup kasus penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemerasan, penggelapan dan segala bentuk tindakan kejahatan kriminalitas yang melanggar ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal KUHP.

Formula perhitungan Indeks Kriminalitas, yaitu :

$$IKD = (\text{Jumlah kasus kriminalitas} / \text{jumlah penduduk}) \times 1.000$$

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diteliti. Dalam studi ini basis data yang diperlukan untuk keperluan analisis adalah data sekunder atau data yang tersedia dan atau yang dipublikasikan oleh badan/instansi terkait pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Bali dan Kepolisian Daerah Bali. Karena itu, dalam studi ini tidak menggunakan instrumen khusus dalam rangka pengumpulan data.

4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Bali. Provinsi ini meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Karangasem, Singaraja dan Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan waktu enam (12) bulan dengan rincian lima (5) bulan pengumpulan dan analisis data. Sedangkan penyusunan disertasi menggunakan waktu 7 (tujuh) bulan.

4.6 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sektoral lintas kabupaten/kota dalam runtut waktu (*time series*) selama periode 2000-2006. Penetapan periode waktu analisis ini dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2000 implementasi otonomi daerah dianggap telah berjalan secara efektif. Data ini diperoleh melalui tabel-tabel pokok Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indikator Makroekonomi dan Indikator Pembangunan Provinsi Bali yang dipublikasikan secara resmi oleh Bappeda bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Data kriminalitas dipublikasikan oleh instansi Polda Bali.

Data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk data panel. Keunggulan penyajian data panel di antaranya adalah memperbesar jumlah data, memberikan data yang lebih informatif, bervariasi, memperkecil kolinieritas antar variabel, mempertinggi derajat bebas serta lebih mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi baik dalam data *cross-section* maupun *time-series* (Baltagi, 2002:5-9). Dalam studi ini jumlah objek studi adalah 9 kabupaten/kota, sedangkan jumlah periode adalah 7 tahun. Dengan demikian jumlah secara keseluruhan menjadi 63 unit observasi.

Data pokok dalam studi ini antara lain :

1. Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2000-2006 (BPS Provinsi Bali)

2. Statistik Ketenagakerjaan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2000-2006 (BPS Provinsi Bali)
3. Statistik Pola Konsumsi dan Distribusi Pendapatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2000-2006 (BPS Provinsi Bali)
4. Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2000-2006
5. Statistik Kriminalitas menurut Kabupaten/kota di wilayah Polda Bali periode 2000-2006 (Polda Bali)

Data tambahan :

1. Statistik Indikator Makroekonomi Bali periode 2000-2006
2. Statistik Demografi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Provinsi Bali periode 2000-2006
3. Statistik Pengangguran Provinsi Bali periode 2000-2006
4. Statistik Kemiskinan Provinsi Bali periode 2000-2006

4.7 Teknik Analisis

4.7.1 Konsep Dasar *Partial Least Squares-Path Modeling* (PLS-PM)

Teknik analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dibedakan atas dua macam pendekatan, yaitu pendekatan analisis berbasis *variance* atau disebut dengan *Partial Least Squares-Path Modeling* (PLS-PM) dan pendekatan berbasis *covariance* seperti pada program aplikasi *Amos* dan *LISREL*. Program aplikasi PLS-PM yang digunakan dalam studi ini adalah program aplikasi statistik XLSTAT PL-SM@addinsoft versi 1995-2008 (www.xlstat.com).

PLS-PM merupakan alat analisis yang berguna untuk membangun model statistikal untuk tujuan prediktif dan menguji serangkaian hipotesis hubungan antar variabel laten. Kompetensi utama prosedur PLS-PM adalah penentuan estimasi bobot *Laten Variables* (LVs) secara interatif dari serial regresi OLS yang diterapkan pada setiap blok *Manifest Variables* (MVs). Satu-blok model PLS diestimasi oleh *outward mode* yang secara numerik ekuivalen dengan *first principal component*. Demikian pula, dua-blok model PLS yang keduanya diestimasi oleh *inward mode* adalah ekuivalen dengan analisis korelasi kanonik, dalam hal ini korelasi antara dua LVs setara dengan *first canonical correlation*. Pengembangan prosedur analisis lebih lanjut adalah penerapan *resampling* dalam dua pilihan cara yaitu *bootstrapping* dan *Jackknife*.

Menurut Wold (1988:56), prinsip prosedur estimasi *in-* dan *out-ward mode* dan penerapan *bootstrapping* menjadikan PLS-PM mampu meminimalkan masalah penyimpangan distribusi normal multivariat, multikolinieritas dan heteroskedasitas. Karena itu, PLS-PM memungkinkan menghasilkan model regresi yang bersifat BLUE (*best linier unbiased estimator*) dalam model-model jalur yang kompleks. Implikasinya, nilai prediksi model lebih optimal. Di samping itu, PLS-PM menggunakan metode kuadrat terkecil yang tidak memerlukan persyaratan asumsi ketat tentang distribusi variabel, residual dan parameter. Atas dasar ini Wold menyebut PLS-PM sebagai *soft modeling*.

4.7.2 Spesifikasi model PLS-PM

Model PLS-PM secara formal didefinisikan oleh dua rangkaian persamaan-persamaan linier yang disebut dengan *inner model* dan *outer*

model. Outer dan inner model dapat dihubungkan melalui tiga cara, yaitu (a) refleksif, (b) formatif dan (c) MIMIC (Multiple effect indicator for Multiple Causes). Inner model merepresentasikan hubungan-hubungan antara LVs dan outer model merepresentasikan hubungan-hubungan antara LVs dan indikator-indikatornya. Inner model yang menghubungkan LVs ditulis dengan :

$$\eta = \eta B + \xi \Gamma + \zeta \dots\dots\dots (1)$$

yang mana η melambangkan matrik ($g \times n$) LVs endogenous dan ξ adalah matrik ($h \times n$) dari LVs exogenous, dalam hal ini n adalah jumlah kasus. B dan Γ secara berurutan adalah matrik koefisien ($g \times g$) dan ($g \times h$), dan ζ adalah matrik ($g \times n$) residu inner model.

Asumsi dasar PLS-PM adalah *recursive inner structures*. LVs disusun sedemikian rupa sehingga matrik B triangular yang lebih rendah dengan elemen diagonal nol. Inner model pada pers. (1) terkendala oleh spesifikasi prediktor :

$$E(\eta \eta ; \xi) = \eta B + \xi \Gamma \dots\dots\dots (2)$$

Hal ini berimplikasi $E(\xi \xi') = \mathbf{0}$ dan $E(\eta \zeta') = \zeta \zeta'$, yang mana $\zeta \zeta'$ merupakan matrik diagonal ($g \times g$). Dalam hal ini, model diasumsikan menangkap sistem rantai kausal dengan residu-residu yang tidak berkorelasi. Selain itu, diasumsikan bahwa residu LVs endogenous tidak berkorelasi dengan prediktor LVs yang bersangkutan. Persamaan model *outer* untuk LVs endogenous dinyatakan oleh :

$$y = \Pi_y \eta + \epsilon_y \dots\dots\dots (3)$$

yang mana y melambangkan matrik ($m \times n$) variabel-variabel manifest yang terkait dengan LVs oleh koefisien tertentu ($m \times g$). Matrik Π_y , dan ϵ_y melambangkan matrik asosiasi residu model *outer*. Persamaan serupa mendefinisikan hubungan-hubungan model *outer* untuk LVs eksogenous yang terlibat dalam model.

MVs secara umum diasumsikan dapat dikelompokkan ke dalam blok-blok terpisah, yang masing-masing merepresentasikan LV. Setiap MV hanya dimiliki oleh satu LV. Karena itu masing-masing baris dari Π_y terdiri dari hanya satu elemen bukan nol, sementara elemen baris lainnya disumsikan nol. Dengan mengikuti terminologi analisis faktor, elemen-elemen bukan nol disebut sebagai *loading*. Karena *loading* dan LVs tak dikenal, beberapa standarisasi diperlukan untuk menghindari *scale ambiguity*. Seperti ketentuan umum, seluruh LVs diasumsikan diskalakan ke dalam unit varians, misalnya $\text{VAR}(\eta_g) = 1$. Dengan cara yang sama terhadap model *inner*, spesifikasi prediktor diadopsi untuk model *outer*. Aplikasi pada pers. (3), menghasilkan :

$$E(y^* \eta) = \Pi_y \eta \dots\dots\dots (4)$$

Persamaan ini melibatkan asumsi bahwa residu model *outer* tidak berkorelasi dengan seluruh LVs dan residu model *inner*.

Spesifikasi prediktor diterapkan pada model *inner* dan *outer*. Prinsip mendasar dalam pemodelan PLS-PM adalah asumsi bahwa seluruh informasi antara MVs adalah bermakna dalam LVs. Hal ini memiliki dua implikasi. *Pertama*, model PLS-PM tidak melibatkan hubungan langsung di antara MVs. *Kedua*, residu *outer* dari satu blok diasumsikan tidak berkorelasi dengan

residu *outer* dari blok-blok yang lain. Asumsi sebelumnya bermakna secara formal bahwa *covariance* dari residu model *outer* dapat direpresentasikan oleh matrik diagonal blok dengan elemen-elemen bukan nol berkorespondensi pada kelompok dari MVs kedalam ($g+h$) blok-blok yang terpisah.

Persamaan model inner (1) dapat disubstitusikan pada per. (3).

Hasilnya adalah :

$$\mathbf{y} = \Pi_y (\eta\mathbf{B} + \xi\mathbf{\Gamma}) + \mathbf{v} \dots\dots\dots (5)$$

Residu-residu pada pers. (5) setara dengan $\mathbf{v} = \Pi_y \zeta + \epsilon_y$ dan dengan mengacu pada pers. (2) dan (4), tidak berkorelasi dengan prediktor LVs yang bersangkutan.

4.7.3 Estimasi model

Prosedur estimasi PLS dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama melibatkan estimasi iterasi dari LVs sebagai komposit linier dari MVs yang bersangkutan. Tahap kedua, melibatkan estimasi bukan-iterasi dari koefisien model *inner* dan *outer*. Sebagai contoh, estimasi endogenous LVs dinyatakan dengan :

$$\text{est. } (\eta) = \mathbf{Y} = \mathbf{W}_y \mathbf{y} \dots\dots\dots (6)$$

Yang mana \mathbf{W}_y melambangkan matrik bobot ($g \times k$). Matrik estimasi LVs dinyatakan dengan huruf kapital dan huruf kecil untuk matrik estimasi MVs.

Persamaan (6) mendefinisikan LVs yang diestimasi sebagai komposit linier dari MVs yang bersangkutan. Masing-masing \mathbf{W}_y terdiri dari hanya satu elemen bukan-nol dan bobot terpilih sebagai unit varian LVs yang diestimasi. Estimasi LVs sebagaimana tersebut di atas, pada tahap estimasi

PLS yang kedua digunakan untuk menghitung *loading* dari koefisien model *inner* dengan metode-metode kuadrat terkecil standar. *Loading* dalam arti sederhana didefinisikan sebagai korelasi orde-nol di antara MVs dan LVs yang bersangkutan.

Koefisien model *inner* diestimasi dengan penggunaan prosedur-prosedur analitikal jalur standar. Dalam hal ini, untuk model *inner* rekursif koefisien-koefisien jalur secara berurutan yang menghubungkan LVs didapat melalui regresi *ordinary least square* (OLS) yang diaplikasikan pada masing-masing hubungan model *inner* secara terpisah. Secara umum pendekatan PLS dengan menggabungkan kedua modul dasar ini dimaksudkan agar *powerfull* mengestimasi model jalur yang lebih kompleks dengan melibatkan lebih dari dua LVs.

4.7.4 Evaluasi model

4.7.4.1 Evaluasi Outer Model

Penilaian kualitas outer model dapat dilakukan berdasarkan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *discriminat validity*. *Composite reliability* adalah tingkat kehandalan indikator-indikator dalam suatu blok tertentu mengukur variabel latennya. Dengan kata lain, bersifat unidimensional dalam pengertian sebagai analisis faktor. Terdapat tiga parameter statistik untuk mengukur derajat *compostite realibility*, yaitu (a) nilai *eigen value Principle Component Analysis* (PCA) pada setiap blok indikator, (b) statistik Cronbach'- α , dan (c) statistik Dillon-Goldstein (DG)- ρ .

Berdasarkan statistik *Principle Component Analysis* (PCA), setiap blok indikator dapat dikatakan memiliki *composite realibility* yang baik, jika nilai

eigenvalues Faktor 1 (F1) >1 dan *eigenvalue* F2 bernilai <1, atau sekurang-kurangnya bernilai jauh dibandingkan *eigenvalue* F1. Makin besar selisih nilai *eigenvalue* F1 dan F2, maka besar varian indikator dijelaskan dalam variabel laten bentukannya.

Statistik Cronbach's- α dapat juga dipergunakan untuk menilai sifat unidimensional setiap blok p variabel indikator dalam outer model. Besaran α dapat dihitung dengan formula :

$$\alpha = \frac{\sum_{h \neq h1} Cor(X_h, X_{h1})}{p + \sum Cor(X_h, X_{h1})} \times \frac{p}{p-1}, \text{ untuk data yang telah distandarisasi(7)}$$

$$\alpha = \frac{\sum_{h \neq h1} Cov(X_h, X_{h1})}{Var(\sum X_h)} \times \frac{p}{p-1}, \text{ untuk data asli (raw data)(8)}$$

Dalam hal ini, setiap outer model dikatakan bersifat unidimensional, jika nilai Cronbach's - $\alpha > 0,7$.

Parameter statistik lainnya adalah Dillon-Goldstein (DG)- ρ . Besaran Dillon-Goldstein (DG)- ρ didefinisikan oleh persamaan :

$$\rho = \frac{(\sum_{h=1}^p \pi_h) 2Var(\zeta)}{(\sum_{h=1}^p \pi_h) 2Var(\zeta) + \sum_{h=1}^p Var(\varepsilon_h)}, \text{ (9)}$$

Untuk kasus dimana variabel indikator X_h dan variabel laten ξ yang distandarisasi, perkiraan nilai variabel laten ξ , didapat melalui standarisasi *Principle Component* yang pertama PC(1), yaitu t_1 dari setiap blok indikator. Selanjutnya besaran π_h diestimasi oleh $cor(x_h, t_1)$ dan dengan penggunaan persamaan sebelumnya, $Var(\varepsilon_h)$ diestimasi oleh $1-cor^2(x_h, t_1)$. Dengan

demikian besaran Dillon-Goldstein (DG)- ρ dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\rho = \frac{\left[\sum_{h=1}^p \text{cor}(xh, t1) \right]^2}{\left[\sum_{h=1}^p \text{cor}(xh, t1) \right] + \sum_{h=1}^p [1 - \text{cor}^2(xh, t1)]} \dots\dots\dots (10)$$

Setiap blok dikatakan bersifat unidimensional jika Dillon-Goldstein (DG)- $\rho > 0,7$. Dalam hal ini, Chin (1998:320) menyebutkan bahwa statistik Dillon-Goldstein (DG)- ρ lebih akurat dalam menilai sifat unidimensional dibandingkan dengan statistik Cronbach's $-\alpha$.

Validitas diskriminan (*discriminat validity*) adalah derajat kekuatan setiap indikator berkorelasi dengan variabel laten bentukannya. Dalam analisis PLS-PM, validitas diskriminan ditunjukkan oleh besaran indeks komunalitas dan indeks redundansi. Besaran indeks komunalitas blok indicator-j, didefinsikan sebagai :

$$\text{Commuality-j} = \frac{1}{pj} \sum_{h=1}^p \text{cor}^2(Xjh, Yj) \dots\dots\dots (11)$$

yang mana p , adalah jumlah indikator pada setiap blok. Makin besar nilai indeks komunalitas mengindikasikan validitas diskriminan makin tinggi.

Sedangkan indeks redundansi untuk blok endogenous-j didefinsikan sebagai :

$$\text{Redudancy-j} = \text{Commuality-j} \times R^2\{y_j\} \dots\dots\dots (12)$$

Dalam hal ini, makin kecil nilai indeks redundansi maka validitas diskriminan *outer* model makin tinggi.

4.7.4.2 Evaluasi Inner Model

Evaluasi inner model berkaitan dengan dua hal, yaitu pemeriksaan indeks *goodness-fit of model* (GoF) dan *predictive relevance*. Besaran indeks GoF mencerminkan kesesuaian hubungan-hubungan model *outer* dan *inner* yang diestimasi. Besaran indeks kesesuaian diturunkan dari variasi persamaan model *outer* dan *inner* yang didapat atau diturunkan berdasarkan indeks komunalitas dan redudansi *outer* model. Indeks komunalitas setara dengan kuadrat korelasi di antara MVs dan LVs yang bersangkutan. Menurut Amato *et al.* (2004), rataan geometrik rata-rata indeks komunalitas dan rata-rata R^2 dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk menilai *goodness-fit of model* secara global, (GoF). Rumus untuk menghitung besaran GoF dinyatakan :

$$GoF = \sqrt{Communalities \times R^2} \dots\dots\dots(13)$$

Predictive relevance adalah bagian lain dari evaluasi *inner* model. Indeks *predictive relevance* mencerminkan keakuratan estimasi variabel laten yang diperlakukan variabel dependen oleh variabel laten laten lainnya yang diperlakukan sebagai variabel independen. Wold mengusulkan penggunaan Stone-Geisser Test untuk menguji *predictive relevance* model. Uji ini menghasilkan estimasi jackknife dari residu varian yang diukur melalui Q^2 statistik dan dihitung dengan rumus :

$$Q^2 = 1.0 - \frac{\sum_n (Y_i - \sum_k X_{ki} b_{k(i)})^2}{\sum_n (Y_i - Y_{*(i)})^2} \dots\dots\dots(14)$$

yang mana makin tinggi Q^2 , maka relevansi prediksi model makin tinggi.

4.7.4.3 Uji Signifikansi Koefisien Jalur

Uji signifikansi koefisien jalur dalam model PLS-PM berkaitan dengan pengujian hipotesis. Untuk meningkatkan signifikansi koefisien jalur ditempuh mekanisme *resampling*. Penerapan metode *resampling* memungkinkan data terdistribusi bebas (*distribution free*) sehingga uji statistik t atau uji-t tidak memerlukan asumsi distribusi normal serta tidak memerlukan ukuran sampel yang besar.

Resampling dapat dilakukan dalam dua pilihan cara, yaitu berdasarkan prosedur *jackknife* dan *bootstrapping*. Prosedur Jackknife dilakukan dengan pengurangan sejumlah unit sampel tertentu dari sampel asli (N). Makin besar jumlah penghilangan unit sampel berpotensi mengurangi keteguhan uji statistik-t, dikarenakan oleh jumlah yang sampel yang makin mengecil, Chin (1998:318-320). *Boostrapping* merupakan cara lain untuk memperbaiki signifikansi estimasi parameter melalui pembangkitan sampel menjadi ukuran yang lebih besar dari jumlah sampel aslinya. Disarankan ukuran *bootstrap default* sebesar 100. Bila ukuran *bootstrap* lebih besar 200 akan menghasilkan angka estimasi *standar error* (SE) yang kurang stabil.

Batasan tingkat signifikansi koefisien jalur dalam PLSM-PM dengan Uji- t adalah dengan kriteria $p\text{-value} < 0,05$. Jika koefisien jalur yang menghubungkan dua variabel laten memiliki $p\text{-value} < 0,05$, diputuskan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika $p\text{-value} > 0,05$, diputuskan bahwa hubungan kausalitas antarvariabel tersebut berpengaruh tidak signifikan.

BAB 5

ANALISIS HASIL STUDI

BAB 5 ANALISIS HASIL STUDI

5.1 Kontribusi Pariwisata dan Pertanian dalam Ekonomi Provinsi Bali

5.1.1 Kontribusi dalam Pembentukan *Output*

Berdasarkan data pada Lampiran 2 halaman 260-261, peringkat kontribusi tiga terbesar pembentukan *output* sub-sektor pariwisata pada tingkat ekonomi kabupaten berturut-turut terdapat di kabupaten Badung, Kota Denpasar dan kabupaten Gianyar. Peringkat tiga terbesar pembentukan *output* sektor pertanian berturut-turut terdapat di kabupaten Tabanan, Kelungkung dan Bangli. Rata-rata pembentukan *output* sektor pertanian (27,50%) lebih besar dibandingkan sub-sektor pariwisata (21,25%). Statistik deskriptif kontribusi pembentukan *output* sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian antar kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006 seperti pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
KONTRIBUSI SUB-SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM PEMBENTUKAN *OUTPUT* EKONOMI
PERIODE TAHUN 2000 s.d 2006

Tahun	Pembentukan <i>output</i> (%)	
	Pariwisata	Pertanian
2000	24.62	23.72
2001	24.28	23.52
2002	24.18	20.68
2003	23.82	23.73
2004	23.20	24.78
2005	23.69	23.56
2006	23.65	22.98
Minimum	11.80	7.32
Maximum	35.58	46.18
Rataan	21.25	27.50
STDV	6.44	11.84

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

5.1.2 Kontribusi dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan data pada Lampiran 2 halaman 260-261 peringkat tiga terbesar penyerapan tenaga kerja sub-sektor pariwisata berturut-turut terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Peringkat tiga terbesar penyerapan tenaga kerja sektor pertanian berturut-turut terdapat di Kabupaten Bangli, Karangasem dan Tabanan. Rata-rata penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (37,24%) lebih besar dibandingkan sub-sektor pariwisata (22,18%). Statistik deskriptif kontribusi penyerapan tenaga kerja sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian antar kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006 seperti pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
KONTRIBUSI SUB-SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA
PERIODE TAHUN 2000 s.d 2006

Tahun	Penyerapan tenaga kerja (%)	
	Pariwisata	Pertanian
2000	24.19	32.60
2001	23.10	34.55
2002	24.71	23.22
2003	32.18	36.83
2004	24.29	37.64
2005	22.93	35.05
2006	21.90	35.98
Minimum	9.75	4.27
Maximum	45.20	60.04
Rataan	22.18	37.24
STDV	9.19	16.81

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

5.1.3 Kontribusi dalam Pembentukan PDRB

Berdasarkan data pada Lampiran 2 halaman 260-261, peringkat tiga terbesar pembentukan PDRB sub-sektor pariwisata berturut-turut terdapat

di kabupaten Badung, Kota Denpasar dan kabupaten Gianyar. Peringkat tiga terbesar pembentukan PDRB sektor pertanian berturut-turut terdapat di kabupaten Tabanan, Bangli, dan Karangasem. Rata-rata pembentukan pendapatan sub-sektor pariwisata (27,68%) lebih besar dibandingkan sektor pertanian (26,26%). Statistik deskriptif kontribusi pembentukan PDRB sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian antar kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006 seperti pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
KONTRIBUSI SUB-SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR PERTANIAN
DALAM PEMBENTUKAN PDRB EKONOMI
PERIODE TAHUN 2000 s.d 2006

Tahun	Pembentukan PDRB (%)	
	Pariwisata	Pertanian
2000	31.73	21.68
2001	31.12	22.13
2002	30.18	22.26
2003	30.62	22.28
2004	30.63	22.07
2005	30.84	21.79
2006	30.79	21.54
Minimum	15.60	7.77
Maximum	46.35	40.61
Rataan	27.68	26.26
STDV	8.43	11.05

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

5.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif setiap variabel laten mencakup nilai minimum, maximum, ratahan dan standar deviasi setiap blok indikator refeksif yang merupakan gabungan data *cross section* (kabupaten/kota) dan *time series* periode tahun 2000 s.d 2006 dan membentuk 63 unit observasi.

5.2.1 Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata (X_1) merupakan variabel laten eksogenous yang diukur berdasarkan dua indikator refleksif, yaitu pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, PHR ($X_{1.1}$) dan kontribusi PDRB sektor PHR terhadap total PDRB ($X_{1.2}$). Hasil analisis statistik deskriptif kedua indikator tersebut seperti pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
STATISTIK DESKRIPTIF INDIKATOR PENGUKUR
VARIABEL PERTUMBUHAN SUB-SEKTOR PARIWISATA

Tahun	Pertumbuhan Pariwisata (X_1)	
	Pertumbuhan PDRB ($X_{1.1}$)	Kontribusi PDRB ($X_{1.2}$)
2000	4.37	27.96
2001	3.84	27.92
2002	3.07	27.63
2003	3.36	27.67
2004	4.65	27.63
2005	5.18	27.54
2006	4.57	27.39
Minimum	0.09	15.60
Maximum	7.46	46.35
Rataan	4.15	27.68
STDEV	1.70	8.43

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

Berdasarkan data penelitian Lampiran 3 halaman 262-264 dan hasil analisis pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa baik pertumbuhan maupun kontribusi PDRB sub-sektor pariwisata berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB sub-sektor pariwisata tertinggi (7,46%) terjadi dalam ekonomi kabupaten kelungkung periode 2004 dan terendah (0,09%) terjadi dalam ekonomi kabupaten Tabanan tahun 2003. Sedangkan kontribusi PDRB sub-sektor pariwisata tertinggi (46,35%) terjadi dalam ekonomi kabupaten Badung

tahun 2004 dan terendah (15,60%) terjadi di kabupaten Karangasem tahun 2004.

Rata-rata dan standar deviasi pertumbuhan PDRB sub-sektor pariwisata dalam ekonomi kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2000-2006 sebesar 4,15% per tahun dan 1,70% per tahun. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi kontribusi PDRB sub-sektor pariwisata terhadap total PDRB sebesar 27,68% dan 8,43%.

5.2.2 Pertumbuhan Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian (X_2) merupakan variabel laten eksogenous yang diukur berdasarkan dua indikator refleksif, yaitu pertumbuhan PDRB sektor pertanian ($X_{2.1}$) dan kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB ($X_{2.2}$). Hasil analisis statistik deskriptif kedua indikator tersebut seperti pada Tabel 5.5

Tabel 5.5
STATISTIK DESKRIPTIF INDIKATOR PENGUKUR
VARIABEL PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN

Tahun	Pertumbuhan Pertanian (X_2)	
	Pertumbuhan PDRB ($X_{2.1}$)	Kontribusi PDRB ($X_{2.2}$)
2000	5.30	26.46
2001	3.80	26.20
2002	3.46	26.05
2003	3.68	26.09
2004	4.55	26.02
2005	6.20	26.18
2006	5.12	26.14
Minimum	-1.82	7.77
Maximum	10.70	40.61
Rataan	4.59	26.16
STDEV	2.33	11.05

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

Berdasarkan data penelitian Lampiran 3 halaman 262-264 dan hasil analisis pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa baik pertumbuhan maupun kontribusi PDRB sektor pertanian berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian tertinggi (10,70%) terjadi di kabupaten Badung periode 2005 dan terendah (-1,82%) terjadi di kabupaten Karangasem tahun 2002. Sedangkan kontribusi PDRB sektor pertanian tertinggi (40,61%) terjadi di kabupaten Tabanan tahun 2004 dan terendah (7,77%) terjadi di kotamadya Denpasar tahun 2006.

Rata-rata dan standar deviasi pertumbuhan PDRB sektor pertanian periode 2000-2006 sebesar 4,59% per tahun dan 2,33% per tahun. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi kontribusi PDRB sektor pertanian terhadap total PDRB sebesar 26,16% dan 11,05%.

5.2.3 Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral

Elastisitas kesempatan kerja sektoral (Y_1) merupakan variabel laten endogenous yang diukur berdasarkan dua indikator refleksif, yaitu elastisitas kesempatan kerja pariwisata ($Y_{1.1}$) dan elastisitas kesempatan kerja pertanian ($Y_{1.2}$). Hasil analisis statistik deskriptif kedua indikator tersebut seperti pada Tabel 5.6 halaman 146.

Berdasarkan data penelitian Lampiran 3 halaman 262-264 dan hasil analisis pada Tabel 5.6 menunjukkan bahwa baik elastisitas kesempatan kerja pariwisata maupun pertanian berfluktuasi. Elastisitas kesempatan kerja pariwisata tertinggi (6,95) terjadi di kabupaten Badung periode 2002 dan terendah (-5,66) terjadi di kabupaten Bangli tahun 2001. Sedangkan elastisitas kesempatan kerja pertanian tertinggi (5,94) terjadi di kabupaten

Gianyar tahun 2005 dan terendah (-1,76) terjadi di Kabupaten Tabanan tahun 2001.

Tabel 5.6
STATISTIK DESKRIPTIF INDIKATOR PENGUKUR
ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA SEKTORAL

Tahun	Elastisitas Kesempatan Kerja (Y_1)	
	Pariwisata ($Y_{1.1}$)	Pertanian ($Y_{1.2}$)
2000	0.21	0.23
2001	-0.61	0.26
2002	2.38	0.22
2003	0.17	0.17
2004	1.14	-0.02
2005	0.24	1.40
2006	0.23	0.03
Minimum	-5.66	-1.76
Maximum	6.95	5.94
Rataan	0.54	0.33
STDEV	1.75	1.40

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

Rata-rata dan standar deviasi elastisitas kesempatan kerja pariwisata periode 2000-2006 berturut-turut sebesar 0,54 dan 1,75. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi elastisitas kesempatan kerja pertanian berturut-turut sebesar 0,33 dan 1,40.

5.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan (Y_2) merupakan variabel laten endogenous yang diukur berdasarkan dua indikator refleksif, yaitu *gini-ratio* perkotaan ($Y_{2.1}$) dan *gini-ratio* pedesaan ($Y_{2.2}$). Hasil analisis statistik deskriptif kedua indikator tersebut seperti pada Tabel 5.7 halaman 147.

Berdasarkan data penelitian Lampiran 3 halaman 262-264 dan hasil analisis pada Tabel 5.7 menunjukkan bahwa baik *gini-ratio* perkotaan

maupun pedesaan berfluktuasi. *Gini-ratio* perkotaan tertinggi (0,4052) terjadi di kabupaten Gianyar periode 2001 dan terendah (0,1726) terjadi di kabupaten Jembrana tahun 2000. Sedangkan *gini-ratio* pedesaan tertinggi (0,2298) terjadi di kabupaten Gianyar tahun 2001 dan terendah (0,1376) terjadi di kabupaten Jembrana tahun 2000.

Tabel 5.7
STATISTIK DESKRIPTIF INDIKATOR PENGUKUR
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Tahun	Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Y_2)	
	<i>gini-ratio</i> perkotaan ($Y_{2.1}$)	<i>gini-ratio</i> pedesaan ($Y_{2.2}$)
2000	0.2513	0.1726
2001	0.2899	0.1877
2002	0.2941	0.1930
2003	0.2713	0.1832
2004	0.2703	0.1827
2005	0.3314	0.2060
2006	0.3148	0.1970
Minimum	0.1726	0.1376
Maximum	0.4052	0.2298
Rataan	0.2890	0.1889
STDEV	0.0477	0.0200

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

Rata-rata dan standar deviasi *gini-ratio* perkotaan periode 2000 s.d 2006 sebesar 0,2890 dan 0,0477. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi *gini-ratio* pedesaan sebesar 0,1889 dan 0,0200.

5.2.5 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat (Y_3) merupakan variabel laten endogenous yang diukur berdasarkan dua indikator refleksif, yaitu Indeks Pembangunan

Manusia, IPM ($Y_{3.1}$) dan Indeks Kriminalitas Daerah, IKD ($Y_{3.2}$). Hasil analisis statistik deskriptif kedua indikator tersebut seperti pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8
STATISTIK DESKRIPTIF INDIKATOR PENGUKUR
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tahun	Kesejahteraan Masyarakat (Y_3)	
	IPM ($Y_{3.1}$)	IKD ($Y_{3.2}$)
2000	68.52	1.33
2001	65.20	1.36
2002	67.39	1.17
2003	68.29	1.12
2004	69.03	0.78
2005	69.90	1.36
2006	70.41	1.46
Minimum	57.50	0.15
Maximum	75.70	5.04
Rataan	68.39	1.23
STDEV	4.03	1.19

Sumber : Data empirik, disusun dan diolah kembali

Berdasarkan data penelitian Lampiran 3 halaman 262-264 dan hasil analisis pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa baik IPM maupun IKD berfluktuasi. IPM tertinggi (75,70) terjadi di kota Denpasar periode 2006 dan terendah (57,50) di Kabupaten Karangasem tahun 2001. Sedangkan IKD tertinggi (5,04) terjadi di Kota Denpasar tahun 2006 dan terendah (0,15) di Kabupaten Badung 2004.

Rata-rata dan standar deviasi IPM periode 2000-2006 sebesar 68,39 dan 4,03. Sedangkan rata-rata dan standar deviasi IKD berturut-turut sebesar 1,23 dan 1,19.

5.3 Evaluasi SEM Pendekatan *Partial Least Square-Path Modeling*

5.3.1 Evaluasi Outer Model

Evaluasi terhadap model pengukuran atau *outer* model didasarkan pada kriteria *composite reliability* dan *discriminat validity*. Aplikasi software XL-STAT menghasilkan statistik *composite reliability* ditunjukkan oleh besaran Cronbach's α dan atau D.G-rho (PCA) seperti pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
COMPOSITE RELIABILITY

Variabel Laten	Dimensi Pengukur	Cronbach's- α	D.G.- ρ (PCA)	Critical Value	Eigenvalues
X ₁	2	0.708	0.676	3.543	F1= 5.868 F2= 1.218
X ₂	2	0.390	0.512	3.969	F1= 6.651 F2= 1.256
Y ₁	2	0.581	0.797	2.256	F1= 1.369 F2= 0.144
Y ₂	2	0.828	0.998	9.301	F1= 2.003 F2= 0.000
Y ₃	2	0.321	0.742	8.820	F1= 16.412 F2= 1.227
<i>Goodness of fit index (GoF), raw data = 0.954</i> <i>Goodness of fit index (GoF), bootstrap = 0.954</i>					

Sumber : Hasil proses dari program PLS

Tabel 5.9, menunjukkan bahwa jika diamati berdasarkan nilai statistik Cronbach's- α , *composite realibility* variabel laten Y₂ paling baik dibandingkan variabel laten lainnya. *Composite realibility* Y₃ dan X₂ tidak memenuhi harapan, karena nilainya <0,7. Sedangkan berdasarkan statistik Dillon-Goldstein's- ρ , *composite realibility* variabel X₁ dan X₂ tidak memenuhi harapan dikarenakan nilainya <0,7. *Composite realibility* yang terbaik adalah untuk variabel Y₂ dengan nilai yang terbesar (DG- ρ =0,998). Berdasarkan statistik eigenvalues-PCA *composite realibility* seluruh variabel laten memenuhi harapan dikarenakan nilai eigenvalue F₁>1 dan perbedaan dengan nilai egienvalue F₂ cukup jauh. Hal ini mengindikasikan sebagian besar varian dalam indikator telah terekstrak dalam blok indikator. *Composite*

reability variabel laten Y_2 terbaik dibandingkan variabel lainnya dikarenakan dapat memenuhi persyaratan statistik Cronbach's- α , Dillon-Goldstein's- ρ dan Eigenvalue PCA(1).

Goodness of fit index (GoF) dari keseluruhan *outer* model sebesar 0,954. Dalam hal ini, penerapan *resampling* tidak mempengaruhi indeks kesesuaian model. Hal ini terlihat pada nilai GoF-bootsrap yang sama besarnya dengan kondisi data asli, yaitu 0,954. Dengan besaran (GoF) yang hampir mendekati nilai 1,00, diartikan bahwa setiap blok indikator telah sesuai mengukur variabel laten bentukannya. Hal ini mengindikasikan bahwa prosedur *principal component analysis* (PCA) telah menghasilkan kondisi di mana setiap blok indikator bersifat unidimensional sehingga blok-blok indikator telah memenuhi persyaratan *composite reliability*, (Chin, 1998:320; Tenenhaus and Vinzi, 2004:145).

Discriminant validity dinilai berdasarkan besaran *cross loading* indikator terhadap variabel laten dan rata-rata varian yang terekstrak kedalam variabel laten (*Average Variance Extracted*, AVE). Hal ini ditunjukkan pada Tabel 5.10. Tabel 5.10 halaman 151, menunjukkan bahwa besaran *loading* setiap item indikator yang mengukur variabel laten bersangkutan lebih besar 0,5. Koefisien *loading* $\geq 0,5$ menunjukkan bahwa setiap blok indikator telah memenuhi kriteria *discriminat validity*, Vinzi et al. (2007:145). Hal ini berarti masing-masing variabel laten memprediksi ukuran pada blok indikator mereka lebih baik daripada blok indikator lainnya. Selain itu, validitas diskriminan juga dapat dinilai berdasarkan besaran *square root of average variance extracted* (AVE) dari setiap variabel

laten. Pada Tabel 5.10, terlihat bahwa setiap variabel laten memiliki nilai $AVE \geq 0,5$. Hal ini berarti setiap blok indikator valid mengukur variabel latennya, Fornell dan Larcker dalam Gozhali (2007:25).

Tabel 5.10
DISCRIMINANT VALIDITY

Indikator	Variabel Laten				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
X _{1.1}	0.991	0.045	-0.074	-0.209	0.038
X _{1.2}	0.593	-0.133	-0.019	0.022	0.185
X _{2.1}	0.105	0.897	-0.303	0.134	0.312
X _{2.1}	-0.049	0.928	-0.288	0.531	0.521
Y _{1.1}	-0.027	-0.241	0.620	-0.080	-0.074
Y _{1.1}	-0.075	-0.275	0.916	0.009	-0.038
Y _{2.1}	-0.192	0.388	-0.026	1.000	0.435
Y _{2.1}	-0.194	0.347	-0.021	0.990	0.423
Y _{3.1}	0.063	0.465	-0.057	0.425	0.999
Y _{3.1}	0.016	0.192	-0.103	0.323	0.598
(AVE)	0.613	0.832	0.612	0.990	0.578

Sumber : Hasil proses dari program PLS

5.3.2 Estimasi Bobot Outer Model

Setelah memenuhi kriteria *composite reliability* dan *discriminant validity* tahap analisis dilanjutkan untuk mengestimasi bobot *outer* model. Hasil estimasi bobot *outer* model setiap variabel laten seperti pada Tabel 5.11. Tabel 5.11 halaman 152, menunjukkan bahwa besaran bobot seluruh indikator dalam studi ini signifikan pada $p\text{-value } 0,05$. Hal ini ditunjukkan oleh nilai critical ratio (CR) yang lebih besar dari 1,96 (t-tabel). Tingkat kontribusi pengaruh variabel laten terhadap masing-masing indikator dalam blok indikator pengukurnya bervariasi satu sama lainnya yang tercermin dalam perbedaan besaran angka bobot *outer* model.

Tabel 5.11
ESTIMASI BOBOT OUTER MODEL

Variabel Laten	Indikator	Bobot outer	Bobot outer (normalisasi)	Critical ratio (CR)
X ₁	X _{1.1}	0.014	0.103	7.497
	X _{1.2}	0.118	0.897	1.998
X ₂	X _{2.1}	0.015	0.143	3.441
	X _{2.1}	0.090	0.857	3.536
Y ₁	Y _{1.1}	0.535	0.714	2.151
	Y _{1.1}	0.214	0.286	2.544
Y ₂	Y _{2.1}	17.998	0.715	12.033
	Y _{2.1}	7.175	0.285	11.179
Y ₃	Y _{3.1}	0.244	0.859	10.093
	Y _{3.1}	0.040	0.141	2.002

Sumber : Hasil proses dari program PLS

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi *composite reliability*, *discriminant validity* dan uji estimasi bobot dapat disimpulkan bahwa data yang dipergunakan dalam studi ini dapat menghasilkan *outer model* yang memenuhi persyaratan kriteria statistik sebagaimana dianjurkan teori PLS-PM.

5.3.3 Evaluasi Inner Model

Evaluasi *inner model* mencakup uji signifikansi koefisien parameter jalur dan *predictive relevance*. Dalam menilai *inner model* dimulai dengan melihat R^2 untuk setiap kasus untuk menilai apakah variabel laten independen tertentu mempunyai pengaruh yang substansif terhadap variabel laten dependen. Evaluasi diawali dari *inner model* Y₁ dan tahap berikutnya untuk Y₂ serta Y₃. Hasil analisis seperti pada Tabel 5.12, 5.13 dan 5.14 halaman 153 s.d 154.

Tabel 5.12
EVALUASI INNER MODEL VARIABEL DEPENDEN Y₁

Variabel prediktor	Koefisien Jalur	Standard error	t-hit	P-value	Keterangan
X ₁	0.082	0.031	2.636	0.011	signifikan
X ₂	0.020	0.007	2.528	0.040	signifikan
Persamaan model :					
$Y_1 = 0.082 \cdot X_1 + 0.020 \cdot X_2$ ($R^2 = 0.108$; $f^2 = 0.12$)					
Dampak dan kontribusi variabel prediktor terhadap Y ₁					
	X ₁	X ₂			
Koefisien jalur	0.082	0.020			
Korelasi*koefisien jalur	0.090	0.017			
Kontribusi terhadap R ² (%)	83.72	16.28			
Kumulatif (%)	83.72	100.00			

Sumber : Hasil proses dari program PLS

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa variabel X₁ dan X₂ berpengaruh positif signifikan terhadap Y₁ ($P\text{-value} < 0,05$). Persentase kontribusi pengaruh X₁ terhadap Y₁ sebesar 83,72% dan X₂ terhadap Y₁ sebesar 16,28%. Total varian yang dijelaskan dalam *inner* model sebesar 10,8% ($R^2 = 0.108$) dengan koefisien predictive relevance, $f^2 = 0,12$. f^2 *inner* model dependen Y₁ $< 0,15$ menunjukkan bahwa variabel prediktor X₁ dan X₂ secara substansif memiliki pengaruh kecil pada level struktural, Gozhali (2007:26).

Tabel 5.13 halaman 154, menunjukkan bahwa variabel X₁, X₂ dan Y₁ berpengaruh negatif signifikan terhadap Y₂ ($P\text{-value} < 0,05$). Total varian yang dijelaskan dalam *inner* model sebesar 32,5 persen dengan dengan koefisien predictive relevance, $f^2 = 0,21$. f^2 *inner* model dependen Y₂ $> 0,15$ menunjukkan bahwa variabel prediktor X₁, X₂ dan Y₁ secara substansif memiliki pengaruh besar pada level struktural, Gozhali (2007:26).

Tabel 5.13
EVALUASI INNER MODEL VARIABEL DEPENDEN Y₂

Variabel prediktor	Koefisien Jalur	Standard error	t-hit	P-value	Keterangan
X ₁	-0.141	0.041	-3.390	0.000	signifikan
X ₂	-0.693	0.322	-2.153	0.010	signifikan
Y ₁	-0.062	0.031	-2.029	0.044	signifikan
Persamaan model :					
$Y_2 = -0.141 \cdot X_1 - 0.693 \cdot X_2 - 0.062 \cdot Y_1$ ($R^2 = 0.325$; $f^2 = 0.21$)					
Dampak dan kontribusi variabel prediktor terhadap Y ₂					
	X ₁	X ₂	Y ₁		
Koefisien jalur	-0.141	-0.693	-0.062		
Korelasi*koefisien jalur	0.118	0.628	0.039		
Kontribusi terhadap R ² (%)	16.65	74.21	9.14		
Kumulatif (%)	16.65	90.86	100.00		

Sumber : Hasil proses dari program PLS

Tabel 5.14
EVALUASI INNER MODEL VARIABEL DEPENDEN Y₃

Variabel prediktor	Koefisien Jalur	Standard error	t-hit	P-value	Keterangan
X ₁	0.453	0.157	2.892	0.017	signifikan
X ₂	0.012	0.006	2.079	0.038	signifikan
Y ₁	0.071	0.036	1.986	0.049	signifikan
Y ₂	0.230	0.087	2.634	0.011	signifikan
Persamaan model :					
$Y_3 = 0.453 \cdot X_1 + 0.012 \cdot X_2 + 0.071 \cdot Y_1 + 0.230 \cdot Y_2$ ($R^2 = 0.353$; $f^2 = 0.25$)					
Dampak dan kontribusi variabel prediktor terhadap Y ₃					
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	
Koefisien jalur	0.453	0.012	0.071	0.230	
Korelasi*koefisien jalur	0.421	0.004	0.065	0.187	
Kontribusi terhadap R ² (%)	64.41	4.97	6.98	23.64	
Kumulatif (%)	64.41	69.38	76.36	100.00	

Sumber : Hasil proses dari program PLS

Sedangkan, Tabel 5.14, menunjukkan bahwa X₁, X₂, Y₁ dan Y₂ berpengaruh positif signifikan terhadap Y₃ ($P\text{-value} < 0,05$). Persentase kontribusi pengaruh X₁, X₂, Y₁ dan Y₂ terhadap Y₃ berturut-turut sebesar

64,41; 4,97; 6,98 dan 23,64 persen. Total varian yang dijelaskan dalam inner model sebesar 35,3 persen.

Nilai Q-square *predictive relevance* dari inner model dependen Y_3 dapat dihitung dengan formula :

$$\begin{aligned} \text{Q-square} &= 1 - (1-R^2_1)(1-R^2_2)(1-R^2_3) \\ &= 1 - (1 - 0,108)(1 - 0,325)(1 - 0,353) \\ &= 0,6104 \end{aligned}$$

Nilai Q-square 0,6104 menunjukkan bahwa inner model dalam studi ini mempunyai nilai *predictive relevance* karena nilainya lebih besar 0 (nol). Total varian yang dapat dijelaskan dalam model sebesar 61,04 persen. Residu varian sebesar 38,96 persen mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain diluar model yang memiliki kontribusi pengaruh terhadap Y_3 (Gozhali, 2007:26).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketiga inner model tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan PLS yang didasarkan pada pergeseran analisis dari pengukuran estimasi parameter model dapat dipergunakan menjadi pengukuran prediksi yang relevan. Ini artinya, persamaan struktural yang dibentuk mempunyai akurasi prediksi yang valid.

5.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

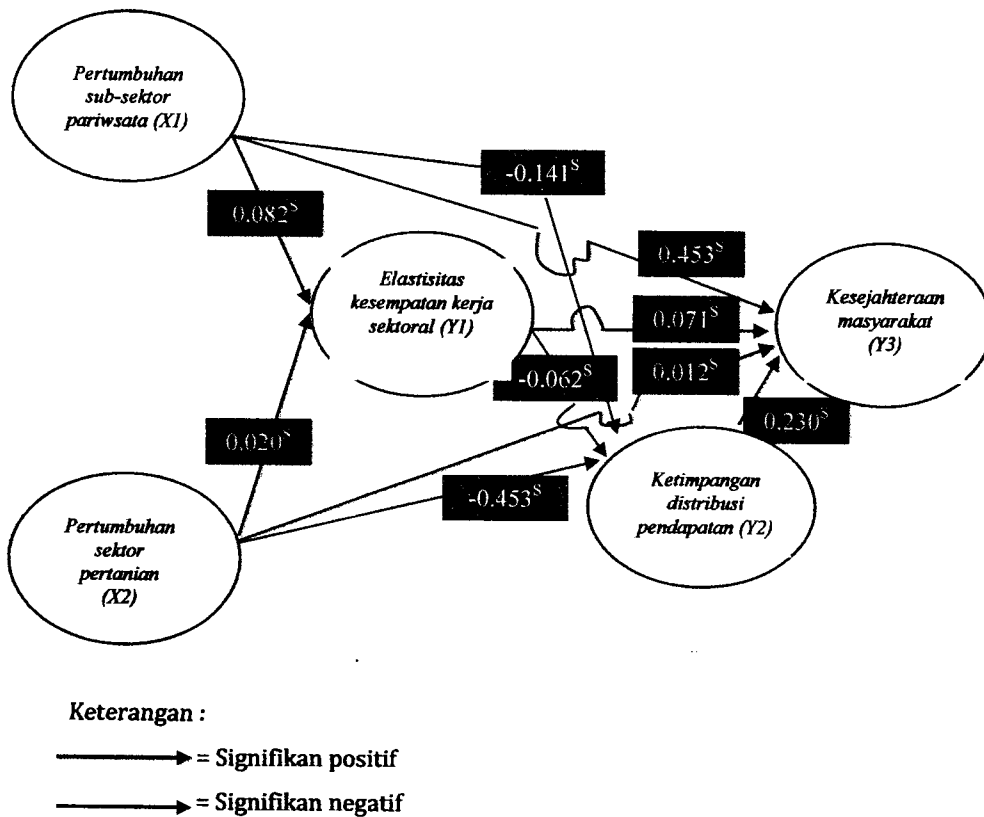
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap inner model dapatlah diringkas hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5.15 dan Gambar 5.1 halaman 156.

Tabel 5.15
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PERSAMAAN STRUKTURAL

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien Jalur (P_{xy})	P-value	Keterangan
H1	$X_1 \rightarrow Y_1$	0.082	0.011	Signifikan
H2	$X_2 \rightarrow Y_1$	0.020	0.040	Signifikan
H3	$X_1 \rightarrow Y_2$	-0.141	0.000	Signifikan
H4	$X_2 \rightarrow Y_2$	-0.693	0.010	Signifikan
H5	$X_1 \rightarrow Y_3$	0.453	0.017	Signifikan
H6	$X_2 \rightarrow Y_3$	0.012	0.038	Signifikan
H7	$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0.062	0.044	Signifikan
H8	$Y_1 \rightarrow Y_3$	0.071	0.038	Signifikan
H9	$Y_2 \rightarrow Y_3$	0.230	0.011	Signifikan

Persamaan struktural :

- 1) $Y_1 = 0.082 \cdot X_1 + 0.020 \cdot X_2$
- 2) $Y_2 = -0.141 \cdot X_1 - 0.693 \cdot X_2 - 0.062 \cdot Y_1$
- 3) $Y_3 = 0.453 \cdot X_1 + 0.012 \cdot X_2 + 0.071 \cdot Y_1 + 0.230 \cdot Y_2$



Gambar 5.1
KOEFISIEN JALUR DAN UJI SIGNIFIKANSI HIPOTESIS

5.3.5 Interpretasi Koefisien Jalur dan Uji Signifikansi

Berdasarkan besaran dan uji signifikansi koefisien jalur seperti pada Tabel 5.16 halaman 156 dapat diinterpretasikan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,082 dan $p\text{-value} = 0,011$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata searah dengan perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
2. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,020 dan $p\text{-value} = 0,040$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sektor pertanian searah dengan perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
3. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar -0,141 dan $p\text{-value} = 0,000$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata berlawanan arah dengan perubahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.

4. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar -0.693 dan $p\text{-value} = 0,010$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sektor pertanian berlawanan arah dengan perubahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
5. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,453 dan $p\text{-value} = 0,017$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata sejalan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
6. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,012 dan $p\text{-value} = 0.038$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sektor pertanian sejalan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
7. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar -0.062 dan $p\text{-value} = 0,044$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral berlawanan arah dengan perubahan

ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.

8. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,071 dan $p\text{-value} = 0,038$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral sejalan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.
9. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,230 dan $p\text{-value} = 0,011$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk sejalan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali periode 2000 s.d 2006.

5.3.6 Intepretasi Persamaan Struktural

Analisis SEM berbasis varian dalam studi ini menghasilkan tiga model persamaan struktural. Adapun intepretasi dari masing-masing model adalah sebagai berikut :

$$\text{Model 1 : } Y_1 = 0,082 * X_1 + 0,020 * X_2$$

Model 1 menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata menaikkan 0,082 persen elastisitas kesempatan kerja sektoral. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sektor pertanian menaikkan 0,020 persen elastisitas kesempatan kerja sektoral. Jika kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian masing-

masing sebesar satu persen, maka total kenaikan elastisitas kesempatan kerja sektoral sebesar 0,102 persen.

$$\text{Model 2 : } Y_2 = -0,141 \cdot X_1 - 0,693 \cdot X_2 - 0,062 \cdot Y_1$$

Model 2 menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata mengurangi 0,141 persen ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sektor pertanian mengurangi 0,693 persen ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Setiap satu persen kenaikan elastisitas kesempatan kerja sektoral mengurangi 0,062 persen ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Jika pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan pertumbuhan sektor pertanian serta elastisitas kesempatan kerja sektoral masing-masing naik sebesar satu persen, maka total pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk sebesar 0,896 persen.

$$\text{Model 3 : } Y_3 = 0,453 \cdot X_1 + 0,012 \cdot X_2 + 0,071 \cdot Y_1 + 0,230 \cdot Y_2$$

Model 3 menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata menaikkan 0,453 persen kesejahteraan masyarakat. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sektor pertanian menaikkan 0,012 persen kesejahteraan masyarakat. Setiap satu persen kenaikan elastisitas kesempatan kerja sektoral menaikkan 0,071 persen kesejahteraan masyarakat. Setiap satu persen kenaikan distribusi pendapatan penduduk menaikkan 0,230 persen kesejahteraan masyarakat. Jika seluruh variabel masing-masing naik sebesar satu persen, maka total kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,766 persen.

BAB 6

PEMBAHASAN

BAB 6

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini dilakukan kajian guna menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dan selanjutnya berdasarkan hasil uji signifikansi dibahas apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak sesuai dengan dukungan data empirik. Hasil analisis data empirik yang dipaparkan pada Bab 5 dibahas mengenai makna dan mengapa hal itu terjadi, kemudian dikaitkan relevansinya dengan teori-teori yang ada dan temuan-temuan penelitian terdahulu.

6.1 Hasil Pengujian Hipotesis

6.1.1 Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral

Ekonomi tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama di semua sektor-sektor-sektornya. Perbedaan ini terjadi karena kesempatan-kesempatan untuk berkembang tidak sama. Kesempatan berkembang tergantung pada ketersediaan sumber daya ekonomi, infrastruktur pendukung, perubahan-perubahan dalam hambatan-hambatan kelembagaan terhadap pertumbuhan, dan kesempatan seperti itu yang lainnya, dan oleh sebab itu menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berlainan pula. Selain itu, suatu sektor yang tumbuh dengan cepat menciptakan kecendrungan menjadi kuat dengan sendirinya, yang bahkan membuatnya tumbuh lebih cepat lagi sampai suatu titik tertentu, Lewis (1966:16).

Kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh kenaikan produksi suatu sektor produksi yang terjadi karena peningkatan dalam

kuantitas dan kualitas faktor produksi yang digunakan dan atau karena adanya penemuan teknologi baru pada sektor tersebut. Untuk menghasilkan *output* yang lebih banyak memerlukan tambahan penggunaan tenaga kerja. Unit-unit usaha meminta tambahan tenaga kerja dengan maksud mencapai tingkat *output* tertentu yang memaksimalkan keuntungan. Adanya permintaan tenaga kerja mencerminkan tersedianya tambahan lapangan kerja baru.

Proses pertumbuhan *output* dapat terjadi karena perubahan dalam kualitas, kuantitas, dan komposisi faktor produksi serta perkembangan teknologi yang mengakibatkan peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas mempengaruhi pola lapangan kerja yang tersedia. Peningkatan produktivitas melalui *capital intensive* mengakibatkan kesempatan kerja menjadi berkurang. Sebaliknya, melalui *labour intensive* mengakibatkan kesempatan kerja bertambah. Di samping itu, penggunaan modal dan tenaga kerja lebih banyak tidak menjamin tercapainya pertumbuhan *output* secara terus-menerus tanpa disertai perbaikan teknologi. Perbaikan teknologi yang bersifat menghemat tenaga kerja mengakibatkan kesempatan kerja berkurang. Sebaliknya, yang menghemat modal mengakibatkan kesempatan kerja bertambah.

Sejalan dengan konsep teoritis tersebut di atas dan hasil pengujian hubungan variabel seperti pada Tabel 5.15 halaman 156 menunjukkan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,082 dan $p\text{-value} = 0,011$ sehingga diputuskan signifikan. Hal

ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata searah dengan perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali periode 2000-2006. Demikian pula, pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,020 dan $p\text{-value} = 0,040$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sektor pertanian searah dengan perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral Provinsi Bali.

Karena itu, temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah nomor satu yang menyatakan : apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Demikian juga telah menjawab rumusan masalah nomor dua yang menyatakan : apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Jika dilihat dari besaran $p\text{-value}$ pada kedua koefisien jalur yang masing-masing bernilai lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral di Provinsi Bali telah dapat diterima dan terbukti kebenarannya.

Analisis korelasi kanonik dalam model PLS menghasilkan persamaan struktural, $Y_1 = 0,082 * X_1 + 0,020 * X_2$. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata menaikkan 0,082 persen elastisitas kesempatan kerja sektoral. Setiap satu persen

kenaikan pertumbuhan sektor pertanian menaikkan 0,020 persen elastisitas kesempatan kerja sektoral. Jika kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian masing-masing sebesar satu persen, maka total kenaikan elastisitas kesempatan kerja sektoral sebesar 0,102 persen. Persamaan ini menyiratkan baik pariwisata maupun pertanian merupakan sektor yang aktif memberikan lapangan kerja baru. Berdasarkan angka koefisien regresi, pertumbuhan sub-sektor pariwisata (X_1) mempunyai kekuatan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian (X_2) dalam memberikan tambahan lapangan kerja baru.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Ini artinya telah terjadi pertumbuhan di sub-sektor pariwisata Provinsi Bali yang disertai penambahan lapangan kerja baru. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, lapangan kerja semakin banyak. Tambahan lapangan kerja baru tercipta akibat meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana jasa kepariwisataan yang didorong oleh semakin meningkatnya jumlah wisatawan asing maupun domestik berkunjung ke daerah tujuan wisata di Provinsi Bali.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata memberikan tambahan lapangan kerja baru. Temuan studi ini menguatkan teori pembangunan pariwisata Bryden. Bryden (dalam Yoeti, 2008:3), menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan industri jasa yang padat karya sehingga memperluas kesempatan kerja. Sebagai suatu industri, pariwisata merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha makanan dan minuman lokal, industri kecil yang

menghasilkan produk cinderamata khas daerah, jasa pemandu wisatawan (*guides*), agen dan biro perjalanan wisata di daerah tujuan wisata, usaha pertunjukan budaya (*cultural events*), usaha toko-toko yang menjual kebutuhan wisatawan, usaha-usaha penginapan dan usaha material dekoratif untuk hotel dan resort.

Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Ini artinya telah terjadi pertumbuhan di sektor pertanian disertai penambahan lapangan kerja baru. Semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi di sektor pertanian maka kesempatan kerja semakin bertambah. Tambahan lapangan kerja baru tercipta akibat meningkatnya kapasitas produktif usaha tani yang didorong oleh semakin berkembangnya sektor ekonomi lainnya dan meningkatnya konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Bali.

Pertumbuhan sektor pertanian memberikan tambahan lapangan kerja baru. Temuan studi ini menguatkan teori pembangunan pertanian Mosher. Mosher (dalam Mubyarto, 1995:231), menyatakan bahwa sektor pertanian di negara-negara berkembang merupakan usaha pertanian rakyat sehingga memperluas kesempatan kerja. Di dalam pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani keluarga (*family farm*) yang memproduksi hanya satu macam hasil saja dan tujuan utama dari usaha adalah pendapatan keluarga yang terbesar. Karena itu, dalam menaikkan produksi, para petani akan berusaha untuk menggunakan lebih banyak faktor produksi tenaga kerja.

Berdasarkan analisis statistik deskriptif Tabel 5.4 halaman 143, prestasi pertumbuhan sub-sektor pariwisata tercermin oleh rata-rata laju pertumbuhan *output* sebesar 4,15 persen dan kontribusi terhadap pembentukan total *output* ekonomi sebesar 27,68 persen setiap tahunnya. Sedangkan Tabel 5.5 halaman 141, menunjukkan prestasi pertumbuhan sektor pertanian tercermin oleh rata-rata laju pertumbuhan nilai *output* sebesar 4,59 persen dan kontribusinya terhadap pembentukan total *output* ekonomi sebesar 26,16.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian memberikan tambahan lapangan kerja baru. Hasil studi ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dari teori Adam Smith, Harrod-Domar dan Romer yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi karena semakin banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak pula permintaan akan tenaga kerja. Meningkatnya permintaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan merupakan kesempatan bagi tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Karena itu, hanya melalui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi penyediaan lapangan kerja baru dapat diwujudkan.

Pariwisata dan pertanian merupakan sektor yang aktif memberikan tambahan lapangan kerja baru di Provinsi Bali. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan yang ditempuh pemerintah provinsi mengenai lapangan kerja. Lewis (1966:95;) dan Ranis-Fei (1997:142), menyatakan unsur penting dari kebijakan yang mendorong terciptanya tambahan lapangan kerja baru antara lain mencegah terlalu besarnya kesenjangan yang terbuka

di antara upah di sektor modern dengan penghasilan di sektor tradisional. Unsur lainnya adalah tindakan mencegah intensitas modal yang terlalu besar, pengeluaran yang cukup untuk daerah pedesaan, mengembangkan lebih banyak pusat-pusat urbanisasi kecil dan kebijakan kependudukan.

Hasil studi ini didukung oleh temuan studi Latief (2001) yang menyimpulkan bahwa hubungan pariwisata dan pertanian merupakan hubungan interaksi saling terkait sehingga menciptakan lebih banyak jenis pekerjaan baru. Demikian pula didukung oleh hasil studi Jonathan *and* Faal (2006) dan Pubben *and* Vestappan (2005) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan industri pariwisata di daerah tujuan wisata Gambian Afrika-Barat menciptakan kesempatan kerja untuk menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian tradisional. Pertumbuhan pariwisata dan peningkatan produktivitas pertanian tradisional menaikkan pendapatan per kapita dan akumulasi kapital bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah tujuan wisata.

Namun demikian, temuan studi ini tidak sejalan dengan hasil studi Dwyer *and* Forsyth (2007;2008) yang menyimpulkan bahwa simbiosis pariwisata dan pertanian hanya terjadi pada tahap awal pembangunan dan ketika memasuki tahap eksploitasi situasi berubah menjadi konflik. Konflik pariwisata dan pertanian berkaitan dengan perebutan sumber daya tanah, tenaga kerja dan sumber-sumber daya produktif lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral
2. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata mempunyai kekuatan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian dalam memberikan tambahan lapangan kerja baru.
3. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian mengakibatkan total kenaikan elastisitas kesempatan kerja sektoral sebesar 0,102 persen.
4. Temuan studi ini menguatkan teori pembangunan pariwisata Bryden, teori pembangunan pertanian Mosher dan sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi dari teori pertumbuhan Adam Smith, Harrod-Domar dan Romer.
5. Dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi, interaksi kegiatan di sektor pariwisata dan pertanian memperkuat relevansi model pembangunan *dual economy* Lewis-Ranis-Fei. Mendukung hasil studi Latief (2001), Jonathan and Faal (2006) dan studi Pubben and Vestappan (2005). Akan tetapi, tidak sejalan dengan temuan Studi Dwyer and Forsyth (2007;2008).

6.1.2 Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Kenaikan pertumbuhan ekonomi dicirikan oleh semakin meningkatnya nilai tambah atau pendapatan yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada. Seluruh pendapatan ekonomi akan terbagi habis ke sektor rumah

tangga dalam bentuk upah, sewa modal, bunga uang dan keuntungan pengusaha. Jika sistem harga berfungsi dengan sempurna, harga tiap sumber daya merupakan nilainya dalam penggunaan marginal yang paling produktif dimana ia bisa diterapkan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal. Karena itu, perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat tidak bisa sepenuhnya dihilangkan.

Pendapat lain mengatakan bahwa adanya ketimpangan pembagian pendapatan terjadi akibat dari ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar di sini diartikan sebagai adanya gangguan yang mengakibatkan persaingan dalam pasar tidak dapat bekerja secara sempurna. Gangguan-gangguan tersebut selain berupa perbedaan dalam kepemilikan sumber daya juga dalam bentuk perbedaan dalam kepemilikan informasi, adanya intervensi pemerintah melalui berbagai peraturannya, dan yang sering sekali terjadi di negara sedang berkembang adalah adanya keterkaitan antara beberapa pelaku ekonomi dengan pemerintah.

Pertumbuhan pendapatan sektor-sektor ekonomi terjadi karena perubahan dalam kualitas, kuantitas, dan komposisi faktor produksi serta perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi pola pembagian pendapatan dalam masyarakat. Pola pembagian antargolongan pendapatan akan menjadi semakin timpang, jika akses kesempatan berusaha dan atau kepemilikan faktor produksi dinikmati oleh segelintir orang. Sebaliknya, jika akses kesempatan berusaha dan atau kepemilikan faktor

produksi dinikmati oleh masyarakat luas maka pembagian antargolongan pendapatan akan lebih merata.

Sejalan dengan konsep teoritis tersebut diatas dan hasil pengujian hubungan variabel seperti pada Tabel 5.15 halaman 153 menunjukkan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar $-0,141$ dan $p\text{-value} = 0,000$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata berlawanan arah dengan perubahan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali. Pertumbuhan sektor pertanian juga berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar $-0,693$ dan $p\text{-value} = 0,010$ sehingga diputuskan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sektor pertanian berlawanan arah dengan perubahan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali.

Karena itu, temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah nomor tiga yang menyatakan : apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Demikian juga telah menjawab rumusan masalah nomor empat yang menyatakan : apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Jika dilihat dari besaran $p\text{-value}$ pada kedua koefisien jalur yang masing-masing bernilai lebih kecil dari $0,05$, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dan

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dapat diterima dan telah terbukti kebenarannya.

Analisis korelasi kanonik dalam model PLS menghasilkan persamaan regresi struktural, $Y_2 = -0,141 \cdot X_1 - 0,693 \cdot X_2$. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata mengurangi 0,141 persen ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sektor pertanian mengurangi 0,693 persen ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. Jika pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan pertumbuhan sektor pertanian naik sebesar satu persen, maka total pengurangan ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan sebesar 0,834 persen. Persamaan ini menyiratkan baik pariwisata maupun pertanian merupakan sektor ekonomi yang dalam pertumbuhannya mampu mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Berdasarkan angka koefisien regresi, pertumbuhan sub-sektor pariwisata (X_1) mempunyai kekuatan pengaruh lebih kecil dibandingkan sektor pertanian (X_2) dalam mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali. Ini artinya, telah terjadi pertumbuhan di sub-sektor pariwisata yang disertai pengurangan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi di sektor pariwisata ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi

akibat adanya kenaikan kontribusi pendapatan pariwisata dalam ekonomi yang selanjutnya menetes ke lapisan-lapisan masyarakat yang didorong oleh meningkatnya kesempatan produsen industri kecil kerajinan di Provinsi Bali untuk menaikkan pendapatannya.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Temuan ini menguatkan teori pembangunan pariwisata Bryden. Bryden (dalam Yoeti, 2008:78) menyatakan bahwa sektor pariwisata sebagai katalisator pembangunan (*agent of development*) berfungsi mempercepat pemerataan pendapatan di daerah tujuan wisata. Pariwisata memberikan akses pendapatan kepada masyarakat luas di daerah penerima wisatawan melalui penyebaran pembangunan ke objek daerah tujuan wisata (ODTW), meningkatkan produk hasil kesenian dan kebudayaan dan memperluas pasar produk industri kecil ke dunia internasional.

Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali. Ini artinya, telah terjadi pertumbuhan di sektor pertanian yang disertai dengan pengurangan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi di sektor pertanian ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi akibat adanya kenaikan dalam rata-rata pendapatan petani yang didorong oleh meningkatnya perbaikan diversifikasi usaha tani di Provinsi Bali ke arah tanaman pangan, hasil peternakan dan perikanan yang lebih menguntungkan.

Pertumbuhan sektor pertanian mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Temuan ini menguatkan teori pembangunan pertanian Mosher. Mosher (dalam Mubyarto, 1995: 259) menyatakan bahwa diversifikasi usaha tani dapat mendatangkan kenaikan pendapatan pada petani karena sistem tumpang-sari atau pertanian campuran semuanya dapat dilakukan pada tanah yang sama. Dari segi permintaan, kenaikan pendapatan dapat diharapkan baik dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri selama tanaman diversifikasi benar-benar mempunyai elastisitas pendapatan yang lebih besar.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan. Hasil studi ini memperkuat relevansi model pembangunan *dual economy* Lewis-Ranis-Fei dan berlakunya hipotesis "U" terbalik Kuznets. Berdasarkan argumentasi teori Lewis mengenai perpindahan penduduk dari pedesaan (sektor pertanian) ke perkotaan (sektor industri), Kuznets (1966:23), menyatakan bahwa perubahan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan tidak selamanya stabil sepanjang berlangsungnya proses pembangunan. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi naik sebagai akibat dari proses industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Lewis (1994:112) menyatakan bahwa realokasi tenaga sektor pertanian yang berlebihan ke sektor modern akan menaikkan produktifitas sektor pertanian. Kenaikan dalam produktifitas pertanian bersifat fundamental bagi pemecahan persoalan-persoalan distribusi, karena hal itu memberikan kemungkinan kenaikan bersama dalam konsumsi rakyat, tabungan dan perpajakan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa *dual economy* sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian telah menghasilkan pertumbuhan yang disertai perbaikan distribusi antargolongan pendapatan di Provinsi Bali. Ini artinya, pola pertumbuhan yang terjadi sejalan dengan strategi pembangunan yang disarankan oleh Chenery *et al.* (1974), yakni menciptakan pertumbuhan dan pemerataan berjalan secara bersamaan (*redistribution with growth, RWG*).

Fakta di Provinsi Bali erat kaitannya dengan keunikan karakter pariwisata Bali yang menggunakan budaya sebagai modal dasar dalam pengembangannya. Sektor-sektor pendukung pariwisata mampu memberikan akses bagi industri kecil dan rumah tangga pedesaan untuk meningkatkan pendapatan. Studi Antara (2006), menyebutkan bahwa sektor-sektor pendukung pariwisata yang menampung usaha dan industri kecil pedesaan memiliki keterkaitan tidak langsung kebelakang (*indirect backward linkages*) sebesar 1,630 dan keterkaitan tidak langsung kedepan (*indirect forward linkages*) sebesar 1,267. Artinya, setiap satu unit peningkatan permintaan akhir industri kecil pedesaan mampu meningkatkan pendapatan seluruh perekonomian sebesar 1,630 unit dan setiap

peningkatan satu unit permintaan akhir yang dibangkitkan perekonomian, industri kecil pedesaan mampu memenuhi sebesar 1,267 unit.

Temuan studi ini didukung oleh hasil studi Coxhead *and* Annan (2006) yang menyatakan bahwa diversifikasi usaha pariwisata memperbaiki distribusi pendapatan penduduk oleh meningkatkan akses kesempatan berusaha bagi produsen kecil. Mendukung hasil studi Blake (2008) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran wisatawan di Afrika-Timur tidak saja meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin melainkan juga meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan melalui permintaan ekspor hasil-hasil industri masyarakat setempat. Di samping itu, temuan studi ini juga sejalan dengan studi Clarie *and* Jones (2008) yang menyimpulkan bahwa Industri pariwisata membangkitkan berbagai aktivitas perekonomian domestik sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan distribusi penghasilan yang lebih merata di daerah tujuan wisata Karibia.

Namun demikian, temuan studi ini tidak sejalan dengan hasil studi Telfer dan Wall (1996; 2000), yang menyimpulkan bahwa keterkaitan pertumbuhan pariwisata dan pertanian di Pulau Bali dan Lombok-Indonesia tidak menghasilkan manfaat bersih yang signifikan. *Backwards linkages* pariwisata dan pasokan produksi hasil pertanian lokal terhalang oleh standar aturan dan kriteria yang diberlakukan resort internasional mengakibatkan manfaat ekonomi pariwisata tidak signifikan terdistribusi ke dalam sektor ekonomi domestik. Di samping itu, studi ini juga tidak sejalan dengan studi Ashely (2000;2001) yang menyatakan bahwa terbatasnya

dampak positif pengeluaran wisatawan di daerah tujuan wisata Namibia-Afrika Selatan terhadap perbaikan tingkat hidup penduduk miskin pedesaan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan
2. Pertumbuhan sektor pertanian mempunyai kekuatan pengaruh yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan pariwisata dalam hal mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan
3. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian mengakibatkan pengurangan ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan sebesar 0,896 persen
4. Temuan studi ini memperkuat berlakunya Hipotesis "U" terbalik Kuznets. Sejalan dengan teori pembangunan Chenery *et al.* (1974). Didukung oleh hasil studi Annan *and* Coxhead (2006), Blake (2008), Clarie *and* Jones (2007). Sebaliknya, tidak mendukung hasil studi Telfer *and* Wall (1996; 2000), dan studi Ashely (2000;2001).

6.1.3 Pertumbuhan Sub-sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Berpengaruh Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan riil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku belum tentu mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi tidak melebihi tingkat pertumbuhan penduduk,

kesejahteraan masyarakat akan mengalami penurunan. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan penambahan penduduk, maka kesejahteraan masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dengan demikian, syarat penting yang akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat penambahan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi yang bermakna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh meningkatnya pendapatan per kapita secara terus menerus. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membiayai konsumsi, pendidikan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk memperoleh jaminan kesehatan yang semakin baik. Kemampuan masyarakat untuk menghasilkan kualitas manusia yang lebih baik mempunyai andil dalam perbaikan taraf dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan meningkatnya pendapatan per kapita akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Kecendrungan ini dimungkinkan oleh karena peningkatan pendapatan per kapita memperbesar atau memperluas basis pajak baik pajak langsung dan pajak tak langsung. Dari sisi pajak langsung, perluasan basis pajak terjadi karena dengan makin tingginya pendapatan per kapita maka jumlah penduduk yang pendapatannya dan kekayaannya melewati batas bebas pajak akan bertambah. Penerimaan pajak mencerminkan kemampuan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*Directly Productive Activities, DPA*) dan sektor

prasarana (*Social Overhead Capital*, SOC). Dengan demikian, peran pemerintah menentukan pencapaian kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sejalan dengan konsep teoritis tersebut di atas dan hasil pengujian hubungan variabel seperti pada Tabel 5.15 halaman 156 menunjukkan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,453 dan $p\text{-value} = 0,017$ sehingga diputuskan signifikan. Tanda positif menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan sub-sektor pariwisata searah dengan perubahan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan sektor pertanian juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,012 dan $p\text{-value} = 0,038$ sehingga diputuskan signifikan. Tanda positif menunjukkan bahwa perubahan pertumbuhan pertanian searah dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah nomor lima yang menyatakan : apakah pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian juga telah menjawab rumusan masalah nomor enam yang menyatakan : apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari besaran $p\text{-value}$ pada kedua koefisien jalur yang masing-masing bernilai lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali dan hipotesis

keenam yang menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali dapat diterima dan telah terbukti kebenarannya.

Analisis korelasi kanonik dalam model PLS menghasilkan persamaan struktural, $Y_3 = 0,453 \cdot X_1 + 0,012 \cdot X_2$. Persamaan ini menjelaskan bahwa setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata meningkatkan 0,453 persen kesejahteraan masyarakat. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sektor pertanian meningkatkan 0,012 persen kesejahteraan masyarakat. Jika pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan pertumbuhan sektor pertanian masing-masing naik sebesar satu persen, maka total peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,465 persen. Persamaan ini menyiratkan baik pariwisata maupun pertanian merupakan sektor ekonomi yang dalam pertumbuhannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan angka koefisien regresi, pertumbuhan sub-sektor pariwisata (X_1) mempunyai kekuatan pengaruh lebih besar dibandingkan sektor pertanian (X_2) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi di sektor pariwisata maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali guna meningkatkan indeks kelayakan hidup, pendidikan dan kesehatan serta

konsumsi ritual keagamaan yang didorong oleh peningkatan produktivitas penggunaan sumberdaya ekonomi untuk memajukan pariwisata.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Temuan ini menguatkan teori pembangunan pariwisata Williams-Shaw. Williams and Shaw (1998:145) menyatakan bahwa para wisatawan yang datang harus dilayani dengan baik. Pelayanan yang baik diperlukan, sebab mereka datang ke daerah tujuan wisata dengan membayar pajak dan membawa kemakmuran bagi masyarakat. Makin baik pelayanan, makin banyak wisatawan yang datang berkunjung. Dengan demikian, makin besar pula pendapatan negara dan masyarakat.

Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan yang terjadi di sektor pertanian maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga petani guna meningkatkan indeks kelayakan hidup dan pengeluaran menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pertumbuhan sektor pertanian meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Temuan ini menguatkan teori pembangunan pertanian Kuznets. Kuznets (1966:78) menyatakan bahwa pertanian di negara-negara berkembang merupakan sektor ekonomi yang sangat potensial dalam memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi

produk yang bukan saja untuk suatu kelangsungan suplai makanan mengikuti pertumbuhan penduduk, melainkan juga penyediaan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor pertanian memberikan kontribusi pasar, faktor-faktor produksi dan kontribusi devisa lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi dari komoditi-komoditi pertanian yang menggantikan impor.

Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil studi ini memperkuat relevansi model *dual economy* Lewis-Ranis-Fei. Lewis (1954) menyatakan bahwa ciri utama dalam proses pembangunan ekonomi adalah berlakunya kenaikan tabungan dan penanaman modal yang bersumber dari surplus keuntungan di sektor modern. Penanaman modal menyebabkan perkembangan produksi akan menambah penawaran barang dan jasa-jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Sedangkan Ranis-Fei (1964:102), menyatakan bahwa apabila pembangunan ekonomi terjadi, akan terdapat kenaikan tabungan dan penanaman modal yang bersumber dari kelebihan produksi pertanian jika dibandingkan dengan konsumsi atas hasil pertanian yang dilakukan penduduk di sektor pertanian atau surplus hasil pertanian yang dapat diperdagangkan. Kenaikan produktivitas di kedua sektor secara seimbang merupakan keadaan yang menyebabkan proses pembangunan terus-menerus berlangsung.

Berdasarkan angka koefisien regresi struktural, pertumbuhan sub-sektor pariwisata mempunyai kekuatan pengaruh lebih besar dibandingkan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta di

Provinsi Bali menunjukkan bahwa perkembangan di sektor pariwisata dominan dibandingkan sektor pertanian. Hingga tahun 2007, telah terbangun 19.940 kamar katagori hotel berbintang, 15.332 kamar hotel non-bintang dan 2.009 kamar pondok wisata yang mampu menampung kedatangan sebanyak 1.386.449 orang wisatawan asing dan selebihnya adalah wisatawan domestik. Meskipun dalam kurun waktu 2000-2006, terdapat dua kali tragedi bom yang mengguncangkan pariwisata Bali, namun pemulihan jumlah kunjungan wisatawan asing tidak memakan waktu yang lama.

Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik meningkatkan pengeluaran wisatawan di daerah Bali (Lampiran 6). Pengeluaran wisatawan berdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung bersumber dari pengeluaran akomodasi, konsumsi makanan, angkutan wisata, cindramata, barang-barang kerajinan seni, jasa-jasa hiburan dan atraksi budaya. Sedangkan dampak tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap sektor-sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa. Adapun distribusi pengeluaran wisatawan menurut kelompok pengeluarannya dalam perekonomian Bali adalah seperti pada Tabel 6.1 halaman 183.

Dampak ekonomi pariwisata berakibat meningkatkan pendapatan rumah tangga penduduk dan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Bali. Meningkatnya pendapatan rumah tangga meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah

untuk membiayai belanja publik dan pembangunan. Rata-rata rasio pengeluaran belanja di sektor publik periode 2000-2006 sebesar 68,32 persen terhadap total belanja pemerintah Bali dan dari persentase belanja publik tersebut 32,25 persen merupakan belanja pembangunan, (Bappeda Bali, 2007:1-38-44). Hal ini ikut memberikan sumbangan dalam menciptakan nilai-nilai kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel 6.1
PERSENTASE ALOKASI PENGELUARAN WISATAWAN
MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN

Sektor	Pengeluaran Wisatawan		
	Domestik	Asing	Jumlah
1 Pertanian	0.20	0.01	0.04
2 Pertambangan dan galian	0.00	0.00	0.00
3 Industri Pengolahan	15.01	9.80	10.60
4 Listrik, gas dan air minum	0.00	0.00	0.00
5 Bangunan	0.00	0.00	0.00
6 Perdagangan, hotel dan restoran	43.59	70.98	66.81
7 Pengangkutan dan Komunikasi	38.13	17.45	20.60
8 Keuangan dan persewaan	0.65	0.42	0.45
9 Jasa-jasa	2.41	1.34	1.50
Total	100.00	100.00	100.00

Sumber : Tabel Input-Output Pariwisata Bali 2000

Hasil studi ini di dukung oleh hasil studi Mowfoth *and* Munt (1998) dan Goodwin *et al.* (2006) menyatakan bahwa pariwisata memiliki potensi yang besar dalam upaya memperoleh daya tarik investasi internasional, penerimaan pajak dan kesempatan untuk menciptakan berbagai pertumbuhan. Perkembangan pariwisata membangkitkan beranekaragam aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat kesempatan dan pendapatan (*income*) bagi tenaga kerja, pemilik modal dan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak.

Mendukung hasil studi Suyana Utama (2006) dan Mahendra Yasa (2007) yang menyimpulkan bahwa perkembangan pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali melalui perubahan kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang diukur berdasarkan pertumbuhan PDRB dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali selama periode 1975-2004. Selain itu, pertumbuhan pariwisata juga berpengaruh positif terhadap perubahan struktur ekonomi. Meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan domestik selama periode 1975-2004 telah mengakibatkan terjadinya transformasi ekonomi dari pertanian menuju non-pertanian. Kedua fenomena tersebut berdampak positif terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Pertumbuhan pertanian mempunyai kekuatan pengaruh yang relatif kecil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hasil studi ini didukung oleh hasil studi Torres (2000) yang menyimpulkan bahwa keterlibatan modal dan investasi swasta asing dalam pembangunan industri pariwisata merupakan awal pemicu dilematis keterkaitan industri pariwisata dan pertanian tradisional di daerah tujuan wisata. Hasil studi ini mendukung hasil studi Torres *and* Momsen (2004) yang menyimpulkan bahwa dominasi investasi swasta asing dalam pembangunan industri pariwisata Cancun-Mexico menurunkan pendapatan masyarakat petani. Tingginya tingkat upah pekerja pariwisata Cancun merangsang kenaikan tingkat upah riil pertanian yang berakibat tidak saja mengurangi surplus pendapatan para petani

pedesaan melainkan juga meningkatkan intensitas pelepasan hak kepemilikan tanah pertanian pedesaan.

Namun demikian, hasil studi ini tidak sejalan dengan hasil studi Bowen *et al.* (2001) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan pariwisata di daerah tujuan wisata Hawaii menghasilkan perubahan yang ekstensif dan positif bagi transformasi pertanian. Pola pembangunan di Hawaii mengaitkan tiga pilar pembangunan yaitu pertanian, agroindustri dan pariwisata. Kebijakan pembangunan pariwisata di Hawaii, di satu sisi, memacu diversifikasi aktivitas pertanian yang disertai dengan peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi bagi hasil-hasil pertanian.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata mempunyai kontribusi pengaruh yang dominan dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.
3. Setiap satu persen kenaikan pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian mengakibatkan peningkatan kesejahteraan sebesar 0,465 persen.
4. Temuan studi ini menguatkan teori pembangunan pariwisata Williams-Shaw, teori pembangunan pertanian Kuznets, menguatkan relevansi model *dual economy Lewis-Ranis-Fei*, teori kesejahteraan yang meliputi teori UNDP (1990), World Bank (2000) dan Ranis-Stewart (2004).

Didukung oleh hasil studi Mowfoth *and* Munt (1998), Goodwin *et al.* (2006), mendukung hasil studi Suyana Utama (2006), Mahendra Yasa (2007), Torres (2000), Torress *and* Momsen (2004). Akan tetapi, tidak sejalan dengan studi Bowen *et al.* (2001).

6.1.4 Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral Berpengaruh Signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Elastisitas kesempatan kerja sektoral adalah nilai yang menunjukkan persentase peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ekonomi tertentu jika terjadi peningkatan nilai *output* di sektor tersebut sebesar satu persen. Nilai elastisitas kesempatan kerja sektoral lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa pertumbuhan *output* lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja yang diciptakannya, dan kondisi tersebut dapat tercipta jika terdapat peningkatan dalam produktivitas tenaga kerja dan tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan bila nilai elastisitas kesempatan kerja sektoral lebih besar daripada satu berarti terjadi penurunan produktivitas per tenaga kerja atau terjadinya *underemployment* di sektor yang bersangkutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk menyediakan perluasan lapangan kerja baru. Dengan tersedianya lapangan kerja baru, memberikan kesempatan bagi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan untuk dapat bekerja sehingga mereka memiliki pendapatan. Di samping itu, pendayagunaan tenaga kerja di sektor-sektor ekonomi yang produktif akan memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih meningkatkan kualitas keterampilan dan atau keahlian. Dengan bekal

tersebut, mereka dapat mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Sejalan dengan konsep teoritis tersebut diatas dan hasil pengujian hubungan variabel seperti pada Tabel 5.16 halaman 153 menunjukkan bahwa elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar $-0,062$ dan $p\text{-value} = 0,044$ sehingga diputuskan signifikan. Tanda negatif menunjukkan bahwa perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral berlawanan arah dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar $0,071$ dan $p\text{-value} = 0,038$ sehingga diputuskan signifikan. Tanda positif menunjukkan bahwa perubahan elastisitas kesempatan kerja sektoral searah dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah nomor tujuh yang menyatakan : apakah elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Demikian juga telah menjawab rumusan masalah nomor delapan yang menyatakan : apakah elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari besaran $p\text{-value}$ pada kedua koefisien jalur yang masing-masing bernilai lebih kecil dari $0,05$, maka hipotesis tujuh yang menyatakan bahwa elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali dan

hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali dapat diterima dan telah terbukti kebenarannya.

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 5.6 halaman 146, rata-rata elastisitas kesempatan kerja pariwisata di Provinsi Bali dalam periode 2000 s.d 2006 sebesar 0,54, yang berarti setiap kenaikan satu persen pertumbuhan *output* pariwisata menciptakan 0,54 persen tambahan kesempatan kerja. Sedangkan rata-rata elastisitas kesempatan kerja pertanian sebesar 0,33 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen pertumbuhan *output* pertanian menciptakan 0,33 persen tambahan kesempatan kerja.

Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Ini artinya semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi akibat meningkatnya rata-rata pendapatan pekerja melalui terserapnya yang semula menganggur dan mobilitas tenaga kerja berketrampilan menuju lapangan kerja yang lebih produktif yang didorong oleh meningkatnya akses kesempatan berusaha dibidang pertanian, industri kecil kerajinan tangan dan pariwisata di Provinsi Bali.

Peningkatan elastisitas kesempatan kerja sektoral mengurangi ketimpangan distribusi antar golongan pendapatan di Provinsi Bali. Temuan studi ini menguatkan teori pembangunan Lewis yang menyatakan bahwa kelebihan pekerja di suatu sektor akan memberikan andil terhadap

pertumbuhan *output*, perubahan struktur dan alokasi kesempatan kerja di sektor lainnya. Rendahnya biaya upah di sektor subsisten pedesaan akan dapat menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan para pekerja tersebut dalam pengembangan industrialisasi. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan tenaga kerja di sektor industri modern, maka pada suatu saat tingkat upah di pedesaan akan meningkat. Selanjutnya peningkatan upah ini secara umum akan memperbaiki distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini artinya semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan ini terjadi akibat semakin banyaknya anggota keluarga yang bekerja sehingga baik menambah pendapatan maupun mengurangi beban ketergantungan yang didorong oleh keinginan meningkatkan rasa percaya diri dan status sosial keluarganya.

Peningkatan elastisitas kesempatan kerja sektoral meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Temuan studi ini menguatkan teori perluasan kesempatan kerja. Kraufman and Hotchkiss (2000:125) menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui dua cara. *Pertama*, perluasan kesempatan kerja memberi peluang semakin banyaknya angkatan kerja dalam setiap anggota rumah tangga untuk dapat memasuki pasar tenaga. Semakin banyak anggota rumah tangga yang bekerja akan meningkatkan pendapatan keluarga. Pada tingkat pendapatan keluarga yang lebih tinggi

memungkinkan bagi anggota rumah tangga untuk mengalokasikan pengeluaran konsumsi riil guna memenuhi standar hidup layak dan perbaikan mutu sumber daya manusia. *Kedua*, perluasan kesempatan kerja memberi andil dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran dan keresahan sosial yang berpotensi memicu kasus-kasus kriminalitas di masyarakat.

Peningkatan elastisitas kesempatan kerja sektoral mengurangi ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hasil studi ini didukung oleh hasil studi Coxhead *and* Annan (2006) yang menyimpulkan bahwa diversifikasi jasa-jasa industri pariwisata memberi kesempatan penawaran bagi pasar tenaga kerja lokal dikarenakan industri layanan kepariwisataan bersifat *labor-intensive*. Ekspansi industri pariwisata memperbaiki distribusi pendapatan penduduk oleh meningkatnya permintaan tenaga kerja berketerampilan rendah.

Mendukung hasil studi Susilowati (2005); Sinuraya dan saptana (2007) yang menyimpulkan bahwa perluasan kesempatan kerja di sektor non pertanian berpengaruh positif terhadap migrasi tenaga kerja pedesaan. Manfaat positif yang didapat dari hasil migrasi tenaga kerja adalah meningkatnya kemampuan rumah tangga pedesaan untuk membiayai konsumsi dan keperluan lain seperti biaya sekolah, perbaikan rumah dan tabungan rumah tangga.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Temuan studi ini menutakan teori pembangunan Lewis, teori perluasan kesempatan kerja Kraufman *and* Hotchkiss. Didukung oleh hasil studi Coxhead *and* Annan (2006) dan mendukung hasil studi Susilowati (2005); Sinuraya dan saptana (2007).

6.1.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Berpengaruh Signfikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan dapat terjadi antara lain karena ketidakmerataan pemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan modal. Pihak yang memiliki modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan pihak yang memiliki modal lebih sedikit. Di samping itu, ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan juga dapat terjadi oleh ketidaksempurnaan pasar sehingga ada beberapa pelaku ekonomi yang mendapatkan keuntungan berlebih dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Perubahan dalam ketimpangan distribusi pendapatan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan tingkat kemiskinan. Pengurangan kemiskinan dapat terjadi jika surplus pendapatan yang diterima golongan masyarakat berpendapatan tinggi dipergunakan

untuk kegiatan investasi yang membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi produsen kecil.

Sejalan dengan konsep teoritis tersebut diatas dan hasil pengujian hubungan variabel seperti pada Tabel 5.15 halaman 156 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis PLS menghasilkan koefisien jalur sebesar 0,230 dan $p\text{-value} = 0,011$ sehingga diputuskan signifikan. Tanda positif menunjukkan bahwa perubahan ketimpangan distribusi pendapatan searah dengan perubahan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, temuan studi ini telah menjawab rumusan masalah nomor sembilan yang menyatakan : apakah ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari besaran $p\text{-value}$ pada koefisien jalur yang bernilai lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kesembilan yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali dapat diterima dan telah terbukti kebenarannya.

Berdasarkan statistik deskriptif pada Tabel 5.7 halaman 147, rata-rata *gini-ratio* perkotaan di Provinsi Bali dalam periode 2000-2006 sebesar 0,2890, yang berarti pendapatan yang terdistribusi menghasilkan 71,10 persen tingkat kesejahteraan sosial di perkotaan. Sedangkan rata-rata *gini-ratio* pedesaan sebesar 0,1889, yang berarti pendapatan yang terdistribusi menghasilkan 81,11 persen tingkat kesejahteraan sosial di pedesaan, Atkinson dalam Yotopoulos and Nugent (1976:247). Perbedaan angka *gini-*

ratio menggambarkan bahwa ada perbaikan dalam distribusi pendapatan penduduk pedesaan di Provinsi Bali dalam periode 2000-2006.

Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Ini artinya, sepanjang perubahan pembagian tidak mengurangi dan menghilangkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, meningkatnya ketimpangan distribusi justru meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kondisi kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran kelompok berpenghasilan tinggi untuk tujuan investasi-investasi produktif maupun spiritual guna menopang pertumbuhan tetap bertahan di Provinsi Bali.

Ketimpangan distribusi antargolongan pendapatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Temuan ini menguatkan teori pertumbuhan klasik. Kaldor (dalam Boediono, 1999:79) menyatakan bahwa apabila bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok pemilik modal lebih besar dibandingkan kelompok pekerja maka tingkat tabungan bertambah besar. Tabungan adalah sumber pembiayaan investasi yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Fakta di Provinsi Bali menunjukkan bahwa meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan oleh angka *gini-ratio* yang lebih tinggi tidak selalu bermakna buruk. Sebaliknya, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan oleh *angka gini-ratio* yang lebih rendah tidak selalu bermakna baik.

Dengan kata lain, jika naiknya angka *gini-ratio* yang terjadi lebih disebabkan oleh meningkatnya bagian yang diterima oleh kelompok

berpenghasilan tertinggi tanpa merusak distribusi pendapatan yang diterima kelompok berpenghasilan terendah, justru berakibat positif bagi meningkatnya belanja investasi. Mereka yang menerima bagian pendapatan yang lebih tinggi pada umumnya adalah para pengusaha yang aktif berinvestasi. Meningkatnya belanja investasi merupakan syarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebab, investasi mempunyai dua pengaruh, di satu pihak meningkatkan permintaan efektif masyarakat, dan di lain pihak meningkatkan kapasitas produktif masyarakat. Dua keadaan ini berhubungan positif dengan daya beli dan taraf hidup masyarakat yang semuanya bermuara pada suatu kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan data empirik pada Lampiran 3 halaman 262-264, terlihat bahwa adanya hubungan positif antara angka *gini-ratio* yang lebih tinggi dengan taraf kesejahteraan yang lebih tinggi pula. Di daerah kabupaten/kota yang keadaan sosial ekonominya lebih maju angka *gini-ratio* lebih tinggi dan kesejahteraan yang dicerminkan oleh IPM yang lebih tinggi pula. Misalnya, di kota Denpasar yang merupakan daerah paling maju, rata-rata angka *gini-ratio* (Kota+Desa) periode 2000-2006 sebesar 0,2865 dan rata-rata IPM periode yang sama sebesar 74,9. Sebaliknya, dalam periode yang sama, di kabupaten Karangasem yang merupakan daerah kurang maju, rata-rata angka *gini-ratio* (Kota+Desa) sebesar 0,2499 dan rata-rata IPM sebesar 61,4. Pola hubungan antara rata-rata angka *gini-ratio* dan IPM periode 2000 s.d 2006 selengkapnya ditunjukkan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
ANGKA RATA-RATA *GINI RATIO* (KOTA+DESA) DAN IPM
PERIODE 2000-2006 DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Kabupaten/Kota	Peringkat	IPM	Gini-ratio (Kota+Desa)
Denpasar	1	74,9	0,2865
Tabanan	2	71,5	0,2676
Badung	3	71,2	0,2614
Gianyar	4	69,3	0,2561
Jembrana	5	68,9	0,2525
Kelungkung	6	68,1	0,2448
Bangli	7	67,9	0,2385
Buleleng	8	67,3	0,2330
Karangasem	9	61,4	0,2317

Sumber : BPS Provinsi Bali, berbagai terbitan

Ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan oleh naiknya angka *gini-ratio* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Fakta ini sejalan dengan hasil survei Badan Pusat Statistik yang menemukan bahwa dalam periode 2001s.d 2005, porsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan rendah di Provinsi Bali relatif stabil pada porsi sebesar 22,97 persen. Porsi ini termasuk ketimpangan rendah (*low inequality*) karena telah melebihi porsi 17,00 persen dan menurut pendekatan kriteria Bank Dunia dapat dikatakan bahwa naiknya angka *gini-ratio* yang terjadi di Provinsi Bali tidak merusak distribusi pendapatan mereka yang berpendapatan rendah. Sebaliknya, dalam periode yang sama, fenomena naiknya angka *gini-ratio* di Provinsi Bali lebih disebabkan oleh meningkatnya porsi yang diterima oleh 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi di mana semula 39,47 persen tahun 2001, meningkat menjadi 42,20 persen pada tahun 2005, (BPS,2006).

Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Temuan ini didukung oleh hasil studi Sukarsa (2005) yang menyatakan bahwa kenaikan dalam pendapatan rumah tangga berpenghasilan tinggi berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi ritual keagamaan. Meningkatnya pelaksanaan ritual keagamaan adalah pertanda semakin membaiknya perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai spritual yang mempunyai andil bagi nilai-nilai kesejahteraan suatu masyarakat.

Hasil studi ini mendukung hasil studi Solimano (1999) dan Galor (2000) yang menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan tidak selalu berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan distribusi pendapatan berimplikasi pada peningkatan akumulasi kapital fisik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perbedaan kondisi antarsektor menyebabkan pertukaran dan alokasi sumberdaya secara efisien dan memberikan efek penyesuaian ke bawah sehingga mencapai *pareto optimal*. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat bila didahului oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun demikian, hasil studi ini tidak sejalan dengan hasil studi (Alesina *and* Rodrik, 1994a; Alesina *and* Perroti, 1994b; dan Knack *et al.*, 2000) yang menyatakan bahwa ketidakmerataan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan menyebabkan peningkatan kemiskinan, aktivitas pemburu rente dan ketidakstabilan sosial. Hal ini berimplikasi pada pengurangan jaminan keamanan atas hak-hak kepemilikan, meningkatnya ketidakpastian, tekanan politik dan tingkat pajak

lebih tinggi. Kesemuanya ini menurunkan investasi yang pada gilirannya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap satu persen kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan menaikkan 0,23 persen kesejahteraan masyarakat, *ceteris paribus*.
2. Ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan oleh angka *gini-ratio* yang lebih tinggi tidak selalu bermakna buruk. Sebaliknya, menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan yang dicerminkan oleh *angka gini-ratio* yang lebih rendah tidak selalu bermakna baik.
3. Temuan studi ini menguatkan teori pertumbuhan klasik dan didukung oleh hasil studi Sukarsa (2005). Mendukung hasil studi Solimano (1999) dan Galor (2000). Akan tetapi, tidak sejalan dengan hasil studi Alesina and Rodrik (1994a), Alesina and Perroti (1994b) dan Knack *et al.* (2000).

6.2 Peran Sub-sektor Pariwisata terhadap Perkembangan Sektor Pertanian

6.2.1 Dukungan Pertanian Tahap Awal Pengembangan Pariwisata Bali

Sektor pertanian memainkan peran penting dalam mengawali pembangunan pariwisata di Bali sebelum era tahun 1970-an. Setidaknya dalam dua hal, yakni sebagai kelembagaan produksi untuk penyediaan pangan pokok dan hasil-hasil tanaman pangan yang khas dan

sekaligus sebagai objek pariwisata. Sebelum pariwisata berkembang pesat, suburnya tanah pertanian di Bali menyebabkan hasil panen padinya mengalami surplus. Kemampuan teknik serta organisasi tradisional yang ada sejak lama telah membuat petani Bali mampu mengembangkan budidaya padi beririgasi yang sangat produktif.

Lahan sawahnya yang menempati dataran rendah selatan dan naik berteras sepanjang lereng-lereng gunung berapi menjadi pemandangan yang menarik dan semuanya ini dibentuk atas dasar kreatifitas petani di masa lampau. Petak-petak tanah sekecil apapun diolah mengikuti setiap lekukan permukaan tanah. Pekerjaan irigasi dan pembagian air ke sawah-sawah dilakukan oleh lembaga pertanian tradisional yang dikenal "Subak". Insitusi ini bertanggung jawab atas pengaturan siklus budidaya padi. Padi adalah sebagai komoditi pertanian sekaligus pemujaan, sumber pangan utama dan acuan budaya masyarakat petani Bali yang berlandaskan "Tri Hita Karana". Tri Hita Karana adalah ajaran filsafat hidup yang mengandung arti tiga hubungan harmonis yang harus ditaati umat Hindu, yaitu hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan harmonis manusia dengan sesamanya dan hubungan harmonis manusia dengan lingkungan hidup.

Di samping pertanian padi, dalam pada itu hasil-hasil pertanian lainnya berupa buah-buahan seperti jeruk, salak, anggur, mangga, durian demikian pula jenis hasil pertanian lainnya seperti kopi, vanili dan rumput laut merupakan hasil pertanian lokal yang telah diperdagangkan ke luar pulau. Sedangkan, ternak sapi dan ikan tuna segar merupakan hasil-hasil

lainnya diperdagangkan untuk tujuan ekspor. Dengan luas pulau Bali yang hanya 5.600 km² dan jumlah penduduk waktu itu kurang dari dua juta jiwa, dapat dikatakan menjelang tahun 1970-an adalah masa kejayaan sektor pertanian di Bali.

Sejak Pelita I, pemerintah Indonesia melaksanakan pembaharuan di sektor pertanian dengan Panca Usaha Tani melalui Bimas dan Inmas. Program ini ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian sehingga swasembada pangan secara nasional tercapai. Panca Usaha Tani meliputi lima langkah yaitu irigasi, pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul, pemupukan dan pemberantasan hama penyakit merupakan proses modernisasi dalam bidang pertanian menjadi pedoman petani dalam aktivitasnya di sawah. Kebijakan ini memiliki kelebihan di antaranya panen dapat dilakukan lebih dari dua kali setahun, nasi beras bukan lagi menjadi makanan istimewa yang hanya dapat dikonsumsi oleh golongan tertentu, proses penyuburan tanah tidak memerlukan waktu lama, karena menggunakan pupuk anorganik, pemberantasan hama dapat dilakukan secara spontan dan dapat dimanfaatkan dalam waktu seefektif mungkin.

Ciri lain dari pertanian di Bali adalah tanah milik dibagi-bagi dan sawah menjadi terlalu sempit untuk mencukupi kebutuhan para petani. Oleh karena tidak dapat membuka lahan pertanian yang baru, pemerintah telah meningkatkan produksi dengan mendorong para petani menanam benih jenis unggul berproduktivitas tinggi dan bersiklus pendek. Hasil panen kemudian meningkat secara pesat, bahkan Bali sejak beberapa waktu menjadi pengekspor beras ke daerah-daerah Nusantara lainnya.

Namun hasil tersebut harus dibayar dengan peningkatan ketergantungan masyarakat Bali baik terhadap teknologi pertanian impor maupun terhadap jaringan perdagangan antar-pulau. Hal-hal tersebut telah mempercepat penerimaan uang dari pertanian dan juga merapuhkan hubungan sosial tradisional. Didorong oleh kebutuhan keuangan yang semakin meningkat, kaum petani terpaksa memperluas kegiatan-kegiatan mereka di luar pertanian. Akibatnya tak terhindarkan, terbentuklah cadangan tenaga kerja yang murah.

6.2.2 Marjinalisasi Pertanian

Hasil analisis kuantitatif yang telah dibahas pada Bab 6 menunjukkan bahwa koeksistensi sektor pariwisata dan pertanian dalam pembangunan ekonomi Bali periode 2000-2006 telah terbukti berdampak positif bagi pembangunan dalam arti penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan pariwisata dan pertanian tidak mengarah pada pola pembangunan berimbang sebagaimana yang diisyaratkan dalam model pembangunan dual ekonomi. Lewis dan Ranis-Fei dalam modelnya menyarankan, jika pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan memobilisasi tenaga kerja produktif dari sektor pertanian menuju sektor modern, maka pada saat bersamaan harus dapat diimbangi oleh masuknya teknologi mekanisasi di sektor pertanian. Hal ini penting untuk meningkatkan *output* dan sekaligus nilai tambah sehingga elastisitas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tumbuh secara berimbang di antara ke dua sektor.

Gejala lain mengenai ko-eksistensi pariwisata dan pertanian dalam pembangunan ekonomi Bali periode 2000-2006, juga terlihat adanya indikasi pembangunan pariwisata Bali kurang mendukung pembangunan pertanian. Ketersediaan lahan sawah pengairan sederhana, tradisional dan tadah hujan seperti pada Tabel 6.3 halaman 202 cenderung menyusut. Pesatnya pertumbuhan dan besarnya peranan penanaman modal asing mengakibatkan tergusurnya masyarakat petani sehingga terpaksa menjual tanahnya kepada pemodal. Di lain pihak munculnya rintangan dalam penjualan hasil-hasil produksi pertanian lokal kepada pihak industri perhotelan menyebabkan para petani kehilangan semangat dan memicu pula meningkatnya pelepasan hak kepemilikan tanah.

Lemahnya aspek kelembagaan dalam upaya mengendalikan pembangunan industri pariwisata Bali menimbulkan sejumlah permasalahan yang mendasar pembangunan di sektor pertanian. Meskipun industri pariwisata telah memberikan andil dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun alokasi pengeluaran pembangunan Provinsi Bali tidak mendukung peningkatan kuantitas ketersediaan lahan pertanian. Sifat-sifat ekonomi *enclave* industri pariwisata Bali yang berkembang kurang menguntungkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani. Kecilnya porsi pengeluaran wisatawan baik domestik maupun asing yang terdistribusi di sektor pertanian dan rendahnya pembelian hasil-hasil produksi pertanian lokal oleh wisatawan dan pihak industri yang terkait menurunkan pendapatan yang diterima petani.

Tabel 6.3
PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN LUAS LAHAN PERTANIAN
DI PROVINSI BALI TAHUN 1997-2007

Ketersediaan Lahan	Luas (Ha)		
	1997	2002	2007
Lahan sawah	86.836	82.644	81.235
- Pengairan teknis	0	0	0
- Pengairan setengah teknis	68.110	69.334	69.845
- Pengairan sederhana PU	10.402	6.643	6.301
- Pengairan tradisional	7.296	5.846	4.848
- Tadah Hujan	1.028	821	441
Lahan kering	475.564	480.043	481.367
- Pemukiman/pekarangan rumah dan sekitarnya	41.341	45.110	46.771
- Tegalan/kebun	127.691	128.996	138.235
- Padang rumput	2	2	2
- Hutan negara	126.719	126.795	123.428
- Perkebunan	127.825	127.207	122.174
- Hutan rakyat	12.590	11.914	10.030
- Tanah tidak diusahakan	371	490	268
- Ladang	0	0	4
- Tanah kering lainnya	39.025	39.529	40.455
Lahan lainnya	886	979	1.064
- Rawa-rawa	28	115	73
- Tambak	707	578	696
- Kolam	151	286	295
Total	563.286	563.666	563.666

Sumber: - Bali Dalam Angka 1998; 2003; 2008

*) Total luas lahan (ruang daratan) provinsi Bali tercatat meningkat dari 563.286 Ha menjadi 563.666 Ha, di mana luas wilayah kota Denpasar bertambah sebanyak 380 Ha, yaitu dari 12.398 Ha menjadi 12.778 Ha (Bali Dalam Angka 2001). Hal ini diakibatkan oleh reklamasi pantai di Pulau Serangan dan Pelabuhan Benoa.

Menurut Dwyer *and* Forsyth (1997), hubungan simbiosis pariwisata dan pertanian umumnya terjadi pada tahap awal pengembangan pariwisata. Ketika memasuki tahap eksploitasi situasi berubah menjadi konflik. Sumber utama konflik pariwisata dan pertanian berkaitan dengan perebutan sumber daya tanah, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lain yang berkaitan dengan produksi. Sedangkan, teori biaya-manfaat investasi asing MacDougall (1960) menjelaskan bahwa dikarenakan lemahnya aspek kelembagaan di negara-negara berkembang sulit mencapai efisiensi yang berkeadilan antara kapitalis asing dan domestik sehingga negara penerima akan mengalami

kerugian berupa penurunan *term of trade* secara sekuler. Dalam situasi seperti ini, jika tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan reformasi kebijakan yang efektif, maka pembangunan pariwisata yang tak terkendali akan menjadi sumber ancaman bagi keberlanjutan pembangunan Bali.

Meskipun pertumbuhan pariwisata Bali yang cukup besar telah menimbulkan *spread effects* bagi pembangunan ekonomi, akan tetapi di pihak lain menimbulkan *backwash effects* di sektor pertanian. Jika diperbandingkan tingkat pembangunan di tiga daerah pusat konsentrasi pariwisata seperti kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar jauh lebih maju dibandingkan tingkat pembangunan di enam daerah pusat konsentrasi pertanian seperti kabupaten Tabanan, Kelungkung, Karangasem, Buleleng, Bangli dan Jembrana. Menurut teori sebab-akibat kumulatif Myrdal, dalam jangka panjang keadaan ini menyebabkan jurang kesejahteraan antara daerah pariwisata dan daerah pertanian menjadi bertambah lebar.

Pariwisata sebagai suatu industri telah memberikan dampak negatif yang cukup serius bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di Provinsi Bali. Banyak kalangan mengusulkan agar Pemerintah Bali mengubah rencana pembangunan dengan menempatkan revitalisasi pertanian dan perbaikan tingkat kesejahteraan petani sebagai prioritas utama.

Nehen dalam Sukardika (2004:22) menyarankan transformasi pertanian padi menuju pertanian hortikultura (buah-buah, sayur-sayuran dan tanaman hias) dalam upaya memberdayakan petani Bali. Hal ini didukung oleh ketentuan UU No.12 tahun 1994 tentang kebebasan budidaya.

Satriawan (2005), menyarankan model perencanaan pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan agroindustri dan pariwisata di daerah kabupaten yang memiliki potensi dan memenuhi kriteria kelayakan investasi. Windia *et al.* (2007) menyarankan model pengembangan agrowisata di daerah basis pertanian untuk membantu meningkatkan pendapatan petani dan menghindari sektor pertanian Bali dari proses marginalisasi. Sebagai pembanding, pemerintah Malaysia sedang mengkaji model pengembangan pariwisata pertanian organik (*organic agricultural tourism*) yang mensinergikan pembangunan pertanian, pariwisata dan lingkungan, Hassan *et al.* (2006).

Pada dasarnya, model-model perencanaan tersebut di atas merupakan pilihan strategi yang bermaksud mengaitkan pertanian dan pariwisata dalam pembangunan. Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek penerapannya memerlukan jangka waktu yang panjang dan membutuhkan penanaman modal yang cukup besar sehingga sesuai dengan realitas yang ada di Provinsi Bali, kebijakan semacam ini diyakini tidak bersifat *best practise policy*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam studi ini mengusulkan kebijakan yang bersifat kelembagaan sebagai alternatif penguatan keterkaitan pertanian dan pariwisata di Provinsi Bali.

6.2.3 Kebijakan Penguatan Keterkaitan Sektor Pertanian dan Sub-sektor Pariwisata di Provinsi Bali

Pengembangan sektor pertanian di daerah pariwisata menjadi penting untuk penyediaan pangan bagi penduduk, memelihara lingkungan hidup, melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan petani, Mubiyarto

(dalam Yoeti, 2006:222). Pengembangan pariwisata dan pertanian memiliki potensi besar bekerja bersamaan dalam hubungan simbiosis. Perbaikan sistem transportasi pariwisata bermanfaat bagi pertanian melalui peningkatan akses pasar potensial. Perbaikan infrastruktur ini tidak saja membantu pertanian melainkan juga memungkinkan wisatawan dapat mengunjungi dan melihat areal, sistem pertanian dan kegiatan masyarakat petani. Promosi pariwisata bisa membangkitkan permintaan ekspor bagi produk pertanian lokal dan di lain pihak promosi pertanian bisa membangkitkan kunjungan wisatawan.

Penguatan keterkaitan sektor pertanian dan sub-sektor pariwisata dapat ditempuh melalui sisi permintaan, penawaran dan pemasaran. Berdasarkan hasil kajian teoritik-empirik dalam studi ini pilihan strategi pembangunan ekonomi Bali yang dapat dipertimbangkan adalah strategi pembangunan ekonomi yang seimbang bertahap, antara sektor industri pariwisata dengan pertanian dalam arti luas yang disertai dengan penguatan keterkaitan pertanian dan pariwisata. Hal ini mengingat sektor industri pariwisata telah memiliki suprastruktur dan infrastruktur sangat memadai serta kondusif, tinggal mengubah kearifan untuk lebih mendukung pembangunan pertanian.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Bali di masa mendatang, kebijakan efektif yang harus ditempuh untuk menguatkan keterkaitan pertanian dan pariwisata Bali adalah dengan menciptakan kebijakan yang bersifat kelembagaan. Melalui kekuatan politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah atau sejenisnya, yang intinya diawali dengan upaya

memaksa pihak pengelola hotel bertaraf internasional untuk bersedia menampung hasil produksi dan membina kelompok tani tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Setelah, para petani mampu menjalankan kegiatan produksinya, para kelompok tani dipaksa untuk mampu meningkatkan kualitas sesuai dengan standar mutu yang diinginkan pihak pengelola hotel. Dalam hal ini, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dibentuk sebuah badan (organisasi) independen yang anggotanya berasal dari unsur hotel, petani dan pemerintah.

Target yang diharapkan dari implementasi kebijakan tersebut mencakup sisi penawaran/berkaitan produksi, sisi permintaan dan sisi pemasaran. Adapun target yang diharapkan pada masing-masing sisi sebagai berikut :

Target Kebijakan Sisi Penawaran/Berkaitan Produksi :

1. Meningkatnya kecukupan, konsistensi dan jaminan kuantitas hasil produksi pertanian lokal
2. Menyesuaikan kualitas hasil produksi pertanian lokal dengan standar mutu perdagangan nasional dan internasional
3. Meningkatkan daya saing komoditi pertanian lokal terhadap komoditi impor
4. Terbentuknya sistem pertanian lokal dengan skala ekonomi yang kecil
5. Meningkatkan kesuburan lahan pertanian
6. Meningkatnya motivasi dan akses para petani terlibat dalam kegiatan pariwisata

Target Kebijakan Sisi Permintaan :

1. Meningkatnya selera penggunaan makanan dan hasil produksi pertanian lokal
2. Menurunnya kekhawatiran wisatawan akan masalah sanitasi, heigenitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan
3. Meningkatnya keterampilan chief internasional dalam mendayagunakan dan memadukan penggunaan hasil pertanian lokal dengan komponen yang berasal dari negara asal wisatawan.

Target Kebijakan Sisi Pemasaran :

1. Meningkatnya promosi makanan lokal
2. Meningkatnya kesesuaian infrastruktur transportasi, penyimpanan, pengolahan dan pemasaran
3. Mengurangi ketidakpercayaan atau meningkatkan komunikasi di antara petani, pemasok dan industri pariwisata
4. Mencegah praktek monopoli atau jaringan pemasaran yang menghalangi akses petani
5. Meningkatnya karakter formal operasional pertanian lokal

6.3 Peran Sub-sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi

6.3.1 Sektor Industri Tersier dan Sekunder Terkait Sub-sektor Pariwisata

Sejalan dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1990, pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor lainnya yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pendapatan negara meningkat. Pariwisata

menggerakkan ekonomi melalui aktivitas sektor-sektor ekonomi baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Industri pariwisata merupakan sekelompok perusahaan-perusahaan sejenis yang kegiatannya menghasilkan berbagai macam barang dan jasa guna memenuhi kenyamanan (*comfortable*), keamanan (*security*) dan kepuasan (*satisfaction*) wisatawan bila berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu.

Adapun kelompok usaha industri tersier yang terkait langsung dengan industri pariwisata antara lain biro perjalanan (*tour operator*) yang kegiatannya memberi informasi paket wisata, maskapai penerbangan (*airlines*) menyediakan layanan transportasi udara, angkutan pariwisata (*taxi, coach*) melayani jasa transfer dari dan ke *airport* dan mengunjungi objek-objek wisata, perhotelan menyediakan jasa akomodasi, *laundry* dllnya, restoran dan sejenisnya menyediakan makanan dan minuman, *entertainment* menyediakan atraksi dan hiburan serta pertunjukan seni, biro perjalanan lokal (*local tour operator*) menyediakan jasa rekreasi di DTW, pertokoan (*shopping center*) menyediakan cindramata dan oleh-oleh, valuta asing (*money changer*) melayani penukaran valuta asing dan perusahaan retail yang menyediakan bermacam-macam keperluan wisatawan.

Industri pariwisata Bali mengalami perkembangan yang sejajar dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Proses ini pertama-tama berwujud peningkatan penanaman modal dalam bidang perhotelan. Jaringan-jaringan perhotelan internasional telah banyak membuka cabangnya di Provinsi Bali. Mereka tertarik oleh deregulasi sektor perbankan dan tawaran kerja sama dari penanaman modal di kawasan Asia.

Pada tahun 1970 jumlah kamar hotel yang tersedia hanya 500 kamar. Dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 1975 sudah berjumlah 3.000 kamar dan tahun 1980 bertambah menjadi 4.000 kamar. Pesatnya pembangunan hotel dalam dasa warsa pertama adalah karena telah terbangunnya kawasan pariwisata Nusa Dua bertaraf internasional di bawah manajemen *Bali Tourism Development Corporation* (BTDC). Lima tahun kemudian yaitu Tahun 1985 terjadi penambahan sangat dramatis sehingga berjumlah 10.000 kamar. Sejak waktu itu, kapasitas jumlah kamar telah meningkat rata-rata 7% per tahun, dan melonjak hingga sebanyak 64% pada tahun 1990, menjelang *Visit Indonesia Year*. Pada tahun 1989, penanaman modal di bidang konstruksi perhotelan merupakan lebih dari 4/5 dari seluruh penanaman modal di Provinsi Bali.

Sampai pada tahun 1990, tercatat tidak kurang tidak kurang dari 50 hotel berbintang ada di Bali dengan jumlah kamar 8.500, sementara 900 hotel melati dan pondok wisata memiliki 12.500 kamar; sehingga jumlah kamar mencapai 21.000 buah. Pada tahun 1994 jumlah total kamar melebihi 30.000 kamar, di antaranya 17.000 dalam 90 hotel berbintang, dengan sisanya terbagi dalam lebih dari 1.200 hotel melati dan pondok wisata. Pada tahun yang sama Bali memiliki lebih dari 500 restoran dengan kapasitas keseluruhannya melebihi 34.000 tempat duduk.

Oleh karena jumlah kunjungan tidak meningkat seperti yang diperkirakan, sampai tahun 1988 tingkat hunian kamar tetap lebih rendah dari angka 70%. Setahun berikutnya tingkat hunian hotel berbintang lebih tinggi, sementara hotel melati dan pondok wisata yang dimiliki penduduk

lokal angkanya tetap lebih rendah dan bahkan jarang melebihi 35%. Tetapi membeludaknya jumlah kamar tahun berikutnya telah mengakibatkan jatuhnya tingkat hunian, masing-masing 51% dan 25% untuk hotel-hotel berbintang dan non-bintang pada tahun 1990. Situasi sedemikian kritis menjelang *Visit Indonesia Year* sehingga Dirjen Pariwisata mengumumkan pembekuan pembangunan hotel selama satu tahun di bagian selatan pulau, yang sudah mencapai titik jenuh.

Namun, tindakan tersebut selain hanya bersifat sementara, telah dilanggar secara terang-terangan oleh penanam modal tertentu, yang terlindungi oleh jaringan koneksi Jakarta. Terbukti dua tahun setelah pembekuan tersebut, ternyata lebih dari 20.000 kamar tengah dibangun dan membengkakkan ketersediaan kamar di Bali berjumlah dari 50.000 buah. Sehingga terbentang perbedaan yang mencolok antara peningkatan masing-masing daya tampung industri perhotelan dan kunjungan wisatawan. Surplus kamar tersebut menimbulkan perang harga yang dampaknya pertama-tama mesti dipikul oleh pengusaha-pengusaha perhotelan kecil.

Pasca krisis ekonomi 1997 perkembangan industri perhotelan memasuki masa-masa sulit dan sebagian di antaranya telah menutup usahanya sehingga tahun 2007, ketersediaan kamar hotel di Bali tercatat 19.940 kamar katagori hotel berbintang, 15.332 kamar hotel non-bintang dan 2.009 kamar pondok wisata dengan kedatangan 1.386.449 orang wisatawan asing dan selebihnya adalah wisatawan domestik.

Sebagaimana halnya dengan industri perhotelan, biro-biro perjalanan juga telah mengalami hal yang sama, turun naik sesuai dengan kunjungan

wisatawan. Pada tahun 1970, biro perjalanan berjumlah 42 buah, angkanya turun menjadi 29 pada tahun 1980. Proses rasionalisasi terpaksa tersebut, untuk sebagian besar disebabkan oleh kebangkrutan, terutama mengorbankan pihak Bali, yang sedikit demi sedikit terlucuti kontrol miliknya atas perusahaan-perusahaan tersebut. Belakangan ini, banyak biro perjalanan bermunculan dan jumlah totalnya mencapai 178 pada tahun 1994 dan tidak terhitung biro perjalanan lainnya yang beroperasi secara liar. Oleh karena biro-biro perjalanan terlalu banyak, juga dihantui likuiditas dan profesionalisme, kebanyakan di antaranya menempati posisi lemah di hadapan partner-partner asingnya, yang mampu memaksa mereka menurunkan tarif sebagai akibat ketatnya persaingan.

Kebanyakan biro perjalanan yang beroperasi di Provinsi Bali adalah cabang regional dari perusahaan-perusahaan yang berpusat di Jakarta. Sebagian besar kegiatannya adalah menangani rombongan-rombongan wisatawan yang dikirim oleh kantor pusatnya di Jakarta atau *tour operator* luar negeri langganannya. Selebihnya biro-biro perjalanan melaksanakan pertunjukan-pertunjukan dan *tour-tour* di sekeliling pulau. Mereka mempekerjakan sekitar 3.000 pemandu wisata berlisensi dan mengoperasikan armada bis, minibus, taksi yang mencapai 3.200 kendaraan pada tahun 1994 ditambah 1.600 kendaraan yang disewakan kepada wisatawan.

Pariwisata juga dapat menggerakkan sektor industri sekunder. Industri pengolahan yang memproduksi barang-barang perhiasan yang terbuat dari bahan baku perak pada awalnya diperuntukkan wisatawan kini

berkembang untuk pasaran ekspor. Industri kerajinan (*handcraft*) patung sebagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Gianyar di Desa Tegallalang, Pujung, Sebatu, Kemenuh dan Mas untuk kerajinan kayu, dan Desa Celuk dan Singapadu untuk kerajinan emas dan perak.

Pada awalnya industri garmen dirangsang oleh kehadiran para wisatawan, yang selain menjadi pembeli biasa, juga tidak sedikit di antaranya adalah para pengusaha. Di antara peluang-peluang yang ada industri perhiasan dan garmen yang dapat berkembang pesat, baik karena persediaan bahan baku maupun karena ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, kini terdapat puluhan ribu masyarakat Bali, terutama kaum wanita yang bekerja mencelup, menjahit, dan membordir untuk menghasilkan pakain jadi yang dipasarkan di butik-butik di seluruh dunia.

Salah satu akibat positif dari pariwisata dan kegiatan ekonomi terkait adalah pengurangan urbanisasi. Hal ini terutama berlaku di kabupaten Gianyar, di mana perkembangan kerajinan telah berhasil memberikan nafkah para petani setempat yang tanpa itu tidak akan dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Sehingga sukses besar dari industri garmen, kerajinan patung dan perhiasan di daerah ini dapat dipandang sebagai model pembangunan ekonomi yang mampu menyerap surplus tenaga kerja pedesaan yang besar seperti yang umumnya dijumpai di negara-negara Dunia Ketiga.

6.3.2 Dampak Ekonomi Pariwisata

Dari sisi permintaan dampak industri pariwisata menyusup ke berbagai kegiatan perekonomian dan menyebar melalui beragam industri

terkait. Pariwisata mempunyai keterkaitan ekonomi yang sangat erat dengan banyak sektor. Keterkaitan ekonomi terdiri dari keterkaitan ke depan (*forward linkages*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) baik langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem ekonomi bekerja *open-loop effects* dan *induced-effect*, sehingga pengeluaran wisatawan dan pendapatan pariwisata yang terdistribusi ke berbagai sektor maupun kelembagaan ekonomi yang ada akan menghasilkan manfaat ekonomi yang berlipat ganda (*mutliplier effects*). Efek-efek ganda ini selanjutnya mempengaruhi kinerja ekonomi di daerah tujuan wisata, Pitana (2002:128).

Sejalan dengan teori *mutiple effects* Samuelson, efek-efek penganda pariwisata terjadi dikarenakan uang yang dibelanjakan wisatawan, setelah dibelanjakan tidak berhenti beredar, akan tetapi berpindah dari satu tangan ke tangan orang lain atau dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Setelah melalui beberapa kali transaksi dalam periode satu tahun, baru akan berhenti dari peredarannya bila uang itu tidak lagi memberi pengaruh terhadap perekonomian negara atau daerah tujuan wisata yang dikunjungi. Sebenarnya, bukan saja pengeluaran wisatawan yang dapat mempengaruhi perekonomian, melainkan sedikitnya masih ada lima pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan pariwisata, yaitu pengeluaran konsumsi domestik, investasi pariwisata, pengeluaran pemerintah dan swasta.

Menurut Clement (dalam Yoeti, 2008:242), ukuran keberhasilan pengembangan pariwisata pada suatu negara dapat dilihat dari besar atau kecilnya nilai pelipatgandaan yang dinyatakan dengan koefisien multiplier (K). Koefisien multiplier (K) adalah nilai berapa besar pengaruh dari setiap 1

dollar AS yang dibelanjakan wisatawan pada perekonomian setempat, setelah melalui beberapa kali transaksi. Semakin besar nilai K, semakin besar pula pengaruhnya terhadap perekonomian setempat dan sebaliknya. Hal ini akan terjadi tergantung pada sejauh mana pengembangan pariwisata yang ada mampu menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi sehingga sebagian besar permintaan-permintaan yang terjadi terserap oleh aktivitas ekonomi domestik. Sebaliknya, pemenuhan permintaan yang berasal dari luar (impor) akan menimbulkan kebocoran (*leakages*) dan berakibat pada koefisien multiplier yang mengecil.

Nilai koefisien multiplier pada setiap sektor tidak sama, walupun jumlah uang yang dibelanjakan sama. Artinya, setiap sektor memiliki koefisien multiplier yang berbeda. Secara sederhana, nilai K industri pariwisata dapat dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai K masing-masing sektor dalam kelompok perusahaan industri pariwisata dibagi dengan jumlah sektor yang ada.

Dengan menggunakan pendekatan Neraca Nasional (*National Account*), dampak ekonomi industri pariwisata tidak dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan tunggal. Karena itu, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Tourism and Travel Council* (WTTC) menyarankan pemerintah negara di dunia menyusun Neraca Satelit Pariwisata (*Tourism Satellite Account*) sebagai cara untuk mengukur dampak industri pariwisata dan menyusun kebijaksanaan sosial ekonomi, Yoeti (2008:51).

Dalam menyikapi usulan tersebut Departemen Pariwisata dan Budaya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik telah menyusun Neraca Satelit

Pariwisata Bali-2007 (NSPB-2007) yang menguraikan seluruh aktivitas ekonomi dan transaksi yang terkait dengan barang dan jasa kepariwisataan baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Sistem data ini memuat informasi antara lain, (i) profil ekonomi sektor pariwisata, (ii) struktur dan besaran pengeluaran pariwisata, (iii) struktur keterkaitan pariwisata dengan sektor-sektor lainnya, (iv) struktur investasi pariwisata dan sumbangan terhadap investasi regional, (v) struktur kesempatan kerja dan sumbangannya terhadap kesempatan kerja regional dan (vi) kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi regional. Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) disusun berdasarkan rekomendasi lembaga *World Tourism Organization* (WTO) dan *United Nations* (UN) yang mengacu pada *Standard International Classification of Tourism Activities* (SICTA), *Tourism Specific Products* (TSP) dan *International Standard of Industrial Classification for all economic activities* (ISIC).

Menurut metode Neraca Satelit Pariwisata, hubungan antara konsumsi pariwisata dan *output* diformulasikan sebagai berikut :

$$X_i = (I-A^d)^{-1} \cdot C_i \dots\dots\dots (6.1)$$

Di mana :

- X_i = *output* yang dibangkitkan oleh konsumsi pariwisata
- $(I-A^d)^{-1}$ = matrik invers sebagai koefisien regresi dalam model
- C_i = konsumsi pariwisata yang meliputi (i) inbound, (ii) outbound, (iii) konsumsi domestik, (iv) investasi pariwisata dan (v) promosi pariwisata oleh pemerintah dan lembaga swasta
- i = 1,2,3,4,5.

Sedangkan hubungan antara konsumsi pariwisata dan nilai tambah bruto diformulasikan sebagai berikut :

$$V_i = v(I-A^d)^{-1} \cdot C_i \dots\dots\dots(6.2)$$

Di mana :

- V_i = nilai tambah bruto yang disebabkan dampak konsumsi pariwisata
 v = matrik diagonal dari koefisien nilai tambah bruto, yaitu ratio antara nilai tambah sektor tertentu terhadap outputnya
 C_i = konsumsi pariwisata yang meliputi (i) inbound, (ii) outbound, (iii) konsumsi domestik, (iv) investasi pariwisata dan (v) promosi pariwisata oleh pemerintah dan lembaga swasta

Berdasarkan hasil analisis terhadap struktur pengeluaran konsumsi wisatawan, pembentukan modal domestik tetap bruto (PMTB) yang terkait pariwisata, promosi pariwisata dan pembangunan Bali, peran sektor pariwisata terhadap PDRB Bali tahun 2007 ditunjukkan pada Tabel 6.4. Sedangkan dampak ekonomi dari sektor pariwisata Bali tahun 2007 ditunjukkan pada Tabel 6.5 halaman 217.

Tabel 6.4 dan Tabel 6.5 halaman 217, menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah memainkan peran penting dalam ekonomi Provinsi Bali.

Tabel 6.4
PERAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB BALI TAHUN 2007

No	Sektor Ekonomi	PDRB (jutaan rupiah)	Nilai Tambah Pariwisata (jutaan rupiah)	Kontribusi (%)
1	Pertanian	8.216,4	1.748,3	21,28
2	Pertambangan dan penggalian	281,1	166,9	59,38
3	Industri pengolahan	3.804,9	2.777,6	73,00
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	846,1	283,2	33,47
5	Konstruksi	1.877,5	1.254,3	66,81
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	12.269,7	7.196,2	58,65
7	Transportasi dan Komunikasi	5.219,1	3.239,8	62,08
8	Keuangan dan Persewaan	3.108,1	800,7	25,76
9	Jasa-jasa	6.713,4	2.076,4	30,93
	Total	42.336,4	19.543,4	40,16

Sumber : BPS Jakarta, disusun dan diolah kembali

Tabel 6.5
DAMPAK EKONOMI SEKTOR PARIWISATA BALI TAHUN 2007
(Jutaan rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Pengeluaran Wisatawan, promosi dan investasi	D A M P A K TERHADAP				
			Output	PDRB	Upah /Gaji	Pajak	Ksmptan Kerja (ribuan)
1	Pertanian	177,00	3.449,26	1.748,26	326,29	13,55	144,59
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	255,85	166,93	15,05	2,32	5,38
3	Industri Pengolahan	7.689,00	9.441,98	2.777,61	920,94	76,42	251,68
4	L G A	0,13	412,19	283,17	28,07	2,79	1,31
5	Konstruksi	3.149,00	3.641,68	1.254,34	422,93	13,29	86,04
6	Perdagangan	-	1.619,54	1.063,46	414,36	26,10	73,62
7	Restoran	4.237,05	4.756,03	2.137,80	619,27	104,97	62,79
8	Hotel	7.086,42	7.227,57	3.994,95	663,82	301,06	44,12
9	Transportasi Darat	1.288,92	1.361,84	798,73	203,32	29,96	29,81
10	Transportasi Air	57,76	118,44	86,06	19,40	1,79	1,18
11	Transportasi Udara	1.917,09	2.377,64	1.381,89	45,51	22,56	0,93
12	Rent Car	408,39	721,84	322,23	92,24	3,85	6,62
13	Komunikasi	806,63	1.006,95	650,92	177,81	10,86	9,19
14	Jasa lainnya	2.574,95	3.996,11	2.877,02	497,09	44,85	98,38
	Total Pariwisata	20.393,93	40.387,49	19.543,38	4.446,40	654,34	815,66
	Total Ekonomi		78.325,61	42.336,42	12.336,42	984,81	2.011,05
	Kontribusi pariwisata		51,56	46,16	36,11	66,44	40,56

Sumber : BPS Jakarta, disusun dan diolah kembali

Sebagai daerah tujuan wisata, Provinsi Bali menerima dampak sosial ekonomi dari aktivitas pariwisata. Aktivitas pariwisata terbukti sebagai sumber utama pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menurut Erawan (2004), dampak pariwisata terhadap PDRB Provinsi Bali tahun 1984 mencapai 10,3 persen dengan koefisien multiplier sebesar 1,22. Sepuluh tahun kemudian, yaitu tahun 1994, sumbangannya terhadap PDRB Provinsi Bali meningkat menjadi 45,3 persen, sedangkan koefisien multipliernya sebesar 1,46. Bukti lain menunjukkan bahwa ketika terjadi tragedi bom Bali 2002, sumbangan pariwisata menurun 47,42 persen terhadap PDRB Provinsi Bali tahun sebelumnya.

6.4 Dampak Budaya Wisatawan terhadap Budaya Masyarakat Setempat

6.4.1 Pariwisata Internasional Sebagai Doktrin Pembangunan Ekonomi

Pemerintah Indonesia mengambil langkah mempromosikan pariwisata untuk melancarkan program Repelitanya sebagai jalan keluar untuk memulihkan keadaan ekonomi negara pada tahun 1969. Pada waktu itu semua kalangan sepakat bahwa pariwisata adalah alat pembangunan ekonomi yang cocok dengan kondisi negara-negara Dunia ketiga, yang kaya akan sumber alam dan budaya. Doktrin pembangunan melalui pariwisata, ketika itu masih dianggap memberikan keuntungan ekonomi yang besar sedangkan kerugiannya, baik bagi masyarakat penerima maupun terhadap lingkungan alam kurang mendapat perhatian.

Pariwisata internasional tidak selamanya dianggap sebagai alat pembangunan. Baru setelah Perang Dunia II pemerintah-pemerintah negara Eropa Barat, ketika harus kembali membangun perekonomiannya, melancarkan promosi pariwisata di negeri mereka, oleh karena pengunjung asing dipandang sebagai sumber devisa. Dan ketika gagasan pembangunan mulai diterapkan pada negara-negara yang lahir dari proses dekolonisasi yang kemudian disebut Dunia Ketiga, dengan sendirinya pariwisata internasional sebagai faktor pembangunan. Dengan keyakinan bahwa pariwisata dapat memberikan sumbangan pada tujuan-tujuan pembangunan, resolusi PBB pada tahun 1963 juga menganjurkan kepada pemerintah-pemerintah Dunia Ketiga untuk memprioritaskan rencana-rencana pembangunan pariwisata dan meminta kepada lembaga-lembaga PBB dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan bantuan dalam hal ini.

Melihat bahwa sebagian besar dari negara-negara maju berneraca negatif dalam hal "perjalanan", Kraft (dalam Picard,2006:153) berkesimpulan bahwa semakin maju sebuah negara, semakin cenderung warganya bepergian ke luar negeri dan pada umumnya perjalanan mereka menuju ke negara-negara yang kurang makmur, sehingga pengeluaran mereka membantu menyeimbangi defisit neraca pembayaran negara yang dituju. Berdasarkan fakta ini, pariwisata internasional dapat dilihat sebagai mekanisme yang mengoreksi ketidakseimbangan yang berkelanjutan dari negara-negara Dunia Ketiga, oleh karena mengembalikan ke negara-negara penerima wisatawan sebagian surplus kekayaan negara pengirim wisatawan. Lebih jauh, dengan membantu membiayai impor barang dan jasa yang dikonsumsi negara penerima, pendapatan dari pariwisata turut merangsang perdagangan internasional, dan serta merta merangsang pula roda perekonomian negara pengirim wisatawan.

Selain itu, pariwisata membuka peluang pemanfaatan kekayaan-kekayaan yang berlimpah di negara-negara sedang membangun, tidak saja berupa kekayaan-kekayaan ciptaan alam dan iklimnya, melainkan juga kekayaan warisan budaya dan sejarah. Kraft (dalam Picard, 2006:154), menyebutkan bahwa tanpa kunjungan wisatawan asing, semua kekayaan itu tak tersentuh, tak akan dikelola secara ekonomis dan negara-negara yang bersangkutan akan mengabaikan satu-satunya kesempatan untuk membantu dirinya sendiri.

Pada saat pariwisata memasukkan warisan budaya dalam lalu lintas ekonominya, dengan sendirinya pelestarian warisan itu turut terjamin,

karena memberikan kepada pemimpin-pemimpin negara yang bersangkutan motivasi maupun dana untuk melestarikan dan mengelola warisan yang bersangkutan. Di lain pihak, pariwisata, sambil menghidupkan kembali warisan budaya suatu negara, dapat juga memperkaya pengunjungnya secara kultural. Pengunjung tersebut langsung menyaksikan berbagai kegiatan seni tradisional, yang daya tariknya diperkuat oleh kenyataan bahwa di negara maju yang urban itu tradisi serupa telah lama terkikis oleh industrialisasi. Dalam kerangka itu pariwisata internasional membuka suatu pertukaran dua arah, yakni unsur-unsur ekonomi ke arah negara-negara penerima dan unsur-unsur budaya ke arah negara-negara pengirim wisatawan. Budaya dan ekonomi pariwisata, bukannya bertentangan, malahan saling menyokong satu sama lainnya.

Pariwisata internasional berperan sebagai penghubung antara permintaan dan penawaran. Permintaan pariwisata timbul di negara-negara maju sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan urbanisasi yang dipenuhi melalui penurunan biaya-biaya angkutan dan peningkatan jumlah waktu luang yang dihasilkan oleh kemajuan teknis dan produktivitas kerja. Dan apabila negara-negara berkembang ingin menikmati hasil dari pengeluaran wisatawan, mereka harus menawarkan di pasaran produk-produk pariwisata yang dapat disesuaikan pada ciri-ciri permintaan yang ada. Asal penawaran negara-negara penerima dapat menjawab permintaan negara-negara pengirim, distribusi kekayaan dari kelompok negara pengirim akan mengurangi kemiskinan di negara penerima

melalui sistem pertukaran sehingga sedikit demi sedikit mengurangi jurang perbedaan taraf hidup antara kedua kelompok negara itu, Lanfant (1980).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan tahun 1967 sebagai "Tahun Pariwisata Internasional". Dalam pada itu, banyak negara-negara Dunia Ketiga merangkul pariwisata dan mengembangkan pariwisata secara besar-besaran dengan membuka perbatasannya bagi para wisatawan dan penanaman modal asing. Usaha ini didukung oleh bantuan teknis dan keuangan dari United National Development Program (UNDP) dan Bank Dunia. Sejak itu, pariwisata internasional terus-menerus mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun demikian, pandangan bahwa pariwisata mutlak dianggap sebagai faktor pembangunan ekonomi tidak bertahan lama.

Sejak dunia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1973-74, pariwisata internasional tidak lagi dipandang sebagai penggerak pembangunan sesungguhnya, melainkan justru sebaliknya sebagai pengalihan kekayaan dari negara penerima ke negara-negara pengirim, yaitu sebagai sejenis imperlialisme baru yang mempertahankan ketergantungan Dunia Ketiga terhadap negara-negara maju, Nash (1989:37-52). Bersamaan dengan itu tumbuh gagasan yang menentang pariwisata sebagai bagian dari sistem ekonomi. Dampak-dampak negatif dari komersialisasi budaya lokal yang dijadikan atraksi pariwisata dipandang sebagai bukti kegagalan teori pembangunan melalui pariwisata.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Mathieson *and* Wall (1982:185) menyimpulkan bahwa dampak ekonomi pariwisata secara garis besar menguntungkan, dampak sosial sebagian besar tidak diperhitungkan,

sedangkan dampak terhadap lingkungan adalah campuran keduanya. Hal senada diungkapkan oleh Travis (1982:257) yang menyatakan bahwa pariwisata dapat saja menghancurkan pariwisata. Pariwisata sebagai pemakai sumber daya dapat saja menjadi perusak sumber daya yang menjadi daya tariknya, dan dengan merusak sumber daya yang menimbulkannya, menyebabkan pariwisata tidak akan berumur panjang. Oleh karena itu, Travis mengusulkan bahwa dampak positif dan negatif akibat pariwisata harus diperhitungkan sebelum memulai pembangunan pariwisata. Pembangunan industri pariwisata akan berkesinambungan jika pembangunan itu tidak menguras habis sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya alam maupun budaya.

6.4.2 Komersialisasi Budaya atau Involusi Budaya : *Tesis Hanna vs Tesis McKean*

Pariwisata Bali memainkan peran penting dalam perdebatan mengenai dampak sosial-budaya pariwisata. Sebagian kalangan melihat Bali sebagai contoh ideal "pariwisata budaya yang dirancang dengan baik". Bali adalah sebuah daerah tujuan wisata di mana pariwisata telah turut melestarikan dan merangsang kembali warisan budaya setempat, Cohen (1988); Dogan (1989); dan Travis (1984). Namun, demikian tidak sedikit kalangan pengamat yang melihat kasus pariwisata Bali sebagai contoh di mana pariwisata telah merusak kebudayaan setempat, Crandall (1987:376); Doorn (1989:82); dan Greenwood (1989:173).

Sehubungan dengan perdebatan mengenai problematik dampak sosial-budaya pariwisata, Picard (2006:171) menemukan bahwa terdapat

dua hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan untuk menelaah tentang dampak sosial-budaya pariwisata, yakni tesis Hanna yang disebut dengan tesis komersialisasi budaya dan tesis MacKean yang disebut dengan tesis involusi budaya. Kedua tesis ini isinya saling berlawanan dan masing-masing memiliki argumen yang sulit dibantah.

Peristiwa komersialisasi budaya merupakan pencerminan perubahan-perubahan budaya yang diakibatkan pariwisata disebabkan oleh meresapnya suatu sistem kultural yang lebih kuat dalam suatu sistem yang lebih lemah. Perubahan-perubahan ini menimbulkan pengrusakan tradisi-tradisi lokal, menimbulkan penyeragaman budaya dan hilangnya etnis penduduk daerah. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Hanna (dalam Picard, 2006:171), memaparkan hipotesisnya yang mengungkap dampak negatif pariwisata internasional terhadap budaya masyarakat setempat sebagai berikut :

“Bagaimana memanfaatkan potensi pariwisata Pulau Bali dengan memberi keuntungan pada Orang Bali yang kaya budaya tetapi miskin secara ekonomi, tanpa pada saat yang sama menimbulkan reaksi kasar dan komersialisasi. Dengan lain kata, tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan ekonomis dan meminimalkan kerugian (‘polusi sosial dan budaya’) dan dengan demikian melestarikan nilai-nilai Bali dengan mendapatkan valuta asing yang amat dibutuhkan “

Hasil penelitian Hanna menyimpulkan bahwa meskipun pariwisata dapat menimbulkan sukses komersial, tetapi juga merupakan tragedi budaya. Kesimpulan ini didukung oleh bukti bahwa telah terjadi transformasi kesenian Bali, baik dalam bidang seni rupa yang diubah menjadi barang yang diperjualkan dan menjadi suvenir kasar, maupun dalam bidang seni pertunjukan yang disesuaikan dengan selera dan batasan pemahaman

penonton asing. Tetapi, yang lebih penting lagi, dia meramalkan akan cepat tiba saatnya orang Bali akan tidak mampu lagi membedakan antara tradisi seni Bali yang sesungguhnya dan seni sebagai produk komersial yang diciptakan untuk pasaran pariwisata. Dan dia meramalkan dalam waktu dekat akan tiba saatnya ketika para wisatawan akan menyadari kemerosotan budaya Bali dan akan berhenti mengunjungi pulau ini.

Senada dengan teori kegagalan pariwisata (Greenwood, 1989), bukti-bukti empirik yang dijadikan dasar untuk mendukung tesis komersialisasi budaya antara lain :

1. perampasan milik orang Bali, yang warisan budayanya dijadikan suatu komoditi yang dijual pada pengunjung asing;
2. pemalsuan tradisi-tradisi asli yang diubah demi memenuhi harapan wisatawan;
3. pelecehan upacara agama yang dijadikan pertunjukan-pertunjukan komersial;
4. hilangnya nilai-nilai yang dapat menimbulkan kebanggaan umum masyarakat Bali

Berbeda dengan tesis komersialisasi budaya, MacKean (dalam Picard, 2006:172) mengutarakan hipotesis yang isinya berlawanan. Dia menyatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan ke daerah tujuan wisatawan, bukannya merusak budaya setempat, malahan akan memperkuat ikatan orang-orang di daerah tujuan wisata pada tradisi budayanya.

Untuk mendukung hipotesisnya, MacKean mengkaji kemampuan masyarakat setempat dalam melestarikan warisan dan mempertegas

identitas budayanya di hadapan serangan wisatawan yang membanjirinya. Dia berkeyakinan uang dari pariwisata merangsang masyarakat setempat memperhatikan berbagai tradisi yang terancam punah, sambil menggalakkan kreativitas seni-budayanya. Dan lebih jauh lagi, rasa kagum dari pengunjung asing memperkuat jati diri berikut kebanggaan masyarakat setempat. Sehingga, dengan berfungsinya sebagai pelindung kebudayaan, pariwisata mempunyai andil yang besar dalam pelestariannya dan bahkan renaisansnya, oleh karena berperan rangkap sebagai sumber keuntungan dan sumber prestise bagi orang-orang di daerah tujuan wisata. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut McKean (dalam Picard, 2006:174) memaparkan hipotesisnya yang mengungkap dampak positif pariwisata internasional terhadap budaya masyarakat setempat sebagai berikut :

“Dengan menghibur, mendidik, dan mengurus para wisatawan internasional, orang-orang Bali dibayar untuk melakukan apa yang mereka sadari mampu mereka lakukan dengan sangat baik demi kepuasan mereka sendiri, yaitu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni dan religius, membuat kerajinan, dan melakukan upacara-upacara”

Sejalan dengan teori pembangunan melalui pariwisata, bukti-bukti empirik yang dijadikan dasar untuk mendukung tesis involusi budaya antara lain :

1. kegemaran para wisatawan terhadap tradisi Bali melalui proses adaptasi dari pihak dalam kepada permintaan-permintaan dan harapan-harapan pihak luar yang dipicunya, justru memerkuat rasa diri dan jati diri orang-orang Bali, sambil merangsang bakat seni mereka;

2. pemeliharaan martabat Bali melalui penyajian budaya agaknya merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan Bali sebagai kesatuan kultural yang unik;
3. meskipun terdapat 'kebocoran' yang mencampuradukkan batas ruang masyarakat setempat dan wisatawan, karena berbagai alasan sosial, religius dan ekonomi kemungkinan besar masyarakat setempat akan tetap membedakan ke dua segi ini dari sudut isinya, meskipun dari sudut struktur ada hubungannya.

Teori involusi budaya (*cultural involution*) MacKean menyatakan konsep paradoks sebagai berikut : masyarakat di daerah tujuan wisata ingin menjadi modern sambil melestarikan tradisi budayanya, dan untuk itu mereka membutuhkan uang; para wisatawan yang merupakan wahana modernisasi tertarik pada oleh daerah tujuan wisata karena kekayaan budayanya; akibatnya, terdorong sekaligus oleh alasan pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi diatas, masyarakat di daerah tujuan wisata membina tradisinya demi mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk modernisasinya.

Kesimpulan tesis MacKean (dalam Pitana, 2002:133) adalah tidak benar bahwa budaya yang dibawa oleh wisatawan asing merusak budaya setempat. Pengaruh asing dalam kebudayaan masyarakat setempat lebih bersifat aditif dibanding substitutif. Artinya, berbagai pengaruh diterima, tetapi bukan untuk menggantikan kebudayaan yang telah ada, melainkan memperkaya dan mengembangkan yang telah ada tersebut.

6.4.3 Gejala-gejala Memburuknya Pariwisata Bali dan Merosotnya Budaya Masyarakat Setempat

Dengan mengamati perkembangan pariwisata Bali akhir-akhir ini, sesungguhnya pendapat yang menyatakan bahwa para wisatawan betul-betul tertarik oleh kekayaan budaya Bali lebih merupakan sesuatu yang diidamkan oleh masyarakat setempat daripada kenyataan objektif. Belakangan ini, pariwisata "budaya" di Bali hanya menyangkut sebagian kecil wisatawan, dan terutama mereka yang bermukim hanya di Ubud dan sekitarnya. Mereka pada umumnya ingin menyaksikan Bali yang "asli", yang sesuai dengan apa yang dicitrakan dalam buku panduan mereka dan ingin membedakan diri dengan wisatawan lain. Terlebih, wisatawan yang datang ke Bali lebih menyukai menjemur diri di resort-resort pantai Nusa Dua, Jimbaran, Sanur atau Kuta yang secara sengaja menghindarkan diri untuk membaaur dengan lingkungan penerima.

Sebenarnya ciri khas pariwisata Bali yang semula diformulasikan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Bali oleh para konsultan Perancis SCETO tahun 1971 telah banyak berubah menjadi ciri pariwisata *home base country*. Wisatawan yang datang lebih banyak didorong oleh murahnya harga jasa akomodasi yang ditawarkan saat ini ketimbang menghabiskan waktu luang di negara asalnya tanpa ada suatu kewajiban untuk mengerti akan keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat. Mereka sebagian besar datang adalah karena insentif sebagai tenaga kerja perusahaan yang kebetulan induk perusahaannya juga beroperasi dalam bisnis industri kepariwisataan di Bali.

Dari sisi penawaran pariwisata, hal ini terlihat dari menonjolnya atribut-atribut hotel bertaraf internasional yang mencirikan negara asalnya. Sedangkan dari sisi permintaan pariwisata, hal ini tercermin oleh menurunnya pangsa asal wisatawan Eropa dan Amerika yang digantikan oleh meningkatnya pangsa wisatawan Asia-Pasifik terutama Jepang. Prilaku wisatawan Jepang sangat jelas memperlihatkan ciri *home base country*, di mana mereka pergi ke daerah tujuan wisata menggunakan Japan Air Lines (JAL), jasa perjalanan Japan Travel Birou (JTB), akomodasi di Hotel Nikko, makan di Restoran khusus yang menggunakan bahan-bahan makanan yang di impor dari negara asalnya bahkan berbelanja souvenir pun di Plaza Bali yang juga dikelola oleh pengusaha Jepang. Prilaku serupa juga terlihat pada wisatawan Taiwan dan Korea.

Gejala lain yang mengindikasikan semakin memburuknya mutu pariwisata Bali adalah meskipun jumlah kunjungan mereka masih tetap stabil, namun lama tinggal mereka semakin pendek, yaitu tahun 2007 rata-rata 3,2 hari per wisatawan. Pengeluaran wisatawan yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi jumlahnya makin menurun dan sebagian besar terserap di sektor perhotelan yang sebagian besar dinikmati oleh pemodal asing. Dari sisi perkembangan makroekonomi, pariwisata Bali tidak lagi menunjukkan peran sebagaimana yang terlampau dibesar-besarkan di masa lampau. Dalam periode 2000-2006, ekonomi Bali tumbuh melambat dan tidak stabil, yakni di bawah angka 5% per tahun. Tingkat kenaikan harga-harga barang melampaui rata-rata angka inflasi nasional. Sejak 1971-2007, total akumulasi penanaman modal yang mencapai 42,4 triliun rupiah, di

mana 26,4 triliun adalah sumbangan dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan sisanya 16,0 triliun adalah bagian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), BKPM Provinsi Bali (2007).

Budaya setempat adalah tidak lain kebudayaan Bali yang bernafaskan ajaran Hindu yang sudah menyatu dengan adat budaya lokal. Kebudayaan ini yang bercirikan Tri Hita Karana tumbuh dan berakar pada berbagai lembaga-lembaga tradisional yang bersifat sosial religius seperti Subak, Desa Adat dengan banjarnya. Lembaga tradisional ini, disamping lembaga-lembaga lainnya merupakan pilar-pilar penyangga kelestarian kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali tergantung pada lembaga-lembaga tradisional, sedangkan pariwisata tergantung pada kebudayaan, maka hal ini langsung berarti bahwa pariwisata tergantung pada eksistensi lembaga-lembaga tradisional tersebut.

Dengan logika diatas maka seharusnya ada usaha-usaha sektor pariwisata untuk memperkuat eksistensi lembaga-lembaga tradisional ini. Tetapi kenyataannya hingga kini belum ada usaha-usaha nyata untuk memperkuat eksistensi lembaga tradisional. Hubungan yang ada masih bersifat asimetris, di mana lembaga tradisional diakui peranannya dalam kepariwisataan tetapi dalam posisi sebagai objek. Desa adat memikul tanggung jawab untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan yang hampir tidak ada putus-putusnya dengan karena itu terpaksa harus membebani waktu, tenaga dan biaya terhadap warganya. Pada tingkat yang lebih ekstrim, lembaga tradisional di Bali mirip sapi perahan, tanpa pernah dia sendiri menikmati hasilnya. Pada dasarnya, semua Desa Adat di seluruh

pelosok Bali berperan dalam pelestarian kebudayaan, namun dalam kenyataannya ada ketimpangan yang lebar antara lembaga tradisional yang beruntung dan kurang beruntung.

Aspek lain yang menggambarkan kemerosotan kualitas budaya Bali seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata adalah berkaitan dengan konflik dan keamanan daerah. Distribusi manfaat kepariwisataan yang tidak berkeadilan sesungguhnya telah lama menyimpan permasalahan yang kronis. Ketika era reformasi bergulir potensi ini semakin membesar yang diindikasikan oleh munculnya gejala pengentalan etnis Bali dengan non-Bali. Berbagai tanggapan-tanggapan yang berlawanan mengenai slogan "Ajeg Bali" membuktikan hancurnya usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dan tindakan yang searah dan merupakan indikator potensi konflik yang jelas.

Selain itu, potensi konflik antar kelas yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas bawah yang merasa termarginalisasi sudah memosisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya pengusaha (investor). Konflik yang dominan mewarnai masyarakat setempat adalah konflik antar dan inter banjar yang sudah sering muncul ke permukaan dalam bentuk sangsi pengucilan warga sendiri yang disebut "kasepekang". Sikap masyarakat Bali yang jelas makin memburuk terlihat adalah menipisnya keinginan untuk saling bersilahturami diantara warga yang tinggal di Bali dan luar Bali.

Banyak perubahan yang telah terjadi oleh pesatnya perkembangan pariwisata dan lemahnya kekuatan pemerintah Bali untuk menghadapi tekanan penduduk dan sektor swasta. Undang-undang otonomi daerah telah

membawa harapan bagi masyarakat Bali untuk selanjutnya dapat mengendalikan perkembangan pariwisata dan memperoleh bagian yang lebih besar dari hasilnya. Tetapi sebenarnya Undang-undang ini memindahkan sebagian besar wewenang kepada Kabupaten, dan bukan kepada Provinsi. Dengan demikian, jelas bahwa pembagian hasil-hasil dari pariwisata yang tidak seimbang mendorong persaingan antarkabupaten untuk menarik modal dan memperbanyak atraksi. Akibatnya ketidakseimbangan antar daerah makin nyata, hubungan antar kabupaten makin tegang dan lingkungan alam makin rusak.

6.4.4 Kebijakan Pembinaan Kebudayaan dan Pengembangan Kepariwisata

Keberadaan pariwisata Bali kini nampak sebagai sesuatu yang tak terelakkan, baik di mata orang Bali sendiri maupun di mata para wisatawan adalah hasil dari sejarah yang khas dan dari keputusan-keputusan tertentu. Keputusan-keputusan tertentu semuanya ditetapkan di luar Bali sendiri. Singkatnya, perkembangan pariwisata di Bali merupakan sesuatu yang diharuskan dari luar dan masyarakat Bali mau tidak mau menyesuaikan diri dengannya.

Telah umum diketahui bahwa pembangunan pariwisata Bali berjalan terlalu pesat, terutama pada dasawarsa 1990-an. Dan umum juga diketahui bahwa salah satu titik lemah dalam pembangunan ini adalah perencanaan dan lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan. Pemerintah Bali seakan tidak berdaya menghadapi perilaku masyarakat dan sektor swasta di dalam pembangunan fisik. Karena itu, belajar dari pengalaman di masa lampau

perlu upaya pemerintah Pemerintah Provinsi Bali untuk mengkaji ulang tata ruang wilayah dan mengawasi perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten melalui kebijakan satu pintu, yaitu hanya di tingkat Provinsi. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan budaya spiritual dan ekologi sebagai dampak desakan industri pariwisata Bali yang cenderung kapitalistik. Fokus utama perbaikan adalah menyangkut pemetaan kawasan, tupoksi kelembagaan pengawas berikutan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran oleh penggunaan kawasan suci, hutan lindung, kawasan penyangga dan sempadan pantai.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Bali, segenap masyarakat dan kalangan pelaku pariwisata adalah berkaitan dengan pembinaan kebudayaan yang menjadi ciri khas Pariwisata Bali. Pariwisata telah mengambil suatu dimensi kultural dan moral yang harus dilindungi terhadap segala distorsi negatif yang diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomis. Organisasi-organisasi pariwisata hendaknya tidak hanya memanfaatkan warisan budaya dan alam yang tersedia demi tujuan pariwisata, serta menyebarkan informasi dan melakukan promosinya, tetapi juga harus berkewajiban berperan dalam perlindungan dan pemugaran warisan tersebut, termasuk dengan mengambil tindakan yang mengurangi dampak negatif yang menyertai pengelolaan usahanya.

Inti dari kebijakan yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah mengarahkan agar sektor swasta dan segenap masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pariwisata tanpa kehilangan budayanya. Hal ini bisa dicapai dengan mendukung pengembangan pariwisata budaya yang

membaur dengan lingkungan penerima, dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga tradisional untuk ikut terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan sekaligus pengawasan dalam pembangunan.

BAB 7

PENUTUP

BAB 7 PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikaji baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka dapat disusun kesimpulan dan saran sebagai berikut :

7.1 Kesimpulan

1. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar 0,082, $p\text{-value} = 0,011$. Dengan demikian hipotesis pertama dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan di sektor pariwisata maka kesempatan kerja semakin bertambah. Tambahan lapangan kerja baru tercipta akibat meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana jasa kepariwisataan yang didorong oleh semakin meningkatnya jumlah wisatawan asing maupun domestik berkunjung ke daerah tujuan wisata di Provinsi Bali.
2. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar 0,020, $p\text{-value} = 0,040$. Dengan demikian hipotesis kedua dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan di sektor pertanian maka kesempatan kerja semakin bertambah. Tambahan lapangan kerja baru tercipta akibat meningkatnya kapasitas produktif usaha tani yang didorong oleh semakin berkembangnya sektor ekonomi lainnya dan meningkatnya konsumsi

pangan seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Bali.

3. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar $-0,141$, $p\text{-value} = 0,000$. Dengan demikian hipotesis ketiga dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan di sektor pariwisata ketimpangan distribusi pendapatan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi oleh adanya *trickle down effect mechanism* yang didorong oleh meningkatnya kesempatan produsen industri kecil kerajinan di Provinsi Bali untuk menaikkan pendapatannya.
4. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar $-0,693$, $p\text{-value} = 0,010$. Dengan demikian hipotesis keempat dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan di sektor pertanian ketimpangan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi akibat adanya kenaikan dalam rata-rata pendapatan petani yang didorong oleh meningkatnya perbaikan diversifikasi usaha tani di Provinsi Bali ke arah tanaman pangan, hasil peternakan dan perikanan yang lebih menguntungkan.
5. Pertumbuhan sub-sektor pariwisata berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar $0,453$, $p\text{-value} = 0,017$. Dengan demikian hipotesis kelima dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya

semakin tinggi pertumbuhan di sektor pariwisata maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Bali guna meningkatkan indeks kelayakan hidup, pendidikan dan kesehatan serta konsumsi ritual keagamaan yang didorong oleh peningkatan produktivitas penggunaan sumberdaya ekonomi untuk memajukan pariwisata.

6. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar 0,012, $p\text{-value} = 0,038$. Dengan demikian hipotesis keenam dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi pertumbuhan di sektor pertanian maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga petani guna meningkatkan indeks kelayakan hidup dan pengeluaran menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.
7. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar -0,062, $p\text{-value} = 0,044$. Dengan demikian hipotesis ketujuh dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin berkurang. Pengurangan ini terjadi akibat meningkatnya rata-rata pendapatan pekerja melalui terserapnya yang

semula mengganggu dan mobilitas tenaga kerja berketerampilan menuju lapangan kerja yang lebih produktif yang didorong oleh meningkatnya akses kesempatan berusaha dibidang pertanian, industri kecil kerajinan tangan dan pariwisata di Provinsi Bali.

8. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar 0,071, $p\text{-value} = 0,038$. Dengan demikian hipotesis kedelapan dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya semakin tinggi elastisitas kesempatan kerja maka kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Perbaikan taraf kesejahteraan ini terjadi akibat semakin banyaknya anggota keluarga yang bekerja sehingga baik menambah pendapatan maupun mengurangi beban ketergantungan yang didorong oleh keinginan meningkatkan rasa percaya diri dan status sosial keluarganya.
9. Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis PLS didapat koefisien jalur sebesar 0,230, $p\text{-value} = 0,011$. Dengan demikian hipotesis kesembilan dari studi ini diterima dan terbukti kebenarannya. Ini artinya, pertumbuhan ekonomi yang berlaku mengikuti pola pertumbuhan ekonomi bebas, yakni distribusi pendapatan yang timpang lebih merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sepanjang perubahan pembagian pendapatan dalam masyarakat tidak mengurangi dan menghilangkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kondisi kesejahteraan terjadi akibat meningkatnya pengeluaran kelompok berpenghasilan tinggi untuk tujuan investasi-investasi produktif maupun spiritual guna menopang pertumbuhan tetap bertahan di Provinsi Bali.

10. Berdasarkan kesembilan kesimpulan tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian berpengaruh terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral dan ketimpangan distribusi pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Prestasi pertumbuhannya cukup berhasil, karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, baik langsung maupun secara tidak langsung melalui jalur penciptaan tambahan lapangan kerja baru dan berkurangnya ketimpangan pembagian pendapatan dalam masyarakat secara signifikan. Ini artinya, pertumbuhan yang terjadi telah memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang menjadi keharusan bagi upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Bali.
11. Hasil studi ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bentuk mendukung teori strategi pembangunan RWG Chenery *et al.* (1974), memperkuat relevansi model perencanaan pembangunan *dual economy* Lewis-Ranis-Fei, mendukung berlakunya hipotesis kurva "U"-terbalik Kuznets. Teori Greenwood-William-Shaw kurang berlaku karena pariwisata Bali bercirikan pariwisata budaya dan bukan agrowisata seperti pariwisata Hawaii. Menolak pemikiran ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa

adanya kegiatan ekonomi yang bersifat dualistis bersifat menghambat pembangunan masyarakat dan daerah.

12. Hasil studi ini dapat dijadikan acuan sebagai alternatif perencanaan pembangunan sektoral untuk daerah provinsi yang belum berkembang di Indonesia, khususnya bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya pariwisata. Di samping itu, hasil studi ini merekomendasikan bahwa kebijaksanaan mendorong pertumbuhan sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian yang lebih tinggi adalah pilihan yang baik jika prestasi pertumbuhan yang telah dicapai selama ini ingin dipertahankan.
13. Pesatnya perkembangan kegiatan sub-sektor pariwisata di era 1990-an, cenderung mempelemah keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub-sektor pariwisata dan sektor pertanian. Hal ini terjadi akibat *mismatch* antara kebutuhan hotel-hotel bertaraf internasional dan ketersediaan hasil-hasil produksi oleh petani di Provinsi Bali.
14. Dampak ekonomi dari sub-sektor pariwisata terhadap keseluruhan sektor-sektor ekonomi lebih disebabkan oleh stimulus belanja wisatawan daripada investasi fasilitas pariwisata. Ini artinya stimulus belanja wisatawan telah menggerakkan ekonomi di Provinsi Bali melalui keterkaitan ekonomi yang kuat dengan industri kecil padat karya dan industri jasa-jasa dengan intensitas modal yang rendah.
15. Kehadiran wisatawan asing di Provinsi Bali telah memperkaya dan menghidupkan kreatifitas masyarakatnya dibidang seni. Di samping itu, juga telah terjadi komersialisasi tempat-tempat yang disucikan dan aspek lainnya yang berkaitan ritual keagamaan. Bila diperbandingkan antara

kebaikan dan keburukannya, tampak lebih cenderung memburuk dilihat dari meningkatnya intensitas ketegangan-ketegangan antarmasyarakat Bali.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tersebut dapat disusun saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Bali hendaknya terus berupaya meningkatkan promosi pariwisata, meningkatkan ketersediaan infrastruktur fisik baru yang memperkuat keterkaitan dan ketergantungan sektor pertanian dan sub-sektor pariwisata. Di samping itu, harus juga mendorong sektor swasta untuk lebih banyak menggunakan waktu dan sumber dayanya untuk tujuan yang lebih produktif.
2. Perlu studi lebih lanjut mengenai dampak pariwisata terhadap daerah penerima dan mencari suatu formulasi kebijaksanaan pengembangan sub-sektor pariwisata dan pertanian yang dapat memaksimalkan keuntungan ekonomi sekaligus meminimalkan biaya sosial-budaya masyarakat setempat serta untuk mengetahui keterkaitan kedepan (*forward linkage*) dan kebelakang (*backward linkage*) dari kegiatan tersebut agar lebih dapat memperluas kesempatan kerja baru di Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abipraja, S., 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen serta Strategi*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Adelman, I., and C. T. Morris, 1973. *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. New York : Stanford University Press
- Agrawal, Nisha, 1996. The Benefits of Growth for Indonesian Workers. *Policy Research working Paper No.1637*. Washington, D.C. : World Bank
- Agarwal, HS, 1998. *Modern Microeconomics*, 6th. New Delhi : Konark Publisher PUT Ltd.
- Ahluwalia, M., 1976. Income Distribution and Development. *American Economic Review*, 66(5), pp. 128-35
- _____, N. Carter, and H. Chenery, 1979. Growth and Poverty in Developing Countries. *Journal of Development Economics*, Vol.6(2), pp. 12-56
- Aghion, P. and P. Bolton, 1997. A Theory of Trickle-Down Growth and Development. *Review of Economic Studies*, 64(2), pp. 151-72
- _____, E. Caroli and C. Garcia-Penalosa, 1999. Inequality and Economic Growth : The Perspective of the New Growth Theories. *Journal of Economic Literature*, 37(4), pp. 1615-60.
- Agarwala, Narmal., 1983. *The Development of Dual Economy : A Theoretical Analysis*. Calcutta : K.P Bagchi & Company.
- Albert, M., and R., Hahnel, 2005. *Traditional Welfare Theory*. New York : Elgar Publisher
- Alesina, A. and D. Rodrik, 1994a. Distributive Political and Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*, 109 (2), pp. 23-56.
- _____, and R., Perroti, 1994b. The Political Economy of Growth : A Critical Survey of Recent Literature. *The World Bank Economic Review*, Vol 8(3), pp.351-71
- Antara, M., 2006. Dampak Pengganda Usaha Kecil Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Perekonomian Bali : Suatu Pendekatan Model Input-Output. *Jurnal Sosial-Ekonomi dan Agribisnis*, Vol. 5(2), pp 113-120.

- Arief, S., 1998. *Teori dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta : CIDES.
- Arsyad, L., 2004. *Ekonomi Pembangunan, Edisi ke-4*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ashley Caroline, 2000. Tourism, communities, and the potential impacts on local incomes and conservation. *International Journal of Tourism Research*, 2(4), pp.267-283.
- _____, 2001. *The Impacts of Tourism and Rural Livelihoods : Nimibia's Experiences*. Working Paper No.128. London : Overseas Development Insitute, pp.1-30.
- Azis, Iwan Jaya, 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta : LPFE- UI.
- Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2000-2006
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2001-2005
- _____. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2002-2006
- _____. Tabel Input-Output Pariwisata Bali 2000.
- _____. Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Bali 2000-2006
- _____. Statistik Kriminalitas Provinsi Bali 2000-2006
- _____. Statistik Sosial dan Demografi Provinsi Bali 2000-2006
- _____. Indikator Makroekonomi Bali 2000-2006
- _____. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini-Ratio dan Distribusi Pendapatan Bali 2000-2006
- _____. Laporan Perekonomian Indonesia 2007.
- _____. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2005.
- _____, 2009. *Bali Tourism Satellite Account 2007*. Jakarta : A Joint Project By Statistics Indonesia -Departement of Culture and Tourism.
- Baltagi, H. Badi, 2002. *Econometric Analysis of Panel Data*, 2nd. New York : John Wiley & Son Ltd

- Balaz, Magnus, 2004. *Foreign Investment on Host Countries : A Review of the Empirical Evidence*. Stockholm : World Bank Published.
- Belous, W., 1986. Technological, Convergence, and Welfare : What the Long Run Data Show. *The American Economic Review*, Vol. 76 (4), pp. 1072-1085.
- Birdsall, Nancy, 1998. "No Trade-off : Efficient Growth via More Equal Human Capital Accumulation. *World Bank Economic Review*, 12(3): 419-55.
- Blake, Adam, 2008. Tourism and Income Distribution in East Africa. *International Journal of Tourism Research*, 10(1), pp.511-524
- Boediono, 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi : Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. Yogyakarta : BPFE.
- Booth, Anne and R.M Sundrum, 1984. *Labor Absorbtion in Agriculture*. New Delhi : Oxford University Press.
- Brohman, J., 1996. New Directions in Tourism for Third World Development. *Annal of Tourism Research*, 23 (1), pp. 48-78.
- Bowen, G and T., Finegan, 1993. *The Economics of Labor Force Participation*. New Jersey : Princeton University Press.
- Bowen R., Fox M., and Cox, 2001. Does Tourism Destroy Agriculture?. *International Journal of Tourism Research*, Vol.3 : pp.210-223
- Bryden, John, 2003. Tourism and Development : A case study of the commonwealth Caribbean. *World Development Review*, 21(2): 277-289.
- Bustanul, Arifin, 2004a. *Formasi Strategi Makro-Mikro Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- _____, 2004b. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Chenery, Holis, 1960. Patterns of Industrial Growth. *The American Economic Review*, Vol. 50 (4), pp. 624-654.
- _____, 1968. Development Patterns: Among Countries and Over Time. *The Review of Economics and Statistics*, Vol. 50 (4), pp. 391-416.
- Chenery, H and Sirquin, M, 1986. *Patterns of Development 1950-1970*. London : Oxford University Press.

- Chenery, Holis, Ahluwalia, Bell, Duloy and Jolly, 1994. *Redistribution with Growth*. Oxford : Oxford University Press.
- Chin W., 1998. The Partial Least Squares approach for structural equation modeling. In: G.A. Marcoulides (Ed.), *Modern Methods for Business Research*, Lawrence Erlbaum Associates, pp.295-336.
- Christian, Welzel, Ronald I., and H. Klingmann, 2003. The Theory of Human Development : A Cross-Cultural Analysis. *European Journal of Political Reseach*, Vol.42, pp.341-349.
- Claire Haven and Eleri Jones, 2008. Labour Markets and Skills Needs of the Tourism and Related Sector in Wales. *International Journal of Toursim Research*, 10(1), pp.353-363.
- Cohen, E., 1988. Authenticity and Commerditization in Tourism. *Annal of Tourism Research*, Vol 15(3), pp.371-386
- Coxhead and Anan Tisdall, 2006. Tourism contribution to economy of Kenya. *Annals of Tourism Research* , Vol. 64, pp.531-540.
- Crandall, L., 1987. *Travel, Tourism and Hospitality Research*. New York : John Wiley & Sons.
- Dasgupta, Partha, 1999. Well-Being in the Extent of Its Realization in Developing Countries. *Economic Journal*, 100 (4), pp: 1-32.
- Derek, Hall, 2004. *Tourism in Transition : Governance, Transformation and Development*. Cambridge, MA : CABI Publishing
- Dogan, H., 1989. Form of Adjusment Sociocultural Impacts of Tourism. *Annals of Tourism Research*, Vol 16(2), pp.216-212.
- Doorn, J. Van, 1989. *Tourism : The Case of Developing Countries*. Frankfurt : Peta Lang
- Dorman, D., John, 2004. Post-Colonial Linkages between Tourrism and Agriculture in Martinique. *Ph.D Dissertation, University of California at Davis, USA*.
- Dornbursch, R., and Fischer, Stanley, 1991. *Macroeconomics*, 4th. New York : McGraw Hill Inc.
- Djojohadikusumo, S., 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

- Dwyer Larry and Forsyth, 2007. Enviromental Economic Measure of Tourism Yield. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(5), pp.1-18.
- _____, 2008. Economic Measures of Tourism Yield : What Markets to Targets?. *International Journal of Toursim Research*, 10(1), pp.155-168
- Erawan, I Nyoman, 2004. Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional ; Bali Sebagai Kasus. *Makalah Seminar Konferensi Kepariwisataaan Indonesia " Pariwisata Membangun Bangsa"*, Jakarta.
- Francis A., Mwaijanbe, 2007. Understanding Barrier for Agricultural-Tourism Linkages. Setting Policy Agenda Setting for Agricultural Growth. *Ph.D Dissertasion University of Arkansas, USA*.
- Galor, O., 2000. Income Distribution and the Process of Development. *European Economic Review*, Vol. 44, pp.706-12
- Ghozali, Imam, 2007. *Structural Equation Modeling : Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang : BP Universitas Diponogoro.
- Goodwin, H., Ashley, C., and Luis Chaves, 2006. Tourism Count for the Local Economy in the Carribbean. *International Journal of Tourism Research*, Vol.34 : pp.110-123
- Gower, Barry, 2003. *Scientific Method : A Historical and Philosophical Introduction*. New York : Cambridge University Press
- Greenwood David James, 1970. Agriculture, Industrialization and Tourism : The Economic of Modern Basque Farming. *Ph.D Disssertation, USA : University of Pittsburgh, Pensylvania*
- Grossman, Gene M., and Helpman, Elhanan, 1991a. Endogenous Product Cycles. *Economic Journal* 101, pp.1214-1229.
- _____, 1991b. *Innovation and Growth in the Global Economy*. Cambridge, MA : MIT Press.
- Hakim, Abdul, 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Ekonesia
- Hartono, Tony, 2006. *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Hausmann, R. and M. Gavin, 1996. Securing Stability and Growth in a Shock-Prone Region. *Quarterly Journal of Economics*, 23 (4), pp.78-90.
- Herrick, B. and C.P Kendleberger, 1998. *Economic Development*. Singapore : McGraw-Hill International Book Company.
- Isabel, C., Jiminez, 2007. Which Type of Tourism Matters to the Regional Economic Growth? The Case of Spain and Italy. *International Journal of Tourism Research*, Vol.10 : 127-139.
- Isbandi, R. A., 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta : FE-UI
- Jeffery, Sachs, 2005 . *The End of Poverty : Economic Possibilities for Ourtime*. USA : Penguin Books.
- Jogerson, W., Dale, 1967. The Development of Dual Economy. *Economic Journal*, 71, pp. 309-34
- _____, 1988. Surplus Agricultural Labor and the Development of Dual Economy. *Oxford Economics paper*, 19, pp. 288-312
- Kaldor, Nicholas, 1957. A Model of Economic Growth. *Economic Journal*, Vol.67, pp.591-624
- Kasliwal, P., 1995. *Development Economics*. Ohio : South-Western College Publishing.
- Kelley C. Allen, Jefry G. Williamson and Russell J. Cheetham, 1972. *Dualistic Economic Development : Theory and History*. Chicago : The University of Chicago Press
- Knack , Stephen, 1997. "Does Social Capital Have and Economic Payoff? . A Cross country Investigation". *Quarterly Journal of Economics*, 112 : 1251-88.
- Kraufman E. Bruce and Hotchkiss L. Julie, 2000. *The Economics of Labour Markets*, Fifth Edition. United States of America : The Dryden Press, A Division of Harcourt College Publisher.
- Kusreni, S., 2006. *Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Spesialisasi Sektoral dan Wilayah Serta Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Timur*. Disertasi (tidak dipublikasi). Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Kuznets, Simon, 1966. *Modern economic growth : rate, structure and spread*. New Haven, CA : Yale University Press

- _____, 1968. *Toward a theory of economic growth, with reflections on the economic growth of modern nations*. New York : Norton Publishers
- Lanfant, M., 1980. Tourism in the Process of Internalization. *International Social Science Studies*, Vol 32(1), pp.14-43
- Latimer, Hugh. 2001. Developing Island Economies : Tourism vs Agriculture. *Tourism Mangement Research*, 16(2): 32-42.
- Latzko, A., David, 2004. Tourism and Fluctuations in The Hawaiian Economy. *International Journal of Business and Economics*, 54(1),pp. 465-479.
- Latief, 2001. Linking Tourism and Agriculture to Create Jobs and Reduce Migration in the Caribbean. *Annal of Tourism Research*, Vol 15(2), pp. 289-300.
- Lewis, W., Arthur, 1954. Economic Development With Unlimited Supplies of Labour. *Manchester School of Economics and Social Studies*, 22, pp.105-138
- _____, 1966. *Development Planning : The Essentials of Economic Policy*. New York : George Allen & Unwin Publishers Ltd.
- _____, 1974. *Dynamic Factors in Economic Development*. Bombay : Orient Longman
- _____, 1979. *The Dual Economy Revisted*. USA : Institute of Social and Economic Research.
- Lucas, E., Robert, 1988. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22, pp.3-42.
- MacDougall, 1960. The Benefits and Cost of Foreign Private Investment : A Theoretical Approach. *The Journal of Political Economy*, Vol 23(2), pp. 143-152
- Mangiri, Komet, 2003. *Keterkaitan Pariwisata dengan Ekonomi, Sosial-Budaya dan Lingkungan : Kerangka Teori, Analisis dan Sistem*. Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Mahendrayasa, N., 2007. *Pengaruh Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Struktur Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali*. Disertasi (tidak dipublikasi). Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Mathieson, A and G. Wall, 1982. *Tourism : Economic, Physical and Social Impacts*. New York : Longman Press.

- Meier, Gerald M, 2000. *Leading Issue in Economic Development*. New York : Oxford University Press
- Meisenheimer, T., 1998. Innovation and Job Creation in a Small Open Economy : Evidence from Norwegian Manufacturing Plants 1992-1992. *Journal Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 5 (2), pp. 247-272
- Mowforth, Martin and Iant Munt, 1998. *Tourism and Sustainability : New Tourism in the Third World*. New York : Routeledge.
- Nash, D., 1989. *Tourism as a Form of Imperialism*. Philadelphia : University of Pennsylvania Press.
- Nazamuddin, 2004. Structural Change, Employment Elasticity and Unemployment in Indonesia. *Phd Disertation, Department of Economics, Colorado University, USA*.
- Ocampo, Antonio, Jomo K.S and Sarbuland Khan, 2007. *Policy Matters : Economic and Social Policies To sustain Equitable Development*. New York : Published in Association with the United Nations.
- Oosterhaven, Jan and Tianhau, Fai, 2006. Impacts of International Tourism on Chinese Economy. *International Journal of Tourism Research*, Vol 8, pp. 347-354
- Pasaribu, Bomer, 2005. *Elastisitas kerja di Indonesia memburuk*. Jakarta : Bisnis Indonesia.
- Perotti, R., 1994. Income Distribution and Investment. *European Economic Review*, 38(3), pp.827-835
- _____, 1996. Growth, Income Distribution, and Democracy : What the Data Say. *Journal of Economic Studies*, 1(2), pp. 45-63.
- Picard, Michel, 2006. *Bali : Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta : Forum Jakarta-Paris
- Pitana, I Gde, 2002. *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataaan Bali*. Denpasar : The Works Publishers.
- Pubben, T. and R., Verstappen, 2005. The Net Economic Added Value of Tourism for the Gambian Economy. *Annal of Tourism Research*, Vol 31(4), pp. 135-161.
- Ranis, Gustav and Fei, C., John, 1964. *Development of the Labour Surplus Economy : Theory and Policy*. Homewood : Richard D. Irwin.

- _____, 1966. *Agrarianism, Dualism and Design of Economic Development*. Baltimore : John Hopkins Press.
- _____, 1973. *A Model of Growth and Employment in the Open Dualistic Economy : The Case of Korea and Taiwan*. New York : Southeast Asia Development Advisory Group.
- _____, 1997. *Growth and Development from an Evolutionary Perspective*. New York : Blackwell Publishers.
- Ranis, Gustav and Stewart, Frances, 2000a. Economic Growth and Human Development. *World Development* 28(2), pp.197-219.
- _____, 2000b. Strategies for Success in Human Development. *Journal of Human Development* 1 (1), pp. 46-69.
- Ranis, Gustav, 2004. Arthur Lewis's Contribution To Development Thinking and Policy. *The Manchester School*, Vol 72(6), pp. 712-723.
- Rizwanul, Islam, 2007. *The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction*. An Empirical Analysis. Geneva : International Labour Office
- Romer M. Paul, 1986. Increasing Return and Long Run Growth. *The Journal of Political Economy*, Vol. 94, pp. 1002-37
- _____, 1990. Endogeneous Technological Change. *The Journal of Political Economy*, Vol. 98(5), pp. 97-102.
- Rosenberg, Alex, 2000. *Philosophy of Science : A Contemporary Introduction*. New York : Routeledge
- Rosenstein and Rodan, 1957. *Notes on the Theory of the Big Push*. New York : Cambridge University Press.
- Satriawan, Ketut, 2005. *Rancang Bangun Sistem Penunjang Keputusan Model Integrasi Agroindustri dan Pariwisata Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom : Kasus Kabupaten Jembrana*. Disertasi Program Doktor Program Studi Teknologi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Saxonhouse R., Gary and Srinivasan, 2002. *Development, Duality and The International Regime*. USA : The University of Michigan Press.
- Scitovsky, T., 1954. Two Concepts of External Economies. *The Journal of Political Economy*, pp. 143-152

- Sen, K., Amartya.,1998. The Concept of Development. In H. Chenery and T.N. Srinivasan, eds., *Hand Book of Development Economics*, Vol. I. New York : Elsevier Science Publisher.
- Sitanggang R., Ignatia dan Nachrowi D., 2004. Pengaruh Struktur Ekonomi pada Penyerapan Tenaga Kerja : Analisis Model Demometerik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. V(1), hal. 103-133.
- Sinuraya, Julia, F. dan Saptana, 2007. Migrasi Tenaga Kerja Pedesaan dan Pola Pemanfaatannya. *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 7(3), pp. 235-244
- Solimano, A. 1999. Beyond Unequal Development : An Overview. *World Bank Policy Research Working Paper* No.2091, Maret. www.worldbank.org.
- Solow, R., 2000. *Growth Theory : An Exposition*. New York : Oxford University Press.
- Sugiyono, 2003. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- _____,2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Penerbit Alfa Beta
- Sugiyarto, Narayan P and Dwyer L, 2002. *Economic Impact of Tourism on Indonesian Economy*. Canberra : John Wiley & Sons, Ltd.
- Suparmoko dan Irawan, 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi keenam. Yogyakarta : BPFE UGM
- Sukirno, S., 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Susilowati, H., 2005. Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 5(1), pp. 75-91
- Susilowati, H., B., Sinaga, H., Wilson, dan Erwidodo, 2007. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri Terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 25(1), pp.11-36.
- Susanti, H., Ikhsan,M., dan Widyanti, 2000. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Edisii Kedua. Jakarta : LPFE UI
- Sukardika, Ketut, 2004. *Menata Bali Ke Depan. Kebijakan Kultural, Pendidikan dan Agama*. Denpasar : Media Adhikarsa

- Sukarsa, I Made, 2005. *Pengaruh Pendapatan Keluarga dan Pemahaman Agama Terhadap Pengeluaran Konsumsi Ritual Masyarakat Hindu di Bali*. Disertasi (tidak dipublikasi). Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Suyana Utama, Made, 2006. *Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat*. Disertasi (tidak dipublikasi). Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Tambunan, T., 2005. *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tafsir, Ahmad, 2004. *Filsafat Ilmu : Mengurai Ontologi dan Espistemologi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Telfer David John, 1996. *Development through economic linkage : Tourism and Agriculture in Indonesia*. *Ph.D Dissertation, University of Waterloo, Canada*.
- Telfer, D., and G., Wall, 1996. *Linkages Between Tourism and Food Production*. *Annal of Tourism Research*, Vol 23(2), pp. 635-653.
- _____, 2000. *Strengthening Backward Economic Linkages: Local Food Purchase by Three Indonesian Hotels*. *Tourism Economics*, 27(1), pp.421-447
- Tenenhaus M. and Vinzi, E., 2004. *A bridge between PLS path modeling and multi-block data analysis*. New York : Springer-Verlag.
- Thirwall, A.P., 1999. *Growth and Development : With special references to developing economies*. 6st ed. London : Macmillan Press Ltd.
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1999. *Keseimbangan Penduduk, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Todaro, Micahael P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi ke-7. Surabaya : Erlangga
- Torres, Rebecca, 2000. *Linkage Between Tourism and Agriculture in Quintana-Mexico*. *Ph.D Dissertation, Graduate Group in Geography, University of California at Davis, USA*.
- _____, 2002a. *Cancun's Tourism Development from a Fordist Spectrum Analysis*. *Toursit Studies*, 22(1), pp. 87-116

- _____. 2002b. Toward Better Understanding of Tourism and Agriculture in Yucatan : Tourist Food Consumption and Preferences. *International Journal of Hospitality and Tourism Administration*, 23(4), pp. 71-88
- _____. 2003. Linkages Between Tourism and Agriculture in Mexico. *Annal of Tourism Research*, Vol 30(3), pp. 546-566.
- Torres, Rebecca and Hensall Momsen, 2004. Challenges and potential for linking tourism-agriculture to achieve pro-poor tourism objectives. *Progress in Development Studies*, Vol 4(4), pp.294-318
- Travis, A., 1982. *Managing the Environmental and Cultural Impacts of Tourism and Leisure Development*. Paris : Unesco Press.
- _____. 1984. Social and Cultural Aspects of Tourism. *Industry and Environment*, Vol 7(1), pp.22-24
- United Nations for Development Program (UNDP), 1990. *Human Development Reports*. Wasington DC : World Bank Publisher
- Varian, Hal, 1993. *Microeconomics Analysis*, 3ed. New York: WW Norton & Company Inc.
- Vinzi, E., V. Chin, W. Henseler, and H. Wang, 2007. *Handbooks of Partial Least Squares (PLS) : Concepts, Methods and Application*. Italy: Springer.
- Wang, Youcheng, Paul D., Denver S., and N. Peeratdit, 2006. Examining and Identifying the Determinant of Travel Expenditure Pattern. *International Journal of Tourism Research*, Vol.8 : 333-346.
- Williams, A. Mitchael and Gareth Shaw, 1998. *Tourism and Economic Development : European Experiences*. United Kingdom : John Wiley & Sons.
- Windia, W., Wiratha, M., Suamba, K., dan Made Sarjana, 2007. Model Pengembangan Agrowisata di Bali. *Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 7(1), pp. 89-94.
- Wong Yan, Wagner J., and Zhang Hall, 2008. Economic perspectives on tourism in New Industrial Countries, NICs. *Tourism and Hospitality Research*, 24, pp.257-275.
- Wold, H., 1988. *Soft Modeling : The Basic Design and Some Extensions*. Amsterdam : North Holland Press.
- World Bank, 2000. *The Quality of Economic Growth*. USA : Oxford University Press.

- World Travel and Tourism Council, 2006. *Tourism Highligts*. www.wttc.org
- Yoeti, Oka, 2006. *Pariwisata Budaya : Masalah dan Solusinya*. Jakarta : Pradnya Paramita
- _____, 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Implementasi*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Yotopoulus A., Pan and Nugent B., Jeffrey, 1976. *Economics of Development : Empirical Investigations*. New York : Harpers and Row Publishers Inc.
- Zadjuli, Suroso, 1986. *Pola Pembangunan Berimbang Dalam Struktur Ekonomi Daerah Jawa Timur*, Disertasi, Surabaya : Universitas Airlangga.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PETA TEORI

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
1	Simon Kuznets (1966) New Haven, CA : Yale University Press Simon Kuznets (1968) New York : Norton Publishers	<i>Modern economic growth : rate, structure and spread</i> <i>Toward a theory of economic growth, with reflections on the economic growth of modern nations</i>	Pertumbuhan output per kapita, laju pertumbuhan penduduk, tingkat kenaikan produktivitas semua faktor, tingkat trnasformasi struktural ekonomi, tingkat transformasi sosial dan ideologi, penetrasi ekonomi internasional, pelebaran pertumbuhan ekonomi	Kajian teoritik-empirik dan historis	<p>Teori Pertumbuhan Modern Kuznets</p> <p>Pertumbuhan ekonomi modern adalah serangkaian perubahan struktur ekonomi, sosial, politik dan idiologi yang dicirikan oleh kenaikan pendapatan per kapita, perubahan struktur dan akumulasi kapital yang lebih cepat.</p> <p>Perubahan struktur ekonomi tercermin oleh penurunan peran sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan dan perkembangan tingkat produktivitas di masing-masing sektor dalam proses pembangunan.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi modern melebarkan pengaruhnya ke negara lain untuk memperoleh bahan mentah, tenaga kerja murah dan pasar yang menguntungkan.</p> <p>ketimpangan distribusi pendapatan menaik pada tahap awal transisi dan menurun pada tahap transisi berikutnya menyerupai kurva U-terbalik (<i>Kuznets U-curve Hypothesis</i>).</p>

Dilanjutkan

..... Lanjutan 1

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
2	<p>Holis Chenery (1960) <i>The American Economic Review</i>, Vol. 50 (4), pp. 624-654.</p> <p>Holis Chenery (1968) <i>The Review of Economics and Statistics</i>, Vol. 50 (4), pp. 391-416.</p>	<p><i>Patterns of Industrial Growth</i></p> <p><i>Development Patterns: Among Countries and Over Time</i></p>	<p>Pembentukan modal, pendapatan pemerintah, pendidikan, struktur permintaan domestik, struktur produksi, struktur perdagangan, alokasi tenaga kerja, urbanisasi, transisi demografis, distribusi pendapatan</p>	<p>Kajian teoritik, empirik dan model ekonometrik</p>	<p>Teori Perubahan Struktural Chenery: Pola normal pertumbuhan industrialisasi adalah pertumbuhan yang kecil pada industri jasa dan pertanian, dan besar pada industri manufaktur barang konsumsi.</p> <p>Pola normal pertumbuhan <i>output</i> di sektor industri adalah sektor industri yang masih tertinggal tumbuh lebih cepat.</p> <p>Pembangunan adalah serangkaian perubahan yang melibatkan proses akumulasi, proses alokasi sumber daya dan proses pendistribusian serta transformasi kependudukan</p> <p>Pola pembangunan adalah pola perubahan struktural.</p> <p>Pola perubahan struktural adalah variasi-variasi yang bersifat sistematis dalam beberapa aspek struktur sosial ekonomi yang berkaitan dengan meningkatnya level pendapatan atau indeks pembangunan lainnya.</p>

Dilanjutkan

..... Lanjutan 2

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
3	<p>William Arthur Lewis (1954) <i>Manchester School of Economics and Social Studies</i>, 22, pp.105-138</p> <p>William Arthur Lewis (1972) USA : Institute of Social and Economic Research.</p> <p>William Arthur Lewis (1979) USA : Institute of Social and Economic Research.</p>	<p><i>Economic Development With Unlimited Supplies of Labour.</i></p> <p><i>Reflections of Unlimited Labor</i></p> <p><i>The Dual Economy Revisited</i></p>	<p>Penawaran tenaga kerja yang berlebih, realokasi tenaga kerja, surplus keuntungan kapitalis, investasi, akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Model analitis ekonomi surplus tenaga kerja</p> <p>Model ekonomi dua-sektor</p>	<p>Model Dual Economy Lewis :</p> <p>Eksansi ekonomi dapat dilakukan dengan memindahkan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian subsisten menuju sektor industri modern perkotaan dengan syarat tingkat upah-upah riil dapat dipertahankan konstan.</p> <p>Perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota menimbulkan dua keuntungan sekaligus, yaitu kenaikan produktivitas di sektor sektor pertanian dan ekspansi <i>output</i> di sektor modern. Surplus keuntungan di sektor modern yang diinvestasikan kembali akan menyerap kelebihan tenaga kerja yang masih tersedia</p> <p>Terminal akhir proses transformasi ekonomi dicapai ketika surplus tenaga kerja telah habis dan saat itu pembangunan di sektor industri dan pertanian telah berjalan secara berimbang sehingga situasi berubah menjadi ekonomi neo-klasik.</p>

Dilanjutkan

..... Lanjutan 3

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
4	Gustav Ranis dan John Fei (1964) Homewood : Richard D. Irwin Gustav Ranis dan John Fei (1973) New York : Southeast Asia Development Advisory Group	<i>Development of the Labour Surplus Economy : Theory and Policy</i> <i>A Model of Growth and Employment in the Open Dualistic Economy : The Case of Korea and Taiwan</i>	Penawaran tenaga kerja yang berlebih, realokasi tenaga kerja, surplus produksi pertanian, investasi, akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi	Model analitis ekonomi surplus tenaga kerja Model ekonomi dua-sektor	<p>Model Dual Economy Ranis-Fei : Bagi negara-negara yang memiliki lahan dan tenaga kerja yang berlebih, sektor pertanian dapat berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Tahap pembangunan diawali dengan memindahkan tenaga kerja non produktif menuju perkotaan di sektor non-pertanian</p> <p>Realokasi kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian menuju sektor modern, baru dilaksanakan setelah tabungan surplus produksi pertanian diperoleh dalam jangka yang lama dan sanggup membiayai investasi di sektor pertanian dan industri</p> <p>Pada akhir transisi akan tercipta ko-eksistensi sektor pertanian modern pedesaan dan sektor industri komersial perkotaan dengan pola pertumbuhan yang berimbang.</p>

Dilanjutkan

..... Lanjutan 4

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
5	<p>Greenwood David James (1970) Canada : Kluwer Academic Publishers</p> <p>Williams A. Mitchael dan Gareth Shaw (1998) United Kingdom : John Wiley & Sons.</p>	<p><i>Toward Better Understanding of Tourism and Agriculture Linkages</i></p> <p><i>Tourism and Economic Development : European Experiences.</i></p>	<p>Pariwisata, pertanian, infrastuktur, <i>backward linkages</i>, permintaan, penawaran dan pemasaran</p>	<p>Kajian teoritik-empirik</p>	<p>Teori Koeksistensi Pariwisata dan Pertanian Greenwood-Williams-Shaw</p> <p>Pembangunan pariwisata dan pertanian memiliki potensi besar bekerja bersamaan dalam hubungan simbiosis.</p> <p>Perbaikan sistem transportasi pariwisata bermanfaat bagi pertanian melalui peningkatan akses pasar potensial.</p> <p>Perbaikan infrastruktur tidak saja membantu pertanian melainkan juga memungkinkan wisatawan dapat mengunjungi dan melihat areal, sistem pertanian dan kegiatan masyarakat petani.</p> <p>Promosi pariwisata bisa membangkitkan permintaan ekspor bagi produk pertanian lokal dan dilain pihak promosi pertanian bisa membangkitkan kunjungan wisatawan</p> <p>Hubungan pariwisata dan pertanian terkait melalui sisi permintaan, penawaran dan pemasaran.</p>

Dilanjutkan

No	Penulis dan Sumber	Judul	Variabel	Metodelogi	Kesimpulan
6	World Bank, (2000) USA : Oxford University Press Gustav Ranis dan Frances Stewart (2000) <i>World Development</i> 28(2), pp.197-219	<i>The Quality of Economic Growth</i> <i>Economic Growth and Human Development</i>	Kualitas kebijakan, modal manusia, modal fisik, modal alam, pertumbuhan dan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi	Kajian teoritik-empirik dan analitis	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mendukung pencapaian pembangunan manusia yang tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat
7	Wayan Widia Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2009	Pengaruh Pertumbuhan Sub- sektor Pariwisata dan Sektor Pertanian Terhadap Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali	Laju pertumbuhan dan kontribusi nilai tambah pariwisata, Laju pertumbuhan dan kontribusi nilai tambah pertanian, elastisitas kesempatan kerja pariwisata, elastisitas kesempatan kerja pertanian, gini-ratio perkotaan, gini-ratio pedesaan, IPM, Indeks Kriminalitas Daerah	<i>Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM)</i>	Pertumbuhan <i>dual economy</i> pariwisata dan pertanian berpengaruh positif signifikan terhadap elastisitas kesempatan kerja sektoral, berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Elastisitas kesempatan kerja sektoral berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

**Lampiran 2. KONTRIBUSI SUB-SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR
PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI BALI PERIODE 2000 s.d 2006**

Kabupaten/ Kota	Tahun	PEMBENTUKAN OUTPUT (%)		PENYERAPAN TENAGA KERJA (%)		PDRB (%)	
		Pariwisata	Pertanian	Pariwisata	Pertanian	Pariwisata	Pertanian
Jembarana	2000	17.59	31.30	19.26	42.43	23.59	29.78
	2001	18.11	29.64	16.04	43.72	24.00	28.84
	2002	17.94	24.62	21.54	35.17	23.39	28.40
	2003	18.25	28.96	22.08	38.01	24.25	28.11
	2004	17.82	30.17	22.60	38.17	24.37	27.84
	2005	18.31	29.20	16.89	40.98	24.53	27.78
	2006	18.32	28.15	19.79	38.34	24.64	27.76
Tabanan	2000	17.13	43.19	15.86	48.79	22.34	39.95
	2001	17.34	41.82	14.45	51.31	22.24	39.39
	2002	16.70	35.19	20.22	40.85	21.78	39.61
	2003	16.13	43.12	14.67	46.76	20.78	40.57
	2004	15.61	46.18	15.77	54.33	20.35	40.61
	2005	15.42	43.27	18.32	40.37	20.39	40.44
	2006	15.50	42.33	16.34	46.31	20.26	39.84
Badung	2000	34.59	9.30	35.14	13.01	45.19	8.62
	2001	34.71	9.30	29.93	14.71	45.15	8.89
	2002	34.57	7.92	35.52	17.59	44.71	8.84
	2003	35.58	9.17	34.49	18.34	46.30	8.71
	2004	35.06	9.74	34.44	20.54	46.35	8.67
	2005	34.36	9.53	35.96	15.68	46.13	9.09
	2006	34.54	10.01	32.91	21.00	45.40	9.47
Gianyar	2000	24.51	19.22	23.23	17.44	32.46	18.06
	2001	24.74	19.44	23.03	19.62	32.53	18.77
	2002	24.43	17.13	23.82	19.80	32.02	19.38
	2003	24.46	20.00	18.85	24.12	31.84	19.01
	2004	23.53	21.23	25.60	25.78	31.39	19.11
	2005	23.35	20.48	24.90	21.77	31.02	19.33
	2006	23.33	20.60	23.16	22.15	30.73	19.54
Kelungkung	2000	16.29	36.25	21.18	43.83	21.35	33.70
	2001	16.08	35.52	20.37	43.19	20.94	33.95
	2002	15.81	30.21	19.03	44.69	20.73	34.17
	2003	16.00	35.94	21.12	45.05	20.81	34.13
	2004	15.90	36.84	17.94	46.21	21.36	33.40
	2005	15.92	36.93	18.34	49.67	21.09	34.74
	2006	16.29	36.36	18.80	47.93	21.42	34.44

Dilanjutkan

..... Lanjutan 1.

Kabupaten/ Kota	Tahun	PEMBENTUKAN OUTPUT (%)		PENYERAPAN TENAGA KERJA (%)		PDRB (%)	
		Pariwisata	Pertanian	Pariwisata	Pertanian	Pariwisata	Pertanian
Bangli	2000	22.25	37.97	14.83	46.10	28.45	34.44
	2001	22.40	36.13	9.75	53.31	28.19	33.39
	2002	21.67	29.91	12.05	55.63	28.10	33.47
	2003	21.25	36.15	11.16	58.08	27.53	34.20
	2004	20.53	39.44	14.04	60.04	27.00	34.99
	2005	20.53	38.55	11.07	55.56	26.67	35.56
	2006	20.00	38.81	9.86	53.87	25.79	36.03
Karangasem	2000	12.88	39.29	15.53	49.61	16.86	36.48
	2001	12.87	37.85	14.81	52.46	16.51	35.67
	2002	12.70	30.87	13.51	52.49	16.19	33.99
	2003	12.34	36.31	13.35	58.28	15.76	33.86
	2004	11.80	37.80	13.32	56.22	15.60	33.69
	2005	12.10	35.86	13.27	54.88	15.75	33.15
	2006	12.37	35.19	12.89	53.60	16.02	32.82
Buleleng	2000	21.49	32.37	23.79	45.20	26.96	28.80
	2001	21.71	31.50	23.01	48.37	26.91	28.67
	2002	21.28	26.16	21.90	44.72	26.78	28.41
	2003	21.45	31.05	21.76	49.48	26.62	28.13
	2004	20.82	32.19	23.04	46.72	26.72	27.87
	2005	20.99	30.63	19.67	50.33	26.73	27.70
	2006	21.13	30.36	17.91	52.69	26.69	27.61
Denpasar	2000	26.87	9.16	39.25	11.32	34.42	8.32
	2001	27.22	8.82	45.20	7.47	34.77	8.27
	2002	27.11	7.32	41.36	4.27	34.99	8.15
	2003	27.41	8.60	44.42	8.20	35.15	8.06
	2004	27.03	9.03	43.26	5.38	35.56	7.97
	2005	27.48	8.48	38.24	6.08	35.59	7.80
	2006	27.13	8.28	36.37	8.30	35.57	7.77

Lampiran 3. DATA VARIABEL PENELITIAN

No.	PERTUMBUHAN PARIWISATA (X ₁)			PERTUMBUHAN PARIWISATA (X ₂)			ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA (Y ₁)			KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y ₂)			KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Y ₃)		
	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	Pertumbuhan	Pariwisata	Pertanian	Pertanian	gini-ratio Perkotaan	gini-ratio Pedesaan	IP	M	IKD	
	x1.1	x1.2	x2.1	x2.2	x2.2	x2.2	y1.1	y1.2	y1.2	y2.1	y2.2	y3.1	y3.1	y3.2	
1	2.99	23.59	5.60	29.78	29.78	0.18	0.43	0.43	0.1726	0.1376	69.8	69.8	0.73		
2	4.94	24.00	-0.12	28.84	28.84	-1.11	-1.67	-1.67	0.3204	0.2038	65.5	65.5	1.00		
3	2.99	23.39	1.56	28.40	28.40	2.26	0.36	0.36	0.3040	0.1972	68.9	68.9	0.86		
4	4.73	24.25	2.49	28.11	28.11	-0.17	0.03	0.03	0.2803	0.1833	69.1	69.1	1.05		
5	5.35	24.37	3.85	27.84	27.84	1.01	0.26	0.26	0.2671	0.1810	69.7	69.7	0.25		
6	5.71	24.53	4.79	27.78	27.78	-2.08	-1.06	-1.06	0.3316	0.2046	70.4	70.4	1.04		
7	4.96	24.64	2.59	27.76	27.76	0.35	-1.51	-1.51	0.2892	0.1897	70.7	70.7	0.87		
8	3.84	22.34	6.27	39.95	39.95	0.16	0.23	0.23	0.2401	0.1682	72.9	72.9	0.47		
9	2.61	22.24	1.63	39.39	39.39	-0.33	-1.76	-1.76	0.2462	0.1733	68.7	68.7	0.50		
10	2.37	21.78	5.13	39.61	39.61	4.45	0.39	0.39	0.2979	0.1947	70.4	70.4	0.40		
11	0.09	20.78	7.45	40.57	40.57	0.12	0.09	0.09	0.2603	0.1761	70.9	70.9	0.39		
12	2.54	20.35	4.83	40.61	40.61	2.36	0.30	0.30	0.2765	0.1902	71.5	71.5	0.35		
13	5.65	20.39	5.51	40.44	40.44	1.26	3.95	3.95	0.2904	0.1901	72.3	72.3	0.86		
14	5.11	20.26	3.70	39.84	39.84	-0.50	0.81	0.81	0.3292	0.2035	72.4	72.4	0.64		
15	5.26	45.19	6.27	8.62	8.62	0.23	0.19	0.19	0.3020	0.1961	71.5	71.5	0.61		
16	5.40	45.15	8.75	8.89	8.89	0.94	0.18	0.18	0.2890	0.1805	68.2	68.2	0.77		
17	2.90	44.71	3.34	8.84	8.84	6.95	-0.73	-0.73	0.2944	0.1948	70.1	70.1	0.66		
18	6.64	46.30	1.54	8.71	8.71	0.03	0.11	0.11	0.3188	0.2060	70.5	70.5	0.56		
19	5.67	46.35	5.26	8.67	8.67	0.10	0.31	0.31	0.3430	0.2125	71.2	71.2	0.15		
20	5.33	46.13	10.70	9.09	9.09	0.92	-1.62	-1.62	0.3874	0.2259	71.6	71.6	0.91		
21	3.37	45.40	9.48	9.47	9.47	0.38	1.01	1.01	0.3611	0.2175	72.7	72.7	1.17		
22	4.17	32.46	6.27	18.06	18.06	0.18	0.28	0.28	0.2444	0.1646	67.2	67.2	0.66		
23	4.66	32.53	8.56	18.77	18.77	-0.20	0.43	0.43	0.4052	0.2298	64.4	64.4	0.27		

Dilanjutkan

..... Lanjutan 1.

No.	PERTUMBUHAN			PERTUMBUHAN			ELASTISITAS			KETIMPANGAN			KESEJAHTERAAN		
	PARIWISATA (X ₁)			PERTANIAN (X ₂)			KESEMPATAN KERJA (Y ₁)			PENDAPATAN (Y ₂)			MASYARAKAT (Y ₃)		
	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	PDRB	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	PDRB	Pariwisata	Pertanian	Pertanian	gini-ratio Perkotaan	gini-ratio Pedesaan	gini-ratio	I P M	I K D	
	x1.1	x1.2	x1.2	x2.1	x2.2	x2.2	y1.1	y1.2	y1.2	y2.1	y2.2	y3.1	y3.2		
24	1.88	32.02	32.02	6.86	19.38	19.38	6.42	0.07	0.07	0.3056	0.1963	67.7	0.22		
25	2.72	31.84	31.84	1.34	19.01	19.01	0.42	-0.30	-0.30	0.2630	0.1769	68.8	0.19		
26	3.50	31.39	31.39	5.53	19.11	19.11	4.22	0.16	0.16	0.2239	0.1622	69.3	0.31		
27	4.21	31.02	31.02	6.65	19.33	19.33	-0.13	5.94	5.94	0.3250	0.2031	70.8	0.44		
28	4.22	30.73	30.73	6.36	19.54	19.54	-0.20	0.18	0.18	0.3679	0.2171	71.7	0.41		
29	5.15	21.35	21.35	4.17	33.7	33.7	0.31	0.18	0.18	0.2296	0.1645	66.3	0.64		
30	3.75	20.94	20.94	6.56	33.95	33.95	-0.86	0.65	0.65	0.2174	0.1566	62.9	0.84		
31	4.46	20.73	20.73	6.23	34.17	34.17	0.79	0.41	0.41	0.2947	0.1930	64.6	0.80		
32	3.52	20.81	20.81	2.97	34.13	34.13	0.43	0.02	0.02	0.2590	0.1767	67.6	0.77		
33	7.46	21.36	21.36	2.43	33.40	33.40	-0.67	0.21	0.21	0.2266	0.1623	68.1	0.49		
34	4.05	21.09	21.09	9.64	34.74	34.74	2.40	2.35	2.35	0.3563	0.2158	68.7	1.13		
35	5.57	21.42	21.42	4.13	34.44	34.44	0.16	-0.62	-0.62	0.3081	0.1978	68.9	1.07		
36	3.09	28.45	28.45	4.06	34.44	34.44	0.21	0.13	0.13	0.2344	0.1636	68.1	1.19		
37	2.35	28.19	28.19	0.13	33.39	33.39	-5.66	-1.59	-1.59	0.2711	0.1813	64.4	0.80		
38	2.68	28.10	28.10	3.27	33.47	33.47	0.20	-0.10	-0.10	0.2669	0.1820	66.7	0.65		
39	1.30	27.53	27.53	5.65	34.20	34.20	-0.69	0.09	0.09	0.2274	0.1616	67.2	0.98		
40	2.03	27.00	27.00	6.43	34.99	34.99	1.82	0.19	0.19	0.2059	0.1518	67.9	0.34		
41	3.16	26.67	26.67	6.16	35.56	35.56	1.04	3.17	3.17	0.2906	0.1906	68.7	0.94		
42	0.81	25.79	25.79	5.64	36.03	36.03	2.14	-0.16	-0.16	0.2346	0.1555	68.9	0.86		
43	3.31	16.86	16.86	5.26	36.48	36.48	0.23	0.09	0.09	0.2465	0.1728	61.2	1.25		
44	0.78	16.51	16.51	0.61	35.67	35.67	2.19	-1.67	-1.67	0.2451	0.1725	57.5	1.15		
45	1.11	16.19	16.19	-1.82	33.99	33.99	-0.59	-0.13	-0.13	0.2622	0.1796	59.3	0.94		
46	1.23	15.76	15.76	3.71	33.86	33.86	1.23	0.16	0.16	0.2518	0.1776	60.3	0.31		
47	3.44	15.60	15.60	3.97	33.69	33.69	0.82	0.04	0.04	0.2754	0.1876	61.4	0.53		

Dilanjutkan

..... Lanjutan 2.

No.	PERTUMBUHAN PARIWISATA (X ₁)		PERTUMBUHAN PARIWISATA (X ₂)		ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA (Y ₁)		KETIMPANGAN PENDAPATAN (Y ₂)		KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Y ₃)	
	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	Laju Pertumbuhan	Kontribusi PDRB	Pertanian	Pariwisata	gini-ratio Perkotaan	gini-ratio Pedesaan	I P M	I K D
	x1.1	x1.2	x2.1	x2.2	y1.1	y1.2	y2.1	y2.2	y3.1	y3.2
48	6.15	15.75	3.46	33.15	-0.11	0.20	0.3138	0.2015	63.3	0.65
49	6.64	16.02	3.74	32.82	-0.23	-0.32	0.2726	0.1769	64.3	0.90
50	5.37	26.96	4.17	28.8	0.22	0.19	0.2488	0.1732	65.1	3.38
51	3.90	26.91	3.63	28.67	-0.61	4.29	0.2674	0.1790	63.1	3.38
52	3.55	26.78	3.10	28.41	0.57	-0.02	0.2838	0.1901	63.9	1.97
53	4.22	26.62	3.82	28.13	0.44	-0.17	0.2612	0.1803	65.7	1.36
54	5.36	26.72	3.99	27.87	0.56	-0.04	0.2893	0.1935	67.3	0.73
55	5.64	26.73	4.98	27.70	-1.23	-0.37	0.3525	0.2134	68.1	2.02
56	5.18	26.69	4.99	27.61	-0.09	0.47	0.2978	0.1934	68.4	2.19
57	6.16	34.42	5.6	8.32	0.20	0.39	0.3434	0.2132	74.6	3.03
58	6.20	34.77	4.46	8.27	0.15	3.50	0.3474	0.2126	72.1	3.50
59	5.70	34.99	3.51	8.15	0.33	1.76	0.3375	0.2090	74.9	3.99
60	5.79	35.15	4.11	8.06	-0.25	1.52	0.3201	0.2106	74.5	4.51
61	6.47	35.56	4.67	7.97	0.07	-1.57	0.3252	0.2036	74.9	3.91
62	6.73	35.59	3.87	7.80	0.06	0.06	0.3347	0.2086	75.2	4.28
63	5.23	35.57	5.47	7.77	0.06	0.42	0.3727	0.2218	75.7	5.04

Lampiran 4. HASIL ANALISIS DATA

XLSTAT 2009.1.01 - Run - on 1/23/2009 at 6:00:53 PM

Treatment of the manifest variables: Raw MV

Initial weights: Values of the first eigenvector

Internal estimation: Centroid

Regression: OLS

Stop conditions: Iterations = 100 / Convergence = 0.0001

Confidence intervals: 95 / Bootstrap / Resamplings = 100

Latent variable scores: Standardized

Summary statistics:

Variable	Observations	Obs. with missing data	Obs. without missing data	Minimum	Maximum	Mean	Stdev
x1.1	63	0	63	0.090	7.460	4.15	1.70
x1.2	63	0	63	15.600	46.350	27.68	8.43
x2.1	63	0	63	-1.820	10.700	4.59	2.33
x2.2	63	0	63	7.770	40.610	26.16	11.05
y1.1	63	0	63	-5.660	6.950	0.54	1.75
y1.2	63	0	63	-1.760	5.940	0.33	1.40
y2.1	63	0	63	0.173	0.405	0.2890	0.0477
y2.2	63	0	63	0.138	0.230	0.1889	0.0200
y3.1	63	0	63	57.500	75.700	68.39	4.03
y3.2	63	0	63	0.150	5.040	1.23	1.19

Model specification (Measurement model):

Latent variable	X1	X2	Y1	Y2	Y3
Number of manifest variables	2	2	2	2	2
Mode	Mode A	Mode A	Mode A	Mode A	Mode A
Type	Exogenous	Exogenous	Endogenous	Endogenous	Endogenous
Invert sign	No	No	No	No	No
Dimensions	1	1	1	1	1
Manifest variable	x1.1 x1.2	x2.1 x2.2	y1.1 y1.2	y2.1 y2.2	y3.1 y3.2

Model specification (Structural model):

	X1	X2	Y1	Y2	Y3
X1	0	0	0	0	0
X2	0	0	0	0	0
Y1	1	1	0	0	0
Y2	1	1	1	0	0
Y3	1	1	1	1	0

*The main algorithm did converge after 3 iterations.**The algorithm converged on average after 3 iterations.*

Dilanjutkan

..... Lanjutan 1.

Composite reliability:

Latent variable	Dimensions	Cronbach's alpha	D.G. rho (PCA)	Condition number	Critical value	Eigen values
X1	2	0.708	0.766	5.231	3.543	5.868 1.218
X2	2	0.390	0.512	4.865	3.969	6.651 1.218
Y1	2	0.581	0.797	3.263	2.256	3.088 1.218
Y2	2	0.828	0.998	1.856	9.301	1.369 0.144
Y3	2	0.321	0.742	3.657	8.820	16.412 1.227

Variables/ Factors correlations (X2 / 1):	F1	F2
x2.1	0.227	0.982
x2.2	0.908	0.010
Variables/ Factors correlations (Y1 / 1):	F1	F2
y1.1	0.904	0.090
y1.2	0.143	0.998
Variables/ Factors correlations (Y2 / 1):	F1	F2
y2.1	0.804	0.090
y2.2	0.143	0.998
Variables/ Factors correlations (Y3 / 1):	F1	F2
y3.1	0.901	0.031
y3.2	0.383	0.932

Goodness of fit index (1):

	GoF	GoF (Bootstrap)	Standard error	Critical ratio (CR)	Lower bound (95%)	Upper bound (95%)
Absolute	0.381	0.412	0.040	9.497	0.322	0.494
Relative	0.690	0.691	0.058	11.932	0.560	0.798
Outer model	0.954	0.954	0.008	116.836	0.932	0.968
Inner model	0.723	0.725	0.061	11.792	0.589	0.836

Dilanjutkan

..... Lanjutan 2.

Cross-loadings (Monofactorial manifest variables / 1):

Manifest variable	Latent variable				
	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂	Y ₃
X _{1.1}	0.991	0.045	-0.074	-0.209	0.038
X _{1.2}	0.593	-0.133	-0.019	0.022	0.185
X _{2.1}	0.105	0.897	-0.303	0.134	0.312
X _{2.1}	-0.049	0.928	-0.288	0.531	0.521
Y _{1.1}	-0.027	-0.241	0.620	-0.080	-0.074
Y _{1.1}	-0.075	-0.275	0.916	0.009	-0.038
Y _{2.1}	-0.192	0.388	-0.026	1.000	0.435
Y _{2.1}	-0.194	0.347	-0.021	0.990	0.423
Y _{3.1}	0.063	0.465	-0.057	0.425	0.999
Y _{3.1}	0.016	0.192	-0.103	0.323	0.598
(AVE)	0.613	0.832	0.612	0.990	0.578

Latent variable	loadings	Standardized loadings (Bootstrap)	Critical ratio (CR)
X1	0.014	0.103	7.497
	0.118	0.897	1.998
X2	0.015	0.143	3.441
	0.090	0.857	3.536
Y1	0.535	0.714	2.151
	0.214	0.286	2.544
Y2	17.998	0.715	12.033
	7.175	0.285	11.179
Y3	0.244	0.859	10.093
	0.040	0.141	2.002

Inner Model :

INNER MODEL DEPENDEN VARIABLE Y₁

independen variable	Path coefficient	Standard error	Critical ratio (CR)	P-value
X ₁	0.082	0.031	2.636	0.011
X ₂	0.020	0.007	2.528	0.040

Equation model :

$$Y_1 = 0.082 * X_1 + 0.020 * X_2 \quad (R^2 = 0.108)$$

Impact and contribution of the variables to Y₁

	X ₁	X ₂
Path coefficient	0.082	0.020
Correlation * path coefficient	0.090	0.017
Contribution to R ² (%)	83.72	16.28
Cumulative %	83.72	100.00

Dilanjutkan

..... Lanjutan 3.

INNER MODEL DEPENDEN VARIABLE Y₂

independen variable	Path coefficient	Standard error	Critical ratio (CR)	P-value
X ₁	-0.141	0.041	-3.390	0.000
X ₂	-0.693	0.322	-2.153	0.010
Y ₁	-0.062	0.031	-2.029	0.044

Equation model :

$$Y_2 = -0.141 \cdot X_1 - 0.693 \cdot X_2 - 0.062 \cdot Y_1 \quad (R^2 = 0.325)$$

Impact and contribution of the variables to Y₂

	X ₁	X ₂	Y ₁
Path coefficient	-141	-0.693	-0.062
Correlation * path coefficient	0.118	0.628	0.039
Contribution to R ² (%)	16.65	74.21	9.14
Cumulative %	16.65	90.86	100.00

INNER MODEL DEPENDEN VARIABLE Y₃

independen variable	Path coefficient	Standard error	Critical ratio (CR)	P-value
X ₁	0.453	0.157	2.892	0.017
X ₂	0.012	0.006	2.079	0.038
Y ₁	0.071	0.036	1.986	0.049
Y ₂	0.230	0.087	2.634	0.011

Equation model :

$$Y_3 = 0.453 \cdot X_1 + 0.012 \cdot X_2 + 0.071 \cdot Y_1 + 0.230 \cdot Y_2 \quad (R^2 = 0.353)$$

Impact and contribution of the variables to Y₃

	X ₁	X ₂	Y ₁	Y ₂
Path coefficient	0.453	0.012	0.071	0.230
Correlation * path coefficient	0.421	0.004	0.065	0.187
Contribution to R ² (%)	64.41	4.97	4.97	23.64
Cumulative %	64.41	69.38	76.36	100.00

Model assesment :

Latent variable	Mean Communalities (AVE)	D.G. rho	Maximum	Mean	Std. deviation
X1	0.551	0.634	2.244	0.000	1.000
X2	0.530	0.753	1.304	0.000	1.000
Y1	0.516	0.678	3.233	0.000	1.000
Y2	0.990	0.982	2.404	0.000	1.000
Y3	0.576	0.721	1.950	0.000	1.000

Dilanjutkan

..... Lanjutan 4.

XLSTAT 2009.1.01-Normality tests-on 1/23/2009 at 1:11.49 PM

Data : Workbook = Rekapitulasi data penelitian.xls

Significance level (%) : 5

Normality Test:

Shapiro-Wilk test (23.59):

W	0.919
p-value	0.101
alpha	0.05

Test interpretation

H0: The sample follows a Normal distribution

Ha: The sample does not follow a Normal distribution

As the computed p-value is higher than the significance level $\alpha=0.05$, one should accept the null hypothesis H0, and reject the alternative hypothesis Ha.

The risk to accept the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0.05%.

Anderson-Darling test (23.59):

A ²	1.443
p-value	0.172
alpha	0.05

Test interpretation:

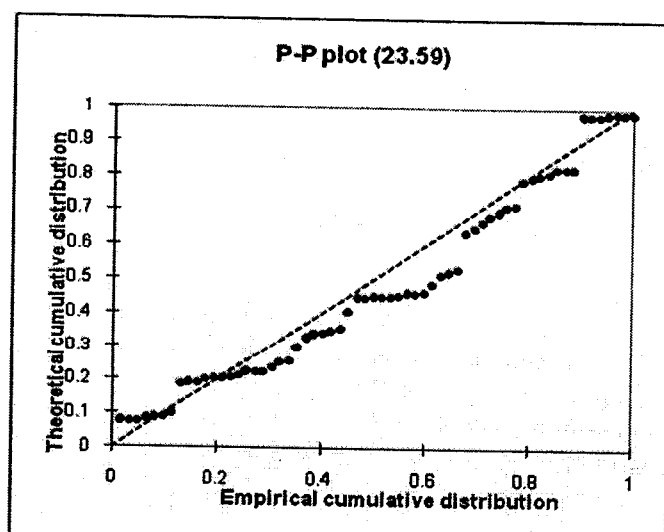
H0: The sample follows a Normal distribution.

Ha: The sample does not follow a Normal distribution.

As the computed p-value is higher than the significance level $\alpha=0.05$, one should accept the null hypothesis H0, and reject the alternative hypothesis Ha.

The risk to accept the null hypothesis H0 while it is true is lower than 0.09%.

P-P plot (23.59):



Dilanjutkan

..... Lanjutan 5.

Distribution fitting :

XLSTAT 2009.1.01 - Distribution fitting - on 1/23/2009

Data: Workbook = Reptulasi data penelitian.xls

Significance level (%): 5

Distribution: Normal,

Estimation method: Moments

Distribution fitting (2.99):

Estimated parameters (2.99):

Parameter	Value
μ	4.167
sigma	1.704

Statistics estimated on the input data and computed using the estimated parameters of the Normal distribution (2.99):

Statistic	Data	Parameters
Mean	4.167	4.167
Variance	2.903	2.903
Skewness (Pearson)	-0.391	0.000
Kurtosis (Pearson)	-0.647	0.000

Kolmogorov-Smirnov test (2.99):

D	0.113
p-value	0.384
alpha	0.05

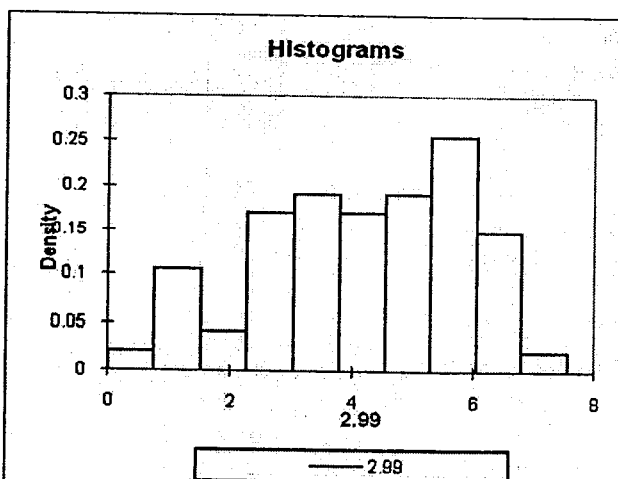
Test interpretation:

H0: The sample follows a Normal distribution

Ha: The sample does not follow a Normal distribution

As the computed p-value is greater than the significance level alpha=0.05, one should accept the null hypothesis H0.

The risk to reject the null hypothesis H0 while it is true is 38.36%.



Lampiran 5. JUMLAH KEDATANGAN WISATAWAN ASING KE INDONESIA DAN YANG LANGSUNG KE BALI PERIODE 1969 s.d 2007

No	Tahun	Jumlah Kedatangan Wisatawan Asing (orang)		Bali (%)	Keterangan
		Indonesia	Bali		
1	1969	86.067	11.278	13.10	PELITA I
2	1970	129.319	24.340	18.82	
3	1971	178.781	34.313	19.19	
4	1972	221.195	47.004	21.25	
5	1973	270.303	53.803	19.90	
6	1974	313.452	57.456	18.33	PELITA II
7	1975	366.293	75.790	20.69	
8	1976	401.237	115.220	28.72	
9	1977	456.718	119.095	26.08	
10	1978	468.614	133.225	28.43	
11	1979	501.430	120.084	23.95	PELITA III
12	1980	561.178	146.644	26.13	
13	1981	600.151	158.926	26.48	
14	1982	592.046	152.364	25.74	
15	1983	538.855	170.505	26.69	
16	1984	700.910	189.460	27.09	PELITA IV
17	1985	749.361	211.244	28.19	
18	1986	825.035	243.354	29.50	
19	1987	1.060.547	209.294	19.16	
20	1988	1.301.049	360.415	27.70	
21	1989	1.625.965	436.358	26.84	PELITA V
22	1990	2.051.686	490.729	23.92	
23	1991	2.569.870	555.939	21.63	
24	1992	3.060.197	738.533	24.13	
25	1993	3.403.138	885.516	26.02	
26	1994	4.006.312	1.032.476	25.77	PELITA VI
27	1995	4.310.504	1.015.314	23.55	
28	1996	5.034.472	1.140.988	22.66	
29	1997	5.184.486	1.230.316	23.73	
30	1998	4.606.416	1.187.153	25.77	
31	1999	4.600.002	1.355.799	29.47	ERA OTONOMI DAERAH
32	2000	5.064.217	1.412.839	27.90	
33	2001	5.153.620	1.356.774	26.33	
34	2002	5.033.400	1.285.844	25.55	
35	2003	4.478.281	993.029	22.17	
36	2004	5.321.000	1.458.309	27.40	
37	2005	5.002.101	1.386.449	27.72	
38	2006	4.871.351	1.260.317	25.87	
39	2007	5.505.759	1.664.854	30.24	

Sumber : Statistik Pariwisata Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali (2008)

